



EKONOMI INTERNASIONAL



Bonaraja Purba • Dewi Suryani Purba • Pratiwi Bernadetta Purba
Pinondang Nainggolan • Elly Susanti • Darwin Damanik • Luthfi Parinduri
Darwin Lie • Fajrillah • Abdul Rahman • Edwin Basmar • Eko Sudarmanto

EKONOMI INTERNASIONAL



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ekonomi Internasional

Bonaraja Purba, Dewi Suryani Purba, Pratiwi Bernadetta Purba
Pinondang Nainggolan, Elly Susanti, Darwin Damanik, Luthfi Parinduri
Darwin Lie, Fajrillah, Abdul Rahman, Edwin Basmar, Eko Sudarmanto



Penerbit Yayasan Kita Menulis

Ekonomi Internasional

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2021

Penulis:

Bonaraja Purba, Dewi Suryani Purba, Pratiwi Bernadetta Purba
Pinondang Nainggolan, Elly Susanti, Darwin Damanik
Luthfi Parinduri, Darwin Lie, Fajrillah, Abdul Rahman
Edwin Basmar, Eko Sudarmanto

Editor: Ronal Watrianthos & Janner Simarmata

Desain Sampul: Tim Kreatif Kita Menulis

Sampul: pexels.com

Penerbit

Yayasan Kita Menulis

Web: kitamenulis.id

e-mail: press@kitamenulis.id

WA: 0821-6453-7176

Anggota IKAPI: 044/SUT/2021

Bonaraja Purba., dkk.

Ekonomi Internasional

Yayasan Kita Menulis, 2021

xiv; 220 hlm; 16 x 23 cm

ISBN: 978-623-6840-89-4

Cetakan 1, Maret 2021

- I. Ekonomi Internasional
- II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Puji dan Syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan berkat dan rahmatNya, sehingga dengan tepat waktu tim penulis mampu menyusun buku yang berjudul Ekonomi Internasional. Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk membantu para pembaca, memahami bahwa Ilmu Ekonomi dan Perdagangan Internasional merupakan bagian tidak terpisahkan dan sangat penting dalam kelangsungan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi pembangunan dan perdagangan internasional.

Buku ini terdiri dari 12 Bab yang menguraikan tentang:

- Bab 1 Karakteristik Ekonomi Internasional
- Bab 2 Teori Perdagangan Internasional Klasik
- Bab 3 Teori Perdagangan Internasional Modern
- Bab 4 Kebijakan Ekonomi Internasional Tariff
- Bab 5 Nilai Pertukaran (Term of Trade)
- Bab 6 Liberalisasi Perdagangan
- Bab 7 Perusahaan Multinasional
- Bab 8 Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi
- Bab 9 Pasar Valuta Asing dan Sistem Nilai Tukar
- Bab 10 Neraca Pembayaran Internasional
- Bab 11 Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal dan Eksternal
- Bab 12 Model Ekonomi Terbuka

Hanya dengan semangat kolaborasi yang solid dan kompak dari Tim Penulis bidang ilmu ekonomi dari berbagai Perguruan Tinggi sehingga buku ini dapat terwujud dan terbit sesuai dengan target waktu. Penyusunan buku ini juga merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tim Penulis sungguh merasakan bahwa dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Tim Penulis sungguh menyadari jika dalam penyusunan buku ini masih terdapat berbagai kekurangan, akan tetapi Tim Penulis siap menerima kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan buku ini di kemudian hari, semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini, khususnya kepada Pimpinan Penerbit Yayasan Kita Menulis yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Kiranya kita senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa dalam segala tugas dan pekerjaan kita. Amin

Medan, 22 Februari 2021

Penulis

Bonaraja Purba, dkk

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xiii

Bab 1 Karakteristik Ekonomi Internasional

1.1 Pengertian.....	1
1.2 Manfaat Perdagangan Internasional.....	3
1.2.1 Pola Perdagangan	3
1.2.2 Proteksionisme.....	4
1.2.3 Neraca Pembayaran.....	5
1.2.4 Penentuan Nilai Tukar.....	6
1.3 Kebijakan Internasional	6
1.3.1 Pasar Modal International	7
1.4 Globalisasi dan Ekonomi Internasional	7
1.4.1 Aktivitas Ekonomi Global	7
1.4.2 Pentingkah Globalisasi?	10

Bab 2 Teori Perdagangan Internasional Klasik

2.1 Pengertian.....	13
2.2 Teori Perdagangan Internasional Klasik	15
2.2.1 Teori Absolut Advantage.....	17
2.2.2 Teori Comparative Advantage	21

Bab 3 Teori Perdagangan Internasional Modern

3.1 Teori Heckscher-Ohlin.....	25
3.2 Kesamaan Harga Faktor Produksi.....	32
3.3 Teori Permintaan dan Penawaran.....	33

Bab 4 Hambatan Tarif (Tariff Barriers)

4.1 Pendahuluan.....	37
4.2 Pengertian Tarif.....	38
4.2.1 Penggolongan Tarif.....	38
4.2.2 Sistem Tarif.....	39
4.2.3 Pembedaan Tarif.....	40
4.3 Efek Tarif Impor.....	44
4.4 Alasan Pengenaan Tarif.....	44
4.5 Tarif Nominal dan Tarif Proteksi Efektif.....	48
4.5.1 Tarif Nominal.....	48
4.5.2 Tarif Proteksi Efektif (TPE).....	48

Bab 5 Nilai Pertukaran (Terms of Trade)

5.1 Pendahuluan.....	53
5.2 Pengertian Terms of Trade.....	54
5.3 Konsep Terms of Trade.....	54
5.3.1 Net Barter Term of Trade (NTT).....	55
5.3.2 Gross Barter Term of Trade (GTT).....	56
5.3.3 Income term of Trade (ITT).....	56
5.3.4 Factor Term of Trade.....	57
5.4 Faktor Faktor yang Memengaruhi Term of Trade.....	59
5.5 Dampak Term of Trade Terhadap Perekonomian.....	61

Bab 6 Liberalisasi Perdagangan

6.1 Pendahuluan.....	63
6.2 Liberalisasi Perdagangan.....	64
6.3 Globalisasi Ekonomi, Perdagangan Bebas, dan Blok Perdagangan.....	67

Bab 7 Perusahaan Multinasional

7.1 Pendahuluan.....	75
7.2 Pengertian dan Ciri Ciri Perusahaan Multinasional.....	76
7.3 Perusahaan Multinasional, Global, Internasional, dan Transnasional.....	80
7.4 Tujuan Perusahaan Multinasional.....	81
7.5 Manfaat & Dampak Buruk Perusahaan Multinasional.....	83
7.6 Keunggulan dan Tantangan Perusahaan Multinasional.....	84
7.7 Manfaat dan Konflik bagi Negara Induk.....	89

Bab 8 Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi

8.1 Pendahuluan	91
8.2 Globalisasi (Globalization)	92
8.3 Pentingnya Perdagangan Internasional	93
8.4 Hambatan Perdagangan Internasional	94
8.5 Beberapa Isu Penting Perdagangan Internasional	95
8.6 Lima Pertanyaan Dasar Mengenai Perdagangan dan Pembangunan	97
8.7 Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Absolut	98
8.8 Teori Perdagangan dan Pembangunan: Argumen-Argumen Tradisional	99
8.9 Manfaat Langsung Perdagangan Internasional	101
8.9.1 Manfaat Tidak Langsung	101
8.10 Pandangan yang Berlawanan	104
8.11 Kritik Terhadap Pandangan Yang Berlawanan.....	106

Bab 9 Pasar Valuta Asing dan Sistem Nilai Tukar

9.1 Pasar Valuta Asing	109
9.1.1 Memahami Pasar Valuta Asing	111
9.1.2 Intervensi Pasar Valuta Asing	113
9.2 Sistem Nilai Tukar.....	114
9.2.1 Sistem Mengambang Bebas.....	116
9.2.2 Sistem Float Terkelola	117
9.2.3 Nilai Tukar Tetap	118

Bab 10 Neraca Pembayaran Internasional

10.1 Konsep dan Struktur Neraca Pembayaran Internasional.....	125
10.2 Fungsi dan Tujuan Neraca Pembayaran Internasional	135
10.3 Teori Neraca Pembayaran Internasional.....	137
10.3.1 Pemikiran Teori NPI Pra-Klasik.....	138
10.3.2 Pemikiran Teori NPI Klasik.....	141
10.3.3 Pemikiran Teori NPI Keynesian.....	143
10.3.4 Pemikiran Teori NPI Modern	150
10.3.5 Pemikiran Constrained Growth.....	156
10.4 Mekanisme Neraca Pembayaran Internasional	158
10.5 Ikhtisar Neraca Pembayaran Indonesia.....	159

Bab 11 Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal dan Eksternal

11.1 Pendahuluan.....	163
11.2 Keseimbangan Moneter dan Fiskal.....	164
11.3 Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal	174
11.4 Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Eksternal ...	180

Bab 12 Model Ekonomi Terbuka

12.1 Pendahuluan.....	187
12.2 Perekonomian Terbuka.....	188
12.2.1 Penyebab Sistem Perekonomian Terbuka	188
12.2.2 Sistem/Model Perekonomian Terbuka	189
12.2.3 Faktor Ekspor dan Impor	192
12.2.4 Sirkulasi Pendapatan dan Keseimbangan Perekonomian Terbuka	193
12.2.5 Keunggulan dan Kelemahan Perekonomian Terbuka	196

Daftar Pustaka	199
Biodata Penulis	215

Daftar Gambar

Gambar 3.1: Isocost.....	27
Gambar 3.2: Produk padat mesin dan padat tenaga kerja.....	28
Gambar 3.3: Teori proporsi faktor produksi.....	29
Gambar 3.4: Kesamaan harga faktor produksi	32
Gambar 3.5: Teori Permintaan dan Penawaran	34
Gambar 4.1: Efek Tarif Bea Masuk	41
Gambar 4.2: Infant Industry Argument	44
Gambar 8.1: Hambatan Perdagangan Internasional	94
Gambar 9.1: Mempertahankan Nilai Tukar Tetap Melalui Intervensi	119
Gambar 9.2: Anatomi Keruntuhan Mata Uang.....	122
Gambar 10.1: Perkembangan Teori Neraca Pembayaran	137
Gambar 10.2: Mekanisme Neraca Perdagangan Menurut David Hume.....	140
Gambar 10.3: The Evolution of Orthodox Monetarism	155
Gambar 11.1: Keseimbangan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia (Bank Indonesia data diolah)	172
Gambar 11.2: Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal di Indonesia (Bank Indonesia data diolah).....	176
Gambar 11.3: Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Eksternal di Indonesia (Bank Indonesia data diolah).....	182

Daftar Tabel

Tabel 2.1: Keunggulan Absolut sebagai Basis untuk Perdagangan.....	19
Tabel 2.2: Keuntungan Per Unit dari Spesialisasi ketika Negara A Berspesialisasi pada Produksi Barang M dan Negara B Berspesialisasi pada Produk T	22
Tabel 2.3: Keunggulan Komparatif sebagai Basis untuk Perdagangan.....	23
Tabel 2.4: Keuntungan Per Unit dari Spesialisasi Berdasarkan Keunggulan Komparatif Di mana Negara A Memproduksi Lebih Banyak Barang M, dan B Memproduksi Lebih Banyak Barang T	24
Tabel 8.1: Manfaat Tidak Langsung Perdagangan Internasional	102
Tabel 10.1: Struktur Neraca Pembayaran Internasional	127
Tabel 10.2: Struktur Balance of Payment Indonesia.....	135
Tabel 10.3: Ringkasan Pemikiran Teori NPI Pra-Klasik.....	138
Tabel 10.4: Ringkasan Pemikiran Teori NPI Klasik.....	143
Tabel 10.5: Ringkasan Pemikiran Teori NPI Keynesian.....	144
Tabel 10.6: Kemungkinan Kondisi Awal Suatu Negara	147
Tabel 10.7: Ringkasan Teori Moneteris dan Model Kendala Pertumbuhan	157
Tabel 10.8: Ikhtisar Neraca Pembayaran Indonesia.....	160

Bab 1

Karakteristik Ekonomi Internasional

1.1 Pengertian

Konsep tentang ekonomi internasional menggunakan metode analisis dasar yang sama dengan cabang-cabang ilmu ekonomi lainnya, sebab perilaku dan motif individu sama dalam perdagangan internasional seperti halnya transaksi domestik. Ilmu ekonomi internasional, terdiri dari masalah-masalah khusus seperti interaksi ekonomi antara negara-negara. Beberapa topik yang selalu dibahas dan bahkan berulang di dalam pembelajaran ekonomi internasional, adalah: keuntungan dari perdagangan (gains from trade), pola perdagangan (pattern of trade), proteksionisme (protectionism), neraca pembayaran (balance of payments), penentuan nilai tukar (exchange rate determination), koordinasi kebijakan internasional (international policy coordination), dan pasar modal internasional (international capital market) (Agus Budi, 2019).

Ditemukan pernyataan dalam berbagai disiplin kajian, bahwa ekonomi internasional dibedakan kepada dua bagian, yaitu teoritis dan deskriptif (Gondolfo, 2004). Teoritis terbagi ke dalam teori perdagangan internasional dan ekonomi moneter internasional. Kedua bagian dan sub bagian tersebut sangat penting dalam memahami hubungan ekonomi internasional (Agus

Budi, 2019; Ferinia et al., 2020; Purba, Nainggolan, et al., 2020; Purba, Sudarmanto, et al., 2020).

Adapun tentang bagian deskriptif terkait dengan deskripsi transaksi ekonomi internasional yang terjadi, seperti aliran barang dan uang, perjanjian internasional, organisasi internasional seperti, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, dan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization). Bagian teoritis mencoba menjelaskan fenomena prinsip umum dan kerangka logis yang dapat digunakan untuk mengatur atau mengarahkan pemahaman peristiwa-peristiwa aktual. Seperti halnya teori ekonomi lainnya, sering menggunakan model-model matematika untuk menjelaskan fenomena. Teoritis yang dibagi ke dalam dua bagian teori perdagangan dan moneter juga mencakup aspek-aspek ekonomi positif dan normatif (Prasetyo and Rakhmadian, 2020; Sherly et al., 2020; Sudarso et al., 2020; Negara et al., 2021; Sahir et al., 2021).

Konsep dan pemikiran tentang ekonomi moneter internasional sering diidentifikasi dengan makro-ekonomi internasional atau ekonomi terbuka karena berkenaan dengan hubungan moneter dan makro ekonomi antar negara. Hal ini terkait dengan neraca pembayaran dan berbagai variabel makroekonomi; rezim nilai tukar, pasar keuangan internasional, krisis, utang, kebijakan internasional dan juga integrasi moneter internasional. Teori perdagangan internasional yang bersifat mikro ekonomi berkaitan dengan sebab, struktur, dan volume perdagangan internasional, seperti barang mana yang diekspor atau impor, negara mana, berapa banyak dan apa keuntungan dari perdagangan internasional. Spesialisasi, efek tarif, kuota, struktur produksi dan konsumsi, serta efek dari pertumbuhan ekonomi terhadap perdagangan internasional, dan lain-lain (Nurhayati and Priangani, 2017; Ashoer et al., 2021; Munthe et al., 2021).

Pada keadaan dunia saat ini secara umum tidak ada lagi negara yang terisolir dalam ekonomi. Berbagai aspek perekonomian, baik itu sektor industri, ketenagakerjaan, jasa atau standar hidup masyarakat dan kesejahteraan selalu berhubungan dengan perdagangan. Dalam hal ini segala kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara selalu berkaitan dengan kebijakan ekonomi negara lain. Efisiensi negara akan sangat berhubungan juga dengan efisiensi di negara lain. Keterkaitan dan ketergantungan ekonomi sebuah bangsa akan sangat berhubungan dengan kebijakan ekonomi bangsa lainnya. Tidak hanya isu-isu ekonomi, akan tetapi isu-isu sosial dan politik sebuah bangsa juga kerap memengaruhi kebijakan ekonomi bangsa lainnya. Hal ini berdampak pada

lancarnya tidaknya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional (Whittlesey, 1939; Adolf, 2006; Utama, 2012; Satriana, 2016; Prasetyo and Rakhmadian, 2020; Romindo et al., 2020; Sari et al., 2020; Sudarmanto et al., 2020; Sahir et al., 2021; Siregar et al., 2021).

1.2 Manfaat Perdagangan Internasional

Sejumlah besar orang mengakui dan memahami bahwa perdagangan, secara khusus perdagangan internasional akan memberikan manfaat. Walaupun ada yang tidak yakin perdagangan akan memberikan manfaat, sehingga lebih baik diproduksi sendiri barang atau jasa dan dikonsumsi sendiri pula. Dengan demikian perdagangan tidak pernah atau tidak perlu terjadi. Kondisi seperti ini dapat terjadi pada di dalam sebuah negara dengan perekonomian tertutup atau autarchy economy. Pemahaman lain dari sistem ini adalah self sufficient economy, di mana negara telah mampu mandiri untuk memproduksi segala kebutuhan bangsanya, sehingga menjadi negara yang melakukan isolasi ekonomi (Prasetyo and Rakhmadian, 2020).

Terdapat pandangan yang paling populer tentang perdagangan dalam ekonomi internasional adalah adanya manfaat dari perdagangan, yaitu bila negara-negara melakukan perdagangan – menjual barang atau jasa – satu sama lain, pertukaran tersebut akan selalu saling memberikan manfaat. Bahkan negara-negara yang berproduksi dengan biaya yang lebih tinggi pun daripada negara-negara lain dalam memproduksi barang dan jasa dapat memperoleh manfaat. Perdagangan internasional juga membenarkan negara-negara untuk melakukan spesialisasi produksi pada barang-barang tertentu, dengan tingkat efisiensi yang tinggi pada skala produksi yang besar (Agus Budi, 2019). Kemanfaatan dalam ekonomi internasional bukan hanya terbatas pada perdagangan barang atau jasa yang kasat mata, tapi juga pada jasa tenaga kerja atau aliran modal.

1.2.1 Pola Perdagangan

Terdapat kesulitan yang sangat besar untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan internasional. Oleh karenanya, upaya untuk menjelaskan pola perdagangan internasional tersebut, siapa menjual apa, telah menjadi perhatian para ekonom internasional. Beberapa aspek tentang pola perdagangan internasional tidak cukup sulit untuk dipahami. Sebagai contoh,

mengapa suatu negara mengekspor minyak, mobil atau kopi. Atau juga mengapa suatu negara mengimpor sapi atau ikan. Iklim, sumberdaya, produktivitas tenaga kerja merupakan salah satunya menjadi penentu dalam hal ini. Faktor produksi sebagai mana dibahas di dalam ilmu mikro ekonomi yaitu, tenaga kerja, lahan, modal dan skill adalah faktor-faktor yang dapat menentukan pola perdagangan suatu negara (Nurhayati and Priangani, 2017).

1.2.2 Proteksionisme

Adapun manfaat perdagangan adalah satu konsep yang amat penting dalam teori ekonomi internasional. Sementara besarnya perdagangan yang diizinkan adalah suatu kebijakan yang sangat penting. Akan tetapi, ada kekhawatiran dari pemerintah bangsa-bangsa dunia pada pengaruh perdagangan atau persaingan internasional terhadap industri dalam negeri, sehingga berupaya untuk melindunginya dari persaingan asing. Hal ini mendorong pemerintah untuk membatasi impor atau membantu industri dalam negeri dengan cara mensubsidi barang ekspor. Kebijakan proteksionisme tersebut sering mendapat kritikan dengan menunjukkan keuntungan dari perdagangan internasional yang lebih bebas dan juga telah menjadi perhatian para ekonom internasional (Heryanto, 2004; Hamid, 2005; Hiariej, 2012).

Sejumlah besar Pemerintah di banyak negara berkembang juga melakukan kebijakan substitusi impor (import substitution), menggantikan impor dengan memproduksi barang tersebut secara domestik. Motivasi utama dari kebijakan substitusi impor ini adalah keyakinan bahwa perekonomian negara dapat menyediakan sendiri kebutuhannya. Sesungguhnya, praktik substitusi impor ini adalah proteksionisme. Pengenaan tarif yang tinggi untuk barang impor untuk melindungi industri dalam negeri. Hal ini untuk mempermudah persaingan dengan dunia luar karena memiliki keunggulan komparatif (Suprijanto, 2011).

Berawal dari perang dunia kedua, negara-negara maju telah menjalankan kebijakan untuk menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan tersebut memiliki misi bukan hanya untuk memajukan kekuatan kemakmuran, tapi juga untuk mempromosikan perdamaian dunia (Krugman and Obstfeld, 2003), sehingga terbentuknya Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement/NAFTA). Selanjutnya melalui putaran Uruguay terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) pada tahun 1994 (Krugman and Obstfeld, 2003).

1.2.3 Neraca Pembayaran

Konsep Neraca Pembayaran (Balance of Payments, BoP) dikenal juga dengan nama 'balance of international payment' suatu negara adalah selisih atau perbedaan antara jumlah uang masuk (money inflows) dengan jumlah uang keluar (money outflows) dengan negara lain pada suatu periode tertentu, misalnya triwulan atau tahunan. Neraca pembayaran ini merupakan metode bagi sebuah negara dalam mengawasi transaksi moneter internasionalnya (Carbaugh, 2011).

Keseluruhan transaksi perdagangan yang dilaksanakan, baik sektor publik maupun privat dicatat dalam neraca perdagangan untuk menentukan berapa besar aliran uang masuk dan keluar. Secara teoritis, neraca pembayaran harus nol, namun secara nyata jarang terjadi. Faktanya, yang sering terjadi adalah defisit atau surplus. Neraca pembayaran ini dibagi kepada beberapa neraca lainnya, yaitu: Neraca Transaksi Berjalan (The Current Account), Neraca Transaksi Modal (The Capital Account) dan Neraca Transaksi Keuangan (The Financial Account). Transaksi berjalan digunakan untuk mencatat masuk (impor) dan keluar (ekspor) barang dan jasa dari sebuah negara. Pencatatan ekspor dan impor barang dan jasa ini menjadi Neraca Perdagangan (Balance of Trade, BoT) (Thompson, 2011; Falianty, 2017).

Neraca Transaksi Modal adalah pencatatan untuk semua transfer modal internasional. Ini mengacu pada akuisisi atau pelepasan aset non-keuangan dan aset non-produksi. Akun modal dipecah menjadi aliran moneter dan aset keuangan, pengalihan kepemilikan atas aset tetap, transfer dana yang diterima untuk penjualan atau akuisisi aset tetap, pajak hadiah dan warisan, pungutan kematian dan, terakhir kerusakan aset tetap yang tidak diasuransikan. Dalam Neraca Transaksi Keuangan dilakukan pencatatan aliran moneter internasional yang terkait dengan investasi dalam bisnis, real estat, obligasi, dan saham. Di sini juga termasuk aset milik pemerintah, seperti cadangan devisa, dan emas, *Special Drawing Rights* (SDRs) yang dimiliki oleh Dana Moneter Internasional (IMF), aset swasta yang dimiliki di luar negeri, dan investasi asing langsung. Aset milik orang asing, swasta dan pejabat, juga dicatat dalam akun keuangan ini (Krugman and Obstfeld, 2003; Gondolfo, 2004; Carbaugh, 2011).

1.2.4 Penentuan Nilai Tukar

Konsep tentang nilai tukar mata uang merupakan salah satu indikator kuat tidaknya ekonomi sebuah negara. Pelemahan nilai mata uang bagi sebuah negara kadangkala dirasa sebagai sebuah pukulan buruk bagi negara tersebut. Akan tetapi, banyak ekonom juga berpendapat bahwa pelemahan mata uang akan memberikan manfaat bagi negara tersebut. Sebaliknya, mata uang yang kuat kadangkala akan menjadi masalah bagi negara tersebut. Hampir dipastikan bahwa setiap negara biasanya memiliki mata uang sendiri. Nilai mata uang tersebut dari berubah dari waktu ke waktu, baik disebabkan oleh mekanisme pasar terjadi apresiasi dan depresiasi, maupun oleh kebijakan pemerintahnya sendiri yang melakukan devaluasi atau revaluasi. Sementara itu, rezim dari sistem moneter internasional itu sendiri juga ada beberapa, yaitu sistem nilai tukar tetap atau terkelola (*fixed or managed exchange rate system*) dan sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate system*) (Chishti, 2002).

1.3 Kebijakan Internasional

Konsep tentang Ekonomi Internasional bagi negara-negara di dunia memiliki kebebasan dalam memilih kebijakan ekonomi masing-masing. Akan tetapi dalam perekonomian yang terintegrasi, kebijakan ekonomi suatu negara akan memengaruhi ekonomi negara lainnya. Perbedaan tujuan dari suatu negara dapat saja menimbulkan konflik kepentingan. Bahkan walaupun mereka memiliki kepentingan atau tujuan yang sama jika tidak berhasil dalam melakukan koordinasi terhadap kebijakannya (Björnskov, 2006).

Terdapat beberapa pilihan kebijakan internasional yang dilakukan pemerintah (Thompson, 2011) adalah: tarif, kuota, hambatan non tarif, pembatasan ekspor sukarela, subsidi ekspor, kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area*), zona perdagangan bebas (*Free Trade Zones*), nilai tukar terkelola (*Managed Exchange Rates*), nilai tukar tetap (*Fixed Exchange Rates*), kontrol devisa (*Foreign Exchange Controls*), dan kontrol investasi asing (*Foreign Investment Controls*). Masalah mendasar dalam ekonomi internasional adalah bagaimana menghasilkan tingkat sinergitas yang dapat diterima antara perdagangan internasional dan kebijakan moneter berbagai negara tanpa harus diberitahukan. Akan tetapi, salah satu tantangan koordinasi kebijakan

internasional adalah selalu membuat perjanjian yang mengikat, sehingga tidak ada negara yang memiliki insentif untuk melanggar perjanjian tersebut (Bjørnskov, 2006).

1.3.1 Pasar Modal Internasional

Terdapat pasar modal yang luas dalam perekonomian modern, ada seperangkat aturan yang mengatur individu dan perusahaan melakukan pertukaran uang saat ini dengan janji yang akan dibayarkan di masa depan. Sejak era 1960-an, perdagangan internasional menjadi sangat penting yang dibarengi dengan pertumbuhan pasar modal internasional serta menghubungkan pasar modal masing-masing negara (Krugman and Obstfeld, 2003).

Ditemukan bahwa dalam beberapa hal pasar modal internasional berbeda dengan pasar modal domestik. Ada peraturan-peraturan tertentu yang diberlakukan oleh banyak negara pada investasi asing; kadangkala mereka juga menawarkan peluang untuk menghindari peraturan yang berlaku di pasar domestik. Ada beberapa risiko yang terkait dengan pasar modal internasional. Salah satunya adalah fluktuasi nilai mata uang: Hal ini berdampak pada kerugian bagi seorang investor yang memegang bond, di mana nilai mata uang tersebut jatuh terhadap mata uang negaranya. Risiko lain adalah default nasional: Suatu negara mungkin saja menolak membayar utangnya (mungkin karena tidak bisa), dan mungkin tidak ada cara yang efektif bagi kreditornya untuk membawanya ke pengadilan (Adolf, 1919; Thompson, 2011; Hiariej, 2012; Satriana, 2016).

1.4 Globalisasi dan Ekonomi Internasional

1.4.1 Aktivitas Ekonomi Global

Ternyata perekonomian global telah memunculkan serangkaian tantangan baru yang sebelumnya tidak terjadi. Serangan-serangan terhadap globalisasi hingga krisis keuangan. Para ekonom harus memeras pikiran untuk menerapkan analisis yang ada menghadapi tantangan tersebut, namun mereka juga memikirkan dan mengajukan konsep-konsep penting berkaitan dengan

persoalan-persoalan yang ada, seperti dampak perubahan kebijakan moneter dan fiskal dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Walaupun persoalan tersebut adalah persoalan klasik yang sudah lama terjadi.

Saat ini tidak ada negara yang mampu bertahan dalam isolasi. Semua aspek ekonomi bangsa seperti sektor jasa, industri, ketenagakerjaan, pendapatan, standar hidup, semuanya berkaitan dengan mitra perdagangan yang efisien. Keterkaitan tersebut dalam hal adanya mobilitas barang dan jasa, keuangan serta teknologi.

Istilah globalisasi memang sudah lama terdengar. Sejak era 1990-an istilah tersebut telah menggema di seluruh negara di dunia. Sebenarnya globalisasi adalah proses ketergantungan antar negara dengan warga negaranya. Interaksi tersebut terjadi melalui perdagangan, migrasi, dan investasi asing. Tidak hanya itu, faktor-faktor non ekonomi juga dapat terjadi pemindahan, seperti pemindahan budaya dan politik (Carbaugh, 2011). Ternyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suatu negara juga dapat dilihat bahwa globalisasi telah membawa mereka untuk dapat mengkonsumsi barang-barang atau jasa dari negara-negara lain. Sangat jauh berbeda dengan konsumsi masyarakat di masa lalu. Lebih dari itu mereka juga dapat memperoleh pendapat dari negara-negara lain serta melakukan perjalanan ke berbagai negara atau melakukan komunikasi dengan bangsa lain. Pembangunan ekonomi di negara lain berpengaruh pada kehidupan dan pembangunan suatu bangsa.

Berdasarkan perkembangan revolusi industri yang dimulai sejak abad 18 (periode 1750-1850) telah menjadikan perubahan-perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan dan teknologi yang memberikan dampak besar bagi perkembangan sosial, ekonomi dan budaya di dunia. Revolusi ini berhasil meningkatkan produksi pada berbagai sektor dengan tingkat yang lebih efisien. Walaupun, revolusi industri ini juga memberikan dampak bagi sebuah negara (Ahmadjayadi, Subkhan and Wiradinata, 2016), antara lain: (1) Laju pertumbuhan yang meningkat akibat peningkatan kesejahteraan masyarakat, (2) Terjadinya migrasi secara besar-besaran dari desa ke kota, (3) Terjadinya ketimpangan sosial antara pengusaha dan golongan pekerja, (4) Terjadinya polusi dan kerusakan alam yang hebat akibat kapitalisme (Lilimantik, 2015).

Ada tiga hal yang mendorong terjadinya globalisasi dari sisi ekonomi (World Trade Organization, 1998), yaitu: Pertama, perubahan teknologi. Mungkin ini memiliki pengaruh yang paling besar. Sejak revolusi industri pada akhir abad

ke-18 dan awal abad ke-19, inovasi teknis telah menyebabkan ledakan produktivitas dan memangkas biaya transportasi. Penemuan listrik, telepon, mobil, kapal kontainer dan jaringan pipa telah mengubah produksi, komunikasi dan transportasi. Perkembangan pesat komputer, teknologi informasi dan komunikasi telah semakin mengecilkan pengaruh waktu dan geografi terhadap kapasitas individu dan perusahaan untuk berinteraksi dan bertransaksi di seluruh dunia. Kemajuan teknis telah memangkas biaya transportasi dan komunikasi secara dramatis sejak revolusi industri.

Kedua, liberalisasi perdagangan dan investasi. Semakin banyak pemerintah atau negara yang mengejar kebijakan liberalisasi, membuka pasar dan menghilangkan hambatan regulasi terhadap kegiatan ekonomi. Liberalisasi perdagangan dan investasi berkelanjutan telah menciptakan lingkungan kebijakan yang semakin tidak terbebani untuk hubungan ekonomi antar bangsa. Liberalisasi telah memungkinkan teknologi baru untuk dieksploitasi di pasar global dalam skala dunia. Banyak negara telah bergerak menuju ketergantungan yang lebih besar pada pasar internasional, untuk menyediakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan.

Liberalisasi berfokus pada rezim perdagangan dan investasi serta berbagai masalah regulasi di mana sistem perdagangan GATT/WTO telah memainkan peran sentral dalam proses tersebut. Sistem GATT/WTO telah membawa kemajuan yang signifikan dalam pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan melalui delapan putaran negosiasi perdagangan multilateral. Tarif di negara-negara industri telah turun dari dua digit yang tinggi menjadi kurang dari 4 persen setelah Putaran Uruguay diterapkan sepenuhnya. Di sisi barang, komitmen pasca-Putaran Uruguay untuk menghapus tarif pada berbagai produk teknologi informasi juga telah membantu dalam mempersiapkan ekonomi nasional untuk menghadapi peluang dan tantangan abad ke-21.

Ketiga, internasionalisasi aktivitas bisnis. Kombinasi teknologi baru dan pasar yang lebih bebas telah memungkinkan sektor bisnis di semakin banyak negara untuk menginternasionalkan aktivitas mereka, menjalin jaringan aktivitas yang saling terkait di seluruh dunia. Di antara mereka, kekuatan-kekuatan ini telah membuat negara-negara memiliki ketergantungan secara ekonomi, menciptakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti halnya ekonomi baru, politik dan sosial. Hambatan perdagangan yang lebih rendah dan liberalisasi secara umum telah memungkinkan lebih banyak perusahaan

untuk mengglobalisasi struktur produksi melalui investasi di luar negeri, yang pada gilirannya telah memberikan stimulus lebih lanjut untuk perdagangan.

Di sisi teknologi, arus informasi yang meningkat dan daya jual barang dan jasa yang lebih besar telah sangat memengaruhi keputusan lokasi produksi. Bisnis semakin dapat menemukan berbagai komponen proses produksinya di berbagai negara dan wilayah dan tetap mempertahankan identitas korporat tunggal. Sebagai perusahaan mensubkontrakkan bagian dari proses produksi mereka ke afiliasi atau perusahaan lain di luar negeri, pekerjaan, teknologi, modal, dan keterampilan ditransfer ke seluruh dunia. Semakin sedikit produk yang dapat diproduksi secara kompetitif saat ini hanya berdasarkan input nasional. Untuk produksi mobil tertentu, misalnya, yang diproduksi oleh satu perusahaan otomotif, melibatkan beberapa aspek produksi, pemasaran dan penjualan. Pada setiap aspek tersebut dapat melibatkan banyak perusahaan dari berbagai negara dengan besaran sharing tertentu yang disepakati. Kondisi ini yang menyebabkan mengapa ekonomi dunia yang berfungsi dengan baik sangat bergantung pada perdagangan terbuka dan rezim investasi (Satriana, 2016; Nurhayati and Priangani, 2017).

1.4.2 Pentingkah Globalisasi?

Merujuk pada uraian sebelumnya bahwa globalisasi adalah fenomena interaksi antar bangsa yang tidak mungkin dihambat karena adanya perkembangan teknologi dan informasi, walaupun ada suara-suara yang pada awalnya menentang globalisasi. Akan tetapi, globalisasi bukanlah suatu hal yang dapat dipersalahkan. Globalisasi menyiratkan integrasi negara-negara ke dalam ekonomi dunia melalui peningkatan perdagangan, investasi, aliran modal jangka pendek, dan migrasi internasional tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Sehingga secara luas bahwa proses globalisasi dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, standar hidup yang lebih baik, dan peluang untuk pengembangan teknologi serta kemajuan budaya bagi negara-negara yang berpartisipasi. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa dalam skenario internasional saat ini tidak ada alternatif selain globalisasi (Chishti, 2002; Ferdiansyah, Tin and Anthonius, 2016; Romindo et al., 2020; Mardia et al., 2021).

Terjadinya peningkatan perdagangan internasional selama bertahun-tahun adalah hasil dari proses globalisasi. Dengan demikian, konsumen dan perusahaan dapat memilih dari lebih banyak produk dan jasa. Selain itu, globalisasi mengacu pada saling ketergantungan antar bangsa sebagai akibat

dari integrasi berbagai aspek ekonomi, seperti perdagangan, yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi negara-negara yang kini saling berinteraksi. Saat ini, globalisasi tidak bisa diabaikan oleh dunia usaha, karena peluang yang ditawarkan oleh pasar luar negeri (Surugiu and Surugiu, 2015).

Baik individu, perusahaan, wilayah atau negara mampu untuk melakukan spesialisasi dalam berproduksi, yang dengannya dapat memperoleh penghasilan untuk selanjutnya melakukan transaksi dengan pihak lain. Dengan transaksi dan aktivitas tersebut, kedua pihak dapat meningkatkan standar hidupnya atau kesejahteraan. Di dalam teori, kondisi ini sering dikenal dengan istilah keuntungan komparatif. Dengan perdagangan tidak ada pihak yang dirugikan. Setiap pihak dalam melakukan perdagangan selalu mengharapkan efisiensi dengan harga yang serendah mungkin.

Terwujudnya perdagangan internasional juga menghasilkan manfaat atau keuntungan dari proses kompetitif, di mana dengan kompetisi ini akan melahirkan inovasi dan efisiensi. Begitu juga halnya dengan industri domestik, melalui perdagangan internasional mereka akan melakukan perbaikan kualitas produk menjadi lebih baik untuk dapat bersaing dengan pihak luar (Surugiu and Surugiu, 2015). Lebih jauh, globalisasi, di mana sudah terjadi perdagangan bebas antar negara, dapat membuat perekonomian domestik rentan terhadap gangguan yang terjadi di luar negeri. Meskipun para ekonom mengakui bahwa globalisasi dan perdagangan bebas dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak seperti perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen, namun mereka dapat membebani pihak lain (Carbaugh, 2011; Siagian et al., 2020).

Bab 2

Teori Perdagangan Internasional Klasik

2.1 Pengertian

Pengertian perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan penduduk/ pemerintah antar negara yang diwujudkan adanya proses pertukaran barang atau jasa yang saling menguntungkan. Hal ini senada dengan pernyataan Setiawan dan Lestari (2011), Perdagangan internasional adalah salah satu jenis perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Perdagangan internasional disebut dengan perdagangan dunia. Hal ini dikarenakan interaksi perdagangannya berasal dari berbagai belahan dunia. Perdagangan Internasional terbagi menjadi dua bagian yakni impor dan ekspor. Impor adalah kegiatan pembelian barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri.

Sedangkan ekspor adalah kegiatan penjualan barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Dengan melakukan perdagangan ekspor impor, negara-negara maju akan memperoleh bahan baku atau bahan mentah yang diperlukan oleh industri di negaranya. Selanjutnya negara maju tersebut dapat menjual hasil

produksinya ke negara –negara berkembang sehingga negara berkembang bisa mengeksport hasil-hasil produksi dalam negeri dan memperoleh devisa.

Dalam pelaksanaan perdagangan internasional akan ditemukan berbagai kerumitan yang lebih kompleks dibandingkan dengan perdagangan di dalam negeri. Hal ini seperti yang diungkapkan Amir M.S (Amir, 2001) bahwa kerumitan tersebut disebabkan para penjual dan pembeli yang berasal dari negara yang berbeda, pajak bea cukai, perbedaan bahasa, mata uang, ukuran timbangan, hukum perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga membawa permasalahan dalam perdagangan internasional seperti pola perdagangan, harga dasar ekspor – impor, manfaat perdagangan internasional, pengaruh makro perdagangan internasional, mekanisme neraca pembayaran, persekutuan perdagangan, modal luar negeri dan pengalihan teknologi.

Dalam perdagangan internasional ada tujuan yang hendak dicapai dan terutama yaitu memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain. Selain dalam memenuhi kebutuhan yang tidak ada di negaranya, perdagangan internasional juga memiliki beberapa tujuan lain yaitu sebagai berikut:

1. Memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi.
2. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor barang/produk.
3. Memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja.
4. Modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi.
5. Membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Menurut Nazzarudin Malik (2017) perdagangan internasional memiliki manfaat dan keuntungan bagi masing-masing negara yaitu:

1. Mempererat hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral.
2. Peluang beberapa negara yang saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing.
3. Mendapatkan devisa dari para investor asing yang menginvestasikan modalnya ke beberapa proyek yang memiliki potensial tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain.

4. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional.
5. Mempermudah dalam memperoleh barang/produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri.
6. Memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya berbagai lapangan kerja.
7. Mendapatkan keuntungan internal dan eksternal negara.

Perbedaan kekayaan SDA dan SDM pada masing-masing negara menuntut negara melakukan interaksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan di negaranya. Sehingga dengan adanya kebebasan ekonomi dalam perdagangan internasional maka dapat mempermudah interaksi antar negara walaupun setiap negara tersebut memiliki hukum dan aturan perdagangannya masing-masing.

2.2 Teori Perdagangan Internasional Klasik

Teori perdagangan internasional adalah teori – teori yang digunakan suatu negara sebagai landasan suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara yang lainnya. Teori perdagangan internasional melakukan analisa tentang dasar–dasar perdagangan internasional dan perhitungan dalam ukuran benefit yang didapatkan serta pengaruh dalam pembatasan perdagangan guna melakukan perlindungan ekonomi negara (proteksionisme).

Teori perdagangan Internasional ada 3 bagian yaitu:

1. Teori Praklasik Merkantilisme
2. Teori Klasik yaitu Absolute Advantage dari Adam Smith dan Comparative Advantage dari David Ricardo yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu Cost Comparative Advantage (Labor efficiency) dan juga Production Comparative Advantage (Labor productivity)
3. Teori Modern yang dibagi menjadi empat yaitu Proportional Factors Theory dan Paradoks Leontief, Teori Opportunity Cost dan Offer Curve/Reciprocal Demand (OC/RD).

Namun dalam bab ini, penulis akan fokus pada teori perdagangan internasional klasik. Teori klasik ini terbagi menjadi dua yaitu Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage) dan Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage).

Teori perdagangan internasional dari kaum klasik dipelopori dan dikembangkan oleh Adam Smith, seorang profesor dari Skotlandia. Pandangan Adam Smith ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul “The Wealth of Nations”, diterbitkan tahun 1776. Setelah Adam Smith, pada abad-abad selanjutnya banyak lagi ekonom yang ikut memberikan sumbangan penting perkembangan teori klasik, antara lain: David Ricardo, Robert Torrens, dan John Stuart Mill. Ternyata sumbangan David Ricardo pada teori perdagangan internasional menjadi sangat penting bagi perkembangan teori perdagangan internasional sehingga teori klasik tentang perdagangan internasional ini kadang langsung merujuk pada teori Ricardian.

David Ricardo mempublikasikan ide-idenya mengenai perdagangan internasional pada Bab 8 dalam bukunya *On the Principles of Political Economy* pada tahun 1819. Dalam bab tersebut dibahas mengenai konsep keunggulan komparatif (comparative advantage), yang mana konsep ini diyakini oleh para ekonom sebagai penentu yang paling prinsipil pola perdagangan fundamental. Meskipun David Ricardo seringkali dikatakan sebagai penemu hukum keunggulan komparatif, akan tetapi banyak orang yang mempelajari sejarah pemikiran ekonomi mengkritik hal tersebut karena terdapat yang substansial bahwa Robert Torrens yang juga seorang ekonom ternama di Inggris pada masa itu, mengembangkan konsep keunggulan komparatif 11 tahun lebih awal yaitu pada tahun 1808.

Namun apakah David Ricardo tahu konsep yang dikembangkan oleh Torrens dan kemudian meminjam ide tersebut atau apakah David Ricardo mengembangkan sendiri secara terpisah konsep-konsepnya mengenai keunggulan komparatif tersebut. Dilihat dari usianya, teori klasik ini sudah sangat kuno yaitu lebih dari 200 tahun, akan tetapi sampai saat ini teori ini masih sangat penting untuk Ekonomi Internasional dipelajari.

Terdapat tiga alasan yang melatarbelakangi perlunya kita mempelajari teori klasik ini, yaitu:

1. Asumsi-asumsi yang diajukan pada model teori klasik sangatlah relevan dengan situasi dan kondisi tertentu yang terdapat pada dunia nyata saat ini.

2. Teori klasik ini mampu menjelaskan bagaimana tingkat upah di Amerika Serikat yang begitu tinggi, akan tetapi barang-barang produksi Amerika masih tetap dapat bersaing di pasar dunia.
3. Teori ini mampu mengilustrasikan dengan lebih baik tentang keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi produksi secara internasional.

2.2.1 Teori Absolut Advantage

Adam Smith berpendapat bahwa sumber tunggal pendapatan adalah produksi hasil tenaga kerja serta sumber daya ekonomi. Adam Smith sependapat dengan doktrin merkantilis yang menyatakan bahwa kekayaan suatu negara dicapai dari surplus ekspor. Kekayaan akan bertambah sesuai dengan skill, serta efisiensi dengan tenaga kerja yang digunakan dan sesuai dengan persentase penduduk yang melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Smith suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain, yaitu karena memiliki keunggulan mutlak dalam produksi barang tersebut.

Adapun teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith merupakan kemampuan suatu negara untuk menghasilkan suatu barang dan jasa per unit dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibanding kemampuan negara-negara lain.

Dalam teori keunggulan mutlak, gagasan-gagasan dari Adam Smith adalah:

1. Adanya Division of Labour (Pembagian Kerja Internasional).
Dalam menghasilkan barang yang sejenis dengan adanya pembagian kerja, suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut memperoleh keunggulan mutlak.
2. Spesialisasi Internasional dan Efisiensi Produksi,
Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bisa diproduksi sendiri (dalam negeri) tidak efisien atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila suatu negara mengadakan

spesialisasi dalam memproduksi barang. Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan dengan banyaknya jam/hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan mutlak dalam produksi barang.

Jadi, keuntungan mutlak terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan, dengan biaya produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara lain.

Adam Smith berpendapat bahwa agar output dunia dapat optimal maka masing-masing negara harus memproduksi barang dan jasa di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut (*absolute advantage*). Dengan adanya pembagian tenaga kerja internasional (*international division of labor*) seperti halnya yang terjadi pada divisi tenaga kerja di suatu pabrik, akan mampu mendorong tingkat produksi dunia yang melampaui jumlah tingkat produksi pada keadaan autarki. Surplus produksi yang dihasilkan dalam situasi seperti ini kemudian dapat dibagi antar negara melalui perdagangan internasional sehingga semua negara akan mendapat barang lebih besar dari apa yang diperoleh apabila tanpa melakukan perdagangan. Konsep inilah yang direkomendasikan oleh Adam Smith tentang bagaimana produksi dunia harus dipetakan.

Untuk membahas lebih lanjut lagi, perhatikan contoh kasus numerik berikut ini. Misalkan rasio input/output pada dua industri yaitu industri makanan (M) dan industri tekstil (T) di negara A dan B seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.1. Angka-angka dalam tabel tersebut merefleksikan jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1-unit output tertentu pada masing-masing negara. Contohnya, dibutuhkan 3 jam untuk memproduksi tiap penambahan 1-unit M di negara A, dan karena adanya asumsi 12, hubungan ini dapat berlaku berapapun jumlah T yang diproduksi pada waktu itu.

Berdasarkan contoh numerik pada Tabel 2.1 di atas kita dapat melihat bahwa tenaga kerja di negara A mampu memproduksi M dalam waktu yang lebih cepat daripada tenaga kerja di negara B, sementara tenaga kerja di negara B mampu memproduksi T dengan waktu yang lebih sedikit dibandingkan tenaga kerja di negara A. Karena tenaga kerja di negara A mampu menghasilkan M

dengan waktu yang lebih sedikit daripada tenaga kerja negara B maka dalam hal ini negara A mempunyai keunggulan absolut pada produksi M. Demikian juga dengan negara B karena tenaga kerja di negara B membutuhkan waktu lebih sedikit untuk memproduksi barang T dibandingkan tenaga kerja di negara A maka negara B dikatakan mempunyai keunggulan absolut pada produksi T.

Tabel 2.1: Keunggulan Absolut sebagai Basis untuk Perdagangan

Produk	Negara	
	A	B
	Jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit output	Jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit output
Makanan (M)	3	12
Tekstil (T)	6	4

Adam Smith berpendapat bahwa pembagian internasional tenaga kerja yang tepat akan mendorong negara-negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Dalam kasus ini negara A seharusnya berkonsentrasi pada produksi barang M dan negara B berkonsentrasi pada produksi barang T.

Tabel 2.2: Keuntungan Per Unit dari Spesialisasi ketika Negara A Berspesialisasi pada Produksi Barang M dan Negara B Berspesialisasi pada Produk T

Negara	Keuntungan Per Unit	
	Produk M	Produk T
Negara A	+2	-1
Negara B	-1	+3
Dunia	+1	+2

Seandainya produksi tekstil (T) di negara A dikurangi 1 unit. Hal ini berarti ada jam kerja tenaga kerja yang menganggur sebesar 6 jam. Selanjutnya, apabila tenaga kerja tersebut berpindah ke industri makanan (M) maka dengan

adanya tambahan 6 jam dari tenaga kerja yang pindah tadi, output M akan meningkat sebesar 2 unit. Sedangkan di negara B, melalui proses yang sama maka output M akan berkurang 1 unit. Perhitungannya adalah sebagai berikut, di negara B tenaga kerja pindah dari industri M ke industri T sehingga ada perpindahan 12 jam kerja dari industri M ke industri T. Dengan adanya tambahan 12 jam kerja maka akan ada tambahan 3 unit produk T yang dihasilkan. Sekarang coba Anda perhatikan hasil totalnya. Di negara A, perpindahan 6 jam tenaga kerja dari industri tekstil ke industri makanan menyebabkan berkurangnya output T sebesar 1 unit dan meningkatkan output M sebesar 2 unit. Di negara B, ketika output M berkurang sebesar 1 unit maka output T meningkat sebesar 2 unit. Pada perekonomian dunia dapat kita lihat bahwa output M meningkat sebesar 1 unit dan output T meningkat sebesar 2 unit.

Dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa ada keuntungan yang diberikan dari pembagian internasional tenaga kerja. Tanpa menggunakan tambahan sumber daya baru (tambahan jumlah jam kerja tenaga kerja), total output dunia dapat meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh diberlakukannya aturan sederhana yaitu bahwa tiap-tiap negara seharusnya mengkonsentrasikan diri pada produksi barang yang diproduksi dengan paling efisien.

Kesimpulan dari contoh di atas adalah sebagai berikut:

1. Negara-negara di dunia mempunyai perbedaan kemampuan untuk memproduksi berbagai macam barang.
2. Output dunia dapat ditingkatkan jika negara-negara di dunia melakukan spesialisasi pada produksi barang yang memiliki keunggulan absolut.
3. Keadaan di atas dapat dicapai karena keadaan tersebut merupakan hasil dari kekuatan pasar yang dikombinasikan dengan perdagangan (internasional) bebas.

Teori dari Adam Smith ini memiliki kelemahannya juga, dikarenakan dalam perdagangan internasional akan terjadi keunggulan absolute yang berbeda, di mana hanya ada satu negara yang memiliki keunggulan absolute untuk kedua jenis produk, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan.

Masngudi (2006) menjelaskan bahwa teori keunggulan absolut dari Adam Smith mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Teori keunggulan absolut tidak menjelaskan dengan mekanisme apa dunia memperoleh keuntungan dan output dan bagaimana dibagikan di antara para penduduk masing-masing negara.
2. Dalam model teori keunggulan absolut tidak menjelaskan bagaimana kalau negara yang satu sudah mengadakan spesialisasi sedangkan yang lain masih memproduksi kedua produk.
3. Bahwa labor productivity berbeda-beda.
4. Bahwa Adam Smith tak terpikirkan adanya negara negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan absolut.

Menurut Salvatore dan Krugman (1992), kelebihan dari teori absolute advantage yaitu terjadinya perdagangan bebas antara dua negara yang saling memiliki keunggulan absolut masing-masing, di mana terjadi interaksi ekspor dan impor untuk meningkatkan kemakmuran negara. Kelemahannya yaitu apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut maka perdagangan internasional tidak akan terjadi karena tidak ada keuntungan.

2.2.2 Teori Comparative Advantage

Menurut teori keunggulan komparatif, meskipun sebuah negara kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi kedua komoditi, namun masih tetap terdapat dasar untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan kedua belah pihak. Teori keunggulan komparatif didasarkan pada nilai tenaga kerja (theory of labor value) yang diperkenalkan oleh David Ricardo, yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya.

Jadi, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional apabila melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dengan memproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut memiliki produksi yang relatif kurang efisien. Dengan kata lain, suatu negara akan tetap mendapatkan keuntungan dalam perdagangan jika berspesialisasi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan relatif, di mana keunggulan relatif yang mengindikasikan bahwa suatu negara lebih efisien secara relatif dalam memproduksi barang.

Negara seyogyanya berspesialisasi di mana mereka mempunyai keunggulan absolut yang paling besar namun apabila mereka mempunyai keunggulan absolut pada kedua macam barang atau berspesialisasi pada produk di mana mereka mempunyai ketidakunggulan absolut yang paling kecil maka kedua negara masih dapat melakukan perdagangan internasional dengan menggunakan aturan yang dikenal dengan hukum keunggulan komparatif (the law of comparative advantage).

Teori ini menyebutkan bahwa suatu negara akan melakukan ekspor jika memiliki comparative advantage terbesar atau biaya dalam menghasilkan suatu barang lebih murah. Sedangkan suatu negara akan melakukan impor jika memiliki *comparative disadvantage* lebih besar atau dalam menghasilkan suatu barang biaya yang dikeluarkan lebih besar.

Tabel 2.3: Keunggulan Komparatif sebagai Basis untuk Perdagangan

Produk	Negara	
	A	B
	Jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit output	Jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit output
Makanan (M)	3	12
Tekstil (T)	6	8

Perhatikan contoh pada Tabel 2.3. Pada contoh ini terdapat perbedaan dengan contoh berikutnya, yaitu pada contoh kasus ini negara A mempunyai keunggulan absolut pada kedua jenis barang. Akan tetapi, besarnya keunggulan absolut ini tidak sama satu sama lainnya. Anda dapat melihat bahwa negara A 4 kali lebih efisien pada produksi barang M daripada negara B (perbandingan jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang adalah 3 jam dengan 12 jam).

Di sisi lain, negara A hanya lebih efisien sebesar $\frac{4}{3}$ pada produksi barang T dibandingkan negara B (perbandingan jam kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang adalah 6 jam dengan 8 jam). Karena keunggulan absolut terbesar yang dimiliki negara A adalah pada produksi M maka negara A ini dikatakan mempunyai keunggulan komparatif pada produksi barang M. Sedangkan negara B karena mempunyai ketidakunggulan absolut paling kecil pada produksi barang T maka negara B dikatakan mempunyai keunggulan komparatif pada produk T. Perhatikan tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4: Keuntungan Per Unit dari Spesialisasi Berdasarkan Keunggulan Komparatif Di mana Negara A Memproduksi Lebih Banyak Barang M, dan B Memproduksi Lebih Banyak Barang T

Negara	Keuntungan Per Unit	
	Produk M	Produk T
Negara A	+2	-1
Negara B	-1	+1,5
Dunia	+1	+0,5

Bila negara A memperluas produksinya pada barang yang mempunyai keunggulan komparatif maka output barang M akan meningkat. Sumber daya yang digunakan dalam melakukan ekspansi ini tentu saja berasal dari industri T. Dengan kata lain, output barang T akan turun. Seandainya produk barang T ini turun sebesar 1 unit. Hal ini berarti terdapat 6 jam kerja yang tersedia. Waktu kerja tenaga kerja ini dapat digunakan pada industri M, dan hal ini akan menghasilkan ekspansi output barang M sebesar 2 unit. Di negara B, output barang M turun sebesar 1 unit, hal ini berarti terdapat 12 jam kerja yang tersedia. Jam kerja yang tersedia tersebut dapat dimanfaatkan pada industri tekstil yang dapat menghasilkan tambahan produksi tekstil sebesar 1.5 unit.

Seperti pada Tabel 2.4 di atas, kita dapat melihat bahwa meskipun tidak menggunakan sumber daya baru dan negara A mempunyai keunggulan absolut pada kedua produk, tetapi output kedua barang naik. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan mengikuti hukum keunggulan komparatif seperti di atas tidak akan menghasilkan peningkatan output pada semua produk, meskipun demikian, dalam kasus ini, semua negara akan menjadi lebih baik (better off) dengan melakukan spesialisasi. Hal ini karena masing-masing negara memproduksi lebih banyak barang yang akan dijual di pasar dunia dan memperoleh harga yang lebih tinggi untuk setiap unit yang terjual.

Teori ini mencoba melihat keuntungan atau kerugian dalam perbandingan relatif. Teori ini berlandaskan pada asumsi:

1. Labor Theory of Value menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk menghasilkan barang tersebut, di mana nilai barang yang ditukar

seimbang dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk memproduksinya.

2. Perdagangan Internasional sebagai pertukaran barang dengan barang.
3. Tidak diperhitungkannya biaya dari pengangkutan dan lain-lain dalam hal pemasaran.
4. Produksi dijalankan dengan biaya tetap, hal ini berarti skala produksi tidak berpengaruh.

Maka dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu negara akan melakukan spesialisasi dalam produksi barang-barang dan mengekspornya apabila negara tersebut mempunyai keuntungan dan akan mengimpor barang-barang yang dibutuhkan jika mempunyai kerugian dalam memproduksi.

Bab 3

Teori Perdagangan Internasional Modern

3.1 Teori Heckscher-Ohlin

Teori Perdagangan Internasional modern diawali saat ekonom Swedia yang bernama Eli Heckscher (1919) dan Bertil Ohlin (1935) menjelaskan tentang perdagangan internasional yang tidak dapat dijelaskan oleh teori keunggulan komparatif. Teori klasik keunggulan komparatif berisi tentang perdagangan internasional yang terjadi karena terdapat perbedaan dalam faktor produksi yang disampaikan antar negara secara eksplisit. Namun teori klasik keunggulan komparatif tidak menjelaskan tentang hal yang menyebabkan adanya perbedaan produktivitas itu. Eli Heckscher dan Bertil Ohlin (Heckscher-Ohlin) mengembangkan teori keunggulan komparatif dan teori keunggulan mutlak untuk menyampaikan teori perdagangan internasional modern (Salvatore, 2018).

Teori Heckscher-Ohlin menjelaskan bahwa penentu utama perdagangan internasional adalah perbedaan berbagai harga faktor produksi antar negara dan relatif dari karunia alam. Heckscher-Ohlin berpendapat bahwa pola perdagangan diawali dengan mengungkapkan perbedaan berbagai harga antar negara secara spesifik. Penyebab perbedaan harga adalah perbedaan proporsi

dalam menggunakan faktor produksi, kenyataan ada faktor spesifik pada setiap perusahaan atau industri contohnya kemampuan manajerial yang tinggi yang merupakan faktor produksi. Contoh lain dari faktor produksi adalah pengetahuan, teknologi, hak paten dan lain sebagainya (Soelistyo and Nopirin, 1977).

Teori Heckscher-Ohlin menyampaikan bahwa perdagangan internasional tidak memiliki banyak perbedaan dan merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Yang menjadi pembeda utama dari perdagangan internasional dan perdagangan antar daerah adalah masalah jarak. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) menguraikan dengan baik berbagai pola perdagangan dan berbagai negara mengeksport secara intensif berbagai barang dengan faktor produksi melimpah. Heckscher-Ohlin berpendapat bahwa sebuah negara akan melaksanakan perdagangan dengan negara lainnya karena negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif yaitu keunggulan dari segi faktor produksi dan teknologi.

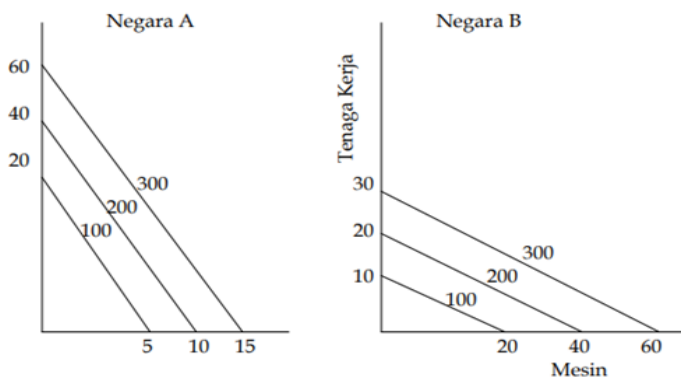
Dasar dari keunggulan komparatif adalah:

1. Faktor endowment adalah kepemilikan berbagai faktor produksi suatu negara.
2. Faktor intensity adalah teknologi yang dipakai dalam proses produksi.

Terdapat dua kurva dalam teori modern Heckscher-Ohlin yaitu:

1. Kurva isocost adalah kurva yang mendeskripsikan kesamaan total biaya produksi.
2. Kurva isoquant yaitu kurva yang mendeskripsikan kesamaan total kuantitas produk.

Berdasarkan teori ekonomi mikro pada titik optimal kurva isoquant akan menyinggung kurva isocost. Yang berarti sejumlah produk tertentu akan diperoleh dengan biaya minimal atau produk yang maksimal akan diperoleh dengan biaya tertentu. Suatu negara A mempunyai tenaga kerja dengan jumlah yang besar dan kapital yang cenderung sedikit sehingga dengan mengeluarkan sejumlah uang tertentu akan diperoleh tenaga kerja dengan jumlah yang lebih banyak daripada kapital. Sebagai contoh uang Rp 200.000.000 dapat digunakan untuk membeli 10 unit mesin atau 40 unit tenaga, jadi 40 unit tenaga sama dengan 10 unit mesin.



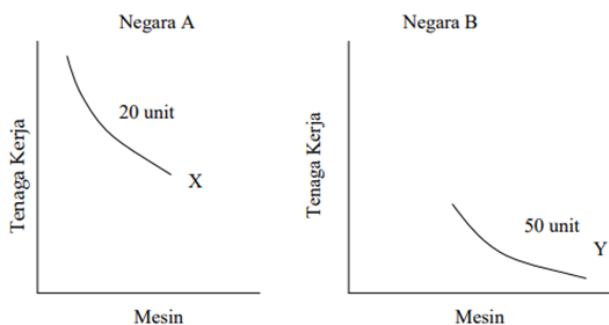
Gambar 3.1: Isocost (Lilimantik, 2015)

Gambar 3.1 diatas mendeskripsikan bahwa:

1. Negara A dengan mengeluarkan Rp 100.000.000 akan mendapatkan 20 unit mesin atau 50 unit tenaga kerja.
2. Negara A dengan mengeluarkan Rp 200.000.000 akan mendapatkan 10 unit mesin atau 40 unit tenaga kerja.
3. Negara A dengan uang sebanyak Rp 300.000.000 dapat membeli kombinasi mesin yang dilihat dari sumbu horizontal (mesin) dan titik pada sumbu vertikal (tenaga kerja). kurva isocost dibentuk dari menghubungkan kedua titik ini dan membentuk suatu garis lurus. Kurva isocost juga dapat dibentuk dari berbagai kombinasi dari dua faktor produksi yang sejumlah uang tertentu bisa membeli faktor produksi tersebut. perbandingan harga antara mesin dengan tenaga kerja ditunjukkan dari sudut arah isocost yaitu 15: 60 atau 1: 4, artinya 1 unit mesin. nilainya sama dengan 4 unit tenaga kerja.
4. Negara B dengan mengeluarkan Rp 100.000.000 akan mendapatkan 20 unit mesin atau 10 unit tenaga kerja.
5. Negara B dengan mengeluarkan Rp 200.000.000 akan mendapatkan 40 unit mesin atau 20 unit tenaga kerja.
6. Negara B mempunyai sedikit tenaga kerja dan lebih banyak kapital atau mesin sehingga di negara B dengan mengeluarkan Rp 300.000.000 akan mendapatkan 60 unit mesin atau 30 unit tenaga. Harga 2 unit mesin sama dengan 1 unit tenaga kerja sehingga

perbandingan harga mesin dengan tenaga adalah 2: 1. Negara B yang memiliki perbandingan harga antara tenaga: capital yaitu 1: 2 akan membuat semua isocost dari berbagai alternatif pengeluaran akan paralel.

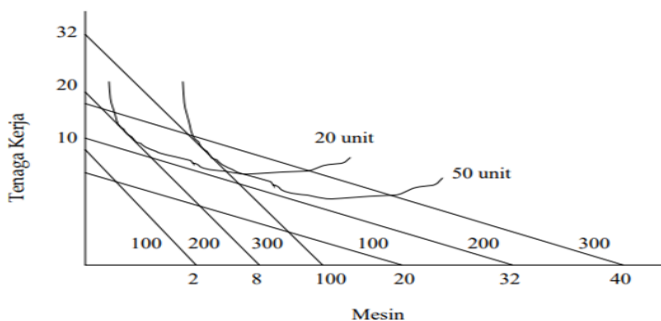
7. Negara B lebih murah jika barang yang diproduksi cenderung memakai sedikit tenaga kerja dan banyak capital, sedangkan Negara A akan lebih murah jika barang yang diproduksi cenderung memakai sedikit capital dan banyak tenaga.



Gambar 3.2: Produk padat mesin dan padat tenaga kerja (Lilimantik, 2015)

Isoquant Negara A berada di dekat sumbu vertikal (tenaga kerja). Hal ini mendeskripsikan bahwa barang X yang diproduksi bersifat padat tenaga kerja karena Negara A mempunyai lebih banyak faktor produksi tenaga. Sedangkan *isoquant* Negara B berada di dekat sumbu horizontal (mesin). Hal ini mendeskripsikan bahwa barang Y yang diproduksi bersifat padat modal karena negara B mempunyai lebih banyak mesin. Penggabungan isoquant dan isocost dari negara A dan negara B terlihat pada Gambar 3.2.

Biaya terendah untuk memproduksi sejumlah barang yang ditunjukkan oleh isoquant yang menyinggung isocost. Pada gambar 3 terlihat bahwa Negara A memakai 2 unit mesin dan 32 unit tenaga kerja untuk memproduksi 20 unit barang X dengan biaya Rp 200,00. Negara B untuk memproduksi 20 unit barang X menghabiskan biaya lebih besar karena negara B mempunyai sedikit faktor produksi tenaga kerja sedangkan barang X tersebut bersifat padat tenaga kerja.



Gambar 3.3: Teori proporsi faktor produksi (Lilimantik, 2015)

Negara A untuk memproduksi 50 unit barang Y menghabiskan biaya sebesar Rp 300,00 dengan memakai 8 unit mesin dan 32 unit tenaga kerja, sedangkan Negara B untuk memproduksi 50 unit barang Y hanya menghabiskan biaya sebesar Rp 200,00 dengan memakai 20 unit mesin dan 8 unit tenaga kerja. Negara A spesialisasi memproduksi barang X dan negara B spesialisasi memproduksi barang Y.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa proporsi berbagai faktor produksi dari suatu negara berbeda yang menyebabkan harga di berbagai Negara ikut berbeda.

Analisis hipotesis Heckscher-Ohlin meliputi beberapa hal yaitu (Lilimantik, 2015):

1. Proporsi dan struktur faktor produksi yang dimiliki menentukan keunggulan komparatif dari suatu jenis produk setiap negara.
2. Jumlah faktor produksi setiap negara menentukan biaya atau harga produksi suatu barang.
3. karena negara mempunyai faktor produksi yang cukup banyak dan memiliki biaya produksi yang murah maka setiap negara akan mengekspor barang tertentu dengan melaksanakan spesialisasi produksi.
4. Negara dengan faktor produksi yang sedikit dan memiliki biaya produksi yang mahal akan memilih untuk mengimpor berbagai barang tersebut.
5. Teori Heckscher-Ohlin memiliki kelemahan ialah perdagangan internasional tidak terjadi jika suatu negara memiliki jumlah faktor

produksi yang relatif sama yang menyebabkan kesamaan harga barang yang sejenis.

Teori Heckscher-Ohlin memiliki beberapa hipotesis yaitu (Lilimantik, 2015):

1. Jumlah faktor produksi dari setiap negara menentukan biaya produksi suatu barang.
2. Penurunan produksi barang impor dan peningkatan produksi barang ekspor.
3. Harga tenaga kerja yang sama di kedua negara menyebabkan barang yang sama memiliki harga yang cenderung sama di kedua negara.
4. Setiap negara melaksanakan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut mempunyai faktor produksi yang murah dan banyak.
5. Negara yang kaya tenaga kerja akan melaksanakan perdagangan dengan negara yang kaya kapital.

Teori Heckscher-Ohlin memiliki beberapa kelemahan dalam mendeskripsikan perdagangan internasional yaitu:

1. Semua faktor produksi dan pasar produk memiliki masalah pada asumsi persaingan sempurna karena perdagangan sebagian besar merupakan produk dari negara industri yang melakukan diferensiasi produk dan skala ekonomi yang tidak dapat dideskripsikan menggunakan model faktor endowment Heckscher-Ohlin.
2. Kesamaan teknologi yang digunakan kedua negara dalam memproduksi barang merupakan asumsi yang tidak valid. Realita di lapangan menunjukkan bahwa sering terdapat perbedaan teknologi yang dipakai suatu negara.
3. Asumsi suatu negara dalam berdagang melakukan spesialisasi penuh untuk memproduksi suatu komoditi tidak sepenuhnya benar karena banyak negara memproduksi komoditi yang sebagian besar berasal dari impor.
4. Asumsi tidak ada perpindahan faktor internasional. Terdapat perpindahan faktor secara internasional dapat menggantikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan faktor

produksi dan harga produk. Hal ini merupakan modifikasi tanpa mengurangi validitas teori Heckscher-Ohlin (Salvatore, 2018).

Beberapa pengujian empiris dari teori Heckscher-Ohlin adalah:

Wassily Leontief menguji data Amerika Serikat

Wassily Leontief menggunakan teori Heckscher-Ohlin pada data Amerika Serikat tahun 1947. Amerika Serikat dianggap sebagai negara yang mempunyai lebih sedikit tenaga kerja dan lebih banyak modal jika dibandingkan dengan negara lainnya. Berdasarkan teori Heckscher-Ohlin, Amerika Serikat akan mengimpor barang padat tenaga kerja dan mengekspor barang padat modal.

Namun berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa Amerika Serikat mengimpor barang padat modal dan mengekspor barang padat tenaga kerja. Hasil pengujian ini tidak sesuai dengan teori Heckscher-Ohlin dan hal ini dikenal sebagai Leontief Paradoks. Namun beberapa ekonom berpendapat bahwa analisa yang lemah dan metodologi yang terbatas menjadi penyebab munculnya Leontief Paradoks. Leontief Paradoks didukung oleh beberapa faktor yaitu perang Dunia II pada tahun 1947 sehingga situasi tersebut belum mewakili secara umum dan tepat kondisi perdagangan Amerika Serikat.

Beberapa ahli ekonomi perdagangan berpendapat bahwa penyebab Leontief Paradoks adalah:

1. Faktor produksi memiliki intensitas yang berkebalikan
2. Tarif dan non-tariff barrier
3. Tenaga kerja, keterampilan dan kapital yang berbeda (Darwanto, 2009)

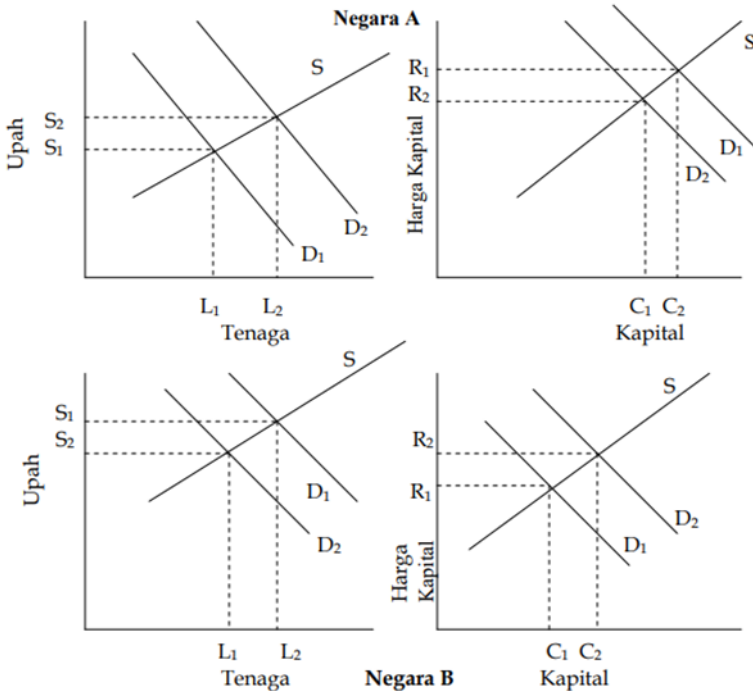
Pengujian data dari banyak negara

Harry P. Bowen, Edward E. Learmer dan Leo Sveikauskas melakukan pengujian menggunakan sampel dari 27 negara dengan 12 faktor produksi rasio faktor endowments dari setiap faktor produksi di suatu negara dihitung terhadap penawaran dunia. Lalu berbagai rasio tersebut dibandingkan dengan bagian setiap negara berdasarkan pendapatan dunia. Harry P. Bowen, Edward E. Learmer dan Leo Sveikauskas berpendapat suatu negara melakukan ekspor faktor melebihi bagian pendapatan jika teori faktor produksi benar. Realitanya adalah 2/3 atau kurang dari 70 persen faktor produksi diperdagangkan yang

sesuai dengan yang diperkirakan. Hasil pengujian ini mendukung paradox Leontief bahwa sering terjadi perdagangan tidak sejalan dengan yang diperkirakan oleh teori Hecksher-Ohlin (Obstfeld and Krugman, 2003).

3.2 Kesamaan Harga Faktor Produksi

Harga berbagai faktor produksi di beberapa negara sama disebabkan oleh perdagangan bebas. Berdasarkan teori faktor proportions Hecksher-Ohlin, Jika produksi barang X di negara A diperbanyak maka permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya Jika produksi barang Y di negara A diperbanyak maka permintaan terhadap capital atau mesin juga ikut berkurang. Upah tenaga kerja akan menurun dan harga capital atau mesin akan meningkat. Kondisi ini dideskripsikan pada Gambar 3.4.



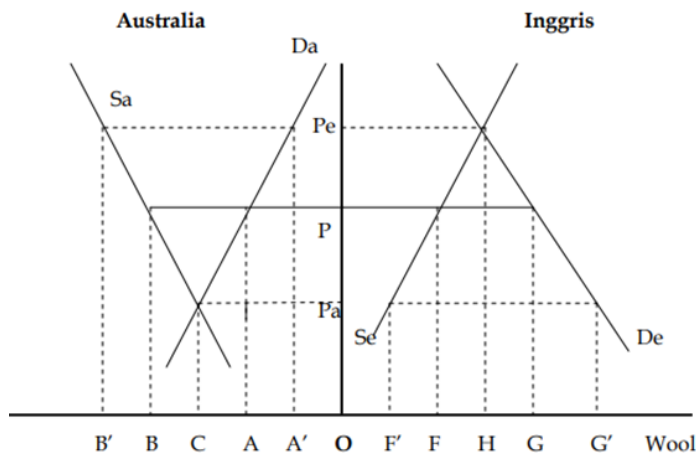
Gambar 3.4: Kesamaan harga faktor produksi (Lilimantik, 2015)

Sebelum terjadi perdagangan harga kapital dan upah tenaga kerja di negara A adalah R_1 dan S_1 dengan kurva permintaan dan penawaran D_1 dan S . Upah tenaga kerja di negara B lebih tinggi dan harga kapital lebih rendah daripada negara A. Setelah perdagangan terjadi di antara kedua negara produksi barang Y berkurang dan barang X bertambah.

Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja dan penurunan permintaan kapital di negara A. Kurva permintaan tenaga kerja berpindah ke D_2 sehingga upah meningkat menjadi S_2 dan jumlah tenaga kerja yang dipakai ialah L_2 . Ketika permintaan kapital menurun, maka kurva permintaan kapital berpindah ke D_2 sehingga harga kapital mengalami penurunan menjadi R_2 dan jumlah kapital yang dipakai adalah C_2 . Negara B yang mempunyai faktor produksi capital lebih banyak dengan peningkatan produksi barang Y dan peningkatan permintaan kapital sehingga harga juga mengalami peningkatan. Begitu juga dengan sebaliknya jika produksi barang X menurun maka permintaan tenaga kerja juga mengalami penurunan sehingga harga barang X juga turun. Sebelum terjadi perdagangan harga kapital lebih tinggi di A dan upah lebih tinggi di B. Melalui perdagangan tendensi harga kapital dan upah di kedua Negara tersebut akan sama (Lilimantik, 2015).

3.3 Teori Permintaan dan Penawaran

Pada prinsipnya perbedaan antara permintaan dan penawaran menjadi penyebab terjadinya perdagangan antara 2 negara. Contoh dari perbedaan permintaan adalah perbedaan selera dan pendapatan. Sedangkan contoh dari perbedaan penawaran adalah perbedaan di dalam jumlah dan kualitas dari berbagai faktor produksi, eksternalitas dan tingkat teknologi. Teori permintaan dan penawaran secara sederhana dapat dijelaskan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5: Teori Permintaan dan Penawaran (Lilimantik, 2015)

Berbagai asumsi yang dipakai dalam analisis teori permintaan dan penawaran adalah:

1. Persaingan sempurna
2. Faktor produksi yang tetap
3. Biaya angkut tidak ada
4. Penuhnya kesempatan untuk berkerja
5. Teknologi tidak berubah
6. Biaya produksi yang meningkat
7. Kapital tidak berpindah

Sebelum perdagangan internasional terjadi harga wol di Australia ialah P_a dan harga wool di Inggris adalah P_e . Harga di Australia lebih murah daripada di Inggris ketika kurva permintaan memotong kurva penawaran. Jika produksi dengan keadaan *constant cost*, maka Australia bisa menjual woolnya pada harga P_a dalam jumlah yang terbatas, sedangkan Inggris tidak bisa menjual satu unit pun wool dengan harga yang lebih murah dari P_e .

Jadi dengan berdagang dengan keadaan *constant cost*, maka spesialisasi akan terjadi yaitu Hanya Australia yang akan menghasilkan wol dan Inggris pada harga P_a akan mengimpor sejumlah wool. Jika produksi dengan *increasing cost*, maka Australia harus meningkatkan produksi agar permintaan dari Inggris terpenuhi. Kenaikan ongkos per unit diakibatkan oleh kenaikan produksi

sehingga harga mengalami peningkatan. Produksi di Inggris akan mengalami penurunan karena sebagian wol diimpor dari Australia yang mengakibatkan harga mengalami penurunan. Proses penyesuaian akan terus terjadi hingga jumlah barang yang diimpor oleh Inggris sama dengan jumlah yang diekspor oleh Australia dan harga yang tercipta ialah P .

Jika memperhatikan faktor biaya angkut maka harganya tidak akan sama di kedua negara tersebut, perbedaannya sebesar biaya angkut tersebut. Pembebanan biaya angkut sebesar P_a ' P_e ' akan memperkecil volume perdagangan, yaitu impor Inggris sama dengan ekspor wol Australia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan harga di kedua Negara disebabkan oleh biaya angkut dan berdampak pada penurunan volume perdagangan (Lilimantik, 2015).

Bab 4

Hambatan Tarif (Tariff Barriers)

4.1 Pendahuluan

Walaupun liberalisasi mampu memperluas serta memperbesar cakupan pasar dan peluang bagi setiap negara dalam memasarkan produk nasionalnya, dan mendorong terjadinya perdagangan bebas. Perdagangan bebas (free trade) yang sedang berlangsung sekarang bertujuan untuk memaksimalkan produksi (output) dunia yang bermanfaat bagi setiap negara di dunia melalui spesialisasi internasional. Dengan perdagangan bebas akan tercipta pangsa pasar yang luas atas berbagai produk yang dihasilkan setiap negara dan juga masing-masing negara dapat mendatangkan (mengimpor) komoditas yang dibutuhkan di negaranya dari negara dianggap lebih berkualitas dan lebih murah tanpa adanya hambatan dalam impor maupun ekspor.

Akan tetapi dalam kenyataannya seluruh negara masih menerapkan hambatan dalam perdagangan internasional seperti hambatan tarif (tariff barriers) baik untuk impor maupun ekspor. Hambatan perdagangan pada awalnya adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memproteksi perusahaan-perusahaan domestik dengan cara melakukan pembatasan kuota produksi yang

datang dari luar negeri. Hambatan perdagangan internasional yang paling penting sejak dahulu hingga sekarang adalah tarif.

Saat ada dua negara melakukan perdagangan internasional untuk produk baik komoditas maupun jasa, kuantitas tertentu sering sekali dibebankan menjadi biaya yang ditanggung negara, sehingga memberikan pendapatan bagi pemerintah negara tersebut serta meningkatkan harga produk asing, hal ini berdampak kepada perusahaan di mana mereka menjadi mampu bersaing dengan produk negara lain. Biaya ini dikenal dengan pajak/ tax atau bea yang disebut dengan hambatan tarif.

4.2 Pengertian Tarif

Tarif (tariff) adalah pembebanan bea atau pajak yang dikenakan terhadap komoditas perdagangan yang melewati batas wilayah hukum (custom area) suatu negara. Tarif dibedakan atas tarif impor (import barriers), dan tarif ekspor (export barriers). Tarif impor (import barriers) merupakan bea yang dibebankan terhadap komoditas yang masuk ke wilayah (custom area) suatu negara yang berasal dari negara lain.

Sedangkan tarif ekspor (export barriers) merupakan bea yang dikenakan terhadap komoditas yang dikirim ke negara lain melewati batas wilayah hukum (custom area) negara yang bersangkutan. Dalam kenyataan bahwa tarif impor lebih penting dari tarif ekspor. Negara-negara dunia ketiga cenderung masih menerapkan kebijakan tarif impor atas berbagai komoditas dari luar negeri demi untuk melindungi industri di dalam negeri (proteksi) dari industri yang sudah maju di luar negeri. Pembahasan dalam bab ini adalah pembahasan terhadap kebijakan tarif impor (Nopirin, 2007).

4.2.1 Penggolongan Tarif

Dengan pengenaan bea impor maka akan mengurangi kuantitas komoditas impor sehingga mendorong produksi dalam negeri untuk menambah tenaga kerja untuk memproduksi. Hal ini memicu kesempatan kerja meningkat.

Tarif digolongkan atas tiga golongan yaitu (Nopirin, 2007):

1. Tarif ekspor yaitu tarif atau bea yang dibebankan terhadap komoditas yang dikirim keluar negeri.

2. Tarif transito yaitu tarif atau bea yang dikenakan terhadap komoditas-komoditas yang melalui suatu negara tetapi tujuan komoditas tersebut tersebut bukan negara itu tetapi negara lain.
3. Tarif impor adalah tarif atau bea yang dikenakan terhadap komoditas-komoditas yang masuk kedalam suatu negara dengan ketentuan negara bahwa negara yang mengenakan tarif sebagai tujuan akhir komoditas tersebut.

4.2.2 Sistem Tarif

Sistem tarif dibedakan atas tiga bagian, yaitu (Lipsey, 1976):

1. Single column tariffs, yaitu untuk berbagai jenis komoditas hanya mempunyai satu macam tarif dan besarnya ditentukan sendiri atau ditentukan sepihak oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain.
2. Double-column tariffs; system di mana untuk setiap komoditas mempunyai 2 (dua) tarif. Apabila kedua tarif tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya: “bentuk maksimum dan minimum”. Dalam bentuk ini jika tarif maksimum sebagai normal duties maka tarif minimumnya digunakan untuk komoditas dari negara-negara tertentu yang mengadakan perjanjian tarif dengan negara tersebut; tetapi apabila tarif minimum sebagai normal duties maka tarif maksimum digunakan untuk membalas tindakan negara lain yang membebankan tarif komoditas yang lebih tinggi. Jika tarif maksimum sebagai normal duties sedang tarif yang lebih rendah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan negara lain, (jadi sebagian autonomous akan sebagian conventional) maka bentuk ini dinamakan “general and conventional form”.
3. Triple-column tariffs: biasanya system ini digunakan oleh negara penjajah. Sebenarnya system ini hanya perluasam daripada double column tariffs, yakni dengan menambah satu macam tarif preferen untuk negara-negara bekas jajahan atau afiliasi politiknya. System ini sering disebut dengan nama “preferential system”.

4.2.3 Pembedaan Tarif

Perbedaan tarif atas komoditas impor terdiri dari 3 jenis (Pratama, 2020)

1. Ad valorem duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam persentase dari nilai komoditas yang dikenakan bea tersebut.
2. Specific duties, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada komoditas.
3. Specific ad valorem atau compound duties, yakni bea yang merupakan kombinasi antara specific dan ad valorem. Misalnya suatu komoditas tertentu dikenakan 10% tarif ad valorem ditambah Rp 20,00 untuk setiap unit.

Kebijakan tarif impor adalah berupa (Hady, 2009):

1. Penghapusan bea masuk (0%) atau bea masuk yang sangat rendah misalnya 5% atau kurang atas komoditas kebutuhan pokok dan sangat vital, seperti beras, peralatan mesin yang dianggap sangat vital di dalam negeri.
2. Tarif sedang, misalnya 5%-20% dikenakan untuk komoditas setengah jadi, dan juga komoditas-komoditas yang belum cukup diproduksi di dalam negeri.
3. Tarif tinggi, misalnya di atas 20%, dikenakan untuk komoditas mewah yang belum vital kepentingannya di dalam negeri, juga komoditas-komoditas yang sudah cukup banyak diproduksi di dalam negeri.

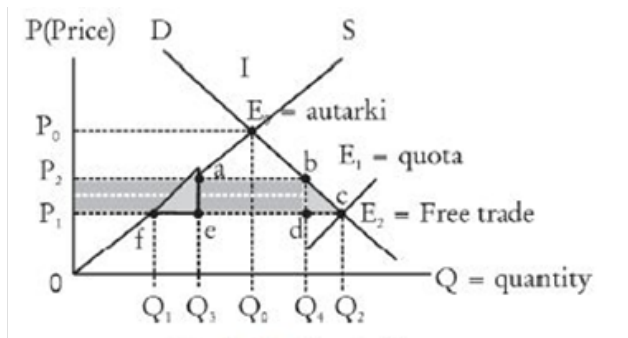
4.3 Efek Tarif Impor

Pembebanan tarif impor atas komoditas dari luar negeri demi perlindungan industri dalam negeri, mempunyai beberapa efek, (Nopirin, 2007) yaitu:

1. Efek harga (price effect), dengan pengenaan tarif ke atas komoditas impor akan menyebabkan harga meningkat sebesar persentase bea yang diterapkan.

2. Efek Produksi (production effect) atau efek proteksi (perlindungan) yaitu dengan tarif bahwa produksi dalam negeri bertambah, sekaligus membatasi jumlah komoditas dari luar negeri ke dalam negeri sehingga industry dalam negeri dapat berkesempatan untuk meningkatkan produksinya.
3. Efek penerimaan (revenue effect) atau efek anggaran (budgetair effect) di mana dengan kebijakan tarif akan menambah penerimaan pemerintah (negara) dari tarif untuk mengisi kas negara.
4. Efek konsumsi (consumption effect), di mana konsumsi dalam negeri berkurang, karena harga mengalami kenaikan setinggi tarif yang diterapkan sehingga permintaan berkurang.
5. Efek redistribusi pendapatan (income redistribution effect) berupa pengusaha industry di dalam negeri memperoleh bagian pendapatan akibat meningkatnya harga komoditas akibat kebijakan impor.

Kelima efek tarif bea masuk diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 4.1: Efek Tarif Bea Masuk (Pradita, 2005)

Gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebelum adanya perdagangan internasional, pasar komoditas X di dalam negeri, penawaran komoditas X ditunjukkan S_0 dan permintaan ditunjukkan oleh D_0 dengan titik keseimbangan pada titik E_0 yang merupakan perpotongan kurva permintaan D_0 dan kurva penawaran S_0 , sehingga harga komoditas X di dalam negeri adalah

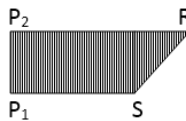
P_0 dengan kuantitas keseimbangan Q_0 (jumlah komoditas yang diproduksi sebesar Q_0).

2. Dengan terjadinya perdagangan bebas, dan kebijaksanaan tarif belum diterapkan, harga komoditas X di pasar luar negeri sama dengan harga dalam negeri sebesar OP_1 yang lebih rendah dari OP_0 (harga di pasar dalam negeri sebelum perdagangan bebas). Harga komoditas X oleh industry di dalam negeri terpaksa harus mengikuti harga komoditas X dari luar negeri agar konsumen dalam negeri mau mengkonsumsi yaitu setinggi OP_1 .
3. Pada harga setinggi OP_1 , permintaan konsumen di dalam negeri begitu banyak (karena harga rendah) sebesar OQ_2 , sementara industri dalam negeri hanya mampu memproduksi dan menawarkan komoditas X sebanyak OQ_1 sehingga impor sebesar Q_1-Q_2 . Dengan masuknya komoditas impor yang cukup banyak dengan harga yang cukup rendah akan mengakibatkan industri dalam negeri terpukul karena produk industri dari luar negeri sudah beroperasi dengan teknologi yang tinggi dan memproduksi dengan efisien dan skala ekonomi (economies of scale) sehingga ongkos produksi lebih rendah. Jika hal ini terus dibiarkan mengakibatkan industri dalam negeri akan tutup akibat tidak mampu bersaing dengan industri luar negeri. Atas dasar itu pemerintah menerapkan kebijaksanaan tarif impor atau hambatan tarif.
4. Pemerintah di dalam negeri menerapkan kebijakan tarif impor sebesar P_1P_2 , sehingga harga harga komoditas impor sebesar OP_2 , ($OP_2 = OP_1 + \text{tarif}$). Dengan naiknya harga menjadi OP_2 , konsumen dalam negeri mengurangi permintaannya menjadi OQ_3 , atau berkurang sebanyak Q_1-Q_3 , sedangkan industri dalam negeri berkesempatan meningkatkan produksinya dan penawarannya menjadi OQ_4 sehingga impor berkurang menjadi Q_2-Q_4 .

Akibat dari kebijaksanaan tarif ini menimbulkan beberapa efek, yaitu:

1. Efek harga (price effect), di mana harga komoditas X mengalami kenaikan di dalam negeri dari OP menjadi OP_2 .

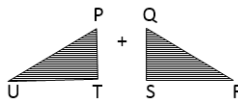
2. Efek produksi atau efek proteksi (production effect), di mana meningkatnya harga menjadi OP_2 akibat kebijaksanaan tarif mengakibatkan industri dalam negeri meningkatkan produksinya menjadi OQ_3 atau sebesar Q_1-Q_3 .
3. Efek redistribusi (redistribution effect), di mana akibat naiknya harga akibat tarif, industry di dalam negeri memperoleh tambahan penerimaan sebesar P_1P_2RS .



4. Efek konsumsi (consumption effect), yaitu berkurangnya konsumsi dalam negeri $Q_2 - Q_4$ sehingga konsumsi dalam negeri menjadi sebesar Q_4 . Akibat naiknya harga komoditas X setelah Negara menerapkan kebijaksanaan tarif impor.
5. Efek penerimaan (revenue effect) atau efek pendapatan, di mana pemerintah memperoleh penerimaan dari tarif sebesar segi empat PQR .



6. Biaya tarif atau biaya proteksi (cost of protection), yaitu dengan kebijaksanaan tarif menimbulkan biaya tarif atau biaya proteksi yang tidak tau siapa yang menikmatinya sebesar kedua segitiga PTU dan QRS .



7. Penurunan impor, yaitu dengan penerapan tarif jumlah komoditas impor berkurang sebesar Q_2-Q_4 , sehingga jumlah impor sebesar Q_4-Q_1 .

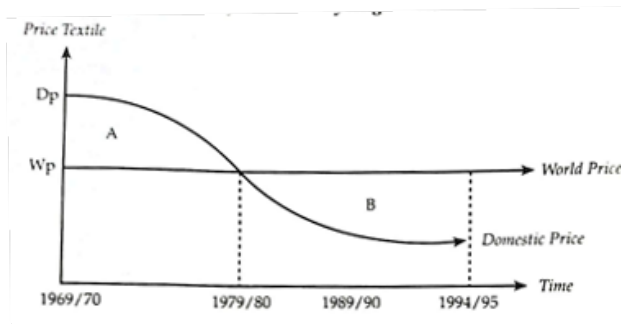
4.4 Alasan Pengenaan Tarif

Pengenaan tarif atas komoditas impor adalah dengan alasan (Pratama, 2020):

1. Melindungi industri di dalam negeri terutama industri yang baru tumbuh (infant industry).

Industri yang baru tumbuh di dalam negeri (infant industry) umumnya masih dengan teknologi yang sederhana serta belum mencapai skala ekonomi (economy of scale) atau efisisensinya masih rendah selalu kalah bersaing dengan industri luar negeri yang sudah memiliki teknologi maju, efisiensi yang tinggi. Akibat dari keadaan ini maka industry dalam negeri perlu dilindungi (proteksi) melalui pengenaan tarif atas komoditas impor. Sebab apabila pemerintah tidak melindungi industri di dalam negeri melalui pengenaan tarif, akan berdampak negatif, industry tidak berkembang dan bahkan menjadi kolaps.

Pengenaan tarif atas komoditas impor hanyalah bersifat sementara atau dengan jangka waktu yang terbatas, dan setelah industry di dalam negeri sudah kuat dan dianggap sudah mampu bersaing maka tarif akan diiadakan atau dihapus (Apridar, 2009). Secara grafis “infant industry argument” tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.2: Infant Industry Argument (Hady, 2009)

Keterangan:

- a. Dimisalkan suatu negara sedang berkembang di mana sektor industri di negara tersebut pada sekitar tahun 1969/70 masih baru tumbuh sehingga tergolong infant industry, misalnya seperti negara Indonesia yang memelalui rencana pembangunan lima tahun (Pelita). Pada tahun tersebut industry tekstil masih baru tumbuh. Oleh karena karena industri tersebut baru lahir (infant industry) dan belum mampu bersaing dengan produk impor maka harga produk dalam negeri P_d relatif jauh lebih tinggi dibandingkan harga produk di luar negeri atau harga dunia yaitu P_w , atas dasar itu agar produksi dalam negeri dapat bersaing dengan komoditas impor maka perlu industry di dalam negeri diproteksi, terutama dengan tarif bea masuk yang relatif tinggi (Hady, 2009).
- b. Industri yang baru tumbuh dan belum berkembang di dalam negeri (Infant industry) yang dilindungi atau diproteksi ini dicerminkan oleh bidang M. Karena harga produk tekstil dalam negeri masih lebih tinggi daripada harga luar negeri ($P_d > P_w$), maka:
 - Perlu diberikan proteksi tarif yang edukatif minimal sebesar jarak $P_d - P_w$.
 - Terdapat “subsidi” dari konsumen kepada produsen karena konsumen membayar harga tekstil dalam negeri mahal daripada luar negeri.
 - Dengan teori experience curve atau learning curve dengan perlindungan yang disertai dengan edukasi terhadap industri dalam negeri, maka harga tekstil dalam negeri akan semakin menurun sehingga akhirnya pada tahun 1979/1980 harga tekstil dalam negeri akan sama dengan luar negeri ($P_d = P_w$).
2. Penerapan proteksi edukatif yang semakin menurun dan sejalan dengan perkembangan serta pertumbuhan infant industry yang semakin dewasa dan kuat seperti dicerminkan oleh bidang N, sehingga pada tahun berikutnya yaitu tahun 2004/2005 harga produk

tekstil dalam negeri lebih rendah dari harga produk textile luar negeri ($P_d < P_w$), dampak proteksi edukatif adalah (Apridar, 2009):

- a. Industri tekstil dalam negeri mampu mengeksport produknya ke luar negeri.
 - b. Konsumen dalam negeri akan mendapat “kompensasi” dari produsen tekstil karena dapat membeli dengan harga yang relatif lebih murah.
3. Memperbaiki dasar tukar (term of trade)
Penaan tarif atas komoditas impor dapat mengurangi impor negara yang bersangkutan. Hal ini berarti dengan ekspor sebanyak tertentu diharapkan jumlah impor yang lebih besar. Pengurangan impor akibat pembebanan tarif impor sedangkan jumlah ekspor tertentu, maka kekuatan negara yang mengurangi atau membatasi impornya untuk menukarkan komoditas semakin kuat
4. Membuka kesempatan kerja (employment)
Pembatasan jumlah impor untuk melindungi industri di dalam negeri akan mendorong industri di dalam negeri untuk berkembang melalui peningkatan produk yang dihasilkan. Peningkatan produksi berarti akan memperluas usaha melalui peningkatan modal usaha atau peningkatan investasi, dan peningkatan investasi akan membuka kesempatan kerja baru yang pada akhirnya akan mengurangi pengangguran. Perluasan kesempatan kerja akibat pembebanan tarif impor akan sekaligus peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibidang teknologi yang berkaitan dengan perkembangan industri tersebut
5. Penganekaragaman produksi (diversification/differentiated product)
Pembelian tarif akan komoditas impor yang dapat diharapkan dapat melindungi industri di dalam negeri sekaligus peningkatan teknologi dan kemampuan pengetahuan di bidang teknologi yang akan membuat perusahaan industri di dalam negeri suatu saat akan mencapai skala ekonomi (economies of scale). Jika suatu perusahaan industri mencapai skala ekonomi akan membuka kesempatan untuk menghasilkan berbagai jenis produksi (differentiated product) yang

permintaan pasarnya cukup besar, atau berbagai jenis produk yang direspon pasar sehingga akan berdampak terhadap peningkatan penghasilan perusahaan (Nopirin, 2007).

6. Kebijakan Anti dumping

Dumping merupakan kebijakan perdagangan di mana suatu negara sengaja untuk menetapkan harga produk di pasar luar negeri lebih rendah dari harga pasar di dalam negeri di mana komoditas tersebut dihasilkan dan bahkan lebih rendah dari harga keuntungan normal atau dibawah biaya produksi. Suatu negara yang permintaan komoditasnya di luar negeri lebih elastis dari pasar dalam negeri adalah sangat memungkinkan untuk melakukan kebijaksanaan dumping demi menguasai pasar dan membuat industri komoditas tersebut di luar negeri terpuakul karena tidak mampu bersaing. Apabila praktek dumping terus berjalan akan membuat industri di negara lain akan tutup.

Untuk melindungi industri di dalam negeri dari praktik dumping adalah dengan melakukan anti dumping yaitu kebijakan tarif impor, di mana negara menetapkan tarif yang sangat tinggi atas komoditas yang berasal dari negara yang melaksanakan dumping atas komoditas eksportnya. Dengan diterapkannya anti dumping melalui tarif yang sangat tinggi terhadap komoditas impor maka harga komoditas impor menjadi lebih tinggi dari harga komoditas produksi domestic, dan pada akhirnya pihak konsumen dalam negeri memilih komoditas produksi dalam negeri dan tidak memilih komoditas impor yang harganya cukup tinggi (Heeler, 1973).

4.5 Tarif Nominal dan Tarif Proteksi Efektif

4.5.1 Tarif Nominal

Tarif nominal adalah persentase besarnya tarif yang dikenakan atas suatu komoditas tertentu yang tertera di dalam Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMBI), berdasarkan ketentuan Harmonized system (HS) dengan penggolongan komoditas dengan 9 digit (***) (***) (***) (Hady, 2009). System digit dalam penggolongan komoditas dapat mempermudah maupun dapat memperlancar arus perdagangan internasional karena sudah diatur didalamnya kesatuan kode komoditas untuk semua negara terutama Negara yang termasuk anggota WCO (World Customs Organization)

4.5.2 Tarif Proteksi Efektif (TPE)

Pembebanan tarif terhadap impor bahan mentah akan menyebabkan kenaikan ongkos produksi namun akan menyebabkan naiknya nilai tambah industri di dalam negeri. Pembebanan tarif impor untuk bahan mentah lebih rendah dari tarif untuk komoditas setengah jadi dan dengan tarif untuk komoditas jadi. Suatu negara sering melakukan impor bahan mentah dengan pajak yang sangat rendah dan bahkan sering pembebasan pajak. Pembebasan pajak ini dilakukan karena bahan mentah tersebut mendorong kegiatan produksi di dalam negeri (Salvatore, 2014)

Tingkat proteksi efektif dihitung pada nilai tambah dalam negeri atau pemroses nya melebihi tingkat tarif nominal yang dihitung nilai komoditas jadi. Jadi nilai tambah di dalam negeri (domestic value added) sama dengan harga komoditas jadi dikurangi biaya bahan baku impor yang digunakan untuk produksi.

Tarif proteksi efektif (TPE) (Effective Rate of Protection, ERP), yaitu kenaikan nilai tambah fabrikasi (Value Added Manufacturing =VAM) yang terjadi karena perbedaan antara prosentase tarif nominal untuk komoditas jadi atau CBU (Completely Built-up) dengan tarif nominal untuk bahan baku / komponen input impornya atau CKD (Completely Knock Down) (Hady,2014).

Tarif proteksi efektif (TPE) dapat dihitung dengan rumus:

$$TPE = \frac{t_j - r_{ij} \cdot t_n}{1 - r_{ij}} = \Delta VAM \quad \dots \text{ (Salvatore, 2014)}$$

$$\Delta VAM = \frac{VAM II - VAM I}{VAM I} \quad \dots \text{ (Hady, 2009)}$$

Keterangan:

t_j = Tarif/bea masuk untuk komoditas jadi (CBU atau Completely Built Up)

t_n = Tarif bea masuk untuk bahan baku atau komponen input impor (CKD atau *Completely Knock Down*)

r_{ij} = Bagian atau prosentase komponen bahan baku impor (rasio dari bahan baku impor dengan harga komoditas jadi saat tidak ada tarif).

ΔVAM = *Value Added Manufacturing* (nilai tambah fabrikasi)

Contoh:

Dengan anggapan harga komoditas X adalah \$ 100 dan merupakan bahan baku industri di dalam negeri untuk menghasilkan komoditas Z. Harga komoditas Z dalam situasi perdagangan bebas \$ 120. Tarif nominal untuk setiap komoditas Z yang diimpor adalah 10 persen. Harga komoditas Z bagi konsumen di dalam negeri menjadi \$132 yang terdiri dari harga impor komoditas X \$100, nilai tambah \$20 dan tarif \$12. Tarif efektif adalah dihitung dari nilai tambah di dalam negeri yaitu: $\$12/\$20 = \$60$

Berdasarkan uraian di atas maka $t_j = 0,1$ atau 10 %; $r_{ij} = \$100/\$120 = 0,833$; $t_n = 0$, maka tarif proteksi efektif (TPE) dapat dihitung:

$$TPE = \frac{t_j - r_{ij} \cdot t_n}{1 - r_{ij}}$$

$$TPE = \frac{0,1 - 0,833 \cdot (0)}{1 - 0,833}$$

$$TPE = \frac{0,1}{1 - 0,833} = \frac{0,1}{0,166} = 0,60$$

TPE = 0,60 atau 60 persen.

Jika tarif nominal sebesar 5 persen dikenakan pada bahan baku impor atau $t_{ij} = 0,05$, maka besar tarif proteksi efektif (TPE) adalah:

$$TPE = \frac{0,1 - 0,833 \cdot (0,05)}{1 - 0,833}$$

$$TPE = \frac{0,1 - 0,04165}{0,166}$$

TPE = 0,35 atau 35 persen

Perhitungan tarif proteksi efektif di atas pada dasarnya akan sama dengan tingkat kenaikan value added manufacturing suatu sektor cabang industri. Contoh perhitungan disajikan sebagai berikut:

Pada keadaan awal dilakukan impor sepeda motor Honda baik dalam keadaan CBU maupun CKD tanpa pengenaan bea masuk. Hitungan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Impor motor Honda CBU:	\$ 10.000 (100%)
Impor motor Honda CKD (rij):	<u>\$6000 (60%)</u>
Value Added Manufacturing I:	\$4000 (40%)

Kemudian, untuk menaikkan VAM maka pemerintah mengenakan bea masuk sebagai berikut:

Untuk motor Honda CBU: 20% (tj)

Untuk motor Honda CKD: 5% (ti)

Dengan pengenaan bea masuk tersebut maka didapat perhitungan VAM II berikut:

Impor motor Honda CBU:		
USD 10.000 (1 + 20%) =		\$ 12000 (100%)
Impor motor Honda CKD:		
USD 6000 (1 + 5%) =		<u>\$ 6300 (62,5%)</u>
Value Added Manufacturing II=		\$ 5700 (47,5%)

Dari kedua perhitungan di atas dapat diketahui besarnya tingkat kenaikan Value Added Manufacturing sebagai berikut:

$$\Delta VAM = \frac{VAM II - VAM I}{VAM I}$$

$$\Delta VAM = \frac{5700 - 4000}{4000} = \frac{1700}{4000} = 42,5\%$$

Catatan: tj = Tarif bea masuk komoditas jadi (CBU).

ti = Tarif bea masuk komponen input impor (CKD).

a_{ij} = Prosentase komponen input impor (CKD/CBU).

Kenaikan VAM dalam suatu proses industrialisasi sangat penting karena VAM diartikan sebagai balas jasa dari faktor produksi yang digunakan dalam proses industrialisasi tersebut, berupa upah, gaji bagi tenaga kerja, bunga modal bagi modal, sewa atas bangunan dan tanah, royalty (fee) bagi teknologi, serta laba bagi pengusaha.

Bab 5

Nilai Pertukaran (Terms of Trade)

5.1 Pendahuluan

Hubungan impor dan ekspor adalah hubungan perdagangan antara satu negara dan negara lain. Ekspor dilakukan oleh satu negara karena harga yang diperoleh lebih tinggi untuk barang yang diekspor ke luar negeri. Impor dan ekspor tidak terlepas dari masalah harga dan keuntungan karena menyangkut permasalahan jual beli secara internasional. Jika harga ekspor lebih tinggi dari harga impor, dengan demikian negara tersebut dapat dikatakan berada dalam posisi yang baik dan sebaliknya, apabila harga barang ekspor lebih rendah dari barang impor maka hal ini sangat merugikan bagi negara tersebut. Kondisi tersebut memerlukan dasar pengukuran yang akurat yakni dasar tukar (term of trade) yaitu ukuran yang digunakan untuk mengukur status perdagangan luar negeri suatu negara.

Peningkatan nilai tukar (term of trade) suatu negara akan dipandang bermanfaat bagi negara itu sendiri, karena harga yang diterima suatu negara dari ekspor telah meningkat relatif terhadap harga yang dibayarkan untuk produk impor menurut Salvatore dalam (Puspasari and Darmawan, 2017).

5.2 Pengertian Terms of Trade

Term of trade merupakan ukuran statistik yang dapat menunjukkan nilai tukar komoditas lain antar kedua negara dalam hal harga dan kuantitas. Term of trade sangat dipengaruhi oleh perubahan harga barang ekspor maupun harga barang impor (Statistik, 2021). Karena perekonomian biasanya mengimpor dan mengekspor sejumlah besar komoditas, mengukur *Term of trade* membutuhkan penentuan indeks harga komoditas impor dan ekspor untuk membandingkan keduanya.

Apabila kenaikan harga komoditas ekspor > harga komoditas impor, maka indeks *term of trade* akan meningkat. Ini berarti ekspor dikurangi guna mengimbangi impor. Begitu pula sebaliknya, jika komoditas impor > komoditas ekspor, maka indeks *term of trade* akan menurun. Dalam artian komoditas ekspor lebih banyak guna mengimbangi impor. Misalnya, ketika harga minyak naik, maka *term of trade* negara pengekspor minyak akan meningkat, sedangkan negara yang mengimpor minyak akan turun. Rumus dalam menghitung term of trade yakni:

$$TOT = \frac{100 \times \text{rata-rata indeks harga ekspor}}{100 \times \text{rata-rata indeks harga impor}} \times 100$$

Jika term of trade < 100 %, maka arus modal keluar (pembelian barang impor) lebih banyak daripada pembelian. Pada saat yang sama, jika term of trade > 100 % itu berarti negara tersebut telah mengakumulasi modal (lebih banyak modal berasal dari ekspor).

5.3 Konsep Terms of Trade

Masalah *term of trade* inilah yang biasanya dihadapi negara berkembang dalam perdagangannya dengan negara maju. Seperti yang diketahui bahwa ekspor negara berkembang biasanya merupakan komoditas non primer tahan lama (seperti produk pertanian), sedangkan impor adalah produk industri tahan lama sehingga basis devisa negara berkembang terus menurun. Pada sub bab ini akan dijelaskan beberapa konsep dasar tukar (term of trade) antara lain:

5.3.1 Net Barter Term of Trade (NTT)

Konsep ini yang paling sering digunakan. NTT membandingkan indeks kuantitas ekspor (P_x) dengan indeks kuantitas impor (P_m). Peningkatan di NTT menunjukkan perbaikan term of trade di mana sejumlah ekspor dapat diperoleh dari impor yang besar melalui hubungan harga. Rumus NTT adalah:

$$NTT = \frac{P_x}{P_m} \times 100$$

Di mana:

NTT = Net Barter Term of Trade

P_x = Indeks harga ekspor

P_m = Index harga impor

100 = Indeks tahun dasar

Apabila $NTT > 100$ atau NTT meningkat, artinya perdagangan luar negeri mengalami perkembangan yang baik, karena dengan harga ekspor tertentu dapat diperoleh harga impor yang lebih besar. Dengan kata lain ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan peningkatan NTT suatu negara antara lain (Wau, 2020):

1. Harga ekspor naik sementara harga impor tetap tidak berubah
2. Harga ekspor tetap tetapi harga impor turun
3. Kenaikan harga ekspor lebih besar dari kenaikan harga impor
4. Penurunan harga ekspor lebih kecil dari penurunan harga impor.

Contoh Soal 1:

NTT- 2008 = 100 (tahun dasar)

P_x 2018 = 95 (angka Indeks)

P_m 2018 = 110 (angka indeks)

Dengan data tersebut maka dapat dirumuskan:

$$NTT - 2018 = \frac{95}{110} \times 100 = 86,36\%$$

Dari hasil perhitungan maka diketahui bahwa untuk periode 2008/2018 indeks harga ekspor (P_x) turun sebanyak 13,64 % jika dibandingkan harga impor (P_m)

5.3.2 Gross Barter Term of Trade (GTT)

GTT adalah perbandingan indeks volume ekspor dan indeks volume impor. Konsep lebih memberikan gambaran perubahan volume perdagangan dan bukan perubahan harga. Oleh karena itu, apabila konsep term of trade tidak diberikan, maka konsep NTT tidak ada artinya.

$$G = \frac{Q_x}{Q_m} \times 100$$

Diketahui:

G = Gross Barter Term of Trade (GTT)

Q_x = Indeks volume ekspor

Q_m = Indeks volume impor

100 = Indeks tahun dasar

Jika $GTT > 100$ atau total GTT meningkat, berarti perkembangan situasi perdagangan internasional suatu negara dikatakan kurang baik atau mengalami profit yang rendah, hal ini disebabkan karena diperlukannya ekspor dalam volume besar untuk memperoleh sejumlah impor. Pada saat neraca perdagangan seimbang menunjukkan nilai ekspor ($P_x \cdot Q_x$) sama dengan nilai impor ($P_m \cdot Q_m$) atau dapat dirumuskan menjadi:

$$P_x Q_x = P_m Q_m \rightarrow \frac{P_x}{P_m} = \frac{Q_m}{Q_x}$$

Artinya bahwa jika neraca perdagangan seimbang maka nilai $NTT = GTT$ dan jika neraca perdagangan yang tidak seimbang maka $NTT > GTT$ atau $NTT < GTT$ (Wau, 2020).

5.3.3 Income term of Trade (ITT)

Bagi negara berkembang (NSB) konsep ini sangat diperlukan karena mencerminkan kemampuan NSB dalam melakukan impor barang modal pembangunan dari hasil ekspornya. Kemampuan impor sebenarnya bergantung pada beberapa faktor (Wahab, 2013) antara lain:

1. Persediaan devisa dan persediaan emas
2. Persediaan yang dimiliki untuk melakukan ekspor
3. Kemampuan dalam memperoleh pinjaman.

Rumus:

$$I = N \times Q_x = \frac{P_x}{P_m} \times Q_x$$

Contoh Soal 2:

NTT– 2008 = 120 (tahun dasar)

Px 2018 = 95 (angka Indeks)

Pm 2018 = 110 (angka indeks)

Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung:

$$I = \frac{95}{110} \times 120 = 103,63$$

Artinya selama 2008/2018 meskipun perubahan ITT ini penting bagi NSB, namun penerimaan ekspor berdasarkan kapasitas impor pendapatan ekspor meningkat sebesar 3,63% karena hal ini sejalan dengan kemampuannya untuk mengimpor barang barang modal pembangunan.

5.3.4 Factor Term of Trade

Merupakan perbandingan antara indeks harga rata rata komoditas ekspor dengan indeks harga rata rata komoditas impor terkait produktivitas. Apabila faktor produktivitas di dalam memproduksi barang dipertimbangkan dalam penghitungan dasar tukar maka konsep ini dinamakan Factorial term of trade yang dapat dibedakan menjadi 2 yakni:

1. Single Factor Term of Trade (STT)

Merupakan gambaran perubahan produktivitas peralatan industri diekspor. Perbandingan produksi ini disebabkan oleh kerugian teknologi dan ilmiah secara keseluruhan. Hal ini dapat membuat produksi barang ekspor yang lebih efisien.

$$S = N \times Z_x = \frac{P_x}{P_m} \times Z_x$$

Diketahui:

Z_x = Produktivitas barang ekspor

S = Single factorial Term Of Term

$\frac{P_x}{P_m}$ = rata rata indeks harga barang impor dan ekspor

2. Double Factor Terms of Trade (DTT)

$$D = \frac{P_x}{P_m} \times \frac{Z_x}{Z_m}$$

Diketahui:

Z_x = Produktivitas barang ekspor

Z_m = Produktivitas barang impor

D = Double Factorial Term of Trade

$\frac{P_x}{P_m}$ = rata rata indeks harga barang impor dan ekspor

Dalam praktiknya konsep Konsep *factor term of trade sulit* diterapkan karena sulit untuk dihitung, namun konsep ini mampu memberikan pemahaman bahwa suatu negara harus memperhatikan jenis dan heterogenitas faktor produksi seperti negara (Wau, 2020) sehingga konsep ini sering disebut sebagai Elastisitas produk. Hal ini disebabkan karena pada rumus *single factorial term of trade*, hanya mengaitkan rasio impor dan ekspor dengan produktivitas ekspor atau produktivitas dalam negeri, bukan dengan produktivitas luar negeri. Kemudian, dalam rumus *double factorial term of trade* selain sektor dalam negeri juga termasuk produktivitas impor atau sektor luar negeri.

5.4 Faktor Faktor yang Memengaruhi *Term of Trade*

Term of trade berfluktuasi dengan perubahan harga produk impor dan ekspor, umumnya bergantung pada kecenderungan tingkat inflasi dalam dan luar negeri. Selain itu nilai tukar (kurs mata uang) juga memengaruhi *term of trade* karena dalam melakukan perdagangan secara internasional melibatkan dua mata uang sebagai alat transaksi pembayaran, dengan demikian harga sangat tergantung pada daya beli (nilai tukar) dari masing masing mata uang tersebut.

Faktor yang memengaruhi *term of trade* (Cerdasco.com, 2020):

1. Nilai tukar (kurs mata uang)

Dengan adanya depresiasi mata uang membuat barang lebih murah bagi konsumen luar negeri. Hal ini disebabkan, mata uang luar negeri memiliki daya beli yang lebih kuat terhadap mata uang lokal. Pada bagian lain, depresiasi memperlihatkan lemahnya daya beli mata uang lokal sehingga barang impor menjadi mahal. Oleh karena itu, depresiasi menyebabkan penurunan *term of trade*. Sebaliknya, apresiasi mata uang lokal menyebabkan harga barang impor lebih murah bagi pembeli dalam negeri.

Pada saat yang sama, produk dalam negeri semakin mahal bagi pembeli luar negeri. Oleh karena itu, jika nilai tukar menguat maka *term of trade* cenderung meningkat. Sistem pertukaran internasional dapat dilakukan dengan 2 cara (Goestjahjanti, 2016):

a. Nilai Tukar tetap

Nilai tukar ini membawa kestabilan dan prediktabilitas karena harga mata uang telah ditetapkan pada tingkat tertentu. Keunggulannya adalah perusahaan internasional dapat menjalankan aktivitas bisnis tanpa mengkhawatirkan nilai mata uang di masa mendatang. Oleh karena itu, pekerjaan manajer keuangan menjadi lebih mudah.

Kelemahannya adalah pemerintah dapat dengan tiba tiba mengubah nilai mata uang. Meskipun dalam sistem ini, perusahaan internasional tidak menanggung risiko perubahan

nilai tukar, namun tetap menghadapi risiko pemerintah menyesuaikan nilai tukar (Madura, 2006).

b. Nilai Tukar fleksibel (mengambang)

Sistemnya lebih fleksibel karena dapat menampung transaksi mata uang yang sangat besar. Keunggulannya, situasi ekonomi suatu negara akan lebih terlindungi oleh situasi ekonomi di negara/wilayah lain dan bank sentral tidak perlu selalu menjaga nilai tukar dalam suatu kisaran tertentu. Oleh karena itu, tidak diperlukan intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian (Madura, 2006).

2. Kualitas dan Kuantitas produk

Produk yang memiliki kualitas baik dan peralatan berat serta mesin industri memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan produk mentah. Asumsikan bahwa perekonomian dalam negeri bergantung ekspor barang tersebut ke luar negeri. Disini, perekonomian dalam negeri bergantung pada impor produk primer seperti bahan baku. Dalam hal ini, term of trade harus melebihi 100 %.

3. Tingkat Inflasi

Inflasi yang tinggi biasanya ditandai dengan kenaikan harga barang/jasa dalam perekonomian suatu negara dan hal ini juga berdampak produk ekspor. Oleh karena itu, ketika tingkat inflasi luar negeri lebih rendah daripada dalam negeri maka term of trade harus > 100 % (paling tidak untuk sementara waktu). Sebaliknya, jika tingkat inflasi dalam negeri lebih rendah daripada luar negeri maka harga barang impor memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan harga barang ekspor. Inilah yang menyebabkan perdagangan menurun.

Apabila inflasi meningkat akibat kenaikan harga, maka akan dibarengi dengan kenaikan biaya produksi akibat peningkatan gaji/upah pekerja dan/atau peningkatan harga bahan baku industri sehingga mengakibatkan penurunan produksi sehingga mengurangi

jumlah ekspor dan meningkatkan jumlah impor (Silitonga, Ishak and Mukhlis, 2017)

5.5 Dampak Term of Trade Terhadap Perekonomian

Perdagangan internasional sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan impor dan ekspor. Nilai tukar (kurs mata uang) dan tingkat inflasi juga memengaruhi arah perubahan permintaan barang/jasa dalam perdagangan internasional, dan karena itu juga dapat memengaruhi perekonomian suatu negara. Jika jumlah barang/jasa diekspor ke luar negeri semakin meningkat, maka negara pengekspor perlu memproduksi lebih banyak barang/jasa di dalam negeri, sehingga membutuhkan arus modal yang lebih besar. Dengan kata lain, hal ini akan meningkatkan output baik barang/jasa yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Selain itu juga term of trade sangat tergantung pada tingkat kurs. Dalam artian jika nilai tukar terdepresiasi maka barang impor akan meningkatkan produksi barang impor ke luar negeri, sehingga menurunkan produktivitas dalam negeri dan menurunkan perekonomian dalam negeri (Astuti and Ayuningtyas, 2018). Pada saat yang sama, perdagangan yang lesu menyebabkan standar hidup mengalami penurunan. Hal ini biasanya sering dialami oleh negara yang sedang berkembang, karena negara tersebut melakukan ekspor dan impor barang manufaktur. Tentu saja, barang manufaktur lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga komoditas karena menambah nilai.

Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya impor bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung produksi manufaktur juga dapat mengindikasikan bahwa derajat keterkaitan antar sektor manufaktur masih rendah. Dilihat dari struktur impor bahan baku dan bahan penolong di Indonesia, komponen terbesar adalah pengolahan dan penyediaan bahan yang digunakan untuk industri yang rata-rata berskala > 40 % dari total volume impor bahan baku dan bahan penolong, diikuti oleh bahan bakar sulingan, pelumas dan suku cadang dan peralatan kargo material. Dalam struktur ini, dibandingkan dengan bahan baku, industri manufaktur memiliki keunggulan dalam mengimpor bahan

olahan untuk diolah, dan bahan bakunya harus merupakan input dari output sektor yang lebih rendah (Anindhita, 2016).

Oleh karena itu, untuk membayar seluruh biaya impor, negara tersebut harus menjual barang dalam jumlah besar, jika harga barang di pasar dunia turun tekanannya akan meningkat. Menghadapi term of trade yang rendah, negara tersebut perlu mengumpulkan banyak uang untuk membayar impor. Negara tersebut harus meningkatkan impor secara substansial dengan tujuan untuk menghindari penurunan nilai tukar lebih lanjut (Cerdasco.com, 2020).

Bab 6

Liberalisasi Perdagangan

6.1 Pendahuluan

Depresi dunia yang terjadi pada tahun 1930 menyebabkan banyak Negara-negara khususnya di Eropa melakukan proteksi. Masing-masing Negara berjuang untuk mengurangi pengaruh negatif akibat memburuknya perkembangan ekonomi dunia dengan cara mengurangi ketergantungan dengan luar negeri melalui tindakan yang bersifat protektif. Amerika Serikat, salah satu Negara yang paling berpengaruh mengenakan tarif terhadap barang ekspor-impornya. Tindakan ini diikuti oleh Negara lain sehingga perdagangan dunia menjadi tidak lagi bebas. Baru beberapa tahun kemudian Amerika Serikat tidak mengenakan tarif terhadap ekspor dan impor dengan Reciprocal Agreement Act, yang memperkenankan Presiden mengadakan perundingan tentang penurunan tarif.

Setelah berakhir Perang Dunia II, usaha ke Liberalisasi Perdagangan menjadi fokus Negara seperti Amerika Serikat, dan Negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Perancis, dan lain-lain. Sejak tahun 1940-an, Esensi dari liberalisasi perdagangan masih sering dipahami secara kurang proporsional oleh khalayak umum. Perdagangan bebas sering dipersepsikan sebagai suatu sistem perdagangan yang bebas, seperti tarif nol atau rendah, serta peniadaan berbagai instrumen yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan. Padahal berdasarkan sejarahnya, jiwa dari liberalisasi perdagangan adalah suatu tatanan

perdagangan yang lebih efisien dan adil (fair). Untuk mencapai hal itu, distorsi perdagangan memang harus diturunkan, tetapi penurunan tersebut hanya sampai tahap yang disepakati, bukan pada titik yang serendah-rendahnya.

Dewasa ini kita berada dalam kegiatan ekonomi antarbangsa yang bergerak menuju saling ketergantungan ekonomi. Suatu ekonomi global jangan dianggap hanya sekedar perdagangan yang semakin besar di antara Negara-negara di dunia, karena yang tengah terjadi adalah suatu ekonomi dunia yang bergerak ke arah ekonomi tunggal, satu ekonomi dan satu pasar. Maka dari itu perlu kita memahami lebih dalam liberalisasi perdagangan (Ekananda, 2014).

6.2 Liberalisasi Perdagangan

Menurut sejumlah ahli jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang berubah seperti sekarang ini maka perdagangan harus memainkan peranan vital. Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Intinya manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.

Menurut Feridhanusetyawan dan Pangestu (2003), Indonesia telah menerapkan liberalisasi perdagangan sejak tahun 1980 yang ditandai dengan ikut sertanya Indonesia dalam Asia Free Trade Area (AFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan World Trade Organization (WTO). Liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas (free trade) merupakan kondisi di mana suatu negara melakukan perdagangan antarnegara tanpa hambatan apapun. Proses menuju kondisi perdagangan bebas inilah yang disebut dengan liberalisasi perdagangan (Arifin, dkk, 2007).

Terjadinya liberalisasi perdagangan dilatarbelakangi oleh teori keunggulan komparatif dan teori *endowments*. Teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo menyatakan bahwa dalam kondisi perdagangan bebas, jika ada dua Negara yang melakukan perdagangan dan salah satu Negara kurang efisien dalam memproduksi barang, maka masih dimungkinkan kedua Negara tersebut melakukan perdagangan (Salvatore, 2004).

Sedangkan teori factor endowments yang dikemukakan oleh Heckscher – Ohlin menyatakan bahwa adanya perbedaan endowment menyebabkan suatu Negara melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan *opportunity cost* suatu produk antara satu Negara dengan Negara lain. Negara yang memiliki banyak faktor produksi dan biaya produksi yang murah akan lebih banyak memproduksi dan mengekspor ke negara lain. Sebaliknya, Negara yang memiliki sedikit faktor produksi dan biaya produksi yang mahal akan lebih banyak mengimpor dari negara lain (Salvatore, 2004).

Yang dimaksud dengan kebijakan liberalisasi dalam hal ini adalah suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal dan terbuka. Perubahan ke arah yang lebih netral tersebut meliputi penyamaan intensif di antara sektor-sektor perdagangan. Suatu kebijakan dianggap sebagai kebijakan liberalisasi apabila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui pengurangan hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi impor.

Dilihat secara historis, diketahui bahwa liberalisasi berakar dari suatu paham yang berkembang pada abad XIX yang sering disebut sebagai liberalisasi. Salah satu paham yang sangat memengaruhi liberalisasi perdagangan yaitu adalah paham yang dipelopori oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “The Wealth Of Nation”, yang menerangkan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin membaik, apabila perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas serta intervensi pemerintah dikurangi seminimal mungkin, dengan perdagangan bebas sumber daya dapat digunakan secara efisien, sehingga kesejahteraan dapat dicapai secara optimal.

Teori lainnya berasal dari David Ricardo dengan prinsip “Comparative Advantage”, yang menjelaskan “dalam suatu sistem perdagangan bebas, setiap negara secara alamiah mengkhususkan modal dan tenaga kerjanya pada pekerjaan-pekerjaan yang paling menguntungkan baginya. Teori Ricardo pada dasarnya bermaksud untuk menyampaikan bahwa dalam suatu perdagangan bebas, sumber-sumber produktivitas negara pesertanya harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan dengan demikian seluruh negara peserta akan meraih keuntungan.

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang telah diuraikan diatas disebut dengan “Teori Keunggulan Absolut” teori yang mendasarkan pada asumsi

bahwa setiap negara mempunyai keunggulan absolut yang nyata terhadap mitra dagangnya. Dalam teori ini negara yang mempunyai keunggulan utama terhadap mitra dagangnya dalam memproduksi suatu komoditi tertentu, akan mengeksport komoditi yang bersangkutan tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolute (Absolute Disadvantage). Begitu pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, antara Negara-negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya, dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya akan dapat digunakan secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan yang dicapai dapat lebih optimal. Namun dalam kenyataannya yang justru terjadi di Eropa adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial antara pengusaha yang kaya raya dengan kaum buruh dan petani miskin.

Liberalisasi perdagangan adalah fenomena dunia. Hampir seluruh negara sebagai anggota masyarakat internasional masuk dalam blok-blok perdagangan bebas ataupun menjalin hubungan bilateral untuk menjalankan perjanjian perdagangan bebas. Blok-blok perdagangan bebas (free trade area – FTA) adalah kesepakatan liberalisasi perdagangan yang dibentuk oleh beberapa negara. Dorongan utama adanya hubungan bilateral maupun blok-blok perdagangan bebas adalah pembebasan tarif perdagangan antar negara-negara yang terlibat di dalam kerjasama tersebut.

Kerjasama FTA adalah embrio dari terbentuknya integrasi ekonomi antar negara-negara yang terlibat. Beberapa FTA yang telah berjalan yaitu North American Free Trade Area (NAFTA), African Free Trade Zone (AFTZ) dan South Asia Free Trade Agreement (SAFTA). Uni Eropa adalah salah satu contoh evolusi dari PTA menuju FTA dan kemudian integrasi ekonomi terjadi.

Liberalisasi perdagangan dapat terwujud di dalam tiga bentuk kerjasama internasional. Pertama, adalah pada perjanjian bilateral, yaitu perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh dua negara, Kedua adalah kerjasama regional, yaitu negara-negara dalam suatu kelompok negara yang dibentuk dari persamaan geografi, bahasa, sejarah dan lainnya. Ketiga adalah perjanjian perdagangan multilateral, yaitu perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh banyak negara.

Ada tiga pendorong utama yang menjadi alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional dan selanjutnya membentuk kerjasama perdagangan bebas, yaitu:

1. Adanya keuntungan dari pertukaran antar negara yang terlibat.

2. Fokus untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif suatu negara.
3. Ekspektasi adanya transfer teknologi dengan masuknya produk dari negara dengan teknologi yang lebih maju.

6.3 Globalisasi Ekonomi, Perdagangan Bebas, dan Blok Perdagangan

Pada saat ini istilah Globalisasi sangat populer, globalisasi terjadi pada kegiatan keuangan, produksi, investasi, dan perdagangan yang kemudian memengaruhi hubungan ekonomi antar Negara. Globalisasi berasal dari kata “global” yang berarti keseluruhan. Globalisasi berarti proses masuknya sesuatu ke lingkup dunia. Sifat perubahan yang menyeluruh menjadi ciri khas dari globalisasi. Globalisasi merupakan kondisi objektif yang harus dihadapi sesuai dengan keragaman yang ada di masyarakat. Globalisasi adalah sebuah proses di mana perekonomian dunia menjadi lebih terintegrasi menuju sebuah perekonomian global dan meningkatkan pembuatan kebijakan ekonomi global (Ekananda, 2014).

Bisnis internasional oleh perusahaan-perusahaan global / mendunia seperti Multinational Corporation / Transnational Corporation berupaya untuk:

1. Memiliki kehadiran di pasar seluruh dunia,
2. Operasinya secara standar di seluruh dunia,
3. Menyatunya operasi-operasinya di seluruh dunia.

Proses globalisasi telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antar negara dan bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia, hingga “batas antar negara dalam praktek dunia usaha / bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi”. Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional.

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu:

1. Komunikasi dan transportasi yang semakin canggih
2. Lalu lintas devisa yang semakin bebas

3. Ekonomi negara-negara yang semakin terbuka
4. Penggunaan secara penuh keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara.
5. Metode produksi dan perakitan dengan organisasi manajemen yang semakin efisien
6. Semakin pesatnya pertumbuhan / perkembangan perusahaan multinasional di hampir seluruh dunia.

Terdapat 2 (dua) faktor utama penyebab terjadinya globalisasi, yaitu:

1. Adanya dorongan investasi yang dimulai dari Marshall Plan.
2. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) merupakan penarik utama di sisi permintaan (demand pull)

Kecenderungan yang mendukung globalisasi dewasa ini adalah:

1. Aliran dana dan modal semakin mudah menembus batas negara
2. Investor asing semakin giat membeli dan menjual aset finansial dan riil.
3. Institusi keuangan asing semakin gencar menembus pusat keuangan dunia dan regional
4. Banyak perusahaan mencatatkan dan menawarkan sahamnya di pasar modal internasional
5. Liberalisasi dan deregulasi sektor finansial.

Sedangkan dimensi globalisasi dapat dilihat dari apa yang terjadi di pasar global, antara lain:

1. Terjadinya pergeseran kekuatan ekonomi global memunculkan tiga mega markets ekonomi dunia, yaitu MEE, Amerika Utara, dan Asia Timur & Tenggara.
2. Globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyebarnya perusahaan transnasional (Transnational Corporation / TNC)

Persetujuan perdagangan bebas dan asosiasi yang ada seperti NAFTA (North American Free Trade Agreement), APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), AFTA (ASEAN Free Trade Association), EEC (European

Economic Community-European Free Trade Association) merupakan niat untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan bebas dan blok perdagangan bebas di antara kawasan-kawasan ekonomi. AFTA secara regional semua bangsa ASEAN (ASEAN didirikan 8 Agustus 1967) sepakat mengambil bagian dan mendirikan kawasan perdagangan bebas ASEAN yang ditempuh melalui mekanisme *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) dan ASEAN Preferential Tariff Arrangement (PTA). Semua negara ASEAN menurunkan tarif bea masuk (bebas bea masuk tahun 2010 untuk 6 negara dan 2015 untuk 4 negara) atau mengurangi restriksi non-tarif bagi sesama negara ASEAN khusus untuk produk yang masuk kesepakatan.

APEC didirikan tahun 1989 dengan tujuan pokok liberalisasi perdagangan dan investasi serta meningkatkan pemanfaatan SDM dan SDA untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Asia Pasifik. Untuk mencapai tujuan tersebut APEC telah menyusun agenda liberalisasi sehingga tahun 2010 liberalisasi perdagangan dan investasi di antara negara industri maju di kawasan Asia Pasifik dapat terwujud. NAFTA didirikan 12 Agustus 1992 oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko untuk menghapus hambatan-hambatan perdagangan, menciptakan persaingan yang wajar serta meningkatkan investasi antar negara anggota.

Globalisasi ekonomi mendorong adanya kebijakan liberalisme, di mana dalam kebijakan tersebut memicu terjadinya pasar bebas. Pasar bebas adalah pasar ideal, di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Misi utama pasar bebas adalah menciptakan iklim perdagangan internasional agar efisien dan produktif sehingga dunia bisnis dapat tumbuh dan berkembang.

Contoh: Pada tanggal 1 Januari 2010 telah mulai diberlakukan Free Trade Agreement – FTA (Perjanjian Perdagangan Bebas antara Negara-negara ASEAN). Hasil kesepakatan negara-negara Anggota ASEAN yaitu Bea Masuk pada produk manufaktur China ke ASEAN sebesar 0 – 5 %.

Bagi Indonesia, pasar bebas ASEAN dan China dirasakan merugikan bagi kalangan pengusaha lokal, industri lokal, dan sektor pertanian di dalam negeri. Penyebabnya adalah karena kurangnya persiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas ASEAN – China. Sementara negara China sudah jauh-jauh hari sebelumnya melakukan persiapan yang matang dalam melakukan penetrasi pasar internasional. Keadaan ini terbukti dengan membanjirnya produk-produknya buatan China dengan harga dan kualitas

yang lebih bersaing dibandingkan dengan produk yang sama hasil produksi dalam negeri.

Sistem perdagangan bebas, berarti setiap negara harus siap bersaing antara produk buatan sendiri dengan produk luar yang akan diimpor masuk ke dalam negeri tanpa hambatan perdagangan yang berarti. Blok perdagangan adalah sekelompok negara yang tergabung bersama melalui sebuah perjanjian perdagangan. Biasanya, ini melibatkan negara-negara di kawasan tertentu. Berikut contoh bentuk dari blok perdagangan, antara lain: (Sinaga, 2015).

AFTA

Semua negara-negara tergabung dalam kerjasama antarnegara se-ASEAN sepakat mengambil bagian dan mendirikan kawasan perdagangan bebas yang dikenal sebagai AFTA. Proses perwujudannya berlangsung selama 10 tahun. Untuk mengawasi, mengkoordinasikan, dan mengkaji pelaksanaan program menuju AFTA, dibentuk sebuah lembaga setingkat menteri. Isi persetujuan berupa rangka dalam meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN (Framework Agreement on Exchanging ASEAN Economic Cooperation – FAEAEC) yang ditandatangani oleh presiden dan perdana menteri setiap negara yang tergabung dalam ASEAN pada bulan Januari 1992.

Persetujuan induk itu juga meliputi usaha peningkatan kerjasama yang mencakup sektor industri, mineral, dan energi, sektor keuangan dan perbankan, sektor pangan, pertanian, dan kehutanan, sektor transportasi dan komunikasi, serta kerjasama ekonomi subregional dan eksternal ASEAN. FAEAEC mengatur masalah lembaga pemantau pelaksanaan kerjasama intra ASEAN dan penyelesaian perselisihannya.

Belakangan ini, persyaratan sistem perdagangan bebas dunia Barat terasa memberatkan negara ASEAN dan di sisi lain, dunia Barat merasakan ASEAN menjadi pesaing tangguh di dunia, terutama di tahun 1980-an dan 1990-an. Bank Dunia kemudian menyebutnya sebagai macan-macanan ekonomi atau yang dikenal sebagai “Asia for Dragon”.

Bank Dunia menyatakan bahwa kemajuan ekonomi Asia Tenggara dengan cepat dapat menjadi ekonomi maju. Para pemimpin negara-negara Asia menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi yang sangat mengesankan itu berakar dalam nilai-nilai Asia yang sangat berbeda dengan nilai-nilai dunia barat. Ciri mereka yang berasaskan otoritas, hirarkis, dan komunitarian yang menekankan hak-hak kolektif, kesatuan, harmoni sosial, dan hormat kepada

otoritas pada pemimpin Asia Tenggara merupakan faktor yang mendorong perekonomian ke arah pertumbuhan ekonomi cepat. Dimulai oleh “Mazhab Singapura” (Lee Kuan Yew, Kishore Mabubani, dan Tommy Koh), wacana tentang nilai-nilai Asia dengan cepat mendominasi intelegensi Malaysia, Indonesia, China, bahkan Jepang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Asia Timur. Mereka kemudian mengklaim bahwa nilai-nilai yang mereka anut adalah lebih tinggi khasiatnya daripada nilai-nilai Barat.

NAFTA (North American Free Trade Agreement)

NAFTA terbentuk pada tanggal 12 Agustus 1992, disetujui dan ditandatangani di Washington DC oleh wakil pemerintahan AS, Kanada, dan Meksiko. Pendirian NAFTA dimaksudkan untuk menghapus hambatan-hambatan perdagangan, menciptakan persaingan yang wajar, serta meningkatkan investasi antar negara anggota. Hal ini dijadikan dasar pengembangan kerjasama regional dan multilateral di masa mendatang.

Ketentuan-ketentuan dalam NAFTA tidak bertentangan dengan aturan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), kesepakatan perdagangan multilateral antar penandatanganan (anggota) yang dewasa ini terdiri dari 108 negara. GATT/WTO tidak melarang pendirian kawasan perdagangan bebas antarnegara, karena kesepakatan tersebut untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang merupakan prinsip yang mendasari perjuangan GATT/WTO, meskipun hanya berlaku bagi negara-negara anggota.

Kesepakatan pendirian NAFTA meliputi program penghapusan tarif bea masuk perdagangan komoditi pertanian, barang-barang otomotif, tekstil bahan pakaian jadi, energi dan petrokimia, serta jasa-jasa. Ketentuan-ketentuan mengenai anti dumping, countervailing, angkutan darat, investasi, hak cipta, dan prosedur penyelesaian sengketa.

Dalam hal tarif bea masuk, NAFTA menentukan untuk kebanyakan yang memenuhi ketentuan sebagai barang asal Amerika Utara dilakukan penghapusan secara progresif dalam waktu 15 tahun atau 10 tahun. Sedangkan untuk barang-barang yang dianggap sensitif, penghapusannya akan dilakukan dalam waktu 15 tahun. Barang-barang yang sensitif ini misalnya sepatu kanvas, keramik, tas, dan berbagai produk pertanian seperti kacang tanah, orange juice, concentrate, asparagus, dan sebagainya.

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)

GATT yang didirikan tahun 1948 adalah perjanjian internasional multilateral yang mengatur perdagangan internasional sesudah perang dunia ke II. GATT lahir setelah negara industri di Barat mengalami banyak proteksionisme dan semangat autarki yang berkembang setelah depresi besar tahun 1930-an. Pada masa tersebut, setiap negara membatasi perdagangan impor atau ekspor. Alasannya, ialah proteksi untuk produsen, proteksi untuk konsumen, masyarakat, pembayaran, pertahanan, dan keamanan.

Negara berkembang, misalnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN akan cenderung melindungi industrinya yang masih pemula (*infant industry*).

Tujuan GATT adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya perdagangan dunia yang bebas, tanpa diskriminasi.
2. Meningkatkan disiplin di antara negara-negara yang menjadi anggota GATT supaya tidak mengambil langkah yang merugikan anggota yang lain.
3. Mencegah terjadinya perang dagang yang akan merugikan semua pihak.

MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) atau EEC (European Economic Community)

MEE diresmikan pada tanggal 17 Februari 1992 di Maastricht, Belanda. Disepakati secara lebih nyata penyatuan Eropa dalam bidang ekonomi, moneter, dan politik. Secara kesepakatan Maastricht, boleh dikatakan tidak ada lagi pembatasan lalu lintas barang maupun orang di antara negara-negara Uni Eropa. Setiap orang boleh bekerja di mana saja yang mereka inginkan. Barang-barang produksi juga bebas diperdagangkan antara negara-negara anggota Uni Eropa.

Dalam perjanjian Roma disepakati mendirikan *European Economic Community* (EEC) atau MEE yang mengharuskan para anggota memenuhi persyaratan berikut:

1. Menurunkan tarif kuota, dan hambatan lain pada perdagangan intra negara-negara eropa.
2. Mematuhi tarif eksternal umum dari negara-negara di luar MEE
3. Menjalankan aliran faktor produksi dalam MEE.

4. Mengharmoniskan kebijakan pajak dan moneter serta kebijakan keamanan sosial.
5. Menentukan kebijakan umum untuk pertanian, transportasi, dan persaingan industri.

Bab 7

Perusahaan Multinasional

7.1 Pendahuluan

Perusahaan multinasional atau yang sering disingkat MNC yang berarti *Multinational Company*. Perusahaan seperti ini mengacu pada sebuah perusahaan besar yang umumnya ada di negara maju. Perusahaan besar ini juga memiliki anak perusahaan yang mungkin saja tersebar di beberapa negara lain khususnya di wilayah negara berkembang. Jadi perusahaan seperti ini umumnya memiliki usaha yang bersifat mendunia karena usaha atau bisnisnya tersebut dijalankan di berbagai negara. Bahkan perusahaan semacam ini biasanya memiliki pengaruh yang cukup kuat pada kondisi politik secara global.

Perusahaan multinasional adalah organisasi bisnis yang beraktivitas di lebih dari dua negara. Perusahaan multinasional ini biasanya melakukan investasi langsung luar negeri, dan dapat beroperasi di lebih dari 100 negara dengan mempekerjakan ribuan orang di luar negara asalnya. Ekspansi dari perusahaan multinasional dimulai setelah Perang Dunia Ke II. Saat itu perusahaan-perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat mulai melakukan ekspansi bisnisnya dengan membuka pabrik dan kegiatan operasionalnya di negara-negara berkembang, setelah itu diikuti oleh perusahaan-perusahaan Inggris dan kemudian Perusahaan multinasional dari Jepang. Pengelolaan perusahaan multinasional menjadi unik dikarenakan perusahaan ini berbeda dalam

kegiatan operasionalnya, dimulai dari pengelolaan keuangan. Perusahaan ini melakukan pengelolaan keuangan dengan menggunakan paradigma internasional, dengan transaksi internasional, di mana ada perbedaan mata uang yang biasanya menimbulkan permasalahan. Dari sisi sumber daya manusia, perusahaan multinasional mempekerjakan pegawai dari berbagai macam negara, suku dan bangsa, hal ini menjadi tantangan tersendiri, ketika perusahaan tersebut harus menanamkan nilai-nilai perusahaan kepada para pegawainya, karena latar belakang yang majemuk (Kartawinata, Budi Rustandi. Wardhana, 2014).

7.2 Pengertian dan Ciri Ciri Perusahaan Multinasional

Perusahaan multinasional atau disebut juga *Multinational Corporations* (MNCs) adalah perusahaan besar, biasanya berlokasi di negara maju dan mempunyai anak perusahaan di negara lain (biasanya di negara berkembang). Karena perusahaan beroperasi di banyak negara / kawasan, sifat bisnisnya adalah global. Dengan cara ini dapat memiliki pengaruh yang kuat pada kondisi politik global. Umumnya, perusahaan-perusahaan ini adalah perseroan terbatas di setiap negara. Namun, saham tersebut dikuasai oleh perusahaan induk. Saham perusahaan tidak diperdagangkan di pasar saham lokal. Sebagai hasil dari model kepemilikan ini, kebijakan operasional perusahaan secara keseluruhan bergantung pada kebijakan perusahaan induk, dan beberapa manajemen perusahaan harus berasal dari perusahaan induk.

Sejak akhir Perang Dunia II, perusahaan multinasional memainkan peran yang semakin penting di negara ini. Awalnya, perusahaan multinasional dari Amerika Serikat mulai beroperasi di Amerika Serikat, Jepang, negara-negara Eropa, serta Australia dan Selandia Baru. Sejak tahun 1960-an, perusahaan multinasional sebagai entitas korporat tidak hanya dimiliki oleh Amerika Serikat, tetapi juga dimiliki oleh Jepang, Eropa dan beberapa negara maju lainnya, dan mulai melakukan bisnis di negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Perkembangan tersebut merupakan salah satu faktor yang menciptakan era globalisasi dalam kegiatan perekonomian dunia (Gintoe, 2019).

Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan multinasional ketika memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu.

Berikut adalah ciri-ciri perusahaan multinasional (Murdani Drajat Andika, 2020):

1. Memiliki lingkup kegiatan income generating (perolehan pendapatan) yang melampaui batas- batas Negara.
2. Perdagangan yang terjadi dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara.
3. Memiliki kontrol terhadap teknologi dan modal secara ketat.
4. Sistem manajemen dan distribusi dikembangkan melintasi batas-batas negara, terutama dalam sistem modal ventura, lisensi dan franchise.
5. Memiliki visi dan strategi produksi barang yang berbasis global.
6. Cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu yang bersifat footloose industry (industri yang tidak terikat lokasi), umumnya manufaktur.
7. Memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara
8. Biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi
9. Menempatkan afiliasi di negara-negara maju

Sementara menurut Siregar (2020) perusahaan multinasional secara garis besar memiliki ciri sebagaimana berikut ini, yaitu:

1. Membentuk cabang-cabang di luar negeri
2. Visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global (mendunia), jadi perusahaan tersebut membuat atau menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara.
3. Lingkup kegiatan income generating (perolehan pendapatan) perusahaan multinasional melampaui batas-batas negara.
4. Lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur.
5. Perdagangan dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi di dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antarnegara.
6. Menempatkan cabang pada negara-negara maju

7. Kontrol terhadap pemakaian teknologi dan modal sangat diutamakan mengingat kedua faktor tersebut merupakan keuntungan kompetitif perusahaan multinasional
8. Pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem modal ventura, lisensi, franchise.

Pada prinsipnya, perusahaan multinasional memang memiliki karakteristik yang cukup kompleks. Karakteristik perusahaan multinasional dapat ditinjau dari perspektif ekonomis, organisasional dan motivasional. Sedangkan dalam pemahaman secara ekonomis, karakteristik perusahaan multinasional ini banyak ditinjau dari segi ukuran, penyebaran geografis dan tingkat keterlibatannya di luar negeri. Melihat dari ciri-ciri perusahaan multinasional ini, maka harus bisa membedakannya dengan bentuk perusahaan lain, yang juga seolah memiliki kegiatan di luar negeri.

Perlu diketahui bahwa perusahaan multinasional pada dasarnya berbeda dengan bentuk-bentuk perusahaan berikut:

1. Perusahaan besar domestik yang sedikit menempatkan investasinya di luar negeri.
2. Perusahaan domestik yang mungkin melakukan investasi di luar negeri, hanya saja investasinya dalam unit ekonomi yang lebih kecil.
3. Perusahaan besar yang melakukan investasi di luar negeri, akan tetapi hanya di satu atau dua negara saja dan dalam skala kecil.
4. Investor besar dengan portofolio yang tidak berusaha mengontrol investasinya serta mengambil risiko kewiraswastaan.

Menurut Gintoe (2019) bentuk perusahaan multinasional terdiri atas beberapa bagian yang sangat diperlukan dalam menentukan dan membedakan hubungan hukum di antara bagian-bagian tersebut berkaitan dengan kegiatan perusahaan multinasional. Bagian-bagian dari perusahaan multinasional yang melaksanakan kegiatan perusahaannya yaitu:

1. Induk perusahaan (parent company);
Induk perusahaan adalah suatu perusahaan memiliki dan mengawasi penanaman modal asing secara langsung, biasanya memiliki anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated di dua negara atau lebih negara tempat modal ditanam. Induk perusahaan

merupakan pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukan tujuan-tujuan dan pengawasan pengawasan berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu perusahaan. Keputusan-keputusan utama yang dibuat oleh induk perusahaan dapat berupa pendirian anak atau cabang perusahaan atau akuisisi perusahaan, penentuan negara yang akan dijadikan lokasi penanaman modal asing langsung, banyaknya produksi yang akan dibuat, produksi-produksi campuran yang dilakukan di antara anak perusahaan, komposisi transfer produksi antar anak perusahaan dan penentuan pasar nasional yang akan dilayani oleh anak-anak perusahaan.

2. Kantor cabang atau cabang perusahaan (branch atau branch office);
Kantor cabang atau cabang perusahaan adalah suatu kantor yang merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk perusahaan atau di luar negeri atau di negara tempat modal ditanam dan tidak berdiri sendiri atau mempunyai status perusahaan. Dari segi hukum cabang perusahaan atau kantor cabang ini hanya merupakan perpanjangan secara fisik dari induk perusahaan dan tidak mempunyai status hukum yang terpisah dari induk perusahaan.
3. Kantor pusat (the headquarters atau head office);
Kantor pusat adalah suatu kantor yang didirikan oleh suatu perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara penanam modal.
4. Anak perusahaan affiliate (daughter atau affiliated company);
Anak perusahaan affiliate atau daughter company adalah perusahaan holding dari penanaman modal di luar negeri, tanpa melihat bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau suatu subsidiary atau perusahaan gabungan atau associate, yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Pendiriannya sama dengan pendirian suatu perusahaan domestik di negara yang bersangkutan, biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas.

5. Anak perusahaan subsidiary;

Anak perusahaan adalah sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh sebuah perusahaan yang terpisah yang lebih tinggi (induk perusahaan). Perusahaan yang dikendalikan disebut sebagai perusahaan korporasi, atau perseroan terbatas,

7.3 Perusahaan Multinasional, Global, Internasional, dan Transnasional

Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas Negara. Bisnis luar negeri berarti operasi-operasi domestik di dalam sebuah Negara asing (Satyarini, 2001). Perusahaan domestik adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah saja tanpa melewati batas negara. Jenis perusahaan ini masih bersifat sederhana dan tidak kompleks karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitarnya saja mulai dari besar kecil kompensasi, budaya perusahaan, rekrutmen tenaga kerja, analisis pasar, dan lain sebagainya.

Perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas atau ekspansi produksi dan pemasaran produk baik barang maupun jasa ke luar negeri dari negara asalnya. Hal ini terkadang harus dilakukan oleh suatu perusahaan bisnis di kala pasar yang ada di dalam negeri sudah berada dalam tahap jenuh, sehingga sulit untuk dapat berkembang lebih besar lagi. Untuk memasuki pasar internasional perusahaan harus mampu beradaptasi di semua bidang dengan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Perusahaan internasional adalah perusahaan yang bergerak dalam penelitian dan pengembangan (R&D) untuk meningkatkan kualitas, efisiensi produksi, dan menciptakan produk baru.

Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik yang berdiri di negara yang berbeda-beda. Penyesuaian dengan budaya di tiap negara yang dimasuki adalah suatu keharusan untuk dapat bertahan dan sukses. Dengan mendirikan banyak unit produksi di negara lain diharapkan

dapat menghemat biaya ongkos produksi dan distribusi produk hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Perusahaan multinasional yang tersebar di negara / kawasan asalnya adalah perusahaan dengan struktur organisasi sendiri-sendiri. Oleh karena itu, setiap manajer memiliki keputusannya sendiri-sendiri, seperti menjawab peluang yang ada tanpa harus pergi ke kantor pusat.

Perusahaan global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Sistem partisipasi bisnis global digunakan karena sudah semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lainnya (globalisasi). Biasanya perusahaan global memiliki ciri distribusi sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Perusahaan global terpusat, yaitu perusahaan dengan kantor dan manajemen terpusat. Perusahaan mendapat untung dengan menggunakan sumber daya murah di negara lain.

7.4 Tujuan Perusahaan Multinasional

Suatu perusahaan menjadi perusahaan multinasional tentu karena memiliki tujuan tertentu. Secara umum, tujuan utama tentu karena pertimbangan adanya potensi keuntungan yang lebih tinggi dengan produksi dan kegiatannya di luar negeri. Sebab, semakin luas kegiatan dan pasar, potensi keuntungan yang bisa diperoleh bisa semakin tinggi pula.

Secara khusus, tujuan MNC dapat diuraikan dalam beberapa poin berikut (Murdani Drajat Andika, 2020):

1. Raw material Seeker ialah mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain.
2. Market Seeker yaitu memperoleh pangsa pasar baru di negara lain.
3. Cost Minimizers Seeker yakni mencapai efisiensi biaya, karena dengan melakukan investasi memungkinkan biaya produksi menjadi lebih rendah.
4. Risk Minimalizers seeker adalah salah satu perusahaan dapat menurunkan risiko produksi dan penjualan dengan mencari lokasi baru di negara lain.

5. Profit maximization trade off with cost minimization yaitu perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghindari biaya yang biasa melekat pada pihak ketiga sebagai perantara.
6. Fund seeker ada dalam manager finance ialah suatu perusahaan dapat memperoleh pendanaan dengan meminjam bank ketika dapat menunjukkan performa positif terkait penggunaan dana tersebut secara maksimal demi menghasilkan return semaksimal mungkin.
7. Penguatan struktur perusahaan yang dengan melayani pasar luar negeri, perusahaan dapat menguatkan struktur perusahaannya.
8. Perusahaan dapat pula menjadi entitas yang kuat dengan memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka di negara lain.

Dalam kaitannya dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi biaya produksi yang serendah-rendahnya, mendirikan cabang di luar negeri dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain (Suryawan, I Putu Gede Budi. Semara, I B Made. Hendrawan. and I Wayan. Septiyana, 2018):

1. Apabila perusahaan tersebut telah melayani pasar luar negeri melalui ekspor, mungkin diperlukan hubungan yang lebih dekat dengan langganan untuk mengetahui kebutuhan dan selera konsumen. Disamping itu cabang di luar negeri dapat merupakan basis untuk memberikan pelayanan kepada konsumen. Untuk produk dengan teknologi tinggi, seperti komputer maka pelayanan purna jual sangat penting. Pelayanan purna jual ini akan lebih efisien apabila dilakukan oleh cabang luar negeri.
2. Ekspor keluar negeri sering dihambat oleh kebijaksanaan tarif negara. Dengan mendirikan cabang di luar negeri yang dapat menghasilkan produk di negara tersebut maka masalah hambatan tarif dapat teratasi. Masalah lain yang berkaitan dengan ini adalah pengaruh perubahan kurs mata uang. Apabila mata uang negara asal perusahaan induk mengalami apresiasi maka harga barang ekspornya akan naik sehingga dapat menurunkan volume ekspor. Masalah ini dapat teratasi apabila perusahaan tersebut mendirikan cabang di luar negeri.

3. Faktor biaya lain yang kerap pertimbangkan adalah biaya transport, dengan membuka cabang, biaya transport dapat ditekan. Pajak yang relatif lebih rendah dapat merupakan daya tarik bagi MNC.

7.5 Manfaat & Dampak Buruk Perusahaan Multinasional

Perusahaan Multinasional tidak hanya berasal dari negara negara maju saja bisa juga berasal dari negara sedang berkembang. Akan tetapi perusahaan perusahaan multinasional dari negara yang sedang berkembang ini memiliki keterbatasan, antara lain sumber daya, pengetahuan dan lingkungan yang tertutup. Namun demikian perusahaan perusahaan multinasional tersebut memiliki kelebihan di pasar global, yaitu dukungan pemerintah dari dari negara asalnya. Bantuan pemerintah ini, selain dapat melindungi perusahaan dari persaingan di pasar, ternyata bisa menjadi boomerang manakala intervensi pemerintah memengaruhi keputusan-keputusan penting (Sukardi, Paulus. and Sari, 2007).

Beberapa keuntungan dan manfaat dari perusahaan perusahaan multinasional di antaranya (Satyarini, 2001):

1. Adanya kesempatan di banyak negara yang berbeda sekaligus dapat mengumpulkan uang dari operasi di seluruh dunia
2. Pertambahan devisa negara melalui penanaman di bidang ekspor.
3. Mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri.
4. Memodernisir industri dan mendukung pembangunan nasional.
5. Menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru.
6. Memperoleh keuntungan dengan berproduksi di negara yang paling efektif dan efisien.
7. Mempunyai akses mendapatkan bahan baku dan sumber daya alam yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh perusahaan domestik

Sementara dampak buruk dan kekurangan perusahaan multinasional

1. Keuntungan yang akan dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya.
2. Depresiasi yang dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan-keuntungan agar tidak terkena pajak. Dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi negara.
3. Kehadiran produk produk dari perusahaan multinasional maka dapat mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif.
4. Dapat merupakan ancaman bagi kekuasaan Negara tuan rumah
5. Dapat memicu persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan lokal.
6. Dapat memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah setempat.
7. Membatasi transfer pengetahuan dan teknologi pada Negara Negara berkembang.
8. Terkadang dapat mengeksploitasi kondisi negara dan sumber daya alam dan meninggalkan Negara tuan rumah ketika sumber daya yang dibutuhkan telah (Sukardi, Paulus. and Sari, 2007 dan Batubara, Luhut P. Purba, Yuniarti H. Tarigan, 2014).

7.6 Keunggulan dan Tantangan Perusahaan Multinasional

Menurut Suryawan, dkk. (2018) sumber keunggulan bersaing Perusahaan Multinasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan Multinasional di pandang sebagai perusahaan yang superior. Sifat transaksi internasional yang dilakukan adalah barangnya relatif sophisticated, sangat bervariasi, kompleks, penggunaan teknologi canggih dan dilakukan oleh beberapa perusahaan besar saja.
2. Perusahaan Multinasional dipandang memiliki kekuatan monopoli yang diperoleh karena penggunaan teknologi melalui riset dan pengembangan (R & D).

3. Perusahaan Multinasional kadang disebut sebagai “perusahaan informasi”, yakni mengorganisir dan secara sistematis mengumpulkan informasi tentang perkembangan pasar, biaya dan teknologi melalui cabang-cabangnya di luar negeri. Informasi ini secara terus menerus disebarkan ke semua cabang untuk dievaluasi dan implementasikan.
4. Perusahaan Multinasional biasanya dapat menikmati adanya skala yang ekonomis dengan cara misalnya, melalui pemutusan seluruh mesin produksi pada satu bagian tertentu dari proses produksi.
5. Perusahaan Multinasional juga memperoleh manfaat dari besarnya/luasnya jaringan keuangan internasional.
6. Perusahaan Multinasional sering mempunyai monopoli pemasaran baik melalui integrasi horizontal maupun vertikal dan tidak jarang mereka melakukan perang harga atau subsidi untuk membuat pasar.
7. Perusahaan Multinasional sering dapat menghindari dari kebijaksanaan tarif atau kuota yang diambil oleh negara lain.

Tentu saja ada beberapa kelebihan yang diberikan oleh perusahaan multinasional. Misalnya saja berbagai macam manfaat yang tertulis di bawah ini. Keunggulan perusahaan multinasional adalah (Aninditain, 2021):

1. Menambah devisa negara
Kehadiran perusahaan multinasional yang pada akhirnya membuka cabang hingga ke wilayah negara lain tentu akan memberikan keuntungan bagi negara lain. Salah satu keuntungan yang diberikannya adalah devisa negara. Devisa negara dalam hal ini bisa semakin bertambah karena adanya penanaman modal oleh perusahaan multinasional termasuk dalam hal ini bertambahnya biaya pajak yang diterima oleh suatu negara dan lain sebagainya.
2. Mendukung modernisasi
Masuknya perusahaan dari negara maju ke negara berkembang tentu akan membuat negara berkembang semakin mengalami kemajuan. Adanya kemajuan tersebut bisa tampak dari adanya modernisasi terutama dalam hal teknologi dan industri.

3. Mendukung pembangunan nasional

Adanya devisa yang bertambah di suatu negara tentu akan lebih menguntungkan terutama bagi negara berkembang. Hal ini pada akhirnya bisa turut mendukung adanya pembangunan nasional seperti pada negara kita ini. Besarnya devisa yang diterima oleh negara kemudian bisa digunakan untuk membiayai pembangunan yang sudah seharusnya dilakukan secara adil dan merata.

4. Meningkatkan penghasilan masyarakat

Berdirinya anak cabang dari perusahaan multinasional tentu membuka lapangan kerja baru. Anak cabang perusahaan besar yang berdiri di negara berkembang akan menyerap beberapa tenaga kerja lokal sehingga masyarakat bisa berpenghasilan lebih. Dengan adanya perusahaan yang berdiri maka pengangguran bisa semakin berkurang. Pada akhirnya penghasilan karyawan lokal bisa turut meningkat.

5. Memenuhi kebutuhan masyarakat

Ada banyak macam kebutuhan masyarakat di mana saja mereka masyarakat berada. Terutama kebutuhan yang menyangkut pangan dan sandang serta papan. Tentunya dibutuhkan kondisi finansial yang setidaknya cukup untuk bisa melakukan pemenuhan kebutuhan. Dengan bekerja di perusahaan asing maka tenaga kerja lokal bisa mendapatkan penghasilan sehingga pemenuhan segala kebutuhan bisa dilakukannya.

Meski bermanfaat, namun sebaiknya kenali juga kelemahan dari perusahaan multinasional, seperti misalnya yaitu:

1. Mematikan perusahaan lokal

Selain kelebihan tentunya ada pula kekurangan dari perusahaan multinasional. Salah satunya adalah matinya perusahaan lokal. Umumnya perusahaan besar memiliki teknologi yang canggih dan modern sehingga produknya lebih menjanjikan jika dibandingkan dengan perusahaan lokal. Hal ini pada akhirnya akan menyingkirkan berbagai perusahaan lokal yang mungkin saja tidak memiliki modal cukup kuat untuk bisa bertahan dan bersaing dengan Perusahaan Multinasional.

2. Melakukan ekspor keuntungan

Setiap perusahaan umumnya berdiri dengan tujuan untuk memperoleh hasil berupa keuntungan yang sebesar-besarnya. Demikian pula setiap anak cabang perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah negara juga akan mendapatkan keuntungan. Namun keuntungan ini akan diekspor dan menjadi milik perusahaan pusat sehingga anak perusahaan di negara lainnya tidak bisa mendapatkan keuntungan secara penuh.

3. Menyebabkan kerusakan lingkungan

MNC tampaknya memiliki bidang usaha yang cenderung sulit dilakukan oleh perusahaan lokal. Seperti misalnya usaha di bidang pertambangan yang membutuhkan modal besar untuk bisa melakukannya. Namun adanya usaha di bidang pertambangan ini umumnya menimbulkan dampak berupa terjadinya kerusakan lingkungan. Kondisi ini pada akhirnya akan merugikan kesehatan masyarakat lokal.

4. Memberikan dampak pada lingkup sosial dan budaya

Modernisasi yang muncul dan semakin berkembang tampaknya tidak selalu memberikan pengaruh positif bagi masyarakat lokal dan seringkali memberikan dampak buruk pada kondisi sosial dan budaya masyarakat. Modernisasi bisa mengubah perilaku seseorang hingga kehilangan jati dirinya. Selain itu budaya daerah bisa saja mengalami pergeseran karena adanya trend yang cenderung mengarah pada proses modernisasi.

5. Memandang rendah pekerja lokal

Pekerja lokal umumnya dipandang memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih sempit daripada orang asing. Selain itu keahlian dan keterampilan juga dinilai lebih rendah daripada orang asing. Fenomena ini membuat pekerja lokal dinilai lebih rendah dan hidup dengan bergantung pada perusahaan besar yang berasal dari negara maju atau negara asing.

Sementara tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan Multinasional di antaranya adalah:

1. Semakin meningkatnya rasa nasionalisme di banyak Negara sehingga terkadang mereka tidak terlalu senang dengan masuknya perusahaan multinasional ke negara mereka.
2. Mereka menjadi semakin menaruh perhatian terhadap sumber daya yang mereka miliki dan menjadi lebih ahli dalam negosiasi internasional.
3. Pemerintahan seringkali berubah sehingga membawa perubahan terhadap undang undang dan kebijakan yang berlaku.

Selain itu Perusahaan Multinasional perlu mempertimbangkan hal hal berikut ini (Satyarini, 2001):

1. Cultural Transferability
Perusahaan jasa terutama menghadapi kendala bahasa dan kebiasaan yang memengaruhi penghantaran jasa kepada konsumennya, tetapi perusahaan dapat berusaha menciptakan pengalaman budaya tentang negara asal perusahaan sehingga konsumen mau membeli jasa yang ditawarkan.
2. Network Development
Banyaknya perusahaan jasa menjadi perusahaan jasa global dikarenakan adanya dorongan dari konsumen yang ingin dilayani kemanapun mereka pergi. Memelihara pengontrolan dan standar operasi kualitas perusahaan ini menjadi sulit, karena karyawan perusahaan biasanya dari host country di mana terdapat perbedaan bahasa dan budaya.
3. Host Government Policy
Pemerintahan di seluruh dunia mempunyai peranan yang penting dalam menghambat pertumbuhan perusahaan jasa multinasional, termasuk didalamnya membuat sulitnya memasukkan dana asing ke negara yang bersangkutan.

7.7 Manfaat dan Konflik bagi Negara Induk

Dalam kerangka analisis general equilibrium, manfaat kegiatan Perusahaan Multinasional di luar negeri adalah dalam bentuk kenaikan pendapatan ataupun risiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Pendapatan ini dapat berbentuk kenaikan: dividen bagi pemilik saham, gaji bagi pimpinan serta upah bagi karyawan. Menurut prediksi teori klasik tentang perdagangan internasional, faktor produksi yang melimpah di negara induk akan memperoleh manfaat dengan faktor produksi yang jarang akan rugi. Namun secara keseluruhan manfaatnya akan lebih besar dari kerugiannya.

Manfaat lain adalah dapat diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya lebih rendah. Biasanya Perusahaan Multinasional mengalihkan sebagian kegiatannya di luar negeri untuk memperoleh biaya yang lebih murah. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan manfaat ini jelas Nampak. Produksi di negara lain di mana terdapat tambang tersebut akan jauh lebih murah (Nariska, 2015). Penolakan terhadap investasi langsung dan transfer teknologi oleh Perusahaan Multinasional biasanya didasari oleh pemikiran tentang efek jangka pendek baik secara sektoral, regional maupun pendapatan. Secara spesifik efek tersebut berupa: pergeseran tenaga kerja, berkurangnya keunggulan modal dan teknologi, penghindaran pajak serta dapat merongrong ekonomi dalam negeri.

1. Pergeseran Tenaga Kerja

Isu mengenai efek investasi langsung (dengan mendirikan perusahaan) di luar negeri terdapat pasar tenaga kerja di dalam negeri masih di perdebatkan. Banyak bukti menunjukkan bahwa beberapa pekerjaan dapat dihilangkan oleh adanya kegiatan Perusahaan Multinasional di luar negeri.

2. Berkurangnya keunggulan Modal dan Teknologi

Perusahaan Multinasional sering dituduh mengekspor modal dan teknologi dan dikombinasikan dengan tenaga kerja yang murah di luar negeri. Hal ini akan mengakibatkan pertama keunggulan di bidang teknologi di dalam negeri dapat berkurang ; kegiatan industri

dalam negeri dapat menyusut di gantikan di luar negeri dalam sumber pendapatan nasional yang berasal dari luar negeri (berupa keuntungan Perusahaan Multinasional yang dikirim balik) meningkat sehingga ekonomi dalam negeri dapat terpengaruhi oleh perusahaan ekonomi dan politik yang terjadi di luar negeri.

3. Penghindaran Pajak

Melalui praktek-praktek penilaian dalam faktur jual-beli (terutama dengan cabang Perusahaan Multinasional) yang sering di sebut transfer pricing serta tax holiday dan insentif yang diberikan oleh negara penerima Perusahaan Multinasional dapat menghindar pengenaan pajak yang wajar. Apabila hal ini terjadi maka negara induk akan dirugikan.

4. Merongrong Kebijakan Ekonomi Negara Induk

Jaringan yang luas dari Perusahaan Multinasional sering mengakibatkan kebijakan ekonomi negara asal terganggu. Kebijakan antitrust dan kebijakan untuk membatasi satu jenis produk tertentu jatuh ke negara tertentu misalnya, dapat tidak/kurang efektif dengan adanya cabang Perusahaan Multinasional di negara lain.

Setiap negara caranya berbeda-beda, misalnya Filipina lebih pada pengaturan masuknya Perusahaan Multinasional, India lebih pada pengaturan kegiatan/operasi, Brazilian sedikit lebih bebas, Jepang umumnya member toleransi untuk patungan dan Indonesia dengan pengaturan melalui undang-undang PMA dan daftar negatif untuk investasi (Budiono, 2009).

Bab 8

Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi

8.1 Pendahuluan

Peranan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi cukup berpengaruh. Beberapa ahli ekonomi klasik dan neo-klasik melihat bahwa perdagangan internasional memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun suatu negara yang digunakan sebagai mesin pertumbuhan. Pendapat ahli lain sebaliknya, mereka menganggap bahwa kegiatan perdagangan internasional memberikan dampak bahwa negara yang kaya menjadi kaya dan negara miskin akan dirugikan dengan kegiatan tersebut.

Oleh sebab itu, bagi negara yang berkembang secara terpaksa akan mengorbankan apa yang menjadi manfaat akibat timbulnya spesialisasi internasional. Tetapi, dengan mengambil dan memberlakukan kebijakan substitusi impor dan industrialisasi yang terukur dan terencana serta memperluas hasil barang maupun jasa untuk dikonsumsi di dalam suatu negara, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pertama, kita akan membahas bagaimana perdagangan internasional menopang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan pandangan yang berlawanan

mengenai seberapa jauh perdagangan internasional menghambat pembangunan negara berkembang.

8.2 Globalisasi (Globalization)

Globalisasi (globalization) membahas mengenai tingkat pembangunan, proses perdagangan dan ekonomi internasional. Proses globalisasi dapat menyatukan perekonomian dari berbagai negara di seluruh dunia, mendorong perekonomian di tingkat global, dan mampu mengglobalkan penetapan kebijakan ekonomi, contohnya melalui badan internasional seperti *World Trade Organization* (WTO). Globalisasi juga merujuk pada timbulnya budaya global, yang berarti bahwa orang semakin sering mengkonsumsi produk yang sama di berbagai negara dan menggunakan bahasa bisnis yang sama. Perubahan ini mempercepat integrasi ekonomi dan pada gilirannya integrasi mempercepat perubahan.

Namun, dalam arti ekonominya, dengan adanya globalisasi keterbukaan dalam sistem perekonomian suatu negara terhadap perdagangan internasional akan mengalami peningkatan, begitu juga dari sisi aliran dana internasional, serta investasi asing yang langsung memasuki negara tersebut. Keterkaitan yang semakin erat dari semua sektor pemerintah dan perusahaan dan antar individu merupakan suatu proses yang memberikan pengaruh kepada setiap orang di dunia. Namun, globalisasi akan memberikan perubahan yang lebih besar dari berbagai sisi bagi negara berkembang.

Bagi sejumlah orang, istilah globalisasi menyiratkan peluang bisnis yang lebih menarik, pertumbuhan pengetahuan dan inovasi yang lebih cepat, atau prospek sebuah dunia yang terlalu saling bergantung sehingga dapat mencegah terjadinya sebuah perang. Untuk beberapa hal, globalisasi juga memberikan dampak yang negatif ke suatu negara seperti terjadinya ketimpangan akan semakin nyata dapat dilihat. Begitu juga dari sisi degradasi lingkungan akan mengalami percepatan. Bagi negara yang kaya, globalisasi akan mendominasi dengan luas dan menjerat, tetapi di beberapa negara akan mengalami ketinggalan. Beberapa keprihatinan ini mungkin dibesar-besarkan, tetapi keprihatinan itu mencerminkan isu-isu nyata yang perlu ditangani untuk mencegah agar globalisasi tidak menyebabkan sejumlah atau semua masalah itu.

Oleh sebab itu, dengan adanya globalisasi mampu memberikan manfaat dan peluang begitu juga dengan resiko yang akan dihadapi di setiap negara, seperti: orang-orang yang hidup di keluarga-keluarga yang mengalami kemiskinan absolut dan di suatu negara yang pendapatannya rendah. Manfaat potensialnya mungkin juga jauh lebih besar untuk negara-negara berkembang; globalisasi benar-benar membawa kemungkinan baru untuk pembangunan perekonomian berbasis luas. Dengan memberikan berbagai jenis interaksi dengan orang-orang di negara lain, globalisasi berpotensi memberi manfaat bagi negara-negara berkembang secara langsung dan tidak langsung melalui pertukaran budaya, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, di samping melalui perdagangan dan keuangan internasional.

8.3 Pentingnya Perdagangan Internasional

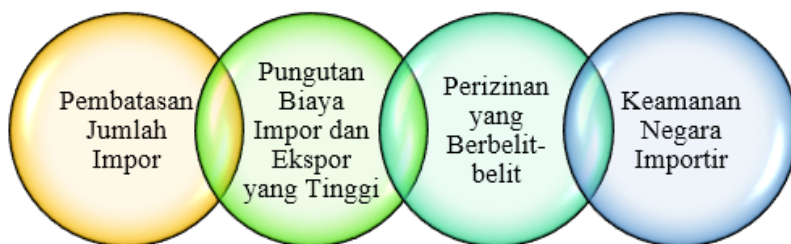
Perdagangan internasional memberikan manfaat dan arti yang sangat penting bagi negara yang berkembang. Kegiatan tersebut memberi arti dalam hal melakukan pembangunan di beberapa sektor, mengembangkan pengetahuan dan menambah pengalaman yang memungkinkan pembangunan serta memberikan sarana untuk melaksanakannya. Menurut Haberler dalam (Jhingan, 2018) untuk pembangunan di negara yang kurang berkembang, perdagangan internasional dapat memberikan kontribusi/sumbangan diharapkan sumbangan tersebut dapat memperbaiki penyimpangan yang tidak mendasar atau marginal adalah kebijaksanaan yang terbaik dilihat dari sudut pembangunan ekonomi.

Ketergantungan suatu negara terhadap perdagangan internasional yaitu sebagai mesin penggerak perekonomian suatu negara memberikan pengaruh yang cukup besar. Menurut Salvatore dalam (Safitriani, 2014), perdagangan internasional merupakan salah satu aktivitas perekonomian di mana aktivitas tersebut meliputi aliran modal, baik yang sifatnya masuk maupun keluar, dari suatu negara ketika terjadi aktivitas perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor dan impor maka besar kemungkinan terjadi perpindahan faktor-faktor produksi dari negara eksportir ke negara importir yang disebabkan oleh perbedaan biaya dalam proses perdagangan internasional. Manfaat lain dari perdagangan internasional tersebut akan meningkatkan kesejahteraan yang

lebih besar serta mampu mengefisiensikan perekonomian, Susantoro dalam (Fakhrudin, 2008).

8.4 Hambatan Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional yang dilakukan sering mendapat hambatan, baik hambatan dari dalam negara maupun dari luar negeri. Dalam pengertian luas, bentuk hambatan berupa tindakan (measures) yang memberikan pengaruhnya serta mampu membatasi aliran produk secara bebas. Dalam praktek perdagangan internasional, hambatan perdagangan dibagi menjadi hambatan tarif dan hambatan non tarif, (Sari, Hakim and Anggraeni, 2014). Kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh suatu negara dapat menjadi hambatan yang paling utama dihadapi dalam perdagangan internasional. Bentuk kebijakan tersebut meliputi:



Gambar 8.1: Hambatan Perdagangan Internasional (Todaro and Smith, 2011).

Keamanan negara importir yang artinya semakin aman keadaan negara, semakin mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan internasional ke negara tersebut. Kurs sebagai salah satu ukuran nilai perdagangan antarnegara menjadi pemicu aliran perdagangan. Kurs mata uang asing yang tidak menentu (tidak stabil) membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual dan beli barang. Kesulitan ini akan memberikan dampak pada harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan. Kondisi ini memberikan pengaruh kepada pedagang internasional menjadi enggan untuk melakukan aktivitas ekspor dan impor. (Ekananda, 2014)

8.5 Beberapa Isu Penting Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional sering kali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian negara Asia Timur lainnya yang mempelopori strategi ini, yang berhasil diikuti oleh tetangganya yang jauh lebih besar, Cina. Pengalaman negara-negara ini menjadi jalur penting dalam mengungkapkan drama perdagangan dan pembangunan.

Pada saat bersamaan, di seantero Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, ekspor produk-produk primer mencakup porsi yang besar dari produk domestik bruto negara. Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, persentase besar dari pendapatan negara diperoleh dari penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer atau produk lain seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak sawit, bauksit, dan tembaga. Pada situasi khusus seperti di negara-negara penghasil minyak, penjualan produk minyak bumi mentah dan olahan ke berbagai negara dunia porsinya mencapai lebih 70 persen dari pendapatan nasional mereka.

Namun, tidak seperti negara-negara produsen minyak dan segelintir negara yang berhasil melakukan industrialisasi seperti Taiwan, Korea Selatan, dan sekarang Cina. Banyak negara berkembang yang masih harus mengandalkan ekspor produk-produk primer non mineral yang meliputi sebagian besar dari pendapatan valuta asing mereka. Hal ini merupakan persoalan serius khususnya di Afrika Sub-Sahara. Karena pasar dan harga-harga bagi produk ekspor semacam itu sering kali tidak stabil, maka ketergantungan ekspor pada produk-produk primer turut menghadirkan sejumlah resiko dan ketidakpastian yang tidak diinginkan banyak negara. (Todaro and Smith, 2011)

Selain masalah ketergantungan ekspor tersebut, banyak negara-negara berkembang yang juga tergantung, biasanya dalam tingkat yang lebih besar, pada impor bahan baku, mesin-mesin, barang-barang modal, barang produsen intermediate, serta produk-produk konsumen guna menggerakkan ekspansi industri mereka dan memuaskan konsumen masyarakat yang semakin meningkat di sana. Bagi mayoritas negara berkembang, permintaan impor

tersebut melampaui kapasitas mereka dalam menghasilkan pendapatan yang cukup dari penjualan ekspor selama pasca perang dunia II. Hal ini telah mengakibatkan defisit kronis pada posisi neraca pembayaran mereka dibandingkan dengan negara lain. Di sejumlah negara berkembang, defisit pada pos transaksi berjalan (porsi dari neraca pembayaran suatu negara yang mencerminkan nilai pasar dari ekspor berwujud, misalnya perdagangan komoditas dan tak berwujud misalnya jasa pengiriman), dikompensasikan pada neraca pembayaran dengan surplus pada pos transaksi modal, beban utang dari pelunasan investasi dan pinjaman internasional terdahulu sering kali menjadi semakin besar. Di sejumlah negara sedang berkembang, defisit parah pada pos transaksi berjalan dan modal telah mengakibatkan merosotnya cadangan moneter internasional, mata uang yang stabil, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Banyak negara yang berhutang akhirnya mencapai surplus ketika melunasi sebagian utang mereka. Pada abad yang baru ini, pola surplus perdagangan telah memperkuat banyak negara berkembang meski tidak berlaku untuk semua. Negara-negara berkembang telah berupaya untuk menghindari terulangnya kembali kondisi di Amerika Latin pada tahun 1980-an, Afrika sub-Sahara pada tahun 1980-an dan 1990-an, dan Asia Timur pada tahun 1997-1998. Penurunan drastis pendapatan ekspor selama krisis keuangan 2008 sekilas telah memperlihatkan bahaya tersebut, meski perekonomian global segera pulih dari ketidakseimbangannya. Pola ini juga membawa resiko; contohnya, hal ini berarti bahwa negara-negara berkembang secara efektif mengeksport modal dan membuat perekonomiannya rentan terhadap koreksi tajam ketika defisit neraca pembayaran AS yang sangat besar dan kronis mulai pulih kembali, (Todaro and Smith, 2011)

Namun perdagangan dan keuangan internasional harus kita pahami dalam perspektif yang luas, jauh lebih luas dari sekadar arus sumber daya keuangan dan komoditi antar negara. Dengan membuka perekonomian dan masyarakat mereka terhadap perniagaan dan perdagangan global, serta dengan berorientasi ke luar, ke bangsa-bangsa lainnya di dunia, negara-negara berkembang tidak hanya mengundang masuknya transfer barang, jasa, dan sumber daya keuangan internasional, tetapi juga pengaruh pembangunan atau anti pembangunan yang terkandung di dalam transfer teknologi produksi; pola konsumsi; tatanan kelembagaan dan organisasional; sistem kesehatan dan sosial; serta tatanan nilai, gagasan, dan gaya hidup yang lebih umum dari negara-negara maju.

Dampak dari transfer teknologi produksi, ekonomi, sosial. Dan budaya terhadap karakter proses pembangunan bisa sejalan atau tidak sejalan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas. Berbagai dampak ini tergantung pada sifat struktur politik, sosial, dan kelembagaan dari negara penerima transfer dan prioritas pembangunannya.

8.6 Lima Pertanyaan Dasar Mengenai Perdagangan dan Pembangunan

Menurut (Todaro and Smith, 2011), pembahasan terhadap teori-teori tradisional dan kontemporer mengenai perdagangan internasional dalam konteks lima tema atau pertanyaan mendasar tentang beberapa nilai penting tertentu bagi negara-negara berkembang sebagai berikut:

1. Bagaimana cara perdagangan internasional memengaruhi tingkat, struktur, dan karakter pertumbuhan ekonomi? Inilah kontroversi tradisional dari “perdagangan sebagai mesin pertumbuhan”, dalam hal aspirasi pembangunan kontemporer.
2. Bagaimana cara perdagangan mengubah distribusi pendapatan dan kekayaan dalam suatu negara dan di antara berbagai negara? Apakah perdagangan menjadi suatu kekuatan pemerataan atau ketidakmerataan dalam lingkup internasional dan domestik? Dengan kata lain, bagaimana keuntungan dan kerugian didistribusikan, dan siapa yang memetik manfaatnya?
3. Dalam kondisi apa perdagangan dapat membantu suatu negara mencapai tujuan pembangunannya?
4. Dapatkah negara berkembang secara mandiri menentukan seberapa banyak perdagangan yang dilakukannya atau produk dan jasa apa yang dijualnya?
5. Mengingat adanya pengalaman masa lalu dan penilaian prospektif, apakah sebaiknya negara berkembang menerapkan kebijakan yang berorientasi keluar (perdagangan yang lebih bebas, aliran modal dan sumber daya manusia yang lebih luas, dan sebagainya) atau yang

berorientasi ke dalam (proteksi demi mencapai kemandirian), atau paduan keduanya, misalnya dalam bentuk kerjasama ekonomi regional dan kebijakan ekspor strategis? Apakah argumen yang pro dan kontra atas strategi-strategi perdagangan bagi pembangunan ini?

Jelas, jawaban atau saran bagi kelima pertanyaan dasar tersebut tidak akan seragam dalam berbagai perekonomian di dunia negara berkembang. Landasan ekonomi bagi perdagangan internasional bersandar pada kenyataan bahwa setiap negara memiliki anugerah sumber daya, preferensi dan teknologi, skala ekonomi, lembaga sosial dan ekonomi, serta kapasitas pertumbuhan dan pembangunan yang berbeda. Tentu saja hal tersebut juga berlaku bagi negara sedang berkembang.

8.7 Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Absolut

Hampir tidak mungkin seseorang atau suatu keluarga memenuhi kebutuhan mereka sendiri bahkan untuk hidup yang paling sederhana sekalipun, mereka memperoleh keuntungan dengan terlibat dalam kegiatan yang paling sesuai atau kegiatan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Prinsip-prinsip spesialisasi dan keunggulan komparatif yang sama ini telah lama diterapkan oleh para ekonom untuk menggambarkan pertukaran barang antarnegara. Terdapat beberapa pertanyaan tentang faktor apa yang menentukan jenis produk yang akan diperjualbelikan, apa yang menyebabkan suatu negara memproduksi barang tertentu, sedangkan negara lain memproduksi produk yang berbeda.

Di zaman Adam Smith memfokuskan perhatiannya kepada perbedaan internasional dari segi biaya produksi dan harga yang ditawarkan pada berbagai produk. Terdapat beberapa negara melakukan spesialisasi dalam hal kegiatan penciptaan suatu produk yang unik dan bernilai karena mereka menginginkan mempunyai keunggulan untuk melakukannya. Mereka berspesialisasi, yaitu mengkonsentrasikan sumber daya pada produksi sejumlah kecil komoditas dalam kegiatan di mana mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari spesialisasi (Todaro and Smith, 2011).

Disamping keunggulan komparatif dan spesialisasi, konsep lain dalam perdagangan internasional adalah keunggulan absolut. Keunggulan absolut adalah produksi suatu komoditas dengan sejumlah sumber daya riil yang sama seperti produsen lain tetapi dengan biaya unit absolut yang lebih rendah. Contoh, Jerman mungkin mampu memproduksi kamera, mobil, sepeda motor dan produk pertanian dengan biaya unit absolut yang lebih rendah dari Kenya. Tetapi karena perbedaan biaya komoditas antara kedua negara ini lebih besar untuk barang manufaktur ketimbang produk pertanian, maka akan lebih menguntungkan bagi Jerman untuk berspesialisasi dalam memproduksi barang manufaktur dan memperdagangkannya dan membeli produk pertanian dari Kenya.

Jadi, walaupun Jerman memiliki keunggulan absolut (*absolute advantage*) dalam biaya kedua komoditas tersebut, tetapi keunggulan biaya komparatifnya terletak pada barang-barang manufaktur. Sebaliknya, Kenya mungkin tidak memiliki keunggulan secara absolut dibandingkan dengan Jerman dalam produk manufaktur dan pertanian dalam arti bahwa biaya produksi unit absolutnya lebih tinggi bagi kedua jenis produk tersebut. Tetapi Kenya dapat terlibat dalam perdagangan yang menguntungkan karena memiliki keunggulan komparatif dalam spesialisasi produk pertanian. Fenomena perbedaan keunggulan komparatif inilah yang memicu perdagangan yang saling bermanfaat bahkan bagi mitra dagang yang paling timpang.

8.8 Teori Perdagangan dan Pembangunan: Argumen-Argumen Tradisional

Menurut Todaro and Smith (2011), jawaban teoritis atas kelima pertanyaan dasar mengenai perdagangan internasional dan pembangunan yang berasal dari model perdagangan neo-klasik.

1. Perdagangan dilakukan di suatu negara untuk merangsang ada pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya aktivitas perdagangan memberikan kontribusi yang besar dalam hal meningkatkan konsumsi suatu negara dan output di dunia, serta mempermudah

untuk mendapatkan akses akan sumber daya yang langka di pasar dunia. Maka dari itu, jika perdagangan tidak dilakukan akan memberikan dampak yang negatif terhadap negara miskin, di mana tidak akan mengalami pertumbuhan.

2. Perdagangan cenderung mendorong kesetaraan internasional dan domestik dengan cara menyamakan harga untuk produk yang diperjualbelikan, meningkatkan pendapatan riil negara-negara yang berdagang, serta cara pemanfaatan sumber daya di dunia dapat dilakukan secara efisien.
3. Dengan adanya perdagangan akan membantu untuk pembangunan melalui promosi produk dari negara yang memproduksi sehingga memberikan manfaat bagi sektor ekonomi di mana negara individu yang memiliki keunggulan komparatif. Manfaat lainnya yaitu efisiensi tenaga kerja atau anugerah faktor dan mengambil keuntungan dari adanya skala ekonomis
4. Dalam dunia perdagangan bebas, harga dan biaya produksi internasional akan menentukan seberapa banyak suatu negara sebaiknya melakukan perdagangan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan nasionalnya. Setiap negara akan bertindak sesuai dengan prinsip keunggulan komparatif dan tidak akan mengganggu mekanisme pasar bebas melalui kebijaksanaan pemerintah yang mendorong ekspor atau membatasi impor.
5. Terakhir, diperlukan kebijakan internasional dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam semua kasus, kemandirian yang didasarkan pada isolasi sebagian atau menyeluruh dianggap kurang baik secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam dunia perdagangan bebas tanpa batas

8.9 Manfaat Langsung Perdagangan Internasional

Dari perdagangan internasional, pihak-pihak yang berkepentingan mendapatkan keuntungan, begitu juga negara memperoleh keuntungan sehingga pendapatan nasionalnya akan membaik. Dilihat dari meningkatnya jumlah barang/jasa dan laju pertumbuhan ekonomi di negara tersebut akan mengalami perubahan yang positif seperti pembangunan ekonomi sehingga lingkaran setan kemiskinan dapat mengalami penurunan.

Pasar domestik di negara berkembang kecenderungannya kecil. Dengan kondisi ini mengakibatkan penyerapan untuk output di pasar domestik tidak dapat dilakukan dengan maksimal, sehingga dorongan untuk berinvestasi juga akan mengalami penurunan. Bukan hanya investasi saja yang memengaruhi, pendapatan per kapita dan daya beli juga berkontribusi memberikan pengaruh terjadinya pasar yang semakin kecil. Untuk itu, diperlukan perdagangan internasional agar memperluas pasar untuk barang/jasa yang dihasilkan suatu negara dan merangsang adanya kegiatan investasi, pendapatan dan tabungan melalui alokasi sumber daya dengan lebih efisien. Tambahan lagi, beberapa negara berkembang mengkhhususkan diri memproduksi satu atau dua komoditi bahan makanan. Jika mereka melakukan upaya ekspor, maka upaya-upaya tersebut cenderung memperluas pasar.

Dengan sumber yang ada dapat digunakan secara produktif dan dialokasikan secara efisien berdasarkan fungsi produksi tertentu. Hal ini menjadi alasan mengapa kegiatan perdagangan internasional memberikan keuntungan yang besar, seperti yang dikemukakan oleh J. S. Mill. Menurut Hicks dalam (Jhingan, 2018), memperluas pasar menghasilkan sejumlah keuntungan baik secara internal dan eksternal dan karenanya mengurangi biaya produksi. Dengan adanya Perdagangan internasional dapat mengalihkan dari sektor pangan ke sektor uang.

8.9.1 Manfaat Tidak Langsung

Mill menjelaskan bahwa dengan adanya perdagangan luar negeri dapat memberikan manfaat yang dinamis secara tidak langsung akan timbul di negara yang hubungan baik penerima maupun yang memproduksi. Hal ini dilihat dari terdapatnya perluasan pasar serta spesialisasi produk yang

ditawarkan. Dengan adanya perdagangan internasional memberikan dorongan kepada pelaku industri dalam menggunakan mesin dalam proses produksi juga mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien serta mendorong adanya penemuan dan pembaharuan, secara tidak langsung perdagangan internasional juga mampu menurunkan biaya suatu produk, yang nantinya akan mengarah pada pembangunan di sektor ekonomi.

Kegiatan perdagangan ke luar negeri juga berkontribusi dalam hal memperkenalkan tentang produk yang berbeda dan menarik dari negara yang memproduksi. Hal ini akan mendorong agar konsumen menyimpang uangnya agar dapat membeli produk impor tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian kegiatan ini akan menghimpun modal bagi kepuasan atas keinginan baru, mengembangkan kemampuan teknis, serta bakat manajer untuk kewiraswastaan. Akhirnya, dengan adanya kegiatan itu akan memberikan dorongan persaingan antar pelaku bisnis secara sehat dan mencegah terjadinya monopoli. Dengan adanya perdagangan internasional secara tidak langsung memberikan manfaat yaitu (Jhingan, 2018):

Tabel 8.1: Manfaat Tidak Langsung Perdagangan Internasional (Jhingan, 2018)

No.	Manfaat Tidak Langsung Perdagangan Internasional
1	<p>Membantu proses mempertukarkan barang-barang yang mempunyai kemampuan pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar negeri yang mempunyai pertumbuhan tinggi. Komoditi bahan makanan negara-negara berkembang ditukar dengan mesin, barang modal, bahan mentah dan produk setengah jadi yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi.</p> <p>Karena kekurangan bahan modal dan bahan, maka untuk mempercepat langkah pertumbuhan, mereka dapat mengimpor dari negara maju, dan membangun <i>overhead</i> sosial dan <i>overhead</i> ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang langung produktif. Jadi ekspor yang lebih besar memperluas volume impor alat-alat perlengkapan yang dapat dibiayai tanpa membahayakan neraca pembayaran dan tingkat kebebasan yang lebih tinggi membuatnya lebih mudah untuk merencanakan investasi domestik bagi pembangunan.</p>
2	<p>Perdagangan luar negeri mempunyai pengaruh mendidik. Negara terbelakang kekurangan keterampilan penting tertentu. Kekurangan</p>

	<p>ini merupakan rintangan yang lebih besar bagi pembangunan daripada kekurangan akan barang-barang modal. Perdagangan luar negeri dapat mengatasi kelemahan ini, karena perdagangan luar negeri, menurut Haberler, adalah sarana dan wahana untuk menyebarluaskan pengetahuan teknis, pemasukan gagasan, keterampilan, bakat manajer dan kewiraswastaan. Pemasukan gagasan, kemampuan dan keterampilan merupakan perangsang kuat bagi kemajuan teknologi. Ia memberikan kesempatan untuk belajar baik dari keberhasilan maupun dari kegagalan negara maju. Perdagangan luar negeri membantu memacu pembangunan negara miskin karena perdagangan luar negeri memungkinkan peminjaman gagasan, keterampilan dan kemampuan tertentu dari negara maju dan menerapkannya sesuai dengan kekayaan faktor setempat.</p> <p>Bahkan kecepatan pembangunan AS, Jepang dan negara maju lainnya efek mendidik perdagangan luar negeri tersebut. J.S.Mill dalam (Jhingan, 2018) menekankan arti penting tersebut sebagai berikut: “Di tengah keadaan tanpa perbaikan manusia seperti saat ini, hampir tidak ada ungkapan yang tepat untuk menggambarkan betapa penting arti menempatkan orang-orang untuk berhubungan dengan orang-orang lain yang berbeda dengan mereka, dengan cara pikir dan cara tindak yang berbeda dengan yang mereka kenal sebelumnya komunikasi seperti ini selalu terjadi dan khususnya pada abad ini merupakan salah satu dari sumber-sumber utama kemajuan.</p>
3	<p>Perdagangan luar negeri memberi dasar bagi pemasukan modal luar negeri ke negara-negara terbelakang. Jika tidak ada perdagangan luar negeri, modal luar negeri tidak akan mengalir dari negara kaya ke negara miskin. Volume modal luar negeri tergantung di antara faktor-faktor lain-pada volume perdagangan. Semakin besar volume perdagangan, semakin besar pula kemungkinan suatu negara dapat membayar kembali suku bunga dan pokok pinjamannya.</p> <p>Bagaimanapun sangat lebih mudah mendapatkan modal luar negeri untuk industri peningkatan ekspor dari pada untuk substitusi impor dan keperluan umum. Tetapi dari sudut pandang negara pengimpor, penggunaan modal asing untuk substitusi import, industri keperluan umum dan industri manufaktur lebih bermanfaat untuk mempercepat pembangunan daripada hanya untuk peningkatan ekspor. Modal luar negeri tidak hanya membantu menambah lapangan kerja, <i>output</i> dan</p>

	<p>pendapatan tetapi juga mempermulus neraca pembayaran dan tekanan inflasi.</p> <p>Selanjutnya, ia menghasilkan mesin, perlengkapan, pengetahuan, keterampilan, gagasan dan latihan bagi tenaga kerja setempat. Menekankan arti penting modal luar negeri melalui perdagangan, J.S.Mill dalam (Jhingan, 2018), mengatakan “modal luar negeri yang menciptakan peningkatan produksi itu tidak lagi tergantung secara eksklusif pada sifat hemat atau penduduk itu sendiri. Sambil memberikan teladan, dan dengan membangkitkan gagasan baru dan mematahkan rantai kebiasaan, jika tidak dengan memperbaiki keadaan nyata penduduk, perdagangan luar negeri menawarkan kepada masyarakat keinginan-keinginan baru, ambisi dan pemikiran tingkat tinggi bagi masa depan bangsa tersebut</p>
4	<p>Perdagangan luar negeri menguntungkan negara terbelakang secara tidak langsung karena meningkatkan persaingan sehat, dan mengendalikan monopoli yang tidak efisien. Persaingan sehat perlu bagi pengembangan sektor ekspor ekonomi dan perlu untuk mengendalikan monopoli yang tidak efisien. Persaingan sehat perlu bagi pengembangan sektor ekspor ekonomi dan perlu untuk mengendalikan monopoli eksploitatif yang tidak efisien yang lazimnya dilakukan dengan alasan proteksi industri baru.</p> <p>Jadi, di samping manfaat statis yang disebabkan oleh alokasi sumber secara efisien berdasarkan fungsi-fungsi produksi tertentu, perdagangan luar negeri memberikan empat macam keuntungan sebagaimana di sebutkan di atas dengan menubah fungsi-fungsi produksi yang ada dan mendorongnya ke atas dan ke luar.</p>

8.10 Pandangan yang Berlawanan

Analisa di atas didasarkan pada doktrin biaya komparatif, telah dikritik oleh para ekonom seperti Prebisch, Singer, dan Myrdal. Mengasumsikan bahwa dengan perdagangan ke luar negeri akan memberikan dampak yang negatif bagi negara miskin seperti pembangunan negara tersebut akan melambat. Sebagaimana dikatakan Myrdal dalam (Jhingan, 2018), akibat dari kegiatan perdagangan bebas bagi dua negeri yaitu negara industri dan negara lainnya

yang berkembang merupakan awal terjadinya proses kumulatif kemiskinan dan stagnasi negara yang sering disebut terbelakang.

Dari tiga pendapat dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional dapat menghambat pembangunan sehingga memberikan dampak pada pergerakan modal secara internasional, *demonstration effect* internasional yang merugikan; keseimbangan barang kurang baik. (Jhingan, 2018). Pada sisi lain, sektor domestik adalah sektor yang menghasilkan produk yang padat karya di mana koefisien variabel yang terlupakan dan terbelakang. investasi pada sektor ini rendah, sehingga kegiatan bisnis tidak dapat diperluas dan rendah dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan untuk menyerap pengangguran. Investasi luar negeri mengarah pada penggunaan sumber daya yang ada di suatu negara dalam bentuk profit dan bunga yang masuk negara yang memiliki modal atas investasi yang dilakukan.

Kedua, dituduh bahwa berlangsungnya *demonstration effect* internasional, disebabkan adanya perdagangan internasional, yang memberikan pengaruh negatif kepada pembentukan modal ke negara berkembang. Tetapi pandangan ini juga tidak benar. Di mana *demonstration effect* tidak memiliki pengaruh dikarenakan terdapat beberapa kota kecil di negara berkembang, mereka mengimpor bahan makan dan produk primer ke negara yang membutuhkan.

Ketiga, menurut Prebisch negara yang berkembang mengalami suatu kemerosotan sekuler dalam “*term of trade*”. Di mana negara berkembang mengalami gangguan serius karena kapasitas impor yang terus merosot. Kemerosotan ini memperlemah kemampuan industri produk primer yang ada untuk menopang pertumbuhan penduduk juga menggagalkan alih kemajuan teknik; di samping membuat upaya masing-masing negara untuk meningkatkan produktivitas industri primer terhujam pada kemerosotan “*term of trade*” negara berkembang terjadi semacam pengalihan pendapatan dari negara sedang berkembang kepada negara kaya dan keuntungan dari perdagangan luar negeri lebih banyak mengalir ke negara maju sembari merugikan negara miskin yang berarti mengurangi tingkat pendapatan nyata dan kemampuan pembangunan.

8.11 Kritik Terhadap Pandangan Yang Berlawanan

Semua kritik tersebut tidak memiliki fakta yang ada, maupun bukti yang mendukung bahwa kegiatan pembangunan di sektor ekspor telah merugikan suatu negara. Kenyataan yang kita lihat bahwa kegiatan investasi dari luar negeri sering tidak sejalan dengan investasi di dalam negeri. Maka dari itu pasar domestik dan kerja sama yang kurang memadai pada negara berkembanglah mendorong untuk melakukan investasi ke luar negeri pada sektor ekspor. Tetapi Nurkse dalam (Jhingan, 2018) berpendapat bahwa dengan perdagangan internasional pertumbuhan mengalami peningkatan dan kejelasan serta dengan adanya modal dari luar negeri akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan jumlah yang melakukan pembelian, memberikan peningkatan pemasukan bagi negara dilihat dari pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan perdagangan internasional akan memberikan keuntungan yaitu meningkatkan perluasan ekonomi domestik.

Pengaruh faktor *demonstration* memberikan persepsi yang kurang baik bagi pihak terkait. Terdapat beberapa usaha yang dilakukan untuk mengimbangi standar hidup ke level yang lebih tinggi dan produk konsumen yang kategori mewah dapat difungsikan sebagai pendorong meningkatkan produktivitas negara miskin. Kondisi ini akan mendorong usaha jasa seperti penyediaan produk mewah. Dampaknya akan mendatangkan pengaruh yang baik untuk merangsang kreativitas dan inovasi usaha di lingkungan setempat.

Pendapat Prebisch tentang adanya kemerosotan sekuler dalam Term of trade di negara berkembang hanyalah rekaan belaka. Mula-mula bagi negara berkembang akan bergantung pada ekspor segelintir produk kebutuhan dasar. Selain itu, produksi negara hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan ekspor dunia yang berupa produk-produk pertanian dan pertambangan. Cairncross dalam (Jhingan, 2018), memperlihatkan bahwa pada tahun 1937, volume produk primer dari negara-negara industri agak sedikit lebih rendah dari tahun 1913, sementara ekspor dari negara-negara non industri lebih tinggi di atas 50 persen lebih.

Pada tahun 1950 terjadi perubahan mencolok ketika ekspor dari negara-negara lain menurun secara tajam. Pada tahun 1957 ekspor produk primer dari kedua kelompok tadi mengalami kenaikan 50 persen dalam volume eksportnya. Yang

terakhir, pandangan ini lalai mempertimbangkan perubahan pola ekspor dan impor negara berkembang. Negara berkembang tidak lagi sebagai eksportir produk primer dan importir produk manufaktur.

Bab 9

Pasar Valuta Asing dan Sistem Nilai Tukar

9.1 Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing (Forex, FX atau Foreign Exchange) adalah pasar terdesentralisasi atau *over the counter* (OTC) global untuk perdagangan mata uang. Pasar ini menentukan nilai tukar mata uang asing untuk setiap mata uang. Pasar valuta asing termasuk lingkup penukaran, pembelian, dan penjualan mata uang pada harga saat ini atau yang ditentukan. Dalam hal jumlah transaksi perdagangan, sejauh ini merupakan pasar forex terbesar di dunia, diikuti oleh pasar kredit (Wikipedia, 2021).

Pasar valuta asing (bahasa Inggris: *foreign exchange market, forex*) atau disingkat valas merupakan suatu jenis perdagangan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan di dalamnya pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan (I. Wikipedia, 2021). Pasar valuta asing (juga dikenal sebagai forex, FX, atau *foreign exchange market*) adalah pasar global *over-the-counter* (OTC) yang menjadi penentu nilai tukar mata uang negara di seluruh dunia. Peserta dapat membeli, menjual, menukar, dan berspekulasi tentang harga mata uang (Ganti, 2020).

Pasar valuta asing adalah tempat mata uang diperdagangkan. Mata uang penting bagi kebanyakan orang di seluruh dunia, disadari atau tidak, karena mata uang perlu dipertukarkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis luar negeri. Jika Anda tinggal di AS dan ingin membeli keju dari Turki, Anda atau perusahaan tempat Anda membeli keju harus membayar dalam mata uang Turki untuk keju dalam euro (EUR). Artinya, importir AS harus menukar nilai mata uang yang setara dari dolar AS (USD) ke euro. Hal ini berlaku juga, untuk bepergian. Seorang pelancong Turki di Mesir tidak dapat melakukan pembayaran dalam euro untuk melihat piramida karena itu bukan mata uang yang diterima secara lokal. Karena itu, pelancong harus menukar euro dengan mata uang negara yang dikunjungi tersebut, dalam hal ini pound Mesir, dengan nilai tukar saat itu (Chen, 2020).

Salah satu aspek unik dari pasar valuta asing ini, tidak adanya pasar sentral untuk valuta asing. Sebaliknya, transaksi mata uang dilakukan secara elektronik *over-the-counter* (OTC), yang berarti bahwa setiap transaksi terjadi melalui jaringan komputer antara pedagang valuta asing (trader forex) di seluruh dunia, bukan di satu bursa terpusat. Pasar buka 24 jam sehari, lima setengah hari seminggu, dan mata uang yang ditransaksikan di seluruh dunia di pusat keuangan utama New York, London, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Hongkong, Singapura, Sydney, dan Paris, hampir semua setiap zona waktu. Artinya, ketika hari perdagangan di AS berakhir, pasar valas baru dimulai di Tokyo dan Hong Kong. Dengan demikian, pasar forex sangat aktif setiap hari kecuali hari sabtu minggu, dengan fluktuasi harga yang terus berubah.

Tidak seperti pasar saham, yang dengan mudah dapat ditelusuri analisis fundamentalnya dari dahulu, pasar forex seperti yang kita pahami saat ini adalah pasar yang fluktuasi harga yang cepat berubah. Tentu saja, dalam pengertiannya yang paling mendasar, orang-orang yang menukar mata uang suatu negara ke mata uang negara lainnya, untuk keuntungan finansial, *foreign exchange* telah ada sejak negara-negara mulai mencetak mata uang. Tetapi pasar *foreign exchange modern* adalah penemuan modern. Setelah kesepakatan di Bretton Woods pada tahun 1971, lebih banyak mata uang utama diizinkan untuk mengambang bebas satu sama lain. Nilai mata uang individu bervariasi, yang telah menimbulkan kebutuhan akan pelayanan dan perdagangan valuta asing.

Bank komersial dan investasi melakukan sebagian besar transaksi di pasar valuta asing atas nama klien mereka, tetapi ada juga peluang spekulatif untuk *trading forex* atau transaksi mata uang suatu negara terhadap mata uang negara

lainnya untuk investor profesional dan individu. Pasar valuta asing terdiri dari bank, dealer valas, perusahaan komersial, bank sentral, perusahaan manajemen investasi, hedge fund, dealer valas ritel, dan investor.

Point Penting Pasar Valuta Asing, yaitu (Chen, 2020) (Ganti, 2020):

1. Pasar valuta asing (juga dikenal sebagai FX atau forex) adalah pasar global untuk menukar mata uang nasional satu sama lain.
2. Pasar valuta asing adalah pasar over-the-counter (OTC) yang menentukan nilai tukar mata uang global.
3. Sejauh ini, merupakan foreign exchange market terbesar di dunia dan terdiri dari jaringan global pusat keuangan yang bertransaksi 24 jam sehari, hanya tutup pada akhir pekan.
4. Mata uang selalu diperdagangkan berpasangan, jadi "nilai" salah satu mata uang dalam pasangan tersebut relatif terhadap nilai mata uang lainnya.
5. Karena jangkauan perdagangan, perdagangan, dan transaksi mata uang negara di seluruh dunia, pasar valuta asing condong menjadi pasar aset terbesar dan paling likuid di dunia.
6. Mata uang ditransaksikan satu sama lain sebagai pasangan nilai tukar. Misalnya, USD / JPY.
7. Pasar valuta asing ada sebagai pasar spot (tunai) serta pasar derivatif yang menawarkan forward, futures, options, dan pertukaran mata uang.
8. Pelaku pasar menggunakan valuta asing untuk melindungi nilai mata uang terhadap mata uang internasional dan risiko suku bunga, untuk berspekulasi tentang peristiwa geopolitik, dan untuk mendiversifikasi portofolio, di antara beberapa alasan lainnya.

9.1.1 Memahami Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing, juga disebut *foreign exchange*, FX, atau pasar mata uang adalah salah satu pasar keuangan asli yang dibentuk untuk membawa struktur pada ekonomi global yang sedang berkembang. Dalam hal volume perdagangan, sejauh ini merupakan pasar keuangan terbesar di dunia. Selain menyediakan tempat untuk membeli, menjual, menukar, dan spekulasi mata

uang, pasar forex juga memungkinkan konversi mata uang untuk penyelesaian perdagangan dan investasi internasional.

Menurut *Bank for International Settlements* (BIS), yang dimiliki oleh bank sentral, perdagangan di pasar valuta asing rata-rata \$ 6,6 triliun per hari pada April 2019 (Survey, 2019). Mata uang selalu diperdagangkan berpasangan, jadi "nilai" salah satu mata uang dalam pasangan tersebut relatif terhadap nilai mata uang lainnya. Ini menentukan berapa banyak mata uang negara X yang dapat dibeli oleh negara Y, dan sebaliknya. Membangun hubungan (harga) untuk pasar global ini merupakan fungsi utama dari pasar valuta asing. Ini juga sangat meningkatkan likuiditas di semua pasar keuangan lainnya, yang merupakan kunci stabilitas secara keseluruhan (Ganti, 2020).

Mata uang selalu diperdagangkan berpasangan, jadi "nilai" salah satu mata uang dalam pasangan tersebut relatif terhadap nilai mata uang lainnya. Ini menentukan berapa banyak mata uang negara X yang dapat dibeli oleh negara Y, dan sebaliknya. Membangun hubungan (harga) untuk pasar global ini merupakan fungsi utama dari pasar valuta asing. Ini juga sangat meningkatkan likuiditas di semua pasar keuangan lainnya, yang merupakan kunci stabilitas secara keseluruhan. Nilai mata uang suatu negara bergantung pada apakah itu "free float" atau "fixed float". Mata uang mengambang bebas adalah mata uang yang nilai relatifnya ditentukan oleh kekuatan pasar bebas, seperti hubungan penawaran-permintaan. Pelampung tetap adalah tempat badan pengatur suatu negara menetapkan nilai relatif mata uangnya ke mata uang lain, seringkali dengan mematoknya ke beberapa standar. Mata uang mengambang bebas termasuk dolar AS, yen Jepang, dan pound Inggris, sementara contoh mata uang mengambang tetap termasuk Yuan China dan Rupee India.

Salah satu fitur paling unik dari pasar valas adalah ia terdiri dari jaringan global pusat keuangan yang bertransaksi 24 jam sehari, hanya tutup pada akhir pekan. Ketika satu hub forex utama ditutup, hub lain di belahan dunia lain tetap terbuka untuk bisnis. Ini meningkatkan likuiditas yang tersedia di pasar mata uang, yang menambah daya tariknya sebagai kelas aset terbesar yang tersedia bagi investor (Ganti, 2020). Pasangan perdagangan yang paling likuid, dalam urutan likuiditas, yaitu (Survey, 2019):

1. EUR / USD
2. USD / JPY
3. GBP / USD

9.1.2 Intervensi Pasar Valuta Asing

Perkembangan pasar ekonomi untuk intervensi pasar valuta asing dan beberapa negara secara aktif melakukan intervensi dalam dekade terakhir ini, kecuali negara maju. Intervensi telah menjadi hal biasa di komunitas pasar valuta asing berkembang. Ada beberapa alasan mengapa negara maju tidak lagi aktif melakukan intervensi. Pertama, penelitian dan pengalaman menunjukkan bahwa instrumen tersebut hanya efektif jangka pendek, jika dilihat dari sisi suku bunga atau penyesuaian kebijakan lainnya. Tidak berdampak lama dan tidak independen pada nilai tukar nominal, intervensi dipandang tidak memiliki kekuatan bertahan lama, untuk memengaruhi nilai tukar riil valuta asing, dan dengan demikian kondisi persaingan untuk sektor valuta asing dapat berlangsung dengan baik. Alasan kedua adalah intervensi skala besar dapat merusak sikap kebijakan moneter. Alasan ketiga adalah bahwa pasar keuangan swasta memiliki kapasitas yang cukup untuk menyerap dan mengelola guncangan, sehingga tidak perlu intervensi nilai tukar valuta asing (View and Mihaljek, 2014).

Namun negara-negara pasar berkembang melakukan intervensi, mungkin karena mereka percaya instrumen tersebut menjadi alat yang efektif dalam keadaan dan situasi yang mereka hadapi. Perbedaan pandangan tersebut disebabkan oleh skala akumulasi cadangan devisa yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok pasar valuta asing sedang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Antara akhir 2001 dan akhir 2004, cadangan devisa global tumbuh lebih dari US \$1600 miliar, mencerminkan akumulasi cadangan ekonomi pasar berkembang di Asia. Banyak pengamat dari negara maju secara terbuka mengaitkan apresiasi mata uang Asia yang relatif lemah terhadap dolar AS yang terdepresiasi cepat dengan intervensi tersebut. Oleh karena itu, tampaknya ada kepercayaan umum bahwa intervensi oleh ekonomi pasar berkembang secara signifikan mengubah jalur nilai tukar riil valuta asing untuk waktu yang cukup lama, bahkan jika pandangan seperti itu bertentangan dengan kebijaksanaan yang diterima tentang intervensi dipasar valuta asing untuk mata uang utama (View and Mihaljek, 2014).

Penelitian ekonometrika biasanya menimbulkan keraguan pada kesimpulan efektivitas intervensi kasus nilai tukar valuta asing yang tidak fleksibel, meskipun seperti dicatat, penelitian semacam ini sering kali mencampurkan adukan intervensi untuk tujuan yang berbeda. Selain itu, efektivitas intervensi kemungkinan besar akan bergantung pada keadaan tertentu, studi efektivitas rata-rata tidak menjawab pertanyaan kapan intervensi valuta asing berhasil.

Dalam pasar spekulatif, harga harus sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia bagi pelaku pasar dan seharusnya tidak mungkin bagi pedagang valuta asing untuk mendapatkan keuntungan berlebih dari spekulasi. Kepentingan akademisi dalam efisiensi pasar valuta asing dapat ditelusuri argumen mengenai informasi harga pasar keuangan dan implikasinya terhadap efisiensi sosial. Dalam bentuk yang paling sederhana, hipotesis pasar efisien dapat direduksi menjadi hipotesis bersama bahwa pelaku pasar valuta asing, dalam arti agregat a) diberkahi dengan ekspektasi rasional dan b) rendah risiko. Hipotesis tersebut dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan risiko, sehingga kemudian menjadi hipotesis gabungan model equilibrium return (yang dapat menerima premi risiko/penyesuaian risiko) dan ekspektasi rasional (Taylor, 2019).

Jika hipotesis foreign exchange market rendah risiko berlaku, maka keuntungan valuta asing yang diharapkan dari memegang salah satu mata uang daripada mata uang lain (perubahan nilai tukar yang diharapkan) harus diimbangi dengan biaya peluang dari memegang dana dalam mata uang ini daripada yang lain (perbedaan suku bunga).

9.2 Sistem Nilai Tukar

Permintaan dan penawaran mata uang suatu negara menentukan nilai tukar mata uang tersebut. Tetapi pemerintah dapat melakukan intervensi untuk memengaruhi nilai tukar mata uang tersebut dengan berbagai cara. Tingkat keterlibatan pemerintah dalam *foreign exchange market* menjadi penentu sistem nilai tukar alternatif. Dalam melakukan intervensi pemerintah akan memeriksa terlebih dahulu beberapa sistem umum dan mengeksplorasi beberapa implikasi makro ekonomi pada sistem nilai tukar mata uang (Academy, Saylor, 2012).

Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara versus mata uang negara atau zona ekonomi lain. Misalnya, berapa dolar AS yang dibutuhkan untuk membeli satu euro? Pada tanggal 31 Juli 2020, nilai tukarnya adalah 1,18 yang berarti dibutuhkan \$ 1,18 untuk membeli € 1 (Fed, 2020). Contoh nyata sistem nilai tukar, King Nasrullah berwisata ke Jerman dari rumahnya di New York dan King Nasrullah ingin memastikan, berapa harga euro senilai 200 dolar ketika dia tiba di Jerman. King Nasrullah pergi ke toko money changer dan melihat bahwa nilai tukar saat ini adalah 1,20. Itu berarti jika King Nasrullah

menukar \$ 200, King Nasrullah akan mendapatkan € 166,66 sebagai gantinya (James Chen, 2020). Dalam hal ini, persamaannya adalah: dolar ÷ nilai tukar = euro atau $\$ 200 \div 1,20 = € 166,66$

King Nasrullah telah kembali dari perjalanannya, dan dia sekarang ingin menukar euro dengan dolar. Dia belum menggunakan € 166,66 dan sekarang nilai tukar telah turun menjadi 1,15. Dia menukar € 166,66 miliknya, dan karena penurunan nilai mata uang ketika dia pergi, dia hanya menerima \$ 191,67. Alasan dia mendapatkan lebih sedikit meskipun memiliki nilai euro yang sama adalah karena euro melemah terhadap dolar selama dia pergi. Dalam hal ini, persamaannya adalah sebaliknya: euro x kurs = dolar atau $€ 166,66 \times 1,15 = \$ 191,66$

Namun, tidak semua mata uang bekerja dengan cara yang sama. Misalnya, perhitungan yen Jepang berbeda. Dalam kasus ini, dolar ditempatkan di depan yen, seperti dalam USD / JPY.

Persamaan untuk USD / JPY adalah: dolar x nilai tukar = yen

Katakanlah seseorang yang bepergian ke Jepang ingin menukar \$ 100 menjadi yen, dan nilai tukarnya adalah 110. Pelancong itu akan mendapatkan ¥ 11.000. Untuk mengubah yen kembali menjadi dolar, orang perlu membagi jumlah mata uang dengan nilai tukar.

$$\$ 100 \times 110 = ¥ 11.000,00$$

atau

$$¥ 11.000,00 / 110 = \$ 100$$

Poin penting nilai tukar, yaitu (James Chen, 2020):

1. Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara vs. mata uang negara atau zona ekonomi lain.
2. Nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran dalam sistem float terkelola, tetapi pemerintah mengintervensi sebagai pembeli atau penjual mata uang dalam upaya untuk memengaruhi nilai tukar.
3. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
4. Sebagian besar nilai tukar mengambang bebas dan akan naik atau turun berdasarkan penawaran dan permintaan di pasar.
5. Beberapa mata uang tidak mengambang bebas dan memiliki batasan.

6. Dalam sistem nilai tukar tetap, nilai tukar antar mata uang tidak diperbolehkan untuk berubah. Standar emas dan sistem Bretton Woods adalah contoh sistem nilai tukar tetap.

Ada tiga besar kategori sistem nilai tukar. Dalam suatu sistem, nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar swasta tanpa adanya keterlibatan pemerintah. Nilai berubah secara konstan karena permintaan dan penawaran mata uang berfluktuasi. Dalam sistem yang lain, sistem nilai mata uang diperbolehkan untuk berubah, tetapi pemerintah berpartisipasi dalam pasar mata uang dalam upaya untuk memengaruhi nilai tersebut. Terakhir, pemerintah mungkin berusaha untuk menetapkan nilai mata uang, baik melalui partisipasi di pasar atau melalui kebijakan regulasi (Academy, Saylor, 2012).

9.2.1 Sistem Mengambang Bebas

Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas, pemerintah dan bank sentral tidak melakukan intervensi dalam pasar valuta asing. Hubungan antara pemerintah dan bank sentral di sisi pasar mata uang dan di sisi lain hampir mirip dengan hubungan antara pasar valuta asing dan pasar saham. Pemerintah dapat mengendalikan pasar saham untuk mencegah penipuan, tetapi harga saham itu sendiri dibiarkan mengambang di pasar. Pemerintah AS, misalnya, tidak menerapkan intervensi di pasar saham untuk memengaruhi harga saham (Academy, Saylor, 2012).

Sistem nilai tukar mengambang bebas adalah konsep teoritis. Dalam penerapannya, pemerintah atau bank sentral melakukan intervensi di pasar mata uang agar dapat memengaruhi sistem nilai tukar. Beberapa negara, seperti AS, melakukan intervensi hanya sedikit, sehingga gagasan sistem nilai tukar mengambang bebas mendekati apa yang sebenarnya ada di AS. Nilai tukar mengambang, atau nilai tukar berfluktuasi, adalah jenis sistem nilai tukar di mana nilai mata uang dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan pasar valuta asing. Mata uang yang menggunakan sistem nilai tukar mengambang dikenal sebagai mata uang mengambang. Dolar adalah contoh mata uang mengambang.

Banyak ekonom percaya sistem nilai tukar mengambang adalah sistem nilai tukar terbaik dikarenakan sistem ini secara otomatis menyesuaikan dengan keadaan ekonomi. Sistem ini memungkinkan suatu negara untuk meredam dampak guncangan dan siklus bisnis asing, dan untuk mencegah kemungkinan

terjadinya krisis neraca pembayaran. Namun, mereka juga menimbulkan ketidakpastian sebagai akibat dari dinamisme mereka.

Sistem mengambang bebas memiliki keuntungan karena dapat dikendalikan sendiri. Tidak perlu intervensi pemerintah, sistem nilai tukar diserahkan ke pasar. Kekuatan pasar juga menahan perubahan besar dalam permintaan atau penawaran. Misalkan, perubahan dramatis dalam mendahulukan dan diutamakan daripada yang lain atau prioritas dunia menyebabkan permintaan barang dan jasa yang diproduksi di Prancis meningkat tajam, tindakan ini akan meningkatkan permintaan akan euro Prancis, menaikkan nilai tukar Prancis, dan membuat barang dan jasa Prancis lebih mahal untuk dibeli orang asing. Dengan demikian, beberapa akibat dari kenaikan permintaan luar negeri akan terserap dalam kenaikan nilai tukar. Akibatnya, nilai tukar mengambang bebas bertindak sebagai penyokong untuk melindungi perekonomian dari dampak peristiwa internasional.

Kesulitan utama dengan sistem nilai tukar mengambang bebas terletak pada ketidakpastiannya. Kontrak antara penjual dan pembeli di berbagai negara tidak hanya harus memperhitungkan adanya kemungkinan perubahan harga dan faktor lain selama masa berlaku kontrak tersebut, mereka juga harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan nilai tukar. Misalnya, perjanjian distributor AS untuk membeli kayu Kanada dalam jumlah tertentu setiap tahun, misalnya, akan dipengaruhi oleh kemungkinan bahwa nilai tukar antara dolar Kanada dan dolar AS akan berubah selama kontrak berlaku. Nilai tukar yang berfluktuasi membuat transaksi internasional lebih berisiko dan dengan demikian meningkatkan biaya berbisnis dengan negara lain.

9.2.2 Sistem Float Terkelola

Pemerintah dan bank sentral berupaya untuk intervensi dengan cara menurunkan atau menaikkan nilai tukar mata uang dengan menjual atau membeli mata uang negara sendiri. Nilai tukar mata uang bergerak bebas mengambang, tetapi pemerintah melakukan intervensi sistem nilai tukar. Intervensi pemerintah atau bank sentral dalam sistem nilai tukar mengambang disebut managed float.

Negara-negara yang menerapkan sistem nilai tukar mengambang dari setiap saat berkeinginan melakukan intervensi di pasar mata uang dalam upaya melakukan intervensi menurunkan atau menaikkan harga mata uang negara sendiri. Biasanya, tujuan dari intervensi semacam itu adalah untuk

menghindari perubahan signifikan yang tiba-tiba terjadi dalam nilai mata uang suatu negara. Intervensi seperti ini kemungkinan hanya berdampak kecil, jika ada, pada sistem nilai tukar. Mata uang kisaran \$ 1,5 triliun berpindah tangan setiap hari di pasar dunia; Sulit bagi satu lembaga, bahkan lembaga sebesar pemerintah AS atau Fed, untuk memaksa perubahan signifikan dalam sistem nilai tukar.

Namun, pemerintah atau bank sentral terkadang dapat melakukan intervensi nilai tukar mereka. Misalkan harga mata uang suatu negara naik sangat cepat. Pemerintah atau bank sentral mungkin berusaha untuk menahan kenaikan lebih lanjut untuk mencegah penurunan besar dalam ekspor neto. Pengumuman bahwa kenaikan lanjutan dalam nilai tukarnya tidak dapat diterima, diikuti oleh penjualan mata uang negara tersebut oleh bank sentral untuk menurunkan nilai tukarnya, terkadang dapat meyakinkan peserta lain di pasar mata uang bahwa nilai tukar tidak akan naik lebih jauh. Perubahan ekspektasi tersebut dapat mengurangi permintaan dan meningkatkan penawaran mata uang, sehingga mencapai tujuan untuk menekan nilai tukar (Academy, Saylor, 2012).

9.2.3 Nilai Tukar Tetap

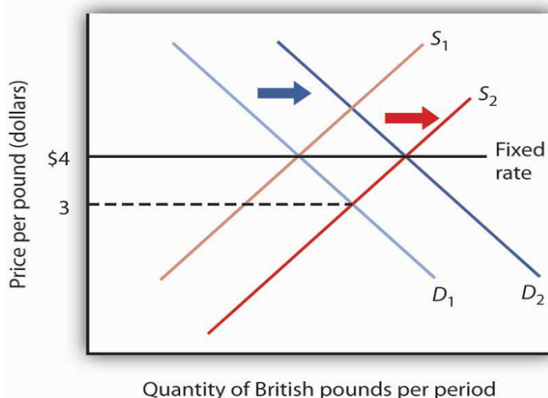
Dalam sistem nilai tukar tetap, nilai tukar antara dua mata uang ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Ada beberapa mekanisme yang melaluinya nilai tukar tetap dapat dipertahankan. Bagaimanapun sistem untuk mempertahankan nilai tukar ini, semua sistem nilai tukar tetap memiliki beberapa fitur penting. Nilai tukar tetap adalah sistem yang diterapkan oleh pemerintah atau bank sentral yang mengikat nilai tukar mata uang resmi suatu negara dengan mata uang negara lain atau harga emas. Tujuan dari sistem nilai tukar tetap adalah untuk menjaga nilai mata uang dalam rentang yang sempit (Christina Majaski, 2020).

Poin penting dalam nilai tukar tetap, yaitu (Christina Majaski, 2020):

1. Tujuan dari sistem nilai tukar tetap adalah untuk menjaga nilai mata uang dalam rentang yang sempit.
2. Nilai tukar tetap memberikan kepastian yang lebih besar bagi eksportir dan importir serta membantu pemerintah mempertahankan inflasi yang rendah.
3. Banyak negara industri mulai menggunakan sistem nilai tukar mengambang pada awal tahun 1970-an.

Tarif tetap memberikan kepastian yang lebih besar bagi eksportir dan importir. Suku bunga tetap juga membantu pemerintah mempertahankan inflasi yang rendah, yang dalam jangka panjang, menjaga suku bunga tetap rendah dan merangsang perdagangan dan investasi. Sebagian besar negara industri besar memiliki sistem nilai tukar mengambang, di mana harga yang berlaku di pasar valuta asing (forex) menetapkan harga mata uangnya. Praktik ini dimulai untuk negara-negara ini pada awal tahun 1970-an sementara negara berkembang melanjutkan sistem tarif tetap.

Perjanjian Bretton Woods menyerukan agar nilai setiap mata uang ditetapkan relatif terhadap mata uang lainnya. Mekanisme untuk mempertahankan suku bunga ini, bagaimanapun, adalah dengan intervensi oleh pemerintah dan bank sentral di pasar mata uang. Sekali lagi anggaplah nilai tukar antara dolar dan pound Inggris ditetapkan pada \$4 per £1. Anggaplah lebih jauh bahwa kurs ini adalah kurs ekuilibrium, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 9.1. Selama kurs tetap bertepatan dengan kurs ekuilibrium, kurs tetap beroperasi dengan cara yang sama seperti kurs mengambang bebas.



Gambar 9.1: Mempertahankan Nilai Tukar Tetap Melalui Intervensi
(Academy, Saylor, 2012)

Awalnya, harga ekuilibrium pound Inggris sama dengan \$4, kurs tetap antara pound dan dolar. Sekarang anggaplah peningkatan penawaran pound Inggris menurunkan harga ekuilibrium pound menjadi \$3. Bank of England dapat membeli pound dengan menjual dolar untuk menggeser kurva permintaan pound ke D 2. Alternatifnya, Fed dapat menggeser kurva permintaan ke D2 dengan membeli pound.

Sekarang anggaphlah Inggris memilih untuk membeli lebih banyak barang dan jasa AS. Kurva penawaran untuk pound meningkat, dan nilai tukar ekuilibrium untuk pound (dalam dolar) katakanlah jatuh ke harga \$3. Di bawah ketentuan Perjanjian Bretton Woods, Inggris dan Amerika Serikat akan diminta untuk campur tangan di pasar, untuk mengembalikan nilai tukar ke nilai yang ditetapkan dalam perjanjian, \$4. Jika penyesuaian akan dilakukan oleh bank sentral Inggris, Bank of England harus membeli pound. Itu akan dilakukan dengan menukar dolar yang sebelumnya diperolehnya dalam transaksi lain untuk pound. Karena menjual dolar, ia akan menerima cek yang ditulis dalam pound. Ketika bank sentral menjual aset, cek yang masuk ke bank sentral mengurangi jumlah uang beredar dan cadangan bank di negara itu. Pahami konsep jumlah uang beredar, misalnya, penjualan obligasi oleh Fed mengurangi jumlah uang beredar AS. Demikian pula, penjualan dolar oleh Bank of England akan mengurangi jumlah uang beredar Inggris. Untuk mengembalikan nilai tukarnya ke tingkat yang disepakati, Inggris harus melaksanakan kebijakan moneter kontraktif.

Alternatifnya, Fed dapat melakukan intervensi. Ia bisa membeli pound, menulis cek dalam dolar. Tetapi ketika bank sentral membeli aset, ia menambahkan cadangan ke sistem dan meningkatkan jumlah uang beredar. Amerika Serikat dengan demikian akan dipaksa untuk melaksanakan kebijakan moneter ekspansif. Gangguan domestik yang disebabkan oleh upaya untuk mempertahankan nilai tukar tetap mengakibatkan matinya sistem Bretton Woods. Jepang dan Jerman Barat menghentikan upaya untuk mempertahankan nilai tetap mata uang mereka pada musim semi tahun 1971 dan mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari sistem Bretton Woods. Presiden Richard Nixon menarik Amerika Serikat keluar dari sistem pada bulan Agustus tahun itu, dan sistem itu runtuh. Upaya untuk menghidupkan kembali nilai tukar tetap pada tahun 1973 segera runtuh, dan dunia telah beroperasi sebagian besar pada float terkelola sejak saat itu (Academy, Saylor, 2012).

Di bawah sistem Bretton Woods, Amerika Serikat telah menebus dolar yang dipegang oleh pemerintah lain dengan emas; Presiden Nixon menghentikan kebijakan saat itu, dia menarik Amerika Serikat dari sistem Bretton Woods. Dolar tidak lagi didukung oleh emas (Academy, Saylor, 2012). Sistem nilai tukar tetap menawarkan keuntungan dari nilai mata uang yang dapat diprediksi saat itu. Tetapi agar nilai tukar tetap berfungsi, negara-negara yang berpartisipasi di dalamnya harus menjaga kondisi ekonomi domestik yang

akan menjaga nilai mata uang ekuilibrium mendekati nilai tukar tetap. Negara yang berdaulat harus bersedia mengkoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal mereka. Mencapai koordinasi semacam itu di antara negara-negara merdeka bisa menjadi tugas yang sulit.

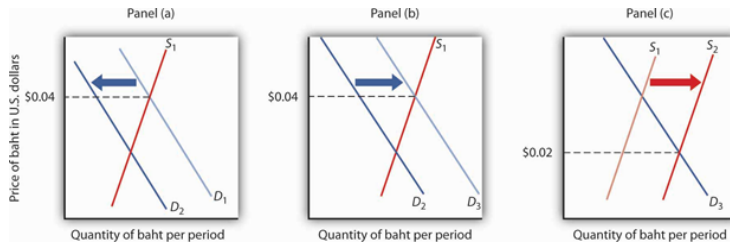
Sulitnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal bukan berarti tidak mungkin. Sebelas anggota Uni Eropa tidak hanya setuju untuk menetapkan nilai tukar mereka satu sama lain, mereka setuju untuk mengadopsi mata uang bersama, euro. Mata uang baru diperkenalkan pada tahun 1998 dan diadopsi sepenuhnya pada tahun 1999. Sejak itu, enam negara lain telah bergabung. Negara-negara yang mengadopsinya setuju untuk membatasi ketat pada kebijakan fiskal mereka. Masing-masing tetap memiliki bank sentralnya sendiri, tetapi bank sentral nasional ini beroperasi serupa dengan bank regional di Federal Reserve System di Amerika Serikat. Bank Sentral Eropa yang baru melakukan kebijakan moneter di seluruh wilayah. Rincian usaha revolusioner ini dan masalah luar biasa yang ditemuinya dalam beberapa tahun terakhir disajikan dalam Case in Point (Academy, Saylor, 2012).

Ketika nilai tukar ditetapkan tetapi kebijakan fiskal dan moneter tidak terkoordinasi, nilai tukar ekuilibrium dapat bergerak menjauh dari tingkat tetapnya. Begitu nilai tukar mulai menyimpang, upaya untuk memaksa naik atau turun mata uang melalui intervensi pasar bisa sangat mengganggu. Dan ketika negara-negara tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan upaya itu, nilai tukar dapat berayun tajam ke satu arah atau lainnya. Ketika itu terjadi, nilai utama dari nilai tukar tetap, prediktabilitasnya hilang.

Pengalaman Thailand dengan baht menggambarkan potensi kesulitan dengan upaya untuk mempertahankan nilai tukar tetap. Bank sentral Thailand telah mempertahankan nilai tukar antara dolar dan baht dengan stabil, dengan harga baht \$0,04. Beberapa faktor, termasuk kelemahan dalam ekonomi Jepang, mengurangi permintaan ekspor Thailand dan dengan demikian mengurangi permintaan untuk baht, seperti yang ditunjukkan pada Panel (a) pada Gambar 9.2. Bank sentral Thailand, berkomitmen untuk mempertahankan harga baht pada \$ 0,04, membeli baht untuk meningkatkan permintaan, seperti yang ditunjukkan pada Panel (b). Bank sentral membeli mata uang mereka sendiri menggunakan cadangan mata uang asing mereka. Biasanya ketika bank sentral menjual obligasi, jumlah uang beredar turun. Ketika menjual mata uang asing, hasilnya tidak berbeda.

Penjualan mata uang asing oleh bank sentral Thailand untuk membeli baht sehingga mengurangi suplai uang Thailand dan mengurangi kepemilikan bank atas mata uang asing. Ketika pedagang mata uang mulai curiga bahwa bank mungkin akan melepaskan upayanya untuk menahan nilai baht, mereka menjual baht, menggeser kurva penawaran ke kanan, seperti yang ditunjukkan pada Panel (c). Hal itu memaksa bank sentral untuk membeli lebih banyak lagi baht, bahkan menjual lebih banyak mata uang asing, sampai akhirnya menyerah dan membiarkan baht menjadi mata uang yang mengambang bebas. Pada akhir tahun 1997, baht telah kehilangan hampir setengah nilainya relatif terhadap dolar.

Kelemahan dalam perekonomian Jepang, di antara faktor-faktor lain, menyebabkan penurunan permintaan baht (Panel [a]). Itu memberi tekanan ke bawah pada nilai baht relatif terhadap mata uang lain. Berkomitmen untuk menjaga harga baht pada \$ 0.04, bank sentral Thailand membeli baht untuk meningkatkan permintaan, seperti yang ditunjukkan pada Panel (b). Namun, karena pemegang baht dan aset Thailand lainnya mulai khawatir bahwa bank sentral akan melepaskan upayanya untuk menopang baht, mereka menjual baht, menggeser kurva penawaran untuk baht ke kanan (Panel [c]) dan menempatkan lebih banyak tekanan ke bawah pada harga baht. Akhirnya, pada Juli 1997, bank sentral menghentikan upayanya untuk menopang mata uang. Pada akhir tahun, nilai dolar baht turun menjadi sekitar \$ 0,02 (Academy, Saylor, 2012).



Gambar 9.2: Anatomi Keruntuhan Mata Uang (Academy, Saylor, 2012)

Penurunan baht adalah yang pertama dalam rantai krisis mata uang yang mengguncang dunia pada tahun 1997 dan 1998. Perdagangan internasional memiliki manfaat besar untuk meningkatkan ketersediaan barang dan jasa bagi dunia. konsumen. Tetapi perdagangan pembiayaan dan cara negara menangani pembiayaan itu, menimbulkan kesulitan. Contoh lainnya sistem nilai tukar tetap yang pernah terjadi, pada tahun 2018, menurut BBC News, Iran menetapkan nilai tukar tetap 42.000 real terhadap dolar, setelah kehilangan 8%

terhadap dolar dalam sehari. Pemerintah memutuskan untuk menghilangkan perbedaan antara tarif yang digunakan pedagang 60.000 real dan tarif resmi, yang pada saat itu 37.000 (Christina Majaski, 2020).

Bab 10

Neraca Pembayaran Internasional

10.1 Konsep dan Struktur Neraca Pembayaran Internasional

Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran (keluar dan masuk) untuk suatu negara. Ikhtisar sistematis dari semua transaksi ekonomi tersebut dinyatakan dalam uang (valuta asing). Sejalan dengan Ekananda (2015), neraca pembayaran adalah catatan sistematis mengenai semua transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara-negara lain selama periode tertentu. Pengertian penduduk dalam hal ini adalah meliputi perorangan (individu), perusahaan, badan hukum, badan pemerintah, atau siapa saja yang tempat tinggal utamanya di negara tersebut.

Neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang/jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk (resident) suatu negara dan

penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode waktu tertentu, biasanya satu tahun (Hady, 2009). Neraca pembayaran disusun dengan sistem akuntansi yang dikenal dengan “double entry book” yang mana setiap transaksi akan tercatat dua kali, yaitu sebagai debit dan kredit. Sehingga neraca pembayaran selalu seimbang.

Lebih lanjut Ekananda menjelaskan bahwa neraca pembayaran internasional suatu negara yang biasanya disebut neraca pembayaran, neraca pembayaran luar negeri, ‘balance of payments’, ‘balance of international payments’ ‘international balance of payments’, biasanya didefinisikan sebagai suatu ikhtisar yang tersusun secara sistematis yang memuat semua transaksi ekonomi luar negeri yang diadakan oleh penduduk suatu negara bersangkutan, untuk jangka waktu tertentu.

Neraca pembayaran internasional memiliki beberapa istilah, misalkan menurut Pippenger (1973) menyebut sebagai Neraca Pembayaran (NP) atau Neraca Pembayaran Luar Negeri (NPLN), senada dengan Soediyono (1987) dalam bahasa Inggris dalam istilah *Balance of Payments* (BOP) atau *Balance of International Payments* (BIP) atau *International Balance Of Payments* (IBP). Neraca pembayaran secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Pencatatan transaksi dilakukan dengan pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping system), yaitu; tiap transaksi dicatat satu sebagai kredit dan satu lagi sebagai debit. Di mana transaksi ekonomi dimaksud adalah kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa, arus masuk dan keluarnya modal, hibah, dan pembayaran transfer lain (Lanciaux, 1990; Blejer, Khan and Masson, 1995; Nwaobi, 2003).

Transaksi debit, merupakan transaksi yang mengakibatkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain: Misalkan Indonesia mengimpor barang elektronik dari Jepang, transaksi ini dicatat dalam neraca pembayaran sebagai transaksi debit karena Indonesia sekarang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada Jepang. Sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang mengakibatkan hak untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Misalkan Indonesia mengeksport kakao ke Amerika Serikat, transaksi ini dicatat dalam neraca pembayaran sebagai transaksi kredit karena Indonesia sekarang mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari Amerika Serikat.

Setiap Negara diwajibkan mencatat segala nilai kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan Negara lain yang biasa disebut sebagai neraca, baik dalam

neraca perdagangan maupun neraca pembayaran. Neraca perdagangan merupakan neraca yang mencatat transaksi bidang perdagangan sedangkan neraca yang mencatat semua aliran keuangan sebuah Negara disebut neraca pembayaran. Adapun struktur neraca pembayaran internasional yang dibuat sebuah Negara yang merupakan model yang dikembangkan Bank Dunia

Tabel 10.1: Struktur Neraca Pembayaran Internasional

Balance of Payment	Credits	Debits
Current Account	* Export of goods & non-factor services	* Import of goods nonfactor services
	* Exports of factor services	* Imports of factor services
	* Private unrequited transfer (by nonresidents)	* Private unrequited transfer (by residents)
	* Emigrant remittances	
	* Private grants	
	official unrequited transfers (by foreign government)	official unrequited transfers (by national government)
Capital Account	* Foreign direct investment (by non residents) (disinvestment shown as negative)	* Foreign direct investment (by non residents) (disinvestment shown as negative)
	* Portfolio investment (by non residents (amortizations shown as negative)	* Portfolio investment (by non residents (amortizations shown as negative)
	* Other long-term capital inflows (by nonresidents) (amortizations shown as negative)	* Other long-term capital outflows (by nonresidents) (amortizations shown as negative)
Reserve Account	Net changes in reserves	

Sumber: Wold Bank, World Debt Tables dalam Kuncoro (2009)

Lebih lanjut Kuncoro (2009) juga mengemukakan bahwa di samping catatan kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut di dalam NPI juga tercatat perubahan cadangan devisa suatu negara. Hal-hal tersebut terjadi akibat adanya hubungan ekonomi antar negara. Hubungan itu dapat berlangsung antar pemerintah; antar penduduk, yakni kalangan swasta atau masyarakat; dan antara pemerintah suatu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk yang dimaksudkan disini tidak selalu berarti orang perorangan, tapi juga berupa perusahaan atau lembaga berbadan hukum (lihat juga Kavous, 2005). Kemudian Kuncoro (2009), menjelaskan masing-masing unsur NPI tersebut di atas sebagai berikut:

Rekening Transaksi Berjalan (current account)

Rekening transaksi berjalan (current account) atau biasanya disebut sebagai Neraca perdagangan merupakan sub NPI yang mencatat seluruh transaksi barang dan jasa. Transaksi berjalan umumnya digunakan untuk menilai neraca perdagangan. Transaksi ini meliputi ekspor maupun impor barang-barang dan jasa. Ekspor barang meliputi barang-barang yang bisa dilihat secara fisik, seperti misalnya, minyak, kayu, tembakau, dan sebagainya. Ekspor jasa seperti misalnya: penjualan jasa-jasa angkutan, *tourisme* dan asuransi. Dalam transaksi jasa ini termasuk juga pendapatan dari pendapatan investasi kapital di luar negeri.

Ekspor barang-barang dan jasa merupakan transaksi kredit sebab transaksi ini menimbulkan hak untuk menerima pembayaran (menyebabkan terjadinya aliran dana masuk). Impor barang-barang meliputi misalnya: barang-barang konsumsi, bahan mentah untuk industri dan kapital; sedang impor jasa meliputi pembelian jasa-jasa dari penduduk negara lain. Termasuk dalam impor jasa adalah pembayaran pendapatan (bunga, dividen dan keuntungan) untuk modal yang ditanam di dalam negeri oleh penduduk negara lain. Impor barang-barang dan jasa merupakan transaksi debit sebab transaksi ini menimbulkan kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain (menyebabkan aliran dana keluar negeri).

Transaksi yang sedang berjalan mempunyai arti khusus. Surplus transaksi yang sedang berjalan menunjukkan bahwa ekspor lebih besar dari impor. Ini berarti bahwa suatu negara mengalami akumulasi kekayaan valuta asing, sehingga mempunyai saldo positif dalam investasi luar negeri. Sebaliknya defisit dalam transaksi yang sedang berjalan berarti impor lebih besar dari ekspor, sehingga terjadi pengurangan investasi di luar negeri. Dengan

demikian transaksi yang sedang berjalan sangat erat hubungannya dengan pendapatan nasional, sebab ekspor dan impor merupakan komponen pendapatan nasional. Hal ini dapat dilihat dari persamaan pendapatan nasional di bawah ini: $Y = C + I + G + X - M$

Di mana Y adalah pendapatan nasional, C untuk pengeluaran konsumsi, I adalah pengeluaran investasi (swasta), G adalah pengeluaran pemerintah, dan $(X - M)$ adalah neraca perdagangan (neto). Apabila $(X - M)$ positif berarti $(C + I + G) < Y$, implikasinya bahwa suatu negara menghasilkan lebih banyak dari yang digunakan sehingga kelebihannya dijual keluar negeri. Sebaliknya, negatif $(X - M)$ berarti negara itu pengeluarannya lebih besar daripada yang dihasilkan. Dengan demikian jelas bahwa suatu negara akan bisa memperbaiki neraca perdagangannya apabila dapat meningkatkan hasil nasional lebih besar daripada penggunaannya.

Rekening ini terdiri atas tiga bagian yaitu: (a) neraca perdagangan (balance of trade), yang mencatat selisih antara ekspor dan impor barang yang diperdagangkan dalam perdagangan internasional; (b) neraca jasa (services balance), yang mencatat transaksi ekspor dan impor jasa, termasuk pembayaran bunga dan dividen, pengeluaran militer dan turis; (c) neraca transfer unilateral (unilateral transfers balance), yang mencatat hibah baik dari perseorangan maupun pemerintah (misalnya bantuan luar negeri dan bantuan militer). Sumber-sumber dana ditunjukkan oleh tanda positif (kredit), sedang penggunaan dana ditunjukkan oleh tanda negatif (debit).

Defisit dan Surplus pada current account.

Defisit pada current account tidak selalu berarti buruk, dan sebaliknya, surplus juga tidak selalu berarti baik. Pada zaman dulu, para ahli ekonomi dan negara selalu mengupayakan kondisi surplus dan menyebutnya sebagai “favorable condition”, sedangkan kondisi defisit disebut sebagai “unfavorable condition”. Sampai sekarang kaum merkantilisme masih percaya mengenai hal tersebut. Namun para ahli ekonomi kini berpendapat lain. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah penyebab terjadinya defisit atau surplus tersebut.

Ada beberapa kondisi yang mungkin dialami negara ketika current account-nya mengalami defisit:

1. Konsumsi melebihi jumlah yang mampu diproduksi. Kondisi ini dalam jangka panjang akan membahayakan perekonomian karena defisit yang terjadi cenderung ditutupi dengan hutang luar negeri

maupun penjualan aset ke luar negeri, yang akan membutuhkan “pembayaran” dimasa yang akan datang.

2. Menurunnya “competitive advantage” produk suatu negara di negara lain. Hal ini biasanya disebabkan oleh harga yang lebih mahal. Harga yang lebih mahal membuat produk domestik kurang menarik bagi konsumen di negara lain. Ini terutama sering dikaitkan dengan kurs tukar. Kurs tukar yang terlalu kuat akan mengakibatkan harga produk suatu negara menjadi relatif mahal di luar negeri, sehingga konsumen luar negeri menjadi enggan untuk membeli.

Menurut para ahli, ada beberapa alasan mengapa kondisi current account yang defisit tidak perlu dikhawatirkan:

1. Jika defisit current account didanai dengan capital inflow jangka panjang, maka ini dapat menguntungkan bagi ekonomi karena akan meningkatkan kapasitas produksi di negara tersebut.
2. Di era globalisasi seperti sekarang ini, mencari dana untuk mendanai defisit tidaklah susah.
3. Jika defisit sudah terlalu besar, maka akan mengakibatkan devaluasi pada mata uang sehingga dapat membantu mengurangi defisit. Ketika terjadi devaluasi, harga produk ekspor suatu negara akan relatif murah bagi konsumen di negara lain, sehingga permintaan ekspor akan bertambah. Sebaliknya, harga produk impor akan relatif lebih mahal di dalam negeri, sehingga permintaan produk impor akan berkurang.

Namun ada juga alasan-alasan mengapa kita perlu mengkhawatirkan kondisi current account yang defisit:

1. Defisit yang terjadi dalam jangka panjang perlu diwaspadai karena membutuhkan pendanaan terus menerus. Pendanaan ini biasanya berupa pinjaman dari luar negeri (sehingga ada surplus pada financial account), yang tentu saja harus dikembalikan di masa depan. jika defisit yang terjadi melebihi 6% dari GDP, maka akan berbahaya jika negara bergantung pada aliran dana dari luar (capital inflow).

2. Banyak negara tidak mampu meminjam dalam jumlah besar dan pada tingkat bunga yang rendah, apalagi jika tidak ada kepercayaan dari dunia internasional. Jika ini yang terjadi, maka negara terpaksa harus menaikkan suku bunga agar dapat menarik dana dari investor asing, yang tentunya juga dapat mengakibatkan masalah baru bagi kondisi makro ekonomi di dalam negeri.
3. Defisit yang terlalu besar dapat menjadi tanda terjadinya ketidakseimbangan dalam ekonomi, kelemahan struktural, dan sektor produksi yang tidak ‘kompetitif’. Biasanya ini mengakibatkan konsumsi yang melebihi produksi, sehingga diperlukan impor untuk menutupi kekurangan tersebut. Selain itu, pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah juga dapat meningkatkan permintaan agregat, sehingga permintaan konsumsi impor ikut bertambah.
4. Defisit pada current account cenderung akan menaikkan hutang luar negeri. Dalam jangka panjang, defisit yang pada mulanya hanya terjadi di current account ini dapat berimbas ke financial account karena pinjaman luar negeri tersebut akan membutuhkan pembayaran bunga dan cicilan hutang. Contoh lainnya adalah penjualan saham ke luar negeri untuk mendapatkan devisa guna menutupi defisit current account, suatu saat tentu harus dibayar dividennya. Sama halnya dengan penjualan obligasi ke luar negeri, suatu saat akan memerlukan pembayaran bunga dan nilai muka (face value) obligasi.

Rekening modal (capital account)

Rekening modal (capital account) merupakan sub NPI yang menunjukkan aliran modal finansial, baik yang langsung diperdagangkan (perubahan portofolio dalam bentuk saham, obligasi dan surat berharga internasional yang lain) maupun untuk membayar barang dan jasa. Dengan kata lain, rekening ini mencerminkan perubahan kepemilikan jangka panjang dari suatu negara (baik berupa investasi asing langsung maupun pembelian surat-surat berharga dengan jatuh tempo lebih dari satu tahun), dan kekayaan finansial jangka pendek (surat-surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun).

Dengan demikian, transaksi dalam rekening modal diklasifikasikan sebagai:
(a) investasi portofolio (pembelian aset finansial dengan masa jatuh tempo

lebih dari satu tahun); (b) investasi jangka pendek (surat berharga dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun); (c) investasi asing langsung di mana terdapat kontrol manajemen baik parsial maupun penuh; (d) pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah.

Reserve Account

Reserve Account merupakan sub NPI yang mencatat hasil bersih dari cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk valuta-valuta asing. Transaksi ini mengukur perubahan-perubahan dalam cadangan internasional yang dimiliki oleh otoritas keuangan suatu negara. Hal ini mencerminkan surplus atau defisit transaksi-transaksi ekonomi neraca berjalan dan neraca modal suatu negara yang dihasilkan dengan cara mencari nilai selisih (netting) dari cadangan aset dan cadangan hutang. Cadangan devisa terdiri dari: Cadangan internasional yang terdiri dari emas dan aset luar negeri yang dapat diperdagangkan. Atau merupakan transaksi yang menimbulkan perubahan pada persediaan emas dalam suatu negara.

Lalu Lintas Moneter (Accommodating Transaction)

Transaksi lalu lintas moneter adalah semua transaksi jual beli yang terjadi dari suatu negara ke luar negeri. Transaksi ini sering disebut accomodating transaction sebab merupakan transaksi yang timbul sebagai akibat dari adanya transaksi lain. Transaksi lain itu sering disebut dengan autonomous, karena timbul dengan sendirinya, tanpa dipengaruhi transaksi lain. Termasuk dalam transaksi autonomous adalah transaksi-transaksi yang sedang berjalan dan transaksi kapital serta transaksi satu arah.

Surplus dan Defisit Neraca Pembayaran

Neraca perdagangan dikatakan surplus bila nilai ekspor barang lebih besar daripada impornya. Kebijakan neraca pembayaran ditujukan untuk lebih meningkatkan penerimaan devisa dari ekspor guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kebijakan tersebut ditujukan pula untuk menghemat devisa melalui substitusi impor dan memanfaatkan sumber sumber dana dari luar negeri, baik berupa pinjaman maupun penanaman modal asing, serta menunjang perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan.

Secara teoritis neraca pembayaran, harus berada pada kondisi nol (ekuilibrium), namun pada kenyataannya ini seringkali tidak tercapai. Menurut Hady (2009), *Disequilibrium* menurut penyebabnya dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Disequilibrium seasonal atau musiman yang berlangsung singkat dan mudah diatasi dan biasanya terjadi pada periode tertentu, misalkan pada hari Lebaran/Natal, musim dingin/panas, dan lain-lain. Disequilibrium ini biasanya akan berakhir dengan sendirinya setelah melewati periodenya;
2. Disequilibrium cyclical atau siklus, yaitu disequilibrium yang terjadi karena adanya gelombang konjungtur dalam perekonomian sebagai akibat perubahan harga, tingkat produksi, tingkat employment baik di dalam /luar negeri. Disequilibrium ini dapat diatasi oleh pemerintah dengan menjalankan berbagai kebijakan moneter dan fiskal;
3. Disequilibrium structural, yaitu disequilibrium yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan demand dan supply dalam perdagangan dan keuangan internasional sebagai akibat dari perubahan proses produksi karena kemajuan teknologi, perubahan aliran modal jangka panjang, perubahan institusi, dan lain-lain. Untuk mengatasi ini diperlukan kebijakan ekonomi makro yang komprehensif dan jangka panjang. Misalnya untuk mengatasi defisit neraca jasa Indonesia yang sebenarnya merupakan pencerminan dari relatif rendahnya kualitas SDM Indonesia diperlukan suatu perencanaan ekonomi dan nonekonomi yang komprehensif dan berjangka panjang;
4. Disequilibrium spekulasi, yaitu disequilibrium yang terjadi karena adanya aliran modal yang terjadi karena unsur-unsur spekulasi seperti yang terjadi di Indonesia sejak krisis moneter Juli 1997. Untuk mengatasinya antara lain dilakukan peniadaan unsur-unsur spekulasi dengan menjalankan berbagai kebijakan yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengurangi defisit neraca pembayaran dapat ditempuh beberapa kebijakan, sebagai berikut:

1. Devaluasi, yaitu dengan menurunkan kurs tukar. Penurunan kurs tukar berarti harga barang ekspor akan lebih murah bagi konsumen luar negeri (karena kurs tukar kita melemah), dan sebaliknya harga barang impor akan menjadi mahal bagi konsumen dalam negeri. Ini

- akan mendorong ekspor dan menurunkan impor, sehingga pada akhirnya dapat memperbaiki defisit pada BOP.
2. Deflasi, yaitu dengan menurunkan tingkat harga umum (deflasi terjadi ketika tingkat inflasi adalah minus). Dengan tujuan untuk menurunkan permintaan agregat, pemerintah akan menaikkan pajak atau suku bunga. Naiknya pajak akan menggerus daya beli masyarakat, sedangkan naiknya suku bunga akan mendorong masyarakat untuk menabung (sehingga konsumsi berkurang). Ketika konsumsi berkurang, impor diharapkan ikut berkurang dan mengurangi defisit. Namun kebijakan ini sangat bergantung pada elastisitas permintaan akan barang impor. Selain itu juga dapat bertentangan dengan kebijakan ekonomi makro ekonomi lainnya karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menambah pengangguran.
 3. Kebijakan supply side, yaitu kebijakan dari sisi penawaran dalam suatu perekonomian. Caranya adalah dengan memanipulasi sisi penawaran (produksi) sehingga dalam jangka panjang akan meningkatkan kekompetitifan ekonomi dan ekspor negara.
 4. Proteksionisme. Misalnya dengan menaikkan tarif/cukai, memberlakukan kuota, persyaratan impor yang ketat, syarat kandungan impor, dan lainnya sebagainya. Intinya adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Dampak negatifnya, kebijakan ini dapat menghambat produksi dalam negeri sehingga potensi ekspor ikut turun. Selain itu, industri lokal mungkin menjadi kurang kompetitif karena diproteksi

Untuk Indonesia sendiri, membuat neraca pembayaran berdasarkan *Balance of Payment Manual* dan *Balance of Payment Textbook* yang diterbitkan oleh IMF (Hady, 2009). Berikut ini adalah struktur BOP Indonesia yang dipublikasikan oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia:

Tabel 10.2: Struktur Balance of Payment Indonesia

No	Komponen	
I	Current Account Neraca Transaksi Berjalan (1+2+3)	
	1	Balance of Trade (Neraca Perdagangan) terdiri dari Export commodity (Ekspor barang) dan Import commodity (Impor Barang)
	2	Services account (neraca jasa)
	3	Unilateral account (neraca transaksi sepihak)
II	Capital Account (neraca modal)	
	1	Capital import baik Pemerintah (pinjaman CGI dan lain-lain) maupun Swasta (PMA)
	2	Capital Export baik Pemerintah (cicilan pokok pinjaman) maupun swasta
III	Perubahan Cadangan Devisa	
IV	Error and omission	
V	Monetary account (OverallBalance)	

Sumber: Depkeu dan BI dalam (Hady, 2009)

10.2 Fungsi dan Tujuan Neraca Pembayaran Internasional

Tujuan utama neraca pembayaran internasional yaitu untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang posisi keuangannya, khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain. Neraca pembayaran Internasional juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan bidang moneter, fiskal, perdagangan dan pembayaran internasional.

Menurut Bank Indonesia (2008), neraca pembayaran dibuat dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian;
2. Mengetahui aliran sumber daya dengan negara lain;
3. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan;
4. Mengetahui permasalahan utang luar negeri;
5. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar;
6. Sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun anggaran devisa; serta
7. Sebagai sumber data penyusunan statistik neraca nasional (national account).

Penyusunan neraca pembayaran internasional mempunyai beberapa tujuan, di antaranya sebagai berikut:

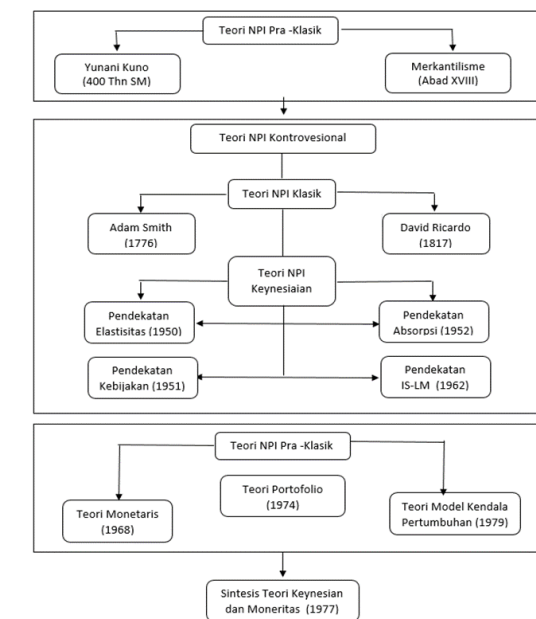
1. Sebagai bahan keterangan kepada pemerintah mengenai posisi internasional negara yang bersangkutan.
2. Sebagai bahan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik perdagangan dari urusan pembayarannya.
3. Sebagai bahan untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang politik moneter dan fiskal.

Sementara fungsi neraca pembayaran internasional adalah sebagai berikut.

1. Sebagai suatu alat pembukuan dan alat pembayaran luar negeri agar pemerintah dapat mengambil keputusan, apakah negara dapat melanjutkan masuknya barang-barang luar negeri dan dapat menyelesaikan pembayaran tepat pada waktunya.
2. Sebagai suatu alat untuk menjelaskan pengaruh dan transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional.
3. Sebagai suatu alat untuk mengukur keadaan perekonomian dalam hubungan internasional dari suatu negara.
4. Sebagai suatu alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara.

10.3 Teori Neraca Pembayaran Internasional

Landreth, et.al, (2002) mengelompokkan teori-teori tentang Neraca Pembayaran Internasional menjadi: 1) Teori NPI Pra Klasik (Pre-Classical Theory), 2) Teori NPI Klasik (Classical Theory), 3) Teori NPI Keynesian (Keynesian Theory), 4) Teori NPI Neo-Klasik atau Moneteris (Neo-Classical Theory of Monetary Theory) dan 5) Teori Model Kendala Pertumbuhan (The Balance of Payments Constrained Growth Model Theory). Masing-masing teori tersebut memiliki perbedaan dari aspek asumsi, variabel, dan proporsinya (lihat juga (Lihat juga Snowdown, 1995; Sukirno, 2000 dan McCombie, et.al, 2002). Pemikiran atau pandangan masing-masing kelompok tersebut dapat diuraikan satu per satu di bawah ini. Secara skematis perkembangan pemikiran teori NPI seperti ditunjukkan dalam Gambar 10.1 sebelumnya.



Gambar 10.1: Perkembangan Teori Neraca Pembayaran Sumber: Landreth (2002)

10.3.1 Pemikiran Teori NPI Pra-Klasik

Pada masa Yunani kuno, konsep pemikiran ekonomi tidak bisa terlepas dari bagian filsafat moral (Landreth, et.al., 2002). Pemikiran tentang ekonomi pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan atau kepatutan yang perlu diperhatikan dalam rangka penciptaan suatu masyarakat adil dan makmur secara merata. Salah seorang murid Plato yaitu Aristoteles (384-322 SM) yang meletakkan pemikiran dasar tentang teori nilai (value) dan harga (price). Kontribusi paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang (exchange of commodities) dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Pemikiran inilah yang selanjutnya mendorong negara (kota) pada waktu itu melakukan perdagangan antara negara (kota). Berdagang adalah aktivitas yang tidak didorong oleh motif faedah (use) saja tetapi juga oleh motif laba (gain).

Masih menurut Landreth, et.al., (2002) bahwa pandangan Aristoteles tersebut semakin dipertegas oleh Xenophon (440-355 SM) melalui karya utamanya *On the Means of Improving the Revenue of the State of Athens*. Xenophon menguraikan bahwa negara Athena yang mempunyai beberapa kelebihan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Xenophon melihat bahwa Athena sangat potensial untuk menarik para pedagang dan pengunjung dari daerah-daerah lain. Untuk itu perlu pelayanan yang baik agar makin banyak orang yang mau datang berdagang dan berkunjung. Dengan demikian semakin besar pula pendapatan negara dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa spirit merkantilisme sudah ada sejak masa Yunani Kuno. Spirit yang menganjurkan orang melakukan perdagangan dengan negara-negara lain.

Perkembangan teori neraca pembayaran pertama kali dikemukakan oleh Thomas Mun. Nopirin (1998) menjelaskan bahwa seiring dengan terjadinya perkembangan yang sangat pesat dalam organisasi kegiatan ekonomi dan masyarakat pada abad ke- XVII, berkembanglah suatu paham merkantilisme yang mempunyai pengaruh cukup besar di Eropa khususnya di Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas dan perak.

Lebih lanjut Nwaobi (2003) mengemukakan bahwa bagi penganut merkantilisme sumber kekayaan negara adalah dari perdagangan luar negeri.

Oleh karena itu, kebijaksanaan perdagangan waktu itu sangat mendorong ekspor dan sedapat mungkin berusaha agar impor dibatasi. Tercatat salah seorang tokoh merkantilis yang mempunyai karya tulis tentang perdagangan luar negeri yaitu Thomas Mun (1571- 1641). Karya tulisnya adalah *A Discourse of Trade, From England unto The East-Indies* (1621) dan *England's Treasure by Foreign Trade or, The Balance of Our Foreign Trade is the Rule of Our Treasure* (1664). Thomas Mun mengemukakan bahwa salah satu prinsip neraca perdagangan adalah harus surplus. Mun merekomendasikan perdagangan internasional harus diatur oleh pemerintah dengan cara menekankan pembatasan impor dan secara terus menerus berusaha mendorong ekspor. Thomas Mun yang memberikan kontribusi pemikiran tentang pentingnya surplus perdagangan internasional. Menurutnya negara harus mengendalikan ekspor dan impor melalui kebijakan tarif, kuota, subsidi, pajak dan alat-alat lainnya yang dapat membuat neraca perdagangan selalu surplus.

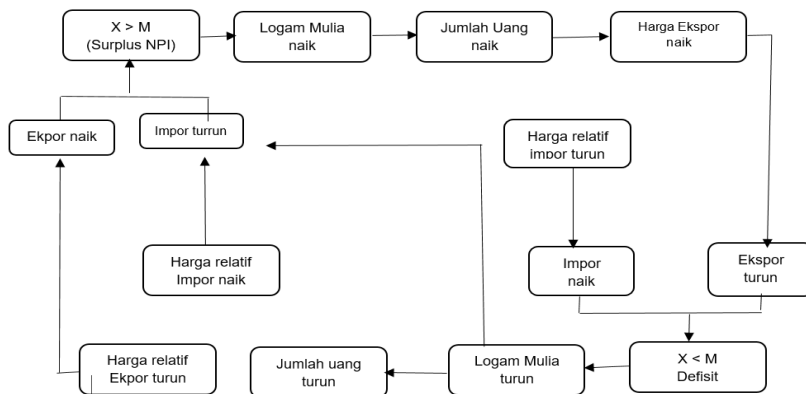
Tabel 10.3: Ringkasan Pemikiran Teori NPI Pra-Klasik

Teori NPI	Asumsi	Variabel Pengaruh NPI	Proporsi	Penulis
<u>A.</u> <u>Praklasik</u>	1. Berdagang didorong motif manfaat dan laba	Tarif, kuota, subsidi dan pajak. Namun menurut David Hume tidak perlu campur tangan pemerintah	Apabila ekspor dan impor dikendalikan dengan tarif, kuota, subsidi dan pajak, maka neraca perdagangan selalu surplus	Landerth, 1989; Nopirin, 1998; Thirwall, 2003; Vera, 2005; Aizenman, 2005
Tokoh-tokohnya: Aristoteles; Xenophone; Thomas Mun dan David Hume	2. Kemakmuran negara berasal dari surplus perdagangan luar negeri			

Vera (2006) menyatakan bahwa menurut Thomas Mun neraca perdagangan dipengaruhi oleh variabel-variabel kebijakan perdagangan internasional melalui instrumen yaitu tarif, kuota, subsidi dan pajak. Instrumen-instrumen

kebijakan-kebijakan tersebut akan berpengaruh pada komponen biaya dan selanjutnya berpengaruh pada harga barang impor dan ekspor. Bagi pelaku impor, apabila tarif impor dinaikkan, maka secara relatif harga impor akan lebih mahal dibanding harga ekspor. Dengan demikian konsumen domestik akan cenderung beli barang domestik atau tidak mau beli barang impor. Pada saat yang sama orang luar negeri cenderung membeli barang negara tersebut. Akibatnya impor menurun dan ekspor meningkat yang pada akhirnya dapat menyebabkan neraca perdagangan berada pada posisi surplus.

Demikian sebaliknya akan menyebabkan neraca perdagangan berada dalam posisi defisit. Logika ini berlaku juga bagi instrumen-instrumen kebijakan perdagangan internasional lainnya. David Hume (1711- 1776) memiliki argumen yang berbeda dengan pandangan Thomas Mun di atas. Melalui skema “mekanisme otomatis neraca pembayaran internasional” sebagaimana tergambar pada Gambar 10.2. Hume menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu mengatur perdagangan internasional. Karena secara otomatis melalui mekanisme aliran emas neraca pembayaran internasional akan seimbang kembali. Pemikiran Hume dituangkan dalam karyanya yang berjudul *of the Balance of Trade*.



Gambar 10.2: Mekanisme Neraca Perdagangan Menurut David Hume

Hady (2009) mengutip pandangan Hume yang menyatakan bahwa jika suatu negara surplus neraca perdagangan, maka akan terjadi aliran emas masuk yang menyebabkan jumlah uang beredar bertambah. Bertambahnya jumlah uang beredar ini mendorong masyarakat meningkatkan permintaan barang domestik. Apabila persediaan barang domestik belum mencukupi, maka akan

terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) yang pada gilirannya akan menaikkan harga barang domestik (*inflasi*). Dengan meningkatnya harga barang domestik, maka orang luar negeri akan mengurangi pembelian barang dari negara tersebut. Pada saat yang sama ada masyarakat domestik yang cenderung membeli barang dari luar negeri yang harganya relatif murah dibanding harga domestik. Akibatnya nilai ekspor negara tersebut menurun dan nilai impornya meningkat sampai keseimbangan NPI kembali tercapai.

Dari pandangan David Hume tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa neraca perdagangan suatu negara dapat dipengaruhi oleh jumlah uang beredar melalui mekanisme harga barang impor dan harga barang ekspor. Apabila jumlah uang beredar naik, harga domestik naik, dan harga barang impor turun. Hal ini menyebabkan ekspor turun dan impor naik. Akibatnya posisi neraca perdagangan akan defisit. Demikian sebaliknya, asumsi yang digunakan adalah tanpa campur tangan pemerintah.

Kelemahan pemikiran Hume tersebut terletak pada asumsi bahwa hanya jumlah uang beredar yang memengaruhi posisi neraca perdagangan. Hume tidak mempertimbangkan faktor lain seperti tingkat pendapatan negara yang melakukan perdagangan internasional. Selain itu, mekanisme otomatis (*pathomechanism*) memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri. Hal ini justru dapat memperburuk kondisi neraca perdagangan suatu negara.

10.3.2 Pemikiran Teori NPI Klasik

Sebagaimana dikemukakan Deliarnov (2005) Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh penggagas utama dari aliran ekonomi Klasik. Alirannya disebut mazhab Klasik sebab gagasan-gagasan yang ditulis Adam Smith sebetulnya sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi jauh sebelumnya. Di dalam bukunya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776) Adam Smith menganjurkan agar pemerintah melakukan campur tangan seminimal mungkin dalam perekonomian (*laissez faire laissez passer*). Argumen ini sebelumnya telah diungkap oleh Francis Quesnay (1694-1774) dari aliran Fisiokrat sebelumnya.

Lebih lanjut Deliarnov (2005) menjelaskan bahwa walaupun Adam Smith sejalan dengan kaum Fisiokrat tentang keyakinan mereka bahwa kemakmuran suatu negara bukanlah melalui perdagangan luar negeri, namun Adam Smith tetap memiliki kontribusi pemikiran dalam perkembangan perdagangan luar

negeri itu sendiri. Kontribusinya berkaitan dengan adanya perdagangan bebas yang akan memberikan manfaat tambahan maksimal bagi suatu negara. Menurut Adam Smith bahwa perdagangan internasional timbul terutama sekali karena suatu negara bisa menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien. Negara mengekspor barang tertentu karena negara tersebut bisa menghasilkan barang dengan biaya yang secara mutlak lebih murah daripada negara lain yaitu karena mempunyai keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dalam produksi barang tersebut.

Menurut Landreth, et.al., (2002) dasar yang mendukung pandangan tersebut adalah teori Adam Smith yang dikenal dengan sebutan Teori Nilai (*Value Theory*). Menurut Smith, barang mempunyai dua nilai. Pertama, nilai guna (*value in use*); kedua, nilai tukar (*value in exchange*). Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*labor*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Untuk mengukur tenaga kerja yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa tidak bisa hanya diukur dari jam atau hari kerja saja. Hal itu karena keterampilan setiap orang tidak sama. Untuk itu, Smith menggunakan harga tenaga kerja sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang. Perbedaan tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang, digunakan Smith untuk mematok harga. Harga seperti itu disebut sebagai harga alami (*natural price*). Pada zaman modern ini disebut harga keseimbangan jangka panjang.

Berbeda dengan pandangan David Ricardo (1772- 1823) (Boediono, 1999). Hal ini dijelaskan melalui teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Melalui bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1817) Ricardo mengemukakan beberapa teori yaitu: *land rent*, *labor theory of value*, *natural wages* dan *comparative advantage theory*. Dengan teori *comparative advantage* David Ricardo mampu menjelaskan terjadinya kegiatan perdagangan antarnegara walaupun negara tersebut efisien dalam memproduksi semua jenis barang (yang menurut teori keunggulan mutlak tidak mungkin terjadi).

Menurut David Ricardo suatu negara hanya akan mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Dengan adanya keunggulan komparatif bisa menimbulkan manfaat perdagangan (*gains from trade*) bagi kedua belah pihak, dan selanjutnya akan mendorong timbulnya perdagangan antarnegara. Keunggulan komparatif ditemukan dari perbandingan biaya per

unit nominal dari masing-masing barang. Pandangan David Ricardo inilah yang dianggap sebagai arsitek utama perdagangan bebas.

Tabel 10.4: Ringkasan Pemikiran Teori NPI Klasik

Teori NPI	Asumsi	Variabel Pengaruh NPI	Proporsi	Penulis
Klasik	1. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian minim	Variabel harga tenaga kerja (upah) dan perbandingan biaya per unit barang	Negara akan menerima manfaat maksimal dari perdagangan bebas dengan mengandalkan keunggulan absolut dan keunggulan komparatif	Alexander,1998; Landerth,1998; Ackay, 2001; Nelson,2002; Deliamov,2005; Razmi,2005
Tokoh-tokohnya: Adam Smith David Ricardo	2. Upah dan harga fleksibel			

Pandangan kedua tokoh tersebut di atas berimplikasi pula pada pengendalian perdagangan luar negeri khususnya untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Seiring dengan ide David Hume dari kelompok Merkantilisme, para ekonom Klasik berkeyakinan bahwa NPI akan selalu atau otomatis mencapai keseimbangan melalui mekanisme pasar. Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi dinamika neraca perdagangan adalah variabel-variabel yang memengaruhi ekspor dan impor melalui sektor riil. Asumsi yang digunakan oleh kaum Klasik adalah adanya fleksibilitas upah dan harga.

Kegagalan teori Klasik menghadapi persoalan depresi besar di tahun 1930 membuktikan bahwa automatic mechanism kadang sulit diterapkan dalam dunia nyata. Kalau toh ada pasti membutuhkan time lag yang cukup panjang. Hal ini berimplikasi semakin besarnya risiko dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengendalikan neraca perdagangan apabila tidak seimbang.

10.3.3 Pemikiran Teori NPI Keynesian

Berbeda dengan pemikir pra klasik, Keynes tidak percaya dengan adanya mekanisme pasar yang bekerja secara fleksibel yang dapat mengembalikan

posisi neraca pembayaran pada posisi keseimbangan. Pemikiran Kelompok Keynesian tentang neraca pembayaran internasional didasari pada teori makro ekonomi John Maynard Keynes (1883-1946) (Duasa, 2000). Di dalam bukunya yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* (1936) Keynes tidak meyakini adanya mekanisme pasar yang bekerja secara otomatis atau fleksibel. Keynes berpendapat bahwa NPI tidak secara otomatis mencapai keseimbangan melainkan diperlukan intervensi pemerintah untuk menangani berbagai kepentingan yang tercatat melalui neraca pembayaran. Rangkuman pemikiran Teori Keynesian ditampilkan dalam Tabel 10.5 berikut ini.

Tabel 10.5: Ringkasan Pemikiran Teori NPI Keynesian

Teori NPI	Asumsi	Variabel Pengaruh NPI	Proporsi	Penulis
Keynesian	1. NPI tidak otomatis mencapai keseimbangan, tetapi butuh intervensi pemerintah	Variabel Pendapatan Nasional, Tingkat bunga, Nilai tukar valuta dan kredit domestik	Kenaikan tingkat bunga dan nilai tukar Valuta dapat meningkatkan NPI	Frengkel, 1993; Mendoza, 1995; Bahmani, 1997; Nopirin, 1998; Mrak, 2001; Filho, 2002; Perraton, 2003; Hansen, 2004 dan Lopez 2005
Tokoh-tokohnya: J.M Keynes; Robinson S. Alexander; James Meade Tinbergen; MJ Fleming dan R.A. Mundell	2. Upah dan harga bersifat kaku 3. Analisis bersifat jangka pendek		Kenaikan pendapatan nasional dan kredit domestik dapat menurunkan NPI	

Berbeda dengan asumsi Klasik, Keynes justru berpendapat bahwa tingkat upah dan harga memiliki sifat yang kaku dan negara selalu berhadapan dengan persoalan pengangguran. Dalam perkembangannya teori NPI kelompok Keynesian terbagi dalam beberapa pendekatan yakni:

Pendekatan Elastisitas

Pendekatan elastisitas yang dikemukakan oleh Robinson pada tahun 1950 menerapkan analisis Marshallian tentang elastisitas penawaran dan permintaan komoditas individual pada analisis ekspor dan impor secara keseluruhan. Ditambahkan oleh Kavous (2003) bahwa penekanan utama dari Robinson adalah efek dari devaluasi valuta asing terhadap NPI. Menurut pendekatan ini devaluasi akan memperbaiki NPI. Dalam konteks ini, umumnya diasumsikan bahwa ekspor tergantung pada harga ekspor dan impor tergantung pada harga impor. Menurut pendekatan ini efek kebijakan devaluasi terhadap neraca perdagangan tergantung pada empat elastisitas yaitu: elastisitas luar negeri permintaan ekspor, elastisitas dalam negeri dari penawaran, elastisitas luar negeri dari penawaran impor dan elastisitas dalam negeri dari permintaan impor. Untuk kasus khusus apabila diasumsikan bahwa semula neraca perdagangan adalah nol dan skedul dua penawaran adalah elastis secara infinitif maka kondisi elastis dari pengaruh devaluasi terhadap perbaikan neraca perdagangan adalah merupakan jumlah dari elastisitas permintaan yang sama dengan satu. Hal ini disebut Marshall Lerner Condition.

Dengan asumsi Keynesian tentang kekakuan upah dan tingkat harga (*sticky wages and prices*), Nwaobi (2003) mengemukakan bahwa devaluasi dapat mengubah tingkat harga barang domestik secara relatif terhadap harga barang luar negeri. Selanjutnya akan ada perubahan dalam dasar penukaran (*terms of trade*), pada pasar luar negeri dan domestik. Kemudian hal itu berpengaruh pada produksi dan konsumsi, yang pada gilirannya berpengaruh pada neraca perdagangan.

Penting untuk diperhatikan dua karakteristik dari kasus khusus pendekatan elastisitas (Kavous, 2003; dan Nwaobi, 2003):

1. Berbagai pengaruh dari devaluasi pada permintaan barang domestik diasumsikan lebih ditentukan oleh variasi output dan kesempatan kerja dari pada oleh harga relatif, sehingga variasi output pada NPI dianggap sebagai hal yang kedua. Hal ini mungkin karena asumsi elastis penawaran adalah infinitif. Kelemahan pendekatan ini tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang NPI pada waktu pasca Perang Dunia II, yang ditandai dengan kesempatan kerja penuh. Dalam kondisi yang demikian ekspor tidak bisa/atau sukar untuk dinaikkan dengan tindakan devaluasi.

2. Hubungan antara NPI dengan penawaran uang dan antara penawaran uang dengan permintaan agregat diabaikan. Hal ini mungkin karena adanya asumsi adanya pengangguran sumber daya yang menurut Keynesian tidak dipengaruhi oleh uang. Kelemahan dari pendekatan elastisitas adalah karena mengabaikan aliran modal. Walaupun pendekatan elastisitas berusaha mengarahkan pemerintah untuk memperbaiki NPI, tetapi sayang hanya difokuskan pada neraca perdagangan saja. Hal ini disebabkan oleh analisis Keynesian lebih condong pada pengendalian sisi permintaan agregat saja (aggregate demand management). Oleh karena itu, analisis pendekatan ini cenderung menggunakan analisis keseimbangan parsial.

Pendekatan Absorpsi

Sejalan dengan waktu, pendekatan elastisitas tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan tentang perdagangan pasca perang Dunia II terutama fenomena kesempatan kerja, dengan kondisi yang demikian, ekspor sulit untuk dinaikkan melalui devaluasi. Nopirin (1998) menulis bahwa S. Alexander pada tahun 1952 memperkenalkan pendekatan baru yakni pendekatan absorpsi atau absorption approach. Lebih lanjut Nwaobi (2003) menyatakan bahwa Alexander melihat NPI dari sudut pandang perhitungan pertumbuhan ekonomi. Menurut pendekatan ini efek devaluasi terhadap NPI tergantung dari dampak devaluasi terhadap pendapatan dan absorpsi. Alexander mendefinisikan pendapatan sebagai suatu nilai hasil penjumlahan dari absorpsi yang terdiri dari konsumsi, investasi dan pengeluaran pemerintah dan ekspor dikurangi impor. Devaluasi akan memperbaiki NPI apabila kenaikan output lebih besar daripada absorpsinya.

Apabila terjadi pengangguran sumber daya maka mekanisme berikut akan terjadi: pengaruh devaluasi adalah meningkatkan ekspor dan menurunkan impor. Hal ini selanjutnya menyebabkan peningkatan pada produksi (pendapatan) melalui mekanisme multiplier. Jika total pengeluaran naik tidak terlalu tajam, maka akan terjadi perbaikan pada neraca perdagangan. Jadi, neraca perdagangan akan identik dengan peningkatan perolehan ekonomi melalui selisih antara total produksi dengan total absorpsi barang dan jasa, sehingga sama dengan akumulasi keseimbangan surat berharga atau uang. Dalam situasi pengangguran, devaluasi tidak hanya memperbaiki NPI, tetapi juga membantu mendorong ekonomi menuju kondisi kesempatan kerja penuh.

Apabila negara pada kondisi kesempatan kerja penuh maka devaluasi tidak bisa diharapkan untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan meningkatkan pendapatan riil. Hal ini tergantung pada kemampuan untuk mengurangi absorpsi.

Menurut Alexander bahwa peningkatan dalam tingkat harga sebagai konsekuensi dari devaluasi akan cenderung mengurangi pengeluaran konsumsi dan investasi. Hal ini terjadi melalui pengaruh keseimbangan riil sebagai suatu referensi pengurangan pengeluaran masyarakat dalam rangka menutup kembali stok uang kas mereka yang hilang karena kenaikan harga.

Akan tetapi pada kondisi kesempatan kerja penuh, devaluasi tidak bisa diharapkan untuk meningkatkan perubahan pada keseimbangan secara keseluruhan. Penurunan pengeluaran masyarakat guna menjaga keseimbangan uang masyarakat harus didukung oleh kebijakan deflasi domestik. Menurut Dornbusch, et.al., (2004) kebijaksanaan tersebut dapat dikatakan sebagai *expenditure switching and expenditure reducing policies*. Hal ini disebabkan oleh neraca perdagangan tidak dapat diperbaiki melalui peningkatan output. Dengan demikian, pendekatan absorpsi hanya berlaku untuk kondisi pengangguran sumber daya.

Pendekatan Kebijakan

Pendekatan kebijakan ekonomi atau *the economic policy approach* = *policy mix* yang dikemukakan oleh James Meade dan Tinbergen pada tahun 1951 merupakan upaya untuk menggabungkan pendekatan elastisitas dan absorpsi. Menurut Nopirin (1998) bahwa teori ini merupakan kombinasi dari *expenditure reducing* dan *expenditure switching* (lihat juga Mankiw, 2003; Dornbusch, et.al, 2004; Kavous, 2005). *Expenditure reducing* dapat dilakukan melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ketat, sedangkan *expenditure switching* dapat dicapai melalui pengaturan langsung perdagangan dan kurs. Kedua kebijakan tersebut untuk mencapai keseimbangan internal (*full employment*) dan eksternal (*keseimbangan perdagangan*).

Tabel 10.6: Kemungkinan Kondisi Awal Suatu Negara

Kondisi Awal	Kondisi Internal	Kondisi Eksternal
1	Inflasi	Surplus
2	Inflasi	Besifit

3	Pengangguran	Besifit
4	Pengangguran	Surplus

Menurut Nopirin (1998) kebijakan campuran (policy mix) yang harus diambil pemerintah sangat tergantung pada kondisi awal dari satu negara. Ada 4 kemungkinan kondisi awal seperti terlihat pada Tabel 10.6.

Pendekatan IS-LM

Perkembangan selanjutnya teori NPI dikemukakan oleh Robert Mundell dan Marcus Fleming pada tahun 1960-an. Era ini adalah era sistem nilai tukar tetap. Modelnya merupakan variasi dari model IS-LM untuk ekonomi yang sudah terbuka. Menurut Dornbusch, et.al., (2004) anggapan yang digunakan untuk teori ini adalah negara kecil, sehingga negara tersebut tidak dapat memengaruhi harga dan pendapatan dunia. Ada 3 persamaan yang dibangun dalam rangka menurunkan persamaan NPI. Ketiga persamaan tersebut adalah: persamaan untuk kurva IS, persamaan untuk kurva LM dan persamaan untuk kurva NPI.

Menurut Soediyono (2000) persamaan kurva IS diturunkan dari keseimbangan pasar barang. Lebih lanjut Dornbusch, et.al., (2004) mengutip pandangan J.M. Keynes bahwa keseimbangan tersebut terjadi apabila Pendapatan Nasional (National Income = Y) sama dengan pengeluaran agregat (Aggregate Expenditure = AE). Pengeluaran agregat terdiri dari pengeluaran konsumsi (Consumption Expenditure = C), pengeluaran investasi (Investment = I), pengeluaran pemerintah (Government Expenditure = G), selisih ekspor (Export = X) dengan impor (Import = M). Berdasarkan hal-hal tersebut maka keseimbangan tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan dasar sebagai berikut.

$$\text{Kurva IS: } Y = C + I + G + X - M$$

Lebih lanjut Soediyono (2000) menyatakan bahwa dalam persamaan tersebut, C (pengeluaran konsumsi) tergantung pada Y (pendapatan nasional), I (pengeluaran investasi) dipengaruhi oleh i (tingkat bunga), M (pengeluaran impor) dipengaruhi Y (pendapatan nasional) dan X (pengeluaran ekspor) dipengaruhi R (kurs valuta asing). Variable G (pengeluaran pemerintah) dianggap variabel exogenous. Melalui proses substitusi matematis maka akan ditemukan persamaan kurva IS perekonomian terbuka.

Persamaan kurva LM diturunkan dari keseimbangan pasar uang. Masih menurut Keynes bahwa keseimbangan tersebut terjadi apabila permintaan uang (demand for money = M) baik untuk transaksi (transaction motive), berjaga-jaga (precautionary motive) dan spekulasi (speculative motive) sama dengan penawaran uang (money supply = M). Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dapat disebut L_1 dan permintaan untuk spekulasi dapat disebut L_2 . Dengan demikian, menurut Dornbusch, et.al., (2004) keseimbangan pasar uang dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Kurva LM: } M = L_1 + L_2$$

L_1 (permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga) dipengaruhi oleh Y (Pertumbuhan Ekonomi). L_2 (permintaan uang untuk spekulasi) dipengaruhi oleh i (tingkat bunga). M (penawaran uang) dianggap variabel exogenous. Melalui proses substitusi matematis maka akan ditemukan persamaan kurva LM perekonomian terbuka. Persamaan Neraca Pembayaran Internasional (NPI) merupakan penjumlahan dari NTB (surplus Neraca Transaksi Berjalan) dengan NTMF (surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial). Dengan menggunakan proses substitusi matematis Soediyono (2000) dan Dornbusch, et.al., (2004) menulis persamaan NPI sebagai berikut.

$$\text{Kurva NPI: } NPI = NTB + NTMF$$

NTB (Neraca Transaksi Berjalan) tergantung pada pendapatan domestik dan luar negeri. NTMF (Neraca Transaksi Modal dan Finansial) tergantung pada suku bunga riil. Kenaikan pendapatan nasional akan memperburuk NTB. Kenaikan suku bunga di atas tingkat dunia akan menarik modal dari luar dan akan memperbaiki NTMF. Mankiw (2003) menyatakan bahwa dengan mobilitas modal sempurna, sedikit saja perbedaan suku bunga akan memicu arus modal yang tak terbatas. Itu menunjukkan bahwa dengan mobilitas sempurna, bank sentral tidak dapat melakukan kebijakan moneter independen dalam sistem nilai tukar tetap.

Apabila sebuah negara menaikkan suku bunganya (kebijakan moneter ketat), segera pemilik portofolio di seluruh dunia memboyong kekayaan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang baru. Hasilnya terjadi arus modal masuk yang besar, NPI mengalami surplus besar. Orang asing ingin membeli aset domestik, cenderung menyebabkan nilai tukar mengalami apresiasi dan memaksa bank sentral melakukan intervensi agar nilai tukar konstan. Bank sentral membeli valuta asing dengan valuta domestik. Intervensi ini menyebabkan persediaan mata uang domestik meningkat. Akibatnya,

kontraksi moneter awal berbalik. Proses akan berakhir ketika suku bunga dalam negeri terdorong ke tingkat awal.

Kesimpulannya bahwa di bawah sistem nilai tukar tetap dan mobilitas modal sempurna, sebuah negara tidak dapat melakukan kebijakan moneter independen. Suku bunga tidak dapat bergerak keluar dari rata-rata yang berlaku di pasar internasional. Setiap upaya kebijakan moneter independen akan menyebabkan pergerakan modal dan diperlukan intervensi hingga suku bunga kembali ke rata-rata suku bunga dunia. Cho (2003) mengkritik pendekatan di atas dengan menyatakan bahwa ketegaran di dalam penggunaan kebijakan fiskal kadangkala memakan waktu lama karena harus melalui suatu proses politik. Oleh karena itu, pendekatan policy mix ini hanya berlaku untuk jangka pendek.

10.3.4 Pemikiran Teori NPI Modern

Teori NPI Portofolio

Teori NPI portofolio dikembangkan berdasarkan konsep model keseimbangan umum untuk ekonomi terbuka. Hal ini menurut Nopirin (1998) sesuai pernyataan McKinnon, Branson, Myhrman, Kouri & Porter. Ciri utama teori ini adalah memasukkan konsep pemilihan portofolio sebagai bagian dari analisis NPI. Dalam analisisnya keseimbangan aset dan pendapatan dianalisis secara simultan. Branson menggunakan model seleksi portofolio Markowitz-Tobin untuk menjelaskan alokasi kekayaan antara aset luar negeri dan aset domestik. Nilai aset luar negeri sama dengan proporsi tertentu aset luar negeri terhadap stok kekayaan individu. Menurut Branson bahwa nilai proporsi aset luar negeri dipengaruhi oleh tingkat bunga domestik, tingkat bunga luar negeri, dan risiko yang diperhitungkan. Nopirin (1998) merumuskan model Branson sebagai berikut.

$$\frac{Bf}{W} = f(r_d, r_f, risk)W$$

Keterangan dari masing-masing identitas tersebut adalah:

W = jumlah total kekayaan individu yang berasal dari aset luar negeri dan domestik.

Bf = aset luar negeri berupa surat-surat berharga pasar modal internasional.

r_d	= tingkat bunga dalam negeri.
r_f	= tingkat bunga luar negeri
$risk$	= risiko karena memegang aset luar negeri
$\frac{B_f}{w}$	= proporsi aset luar negeri terhadap total kekayaan.

Pendekatan portofolio menyatakan bahwa nilai tukar ditentukan oleh jumlah uang domestik, jumlah permintaan obligasi domestik, dan luar negeri dan jumlah penawarannya. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa para individu mendapat bunga dari surat-surat berharga yang mereka pegang bukan dalam bentuk uang. Persamaan aliran modal dapat diperoleh dengan cara mencari turunan pertama fungsi di atas pada kedua sisinya, sehingga lebih lanjut Branson menulis persamaan:

$$\frac{B_f}{w} = f(r_d, r_f, risk)\Delta W + f_{r_d}W\Delta r_d + f_{r_f}W\Delta r_f + f_{risk}W\Delta risk + f_w\Delta W + \mu$$

Keterangan tambahan:

μ = kesalahan pengganggu.

Komponen pertama pada sisi sebelah kanan merupakan efek aliran dari pertumbuhan portofolio dan aliran modal, sementara komponen kedua merupakan efek stok dari penyesuaian portofolio. Dalam situasi empiris, apabila data kekayaan tidak ada maka efek aliran diabaikan. Whitesell (2003) mengungkapkan bahwa Kouri dan Porter mengkritik model Branson ini oleh karena beberapa hal yaitu: 1) dapat timbul kesalahan statistik yaitu persamaan simultan yang bias, 2) walaupun model Branson memiliki fondasi mikro yang sangat kuat, namun tidak mudah diterapkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi makro seperti efek fluktuasi pendapatan pada neraca modal dan hubungan antara neraca transaksi berjalan dengan neraca modal.

Oleh karena itu, menurut Nopirin (1983) bahwa Kouri dan Porter mengembangkan suatu model yang berdasarkan pada sintesis dari model Branson dengan teori NPI Moneteris yang dikembangkan oleh Mundell pada tahun 1968 dan Johnson pada tahun 1971 dan 1972. Dalam model ini, aliran modal dipandang sebagai suatu mekanisme yang dapat memindahkan kelebihan permintaan uang domestik. Variabel-variabel bebas dalam model mereka adalah: perubahan pendapatan nasional, NTB, perubahan instrumen-

instrumen keuangan domestik dan perubahan tingkat bunga internasional. Hasil utama mereka adalah, fluktuasi pendapatan merupakan variabel penting yang mendorong permintaan uang dan kebijakan moneter memiliki efek yang kuat dalam neraca modal.

Teori NPI Moneteris

Paralel dengan perkembangan teori Portofolio, Mundell pada tahun 1968 dan Johnson pada tahun 1971 dan 1972 mengembangkan pendekatan moneter terhadap NPI. Nwaobi (2003) menyatakan bahwa aslinya pendekatan ini dikembangkan oleh Polak dan rekannya di Lembaga Keuangan Internasional (International Monetary Fund = IMF) pada tahun 1950. Kemudian pendekatan ini dikembangkan pada era awal 1960-an dan 1970-an oleh Mundell (1968) dan Johnson (1972). Mundell dalam Blejer, Khan and Masson (1995) mengemukakan bahwa kebijakan moneter lebih efektif daripada kebijakan fiskal dalam rangka menjaga keseimbangan eksternal. Hal itu menurutnya disebabkan oleh kebijakan moneter dapat memperbaiki baik neraca transaksi berjalan (current account) maupun neraca modal (capital account) pada NPI. Dengan bantuan mahasiswa pascasarjana di Universitas Chicago, Mundell, dan Johnson mengembangkan pendekatan moneter modern sebagai alternatif pendekatan tradisional.

Lebih lanjut Kavous (2005) mengatakan bahwa ciri utama pendekatan ini adalah memandang neraca pembayaran internasional sebagai fenomena moneter. NPI didefinisikan sebagai perubahan dari pada cadangan internasional (International Reserve) suatu negara. Pendekatan ini dalam analisisnya lebih mengutamakan pos atau rekening below the line yang merupakan rekening moneter. Dengan demikian, NPI dipandang sebagai satu keseluruhan, baik transaksi berjalan maupun lalu lintas modal (Duasa, 2000; Nwaobi, 2003). Nopirin (1983) mengemukakan bahwa dasar utama pendekatan ini adalah anggapan adanya stabilitas dalam permintaan akan uang serta pemerintah tidak melakukan tindakan sterilisasi (lihat Kavous, 2003, 2005). Tindakan sterilisasi artinya tindakan pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan pengaruh NPI terhadap jumlah uang beredar (JUB). Caranya, apabila terdapat surplus dalam NPI maka pemerintah akan melakukan kebijakan pengurangan jumlah uang untuk mencegah pengaruh surplus ini terhadap JUB, misalnya dengan menjual surat-surat berharga.

Dengan tindakan tersebut surplus NPI tidak akan menyebabkan naiknya JUB. Pengaruh NPI terhadap JUB hanya terjadi apabila suatu negara memakai

sistem kurs tetap. Hal ini oleh karena di dalam sistem kurs berubah-ubah, NPI yang surplus atau defisit dapat menyebabkan kurs valuta asing turun atau naik. Dengan dasar anggapan bahwa pemerintah tidak melakukan tindakan sterilisasi maka surplus atau defisit dalam NPI sifatnya sementara. Artinya, surplus atau defisit yang menyebabkan JUB bertambah atau berkurang akan timbul sampai kelebihan permintaan atau penawaran uang hilang (pasar uang menjadi seimbang). Oleh karena itu, NPI yang tidak seimbang merupakan refleksi dari ketidakseimbangan dalam pasar uang. NPI yang defisit merupakan refleksi dari adanya kelebihan JUB dan sebaliknya surplus sebagai refleksi kelebihan permintaan akan uang. Di dalam jangka panjang keseimbangan pasar uang (dengan demikian juga NPI) akan terjadi secara otomatis. Akan tetapi menurut Kavous (2005) apabila pemerintah melakukan tindakan sterilisasi (menyimpang dari anggapan pendekatan moneter) maka surplus atau defisit NPI akan terjadi terus menerus.

Lebih lanjut Nusantara (2000) mengemukakan bahwa di samping kedua anggapan tersebut di atas (adanya permintaan akan uang yang stabil dan pemerintah tidak melakukan tindakan sterilisasi), sejumlah penulis lain menambahkan beberapa anggapan bahwa upah dan harga, bebas berubah sehingga output dalam jangka panjang akan selalu dalam keadaan full-employment. Konsekuensinya, proses penyesuaian NPI melalui perubahan pendapatan (pendekatan Keynes) tidak penting. Anggapan lain, yakni adanya substitusi sempurna antara barang konsumsi dan modal (termasuk surat-surat berharga). Sebagai konsekuensi anggapan ini, harga atau tingkat bunga di dalam negeri akan sama atau paralel dengan luar negeri, sehingga hanya akan berlaku hukum satu harga saja (law of one price). Penganut kedua anggapan terakhir ini sering disebut global monetarists (Richards, 1994).

Menurut Nopirin (1983) dasar utama dari pendekatan moneter adalah asumsi permintaan uang yang stabil dan aliran keluar (masuk) moneter berkaitan dengan surplus (defisit) NPI tidak disterilisasi. Persamaan NPI menurut pendekatan Moneteris diturunkan dari permintaan uang, penawaran uang, dan keseimbangan pasar uang.

Dalam bentuk persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$M_d = f(Y, P, i)$$

$$M_s = mRM$$

$$RM = DC + R$$

$$M_s = M_d$$

di mana:

M_d = permintaan uang;

M_s = penawaran uang;

P = tingkat harga;

RM = Reserve Money;

R = cadangan internasional;

m = angka pengganda uang;

DC = kredit domestik.

Dalam perekonomian yang stabil (*stationary steady state*), model ini berimplikasi bahwa NPI sama dengan nol (*balance*). Dalam rangka menjamin *non-zero reserve flows*, model tersebut diformulasi ulang dalam bentuk konsep untuk Negara yang mengalami pertumbuhan (*steady state growth*). Kita gunakan lambang sebagai identitas dari tingkat persentase pertumbuhan suatu variabel. Dengan demikian, persamaan dapat ditulis kembali menjadi (Kavous, 2003, 2005):

$$\Delta M_i = \Delta m + \Delta(R + D)$$

$$\Delta M_d = \Delta m + \left[\frac{R}{R+D} \right] \Delta R + \left[\frac{D}{R+D} \right] \Delta D$$

Apabila eX menyatakan elastisitas dari permintaan uang karena perubahan X maka persamaan pertumbuhan permintaan uang adalah:

$$\Delta M_i = \Delta P + eY \cdot \Delta Y + e_i \Delta$$

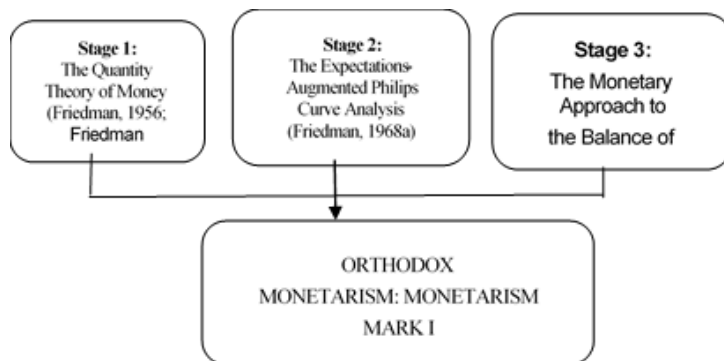
Apabila digabungkan kedua persamaan tersebut maka akan ditemukan kondisi keseimbangan sebagai berikut:

$$\Delta P + eY \cdot \Delta Y + e_i \Delta i = \Delta m + \left[\frac{R}{R+D} \right] \Delta R + \left[\frac{D}{R+D} \right] \Delta D$$

$$\left[\frac{R}{R+D} \right] \Delta R = \Delta P + eY \cdot \Delta Y + e_i \Delta i - \Delta m - \left[\frac{D}{R+D} \right] \Delta D$$

Persamaan di atas merupakan persamaan reserve flow yang dikembangkan oleh Johnson pada tahun 1972. Persamaan inilah yang menjadi dasar bagi semua analisis jangka panjang. Pendekatan moneter terhadap NPI merupakan

kelompok stage 3 dari *The Orthodox Monetarist School* (Snowdown, 1995). Perkembangan historis dari Aliran Pemikiran Moneteris dapat dilihat pada gambar 10.3 berikut ini:



Gambar 10.3: The Evolution of Orthodox Monetarism

Hasil penurunan formula di atas menunjukkan ada perbedaan yang mencolok antara berbagai teori Keynesian sebelumnya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan NPI. Berdasarkan salah satu teori yang diturunkan dari analisis multiplier menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan memperburuk NPI melalui pertumbuhan impor relatif atas ekspor. Teori ini mengabaikan pengaruh permintaan uang pada penawaran ekspor dan permintaan impor dan aliran surat-surat berharga internasional. Menurut pendekatan modern bahwa kredit domestik akan cenderung memperbaiki NPI. Hal ini terjadi dengan menstimulasi investasi dan meningkatnya produktivitas sehingga dapat menurunkan harga domestik dibandingkan dengan harga luar negeri. Kondisi ini yang dapat memperbaiki neraca transaksi berjalan (NTB) melalui proses substitusi barang domestik atas barang luar negeri di pasar domestik dan luar (Nelson, 2002; Jhonsen, 1976 dalam Kavous, 2005).

Ada beberapa kelemahan sebagai kritik pada pendekatan moneter terhadap NPI. Apabila kita menggunakan konsep Keynes tentang teori permintaan uang (The Liquidity Preference), maka terlihat bahwa pendekatan moneter memiliki the lack of consensus tentang fungsi permintaan uang. Para pelopor pendekatan moneter tidak membedakan permintaan uang untuk transaksi dan untuk spekulatif. Pendekatan moneter cenderung memasukan kedua motif itu hanya dalam permintaan uang untuk spekulasi. Hal ini mengurangi kekuatan daya prediksi pendekatan moneter apabila menghadapi Liquidity Trap (Tsiang, 1977 dalam Nwaobi, 2003; Kavous, 2005).

Kelemahan kedua adalah berkaitan dengan asumsi *small country*. Dalam analisis asumsi ini menganggap negara begitu kecil sehingga hanya berada pada posisi *price taker* dalam perdagangan dunia. Asumsi ini mempunyai konsekuensi sulitnya mengambil kebijakan yang cocok dalam prakteknya. Memang Frenkel dan Johnson pada tahun 1976 berusaha membantah kritikan itu dengan mengatakan bahwa *terms of trade* hanyalah aspek kedua dalam analisis.

Kelemahan ketiga adalah tentang asumsi penerapan pendekatan ini hanya untuk *regime of fixed exchange rate* dalam kondisi *full employment*. Ini berimplikasi pada kebijakan bahwa ekspansi moneter untuk *regime of flexible exchange rate and less than full employment* berpengaruh negatif terhadap perolehan pendapatan luar negeri (Mundell, 1964 dalam Nopirin, 1998). Kritik yang lain adalah berkaitan dengan dimensi waktu dan kesulitan melakukan pengujian empiris terhadap proposisi teoritik pendekatan moneter (Backwell, 1972 dalam Nopirin, 1998).

10.3.5 Pemikiran Constrained Growth

Pendekatan ini terkenal dengan sebutan *The Balance of Payments Constrained Growth* (BPCG) Model. Menurut Razmi (2005) bahwa pendekatan ini dikemukakan oleh A.P. Thirlwall pada tahun 1979. Pemikirannya dipengaruhi oleh pandangan Post Keynesian dan Neo Klasik. Model ini dikembangkan sebagai alat untuk mempelajari *constraint* yang disebabkan adanya kebutuhan untuk memperoleh valuta asing di suatu negara. Model ini berusaha menjelaskan secara parsial hubungan antara NPI dengan parameter-parameter struktural pada sisi permintaan yang membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Aslinya model ini membatasi pergeseran valuta asing pada perdagangan barang dan jasa. Namun, Thirlwall dan Hussain pada tahun 1982 dan para kontributor lainnya pada akhirnya memasukkan juga tambahan dari aliran modal pada model BPCG. Model Teoritik dari keseimbangan NPI menurut teori ini adalah:

$$Pd X + EF = Pf EM$$

Yang mana: Pd dan Pf adalah tingkat harga domestik dan luar negeri. X merupakan permintaan ekspor secara riil, M adalah permintaan impor secara riil, E adalah kurs valuta asing nominal, dan F* adalah aliran modal bersih yang diukur dengan valuta asing. Rangkuman Teori Moneter dan Kendala Pertumbuhan ditampilkan pada Tabel 10.7 berikut ini.

Tabel 10.7: Ringkasan Teori Moneteris dan Model Kendala Pertumbuhan

Teori NPI	Asumsi	Variabel Pengaruh NPI	Proporsi	Penulis
<u>D. Moneteris</u>	1. NPI dipandang sebagai fenomena moneter	Pendapatan nasional, tingkat harga, tingkat bunga dan kurs	Ada pengaruh positif antara perubahan kurs, pendapatan nasional, tingkat harga terhadap NPI. Ada pengaruh negatif antara perubahan tingkat bunga terhadap NPI.	Aghevli, 1974; Magee, 1976; Budiono, 1979; Djiwandono, 1980; Frenkel, 1980; Nopirin I, 1983; Lanciaux, 1990; Richards, 1994; Nopirin II, 1998; Hakim, 2000; Nusantara, 2000; Polak, 2001; Whitesell, 2003; Djauhari, 2003; Cho, 2003; Sugiyanto, 2004; Sugema, 2005; Kavous, 2005;
Tokoh-tokohnya: Polak Mundell Jonhson	2. Adanya stabilitas dalam permintaan uang.			
	3. Tidak ada tindakan sterilisasi.			
	4. Upah dan harga fleksibel.			
	5. Output dalam jangka panjang dalam keadaan "full employment".			
	6. Substitusi sempurna antara barang konsumsi dan modal.			
	7. <i>Law of one price.</i>			
E. Model Kendala Pertumbuhan Tokoh-tokohnya: A.P Thirlwall M.N. Hussain J. McCombie	Melihat hubungan secara parsial antara NPI dengan parameter-parameter struktural pada sisi permintaan yang membatasi pertumbuhan ekonomi suatu Negara.	Pendapatan nasional, Ekspor, Impor, Kurs, Harga Ekspor dan Harga Impor	Kendala permintaan berasal dari eksternal. Jika NSB mengalami masalah NPI sebelum tercapainya kapasitas jangka pendek, maka permintaan akan merosot, sumberdaya tidak bermanfaat, daya saing merosot dan akhirnya dapat memperburuk NPI.	Thirlwall, 1979; Thirlwall & Husein, 1982; McCombie, 1997; McCombie, et al., 2002; Perraton, 2003

10.4 Mekanisme Neraca Pembayaran Internasional

Menurut Machmud (2016), ada tiga jenis mekanisme yang berpengaruh terhadap neraca pembayaran suatu Negara seperti perubahan ekonomi atau kebijakan, yaitu mekanisme harga, mekanisme pendapatan dan mekanisme moneter.

Ketiganya saling berkaitan dan saling bekerja berdampingan.

1. Mekanisme Harga

Mekanisme harga bekerja melalui pengaruh perubahan harga-harga terhadap ekspor dan impor. Mekanisme harga dalam sistem standar emas penuh adalah contoh terbaik untuk menggambarkan bekerjanya mekanisme harga. Bila terjadi surplus neraca pembayaran, stok uang dalam negeri akan meningkat, harga dalam negeri akan meningkat, penduduk negara tersebut akan meningkatkan impor serta menurunkan ekspor. Selama surplus belum hilang, impor akan terus meningkat dan menurun, dan akhirnya neraca pembayaran akan kembali seimbang.

Dalam sistem moneter yang lain, mekanisme harga juga masih bekerja, meskipun tidak sesempurna dalam sistem standar emas penuh. Elastisitas harga dari penawaran ekspor dan permintaan impor sangat menentukan efektivitas mekanisme harga dalam membawa kembali neraca pembayaran ke arah keseimbangan. Karena adanya berbagai faktor penghambat, sekarang para ekonom beranggapan bahwa mekanisme harga saja tidak bisa diandalkan mengatasi ketimpangan neraca pembayaran yang besar.

2. Mekanisme Pendapatan

Mekanisme pendapatan bekerja melalui proses pengganda (multiplier). Kenaikan ekspor melalui proses pengganda, akan menimbulkan kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, kenaikan pendapatan nasional akan meningkatkan impor melalui kecenderungan mengimpor (propensity to import). Namun, kenaikan

impor ini tidak akan sebesar kenaikan ekspor yang mengakibatkannya. Ini berarti bahwa mekanisme pendapatan saja tidak bisa membawa neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali secara penuh.

3. Mekanisme Moneter

Mekanisme moneter bekerja melalui stok uang di dalam negeri sebagai akibat dari perubahan keadaan atau kebijakan. Bila ekspor naik dan terjadi surplus neraca pembayaran, stok uang dalam negeri akan meningkat, suku bunga akan menurun, pengeluaran investasi akan meningkat, pendapatan nasional akan meningkat, dan akhirnya impor meningkat. Ini adalah mekanisme moneter menurut Keynes. Kebijakan moneter menurut golongan moneteris memberi tekanan pada apa yang terjadi dengan stok uang riil atau real balance. Bila real balance meningkat, pengeluaran akan meningkat, dan impor juga akan meningkat. Bila kenaikan stok uang diimbangi dengan kenaikan harga, real balance bisa naik atau turun, sehingga impor pun akan tetap atau turun. Mekanisme moneter tidak bisa membawa neraca pembayaran ke posisi keseimbangan penuh.

10.5 Ikhtisar Neraca Pembayaran Indonesia

Ikhtisar neraca pembayaran Indonesia terdiri dari transaksi berjalan, transaksi keuangan, neraca keseluruhan dan cadangan devisa. Transaksi berjalan terdiri dari neraca perdagangan barang dan jasa. Untuk perdagangan barang dan jasa terdapat migas (ekspor dan impor) serta nonmigas (ekspor dan migas), sedangkan transaksi keuangan terdiri dari investasi langsung dan investasi portofolio. Berdasarkan Tabel 10.8, dapat dijelaskan bahwa tahun 2000, merupakan tahun terburuk dalam neraca pembayaran Indonesia. Hal ini terlihat dari cadangan devisa dan neraca barang yang memberikan kontribusi terendah dibandingkan tahun lainnya yaitu -78,81% dan 0,01%.

Penyebab rendahnya kontribusi neraca pembayaran barang adalah kinerja ekspor nonmigas yang masih mengalami penurunan sehingga meskipun

ekspor migas meningkat, secara keseluruhan ekspor nilai ekspor hanya sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sementara itu, berkurangnya jumlah pembayaran utang luar negeri menyebabkan defisit transaksi modal menurun dari tahun sebelumnya.

Hal yang sama tahun 2018, merupakan defisit neraca perdagangan terpuk sejak tahun 1975, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US\$391,9 juta. Selepas dari tahun itu, selama 37 tahun neraca perdagangan terus menunjukkan kinerja positif dengan nilai surplus (Yohana, 2019). Lebih lanjut Wilfridus (2019), menjelaskan buruknya kinerja perdagangan tahun 2018 didorong oleh dua sisi, yakni anjloknya pertumbuhan ekspor serta akselerasi impor yang tajam. Ekspor hanya tumbuh 6,7%, jauh di bawah performa tahun 2017 yang tumbuh sampai 16,2%.

Sementara impor malah mengalami akselerasi dari 15,7% pada 2017 menjadi 20,2% di tahun 2018, disamping itu, faktor pendorong penting dari lonjakan defisit perdagangan di 2018 adalah pelebaran defisit di sektor migas yang mencapai US\$ 12,4 Miliar. Peningkatan harga minyak dunia hampir di sepanjang 2018 telah mendorong lonjakan impor minyak negara-negara net importir minyak seperti Indonesia. Impor migas Indonesia melonjak dari US\$ 24,3 Miliar pada 2017 menjadi US\$ 29,8 Miliar 2018, atau tumbuh 22,6%.

Tabel 10.8: Ikhtisar Neraca Pembayaran Indonesia

Tahun	Transaksi Berjalan		Transaksi Keuangan	Neraca Keseluruhan	Cadangan Devisa
	Neraca Barang (Jutaan US\$)	Neraca Jasa (Jutaan US\$)	Neraca Modal (Jutaan US\$)	Neraca Pembayaran (Jutaan US\$)	Neraca Cadangan Devisa (Jutaan US\$)
1999	206	14,900	(4,600)	3,300	16,400
2000	25	17,100	(6,800)	5,000	17,800
2001	22,695	15,795	(7,617)	3	1,378
2002	23,513	15,690	(1,102)	5,028	(4,023)
2003	24,562	16,456	949	3,654	(4,257)
2004	20,152	8,811	1,852	309	674

2005	17,534	9,122	345	444	663
2006	2,966	9,888	2,944	14,510	(6,902)
2007	33,083	11,103	2,753	12,543	(12,543)
2008	22,916	12,998	(1,832)	(1,945)	1,945
2009	30,932	9,741	4,852	12,506	(12,506)
2010	30,627	9,324	26,620	30,285	(30,285)
2011	34,783	10,632	13,567	11,857	11,857
2012	8,680	10,331	24,909	215	(215)
2013	5,833	12,072	21,963	(7,235)	7,235
2014	6,983	10,010	44,916	15,249	(15,249)
2015	14,049	8,697	16,843	(1,098)	1,098
2016	15,318	7,084	29,306	12,089	(12,089)
2017	18,892	7,864	29,834	11,586	(11,586)
2018	(228)	6,485	25,122	(7,131)	7,131
2019	3,551	7,754	36,651	4,676	(4,676)
Q1 2020*	4,445	1,894	(3,069)	(8,454)	8,454
Q2 2020*	3,958	2,169	10,626	9,245	(9,245)
Q3 2020**	9,795	2,618	1,035	2,053	(2,053)

Sumber: Bank Indonesia, berbagai terbitan (diolah)

Keterangan:

* Angka Sementara

** Angka Sangat sementara

Idealnya saat harga minyak dunia meningkat, tidak hanya berdampak pada kenaikan impor minyak, tetapi juga pada peningkatan ekspor minyak. Uniknya, dampak kenaikan harga minyak terhadap peningkatan ekspor minyak jauh lebih kecil dibandingkan impor minyak. Manakala harga minyak dunia naik 37,3% sepanjang Januari–Oktober 2018 (yoy), pertumbuhan nilai impor minyak ikut terkerek 36,8 persen pada periode yang sama. Sayangnya, ekspor minyak hanya mengalami kenaikan 2,3%. Hal ini disebabkan perbedaan komposisi ekspor dan impor minyak Indonesia. Ekspor minyak

Indonesia didominasi minyak mentah (75,7% terhadap total ekspor minyak) yang harganya lebih murah dibanding minyak olahan. Sebaliknya, 66% dari impor minyak adalah minyak olahan.

Kemudian pada saat harga minyak turun -4% selama November–Desember 2018 (yoy), ekspor minyak turun lebih tajam -23 persen, sementara impor minyak malah tumbuh 3,5 persen pada periode yang sama (yoy). Selain migas, sektor nonmigas juga menghadapi masalah yang tak kalah serius. Walaupun masih surplus, terjadi penciutan tajam surplus non migas dari US\$ 20,4 Miliar pada 2017 menjadi US\$ 3,8 Miliar pada 2018, atau kontraksi sebesar 81,4 persen. "Penciutan surplus nonmigas ini juga didorong oleh dua sisi, pertumbuhan ekspor nonmigas yang jauh lebih lambat, sementara impor justru mengalami akselerasi tajam." Sepanjang 2018, impor nonmigas tumbuh 19,8 persen, jauh lebih cepat dibanding 2017 yang mencapai 13,4 persen. Peningkatan impor memang banyak dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah, yang selama 2018 terdepresiasi 7,3 persen.

Namun pelemahan Rupiah bukan satu-satunya pendorong lonjakan impor. Volume impor nonmigas juga mengalami lonjakan sebesar 11 persen sepanjang 2018, lebih pesat dibanding pertumbuhan volume impor tahun 2017 yang hanya 6,4 persen. Ini menunjukkan peningkatan permintaan domestik belum mampu diimbangi dengan produksi dalam negeri, meskipun 75% dari impor adalah bahan baku/penolong dan 15,9% adalah barang modal yang dibutuhkan untuk kegiatan produktif di dalam negeri. Namun akselerasi impor ternyata tidak hanya terjadi pada kategori barang produktif, tetapi juga pada kategori barang konsumsi. Bahkan impor barang konsumsi justru tumbuh paling cepat, dari 14,7% pada 2017 menjadi 22% pada 2018, sementara bahan baku/penolong serta modal masing-masing hanya tumbuh 20 persen dan 19,5% pada 2018.

Namun, Tahun 2010 merupakan tahun terbaik dalam neraca pembayaran Indonesia. Hal ini terbukti dari neraca modal dan cadangan devisa memberikan kontribusi tertinggi dari tahun lainnya yaitu 20,95% dan 135,79%. Pada tahun 2010, neraca modal memberikan kontribusi yang tinggi pada neraca pembayaran Indonesia karena adanya loncatan surplus, yang terutama bersumber dari peningkatan surplus investasi portofolio dan investasi langsung serta berkurangnya defisit investasi lainnya. Sementara itu, cadangan devisa tahun 2010 memberikan kontribusi terbaik pada neraca pembayaran Indonesia karena nilai tukar rupiah bergerak stabil dan cenderung menguat, yang semuanya didorong oleh besarnya arus modal asing sejalan dengan kuatnya fundamental ekonomi serta ditopang oleh kinerja sektor perbankan yang terlihat dari meningkatnya fungsi intermediasi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Bab 11

Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal dan Eksternal

11.1 Pendahuluan

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal menjadi penentu terhadap stabilitas keuangan suatu negara baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, konsep ini mengontrol aktivitas keuangan secara makro, sehingga sistem keintegralan ini akan memberikan pengaruh pada perilaku ekonomi secara keseluruhan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disisi lain, keseimbangan internal dan eksternal tidak dapat dipandang sebelah mata, karena konsep tersebut akan meningkatkan aktivitas pertumbuhan ekonomi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang, konsep ini tidak terlepas dari pengaruh perekonomian global yang masuk ke suatu negara melalui integrasi kebijakan makroekonomi.

Koordinasi keseimbangan dua sisi kebijakan ini, baik bekerja secara parsial maupun secara simultan tersebut mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang selalu mencapai titik kestabilan secara berkelanjutan bagi suatu negara.

11.2 Keseimbangan Moneter dan Fiskal

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan suatu rangkaian sistem keuangan yang saling kait-mengait, kedua kebijakan ini akan mengontrol laju pergerakan keuangan secara makro, terlepas dari sifat kedua kebijakan yang dapat sejalan atau saling bertentangan, namun kedua kebijakan memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kestabilan perekonomian negara.

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal telah memiliki payung hukum yang sah di Indonesia, semua aturan kegiatan kebijakan tersebut didasarkan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, hal ini menandakan bahwa keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan tugas dan tanggung jawab bagi negara yang legal, sekaligus menjadi dasar tata kelola anggaran keuangan yang taat asas. Pada Pasal 21 mewajibkan adanya menyelaraskan tujuan antara Bank Sentral (Kebijakan Moneter) dan Pemerintah Pusat (Kebijakan Fiskal) dalam mencapai kestabilan keuangan dan ekonomi (internal) dan kestabilan neraca pembayaran (eksternal).

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang terdapat pada Pasal 21 telah mengatur berbagai aspek antara lain, disiplin fiskal bagi pemerintah pusat dan daerah dengan batas maksimum defisit fiskal (dibawah 3% dari PDB dan PDRB sesuai dengan *Maastricht Treaty* untuk masuk dalam European Monetary Union) dan pinjaman pemerintah pusat dan daerah (di bawah threshold 6% dari PDB dan PDRB), sementara Pasal 23 melindungi secara prudensial dan mewajibkan pinjaman luar negeri yang harus mendapat persetujuan parlemen. (Undang-Undang Republik Indonesia)

Disisi lain, berdasarkan teori ekonomi terkait keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal telah menjadi perdebatan, kaum Klasik berpandangan bahwa konsep kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bukan merupakan jalan keluar untuk meningkatkan aktivitas sektor riil, hal ini ditentang oleh pandangan kaum Keynesian, yang menganggap bahwa dengan pelonggaran moneter dan stimulus fiskal akan meningkatkan output riil, karena terjadi peningkatan permintaan agregat dalam kondisi kekakuan harga dan kurangnya lapangan pekerjaan.

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam proses pergerakan permintaan agregat terjadi melalui pelonggaran kebijakan moneter berupa penurunan tingkat suku bunga, penurunan suku bunga ini menjadikan

perbankan lebih mudah dalam menyalurkan kredit karena biaya pendanaan menjadi lebih murah (*cost of fund*), sehingga dapat meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi. Konsep ini cenderung digunakan ketika terjadi krisis keuangan guna memenuhi kekurangan likuiditas di pasar keuangan, termasuk perbankan yang kehilangan kepercayaan dari masyarakat sehingga berdampak beberapa elemen makro ekonomi (*risiko sistemik*), termasuk perilaku diversifikasi aset nyata menjadi aset asing yang memengaruhi tingkat inflasi dan *capital outflow* negara (Siregar et al, 2021; Marzuki et al, 2021).

Kaum Klasik berpandangan bahwa stimulus fiskal memberikan pengaruh positif pada perekonomian karena sifatnya yang netral terhadap output riil, konsep ini tekankan oleh kaum klasik dengan melihat bahwa pemotongan pajak dapat memberikan pengaruh pada defisit anggaran, sehingga konsep ini mewajibkan untuk dapat segera ditingkatkan dalam jangka panjang, yang selanjutnya akan direspon oleh masyarakat dengan perilaku mengurangi pengeluaran untuk memenuhi kewajibannya. Efek Ricardian equivalence terjadi dimana pengeluaran masyarakat dapat menutupi pengeluaran pemerintah sehingga konsep ini tidak memberikan dampak pada output.

Kaum Klasik juga berpandangan bahwa kebijakan moneter tidak dapat mengatur peningkatan nilai nominal terhadap output riil dalam permintaan agregat, meskipun pelonggaran moneter (penurunan suku bunga atau penawaran uang) telah dilakukan karena kecenderungan harga akan terus meningkat.

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal akan tercapai melalui hubungan antara kebijakan moneter akomodatif dengan kebijakan fiskal ekspansif akan memberikan efek multiplier, baik untuk pengeluaran pemerintah dan transfer pada perekonomian. Efek multiplier ini sangat sedikit terjadi di negara Eropa, bahkan di beberapa negara lainnya efek multiplier ini cenderung berdampak negatif. Sementara untuk kebijakan moneter menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan ini cenderung lebih lambat dibandingkan kebijakan fiskal dalam memengaruhi aktivitas perekonomian, hal ini dikarenakan kebijakan moneter cenderung untuk menjaga tingkat inflasi dan kesenjangan output.

Kebijakan moneter terhadap pertumbuhan output perekonomian berpengaruh sangat kecil di beberapa negara khususnya bagi negara berpendapatan menengah (sepuluh negara Eropa Tengah dan Eropa Timur), dimana tekanan moneter (suku bunga) tidak memengaruhi output negara tersebut. (Freedman

et al 2009; Blanchard et al, 2002; Romer et al, 2008; Perotti, 2005; Christiansen, 2008; Giavazzi et al, 1990; Hemming et al, 2002; Mishkin 2002; Chistiano et al, 1999; Rafiq et al, 2008; Bernanke et al 2005; Chuku et al, 2009)

Penjabaran tujuan keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat dicapai dengan menggunakan instrumen atau piranti kebijakan dari masing-masing sektor, dimana kedua kebijakan ini bekerja dengan tujuan yang sama dengan menggunakan instrumen antara lain pertama kebijakan ekspansi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dan pendapatan nasional, konsep ini ditempuh ketika terjadi tingkat pengangguran yang tinggi dan tingkat produksi yang belum memadai, kedua kebijakan kontraksi, berupa kebijakan perekonomian yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja, defisit neraca pembayaran luar negeri yang diikuti dengan tingginya tingkat inflasi.

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia menjadi prasyarat utama Bank Indonesia ketika mencetuskan Inflation Targeting Framework (ITF), namun konsep ini menjadi pertentangan karena pengaplikasian ITF yang ketat akan menyulitkan pertumbuhan ekonomi dan berakhir pada tingkat pengangguran, sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini kemudian diperlukan adanya hubungan keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (*striking the balance*) agar tujuan bersama dapat dicapai secara optimal.

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tentunya akan menciptakan keselarasan perekonomian, namun kebijakan ini selalu menghadapi berbagai tantangan dalam pengimplemetasiannya, dimana kebijakan moneter memiliki peran untuk menstabilkan perekonomian melalui tingkat harga, namun konsep kebijakan fiskal selalu mengacu pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Perbedaan ini terletak pada proses ekonomi yang dijalankan dari setiap kebijakan, sehingga untuk menciptakan keseimbangan diperlukan penyetaraan pandangan dalam menghadapi masalah untuk menentukan kebijakan yang tepat bagi perekonomian.

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, terdapat beberapa alasan bagi kebijakan moneter dalam menetapkan kestabilan harga seperti pertama, penentuan besaran output untuk jangka panjang akan menjadikan keseimbangan pada tingkat inflasi, sehingga konsep ini memberikan dampak

positif pada kebijakan fiskal (sektor riil), kedua, pergerakan aktif pelaku ekonomi memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi khususnya tingkat inflasi sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaksanaan kebijakan, ketiga, penerapan kebijakan moneter terhadap pergerakan aktivitas perekonomian memiliki time lag sehingga hasil aplikasi kebijakan tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, keempat, tujuan kestabilan harga bagi kebijakan moneter akan memberikan pengaruh positif pada perekonomian karena menekan timbulnya biaya yang sangat besar karena pengaruh inflasi. (Kydland et al, 1977; Friedman, 1968)

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, penerapan konsep kebijakan fiskal juga memiliki alasan dalam meningkatkan pertumbuhan dan pengurangan pengangguran melalui variabel defisit fiskal dan utang pemerintah seperti pertama, defisit fiskal yang besar akan memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah utang negara dan tingkat investasi yang menurun, kedua, terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi karena adanya penurunan tingkat investasi swasta yang disebabkan oleh penutupan defisit fiskal negara melalui penjualan obligasi pemerintah secara besar-besaran (crowding out), ketiga, tingkat defisit fiskal keuangan negara yang berat dan berkepanjangan akan searah dengan tingginya tingkat inflasi negara (Traclet et al, 2004).

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal akan memberikan pengaruh pada stabilitas keuangan, namun kebijakan moneter dan fiskal ini merupakan output kebijakan dari dua lembaga keuangan terbesar, sehingga diperlukan independensi dari kedua lembaga tersebut agar tujuan kedua lembaga keuangan tersebut dapat bekerja dengan baik dalam mencapai sasaran bersama.

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal harus selaras, karena tujuan keduanya akan saling kait-mengait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana kinerja kebijakan fiskal yang bekerja untuk meningkatkan pertumbuhan, namun ketika terjadi defisit fiskal yang berkepanjangan akan mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi, sementara untuk kebijakan moneter bekerja ketika terjadi inflasi yang tinggi melalui kebijakan ketat agar pertumbuhan ekonomi dapat stabil.

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tentunya akan menghasilkan output yang maksimal, namun kondisi kedua kebijakan tersebut dapat menimbulkan distorsi bagi pertumbuhan perekonomian, dimana ketika

terjadi sedikit distorsi, akan memberikan dampak bagi output yang diperoleh, demikian pula sebaliknya. Kondisi tersebut tidak dapat dihilangkan, sehingga sebagian pendapat mengatakan bahwa ketika terjadi distorsi baik kecil maupun besar tidak akan memengaruhi pertumbuhan perekonomian (Beetsma et al, 1998).

Oleh karena itu peranan Bank Sentral menjadi basis utama pergerakan makroekonomi, sehingga Bank Sentral harus kuat dan berdiri sendiri melalui independensi kebijakan yang dimilikinya dalam penetapan harga dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, meski kebijakan fiskal nantinya akan menjadi bagian penguat dari kebijakan yang ditetapkan sebelumnya (Fiscal Theory of Price Level), demikian pula sebaliknya, sehingga para pemikir ekonomi berpandangan bahwa teori kebijakan tentang harga dalam pasar merupakan suatu kebijakan terpisah antara keputusan moneter dan keputusan fiskal (Sargant et al, 1981; Woodfrod 2001; Leith et al, 2000).

Fenomena dari keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pernah terjadi pada tahun 1980 di Amerika Latin begitu pula di negara Afrika dan Eropa Timur pada tahun 1988, dimana kondisi keuangan yang dialami oleh negara berupa defisit fiskal yang cukup besar serta berkepanjangan, hal ini terjadi karena pencetakan uang dilakukan oleh bank sentral (Quasi Fiscal), dan berdampak pada ketidakstabilan perekonomian berupa tingkat inflasi yang tinggi dan selanjutnya menjadi resesi ekonomi yang berat.

Fenomena defisit fiskal yang terjadi di Peru pada tahun 1988 mengakibatkan peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1.052% yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah produksi, sehingga inflasi meningkat menjadi 1.694 % (hiperinflasi). Dampak ini menjadikan perekonomian Peru mengalami resesi ekonomi dengan kondisi menurunnya daya beli masyarakat dan biaya transaksi ekonomi yang tinggi.

Defisit fiskal yang terjadi bukan hanya di beberapa negara melainkan telah terjadi di seluruh dunia, hal ini dikarenakan adanya penambahan stimulus fiskal secara besar-besaran, kondisi defisit fiskal dunia sebesar -0.5% (tahun 2007) menjadi -6.7% (tahun 2009) dari GDP, sementara untuk kebijakan moneter terjadi penurunan tajam atas tingkat suku bunga Bank Sentral di dunia yang mendekati 0%, diikuti oleh negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara lainnya dengan rata-rata penurunan 300 hingga 350 bps (International Monetary Fund, 2009).

Gambaran kebijakan fiskal (stimulus fiskal) yang terdiri dari konsumsi publik, investasi, transfer, pemotongan pajak pekerja, pemotongan pajak konsumsi, pemotongan pajak modal, dan pendapatan lainnya, membuat besaran nilai defisit fiskal ini berpengaruh pada PDB, seperti yang terjadi di negara Amerika Serikat (-12.5%), Inggris (-11.6%), Jepang (-10.5%), India (-10.4%) dan Prancis (-8.3%) di tahun 2009. Selain itu suntikan modal juga dilakukan oleh negara-negara anggota G20 ke sektor keuangan sebesar 2.7% yang digunakan sebagai pinjaman oleh Departemen Keuangan dengan rincian sebesar 8.8% untuk jaminan dan 3.7% pembiayaan dimuka pemerintah (Basmar, 2018b).

Terjadinya perlambatan perekonomian global mengakibatkan Bank Sentral di beberapa negara mengambil kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga sebagai bentuk melonggarkan kebijakan moneter, di Amerika Serikat memangkas menjadi 0.25%, sementara negara yang memangkas tingkat suku bunganya mencapai 0.40% adalah Australia, Inggris, Eropa termasuk juga Asia, sementara untuk meningkatkan aktivitas sektor riil pemerintah memberikan pinjaman untuk memperlancar likuiditas keuangan dalam pasar, besarnya bantuan ini mencapai USD 4.240 (International Monetary Fund, 2009).

Kondisi perbankan merupakan salah satu sektor yang juga mengalami perlambatan, hilangnya kepercayaan masyarakat merupakan salah satu penyebab perlambatan perekonomian, untuk itu pemerintah memberikan jaminan terhadap simpanan masyarakat di bank serta memberikan bantuan likuiditas bagi perbankan yang mengalami permasalahan keuangan (Basmar, 2010).

Perbaikan semua sektor untuk menciptakan keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak sistemik dalam pasar keuangan, serta memulihkan sistem keuangan yang mengalami kerusakan global. Secara umum keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam fluktuasi keuangan terjadi sebagai upaya me-reboundnya perekonomian, ditandai dengan meningkatnya likuiditas keuangan dalam pasar, terjadinya stimulus fiskal yang efektif, konsumsi masyarakat meningkat dan penurunan tingkat pengangguran, dampak lain dari penurunan tingkat suku bunga dan pembelian obligasi juga mengakibatkan akses suku bunga pinjaman menurun dan mengakibatkan pergerakan perekonomian dari sektor perbankan juga menjadi aktif (Basmar, 2018a).

Hasil dari keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ditunjukkan melalui pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 11.25% dan jika terjadi akselerasi yang cepat, maka perekonomian dunia akan tumbuh sekitar 4.20%, sehingga peningkatan ini menandakan bahwa kontraksi perekonomian dunia hanya sebesar -0.6% tahun 2009, dan tahun 2010 perekonomian dunia telah mengalami pemulihan sehingga berdampak positif pada negara maju dan negara berkembang lainnya, meski proses perkembangannya terjadi perbedaan setiap negara, misalnya saja untuk negara maju mengalami kontraksi sebesar 11.2%, sementara untuk negara berkembang seperti China, India dan Indonesia melakukan ekspansi sebesar 2.4% untuk menciptakan keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dunia (International Monetary Fund, 2010).

Kondisi keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia tidak jauh berbeda dengan perjalanan pertumbuhan perekonomian dunia, dimana keterpurukan perekonomian Indonesia pernah terjadi di tahun 1962 an, kondisi tersebut ditandai dengan pemotongan nilai mata uang rupiah (sanering) karena tingkat inflasi yang sangat tinggi, sementara beberapa tahun belakangan keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sudah dalam kontrol yang cukup baik, dari kebijakan moneter terjadi stabilitas harga, tingkat inflasi di kisaran 6.60% per tahun, serta tingkat suku bunga yang rendah, sehingga memberikan respon positif pada sektor riil. Sementara dari segi kebijakan fiskal, pemerintah melakukan pengendalian dalam bentuk stimulus fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, indikator tersebut terlihat bahwa level defisit anggaran berada pada tingkat 1% dari PDB sehingga pertumbuhan ekonomi mampu meningkat sebesar 5.5% (tahun 2006). Kondisi keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia juga dilakukan dengan stimulus fiskal sebesar Rp. 711.3 Triliun dan terealisasi sebesar Rp. 32.9 Triliun, serta pengurangan tingkat suku bunga BI rate sebesar 300 bps menjadi 6.5% terjadi di tahun 2009 (Bank Indonesia, 2006).

Kondisi keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal lainnya di Indonesia ditandai dengan adanya stimulus fiskal yang dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah (pengeluaran infrastruktur dan non infrastruktur) dan potongan pajak (subsidi pajak dan non pajak) total sebesar Rp. 32.9 Trilyun atau sebesar 44.9% agar terjadi stimulus keuangan yang dipengaruhi oleh peningkatan daya beli dan insentif bagi pebisnis dalam perekonomian. Disisi lain, Bank Indonesia melakukan pengurangan suku

bunga sebesar 300 bps dari 9.50% menjadi 6.50% (Agustus 2009) hal ini dilakukan karena adanya indikasi terjadi tingkat inflasi yang rendah dan penurunan permintaan agregat, sehingga dengan kebijakan pelonggaran moneter dan stimulus fiskal akan menguatkan elemen makro ekonomi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi nasional (Siagian et al, 2020).

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal melalui pengukuran variabel makroekonomi yang mengalami pergerakan yang fluktuatif (Gambar 11.2) ditandai dengan angka pertumbuhan yang mencapai tingkat 4.5% di tahun 2009, meski tekanan perekonomian global memberikan pengaruh berat bahkan mengantarkan beberapa negara mengalami pertumbuhan negatif, sementara itu nilai tukar rupiah melemah dari Rp. 9.140 per USD menjadi 12.020 per USD, ditambah lagi dengan perlakuan investor yang melakukan capital outflow dari Indonesia, sehingga volatilitas keuangan semakin meningkat dari 1.44% menjadi 4.67% pada perekonomian.

Pergerakan inflasi menunjukkan ada tekanan sehingga inflasi tercatat sebesar 11.06 % akibat peningkatan komoditas minyak dan makanan. Untuk variabel tingkat pengangguran tercatat jumlahnya mengalami penurunan dari 8.1% menjadi 7.9%, hal ini karena adanya penyerapan tenaga kerja sebesar 72.7 juta orang pada sektor informal, kondisi ini kemudian menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 14.15% dari populasi 32.53 juta orang, yang diakibatkan oleh adanya peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat, sehingga fluktuasi ini direspon dengan gerakan gelombang pasang surut akibat adanya tekanan positif maupun negatif yang terjadi di Indonesia (Gambar 11.2)

Implementasi keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda, untuk kebijakan moneter dilakukan pelonggaran kebijakan dengan cara penurunan tingkat suku bunga dan juga pembelian surat berharga (quantitative easing), sementara di sisi fiskal dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah (government spending) dan pemotongan pajak (tax cut), semua ini dilakukan agar fluktuasi perekonomian Indonesia berjalan stabil, seperti yang tampak pada Gambar 11.1 di bawah ini.



Gambar 11.1: Keseimbangan Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal di Indonesia (Bank Indonesia data diolah)

Pergerakan keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal seperti pada Gambar 11.1 menjelaskan bahwa, fluktuasi kebijakan ini terjadi karena besaran tekanan dari kedua kebijakan yang saling berpengaruh, meski efek tekanan tersebut terkadang berjalan tidak seperti yang diharapkan oleh pengambil kebijakan dan masyarakat, seperti perubahan tingkat inflasi yang tinggi, merosotnya nilai tukar, besarnya pengangguran, terjadinya defisit neraca pembayaran serta ketidakstabilan harga, pengaruh jangka panjang dari gelombang ekonomi yang berfluktuatif ini tentunya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dalam menjaga keseimbangan gelombang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut, tentu harus dipantau dengan melakukan pengukuran terhadap variabel ekonomi dengan tepat, misalnya ketika penetapan kebijakan moneter yang ketat akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat (squeeze) dan mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran, hal ini yang membuat gelombang menjadi pasang surut, tergantung besar tekanan dari dampak kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tersebut (Basmar, 2020a).

Pengukuran gelombang tekanan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada Gambar 11.1 dilakukan dengan menggunakan metode bauran kebijakan moneter dan fiskal (monetary-fiscal policy mix) yang menjelaskan tentang skenario koordinasi dari kedua kebijakan tersebut, pertama, kebijakan moneter dan fiskal ekspansif, kedua, kebijakan moneter kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif, ketiga, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif, keempat, kebijakan moneter dan fiskal kontraktif.

Penjabaran keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal hanya berfokus pada kebijakan ketat ataupun kebijakan longgar (a tight or a loose policy), konsep ini bermakna bahwa ketika kebijakan moneter dan fiskal memilih kebijakan ketat akan memberikan pengaruh pada penurunan tingkat inflasi, namun akan meningkatkan pengangguran, demikian sebaliknya ketika kedua kebijakan melaksanakan kebijakan longgar maka tingkat inflasi akan meningkat, namun tingkat pengangguran akan berkurang, kondisi lainnya adalah ketika salah satu kebijakan memiliki kebijakan ketat dan lainnya longgar ataupun sebaliknya, maka kondisi ini menjelaskan bahwa tingkat inflasi maupun tingkat pengangguran berada dalam batas normal (Basmar, 2020b).

Implikasi pengukuran keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memberikan hasil yang berbeda yaitu pertama, kebijakan satu atap yang menjalankan kebijakan di bawah tanggung jawab moneter dan fiskal, yang bekerja dengan upaya untuk mengurangi ketidakpastian sekecil mungkin, kedua, otoritas yang independen, konsep ini berdiri sendiri antara moneter dan fiskal dan tidak terjadi dominasi atas kebijakan yang dikeluarkannya dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal, ketiga, yang memimpin dan yang dipimpin, konsep ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh salah satu otoritas keuangan akan menjadi pemimpin dalam mencapai sasaran bersama, sementara otoritas lainnya akan menetapkan kebijakan dengan menggunakan dasar dari kebijakan pertama sebagai kebijakan yang dipimpin (Blinder, 1982).

Dari keseluruhan model dan pengukuran dalam mencapai keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang ditunjukkan melalui efektivitas bauran kebijakan baik secara longgar ataupun ketat, konsep ini menemukan bahwa dengan konsep bauran dengan metode kebijakan moneter longgar dan kebijakan fiskal ketat lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan kebijakan moneter ketat dan kebijakan fiskal longgar untuk jangka panjang, karena konsep ini tidak bertentangan terhadap fiscal sustainability dan tidak terjadi *crowding out effect* (Bennet et al, 2002).

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, melalui bauran kebijakan ini untuk negara Italia dan Turki menggambarkan bahwa efek dari hubungan ini memberikan dampak positif pada pergerakan ekonomi makro negara tersebut, adapun kondisi untuk negara Indonesia bauran kebijakan tersebut memberikan efek kerugian kecil (minimum loss) terhadap aktivitas perekonomian (Petit et al, 1989; Javed et al, 2005; Goeltom et al, 2005).

Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, melalui pengukuran ini akan menciptakan perekonomian yang optimal, yaitu perekonomian yang akan berjalan dengan baik karena adanya kerjasama antara kedua kebijakan dalam mencapai tujuan bersama, dimana efek dari kebijakan tersebut bersifat menetralkan makro ekonomi secara keseluruhan.

Oleh karena itu keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang saling terkoordinasi dengan baik tentunya akan memberikan dampak positif pada sosial welfare suatu negara secara global, termasuk juga Indonesia, sehingga defisit fiskal yang terjadi dapat terkontrol dengan tingkat inflasi yang seimbang dan dapat merangsang terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan pertimbangan yang matang agar dapat mencapai titik keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dua instansi terbesar harus bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan berat yang dihadapi seperti krisis keuangan ataupun krisis ekonomi yang merusak perekonomian global secara umum dan perekonomian nasional secara khusus.

11.3 Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal

Keseimbangan Internal merupakan suatu faktor yang tidak dapat dilepaskan dalam proses pencapaian keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, meski sasaran dari keseimbangan tersebut mengantarkan pada proses pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, meskipun secara historikal perjalanan keuangan dan perekonomian mengalami pasang surut karena adanya faktor krisis keuangan dan krisis ekonomi secara global. Keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dapat terjadi melalui keseimbangan antara permintaan agregat dan penawaran agregat, meski konsep dari kedua kebijakan ini memiliki struktur dan tindakan yang berbeda namun kinerja keduanya dapat saling bersinergi dalam mencapai tujuan stabilitas perekonomian yang berbeda (Basmar, 2010).

Perbedaan konsep melalui penyeimbangan permintaan agregat dan penawaran agregat ditunjukkan melalui kondisi perekonomian yang mengalami tekanan inflasi yang tinggi, yang mengarah pada pengurangan permintaan agregat untuk mencapai tingkat stabilitas, sementara jikalau kondisi perekonomian

sedang menghadapi resesi maka perlakukan perekonomian menggunakan stimulus pada permintaan agregat. Hal ini sejalan dengan pandangan teori yang dikemukakan oleh Keynesian Baru yang mengatur perekonomian secara umum (tidak terkecuali pada pengukuran perekonomian Indonesia) dengan menggunakan berbagai elemen seperti pengukuran pada pasar kredit, pengukuran efek domino dari shock permintaan agregat, serta pengukuran tingkat pengangguran (Kurva Phillips), tingkat inflasi serta kaitannya terhadap suku bunga (Taylor Rule) dalam mengukur keseimbangan internal dan eksternal di Indonesia (Gambar 11.2).

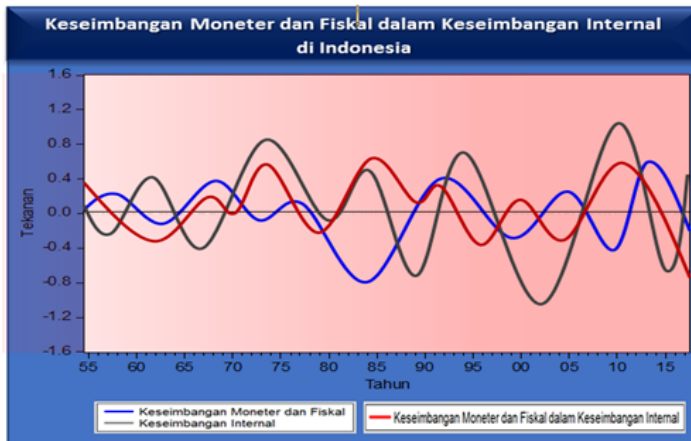
Keterkaitan antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal secara internal tergambar melalui hubungan antara satu dengan lainnya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika pengelolaan kebijakan dilakukan dengan tepat, hal ini bertujuan untuk melihat peranan masing-masing kebijakan dalam proses pencapaian tujuan perekonomian yang optimal. Dimana konsep optimal ini diterjemahkan oleh dalam beberapa teori mengandung beberapa makna antara lain kebijakan dominan dan tidak dominan, rezim Ricardian dan Non Ricardian serta aktif atau pasif yang dimulai sejak tahun 1981 (Sergent et al, 1981; Aiyagari et al, 1985; Leeper et al, 1991).

Pandangan Keynesian Baru ini melihat beberapa hal antara lain, pertama, otoritas keuangan cenderung berfokus pada besaran utang pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan model kontrol yang diinginkan merupakan suatu bentuk kebijakan aktif, namun jika otoritas keuangan merespon kejutan dari utang pemerintah merupakan suatu bentuk kebijakan pasif. Kedua, kebijakan moneter dipandang lebih mudah untuk menetralkan perekonomian jika terdapat gejolak keuangan atau ekonomi yang berat, hal ini berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter dapat menggunakan instrumen kebijakannya melalui transmisi kebijakan moneter yang secara lambat laun dapat memengaruhi tingkat inflasi dan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan uang pasif, yang ditunjukkan dengan pergerakan tingkat suku bunga dan nilai tukar sebagai instrumen kebijakan moneter, dapat menjadikan kestabilan harga pada perekonomian. Keempat, kebijakan yang bersifat kaidah cenderung menghasilkan output yang lebih baik dibandingkan dengan kebijakan yang dijalankan secara diskresi.

Kunci dari pandangan Keynesian Baru ini ada pada kebijakan moneter dengan hak otoritas berada pada Bank Sentral, sehingga kemandirian dan

independensi Bank Sentral sangat diperlukan terkhusus jika terjadi tekanan berat pada perekonomian, tentunya independensi ini diterjemahkan sebagai bentuk kekuasaan Bank Sentral dalam menetapkan langka dan kebijakan tanpa campur tangan pihak lain (baik individu ataupun instansi pemerintahan) serta tekanan atau tendensi politik, sehingga dengan independensi tersebut akan memudahkan kontrol atau mengurangi celah kerusakan keuangan dan ekonomi disaat tekanan perekonomian sedang memuncak (Mustacelli et al, 2000).

Konsep keseimbangan internal ini tentunya akan memberikan dampak pada tekanan perekonomian, selain dari pengaruh keseimbangan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, tekanan internal juga dapat memberikan pengaruh yang cukup besar, pada Gambar 11.2 menunjukkan bahwa tekanan internal bergerak dengan rata-rata tekanan dari 0.8 hingga -0.8 amplitudo, tekanan tersebut menjadi ukuran bagi proses pergerakan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang dapat ditinjau melalui konsep keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam keseimbangan internal.



Gambar 11.2: Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal di Indonesia (Bank Indonesia data diolah)

Gambar 11.2 terlihat bahwa pergerakan gelombang kebijakan internal bisa bergerak fluktuatif dengan tekanan yang berbeda-beda. Pengukuran ini dikarenakan adanya faktor yang memengaruhi masing-masing kebijakan, baik kebijakan moneter, kebijakan fiskal (Basmar, 2018c).

Keseimbangan Internal banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertama tingkat inflasi dan suku bunga karena adanya harga minyak bumi, sejatinya peningkatan harga minyak bumi ini akan memberikan pengaruh pada perekonomian di Indonesia, seperti permasalahan pada anggaran keuangan negara, tingkat konsumsi, dan sektor industri. Untuk negara yang memiliki cadangan minyak yang banyak akan memberikan pengaruh positif pada perekonomiannya seperti di Timur Tengah, Rusia dan Venezuela, namun untuk Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan minyak bumi, tentunya akan memberikan pengaruh pada perubahan tingkat inflasi (kenaikan harga-harga) secara keseluruhan, baik terhadap biaya produksi, harga jual produk, distribusi dan lainnya.

Peningkatan harga minyak dunia ini karena imbalance-nya permintaan dan penawaran yang diakibatkan oleh pertumbuhan perekonomian dunia yang cepat, khususnya di China dan India, sementara di sisi lain terjadi kekurangan supply minyak karena cuaca buruk di teluk Meksiko dan adanya gejala geopolitik dunia, sehingga faktor kenaikan harga minyak diikuti oleh tingkat inflasi mengakibatkan daya beli berkurang, sementara sektor industri tidak dapat membiayai upah karyawan yang juga meningkat, sehingga peranan pemerintah diperlukan untuk membantu sektor industri agar dapat menjalankan aktivitasnya melalui subsidi agar biaya produksi menjadi lebih rendah.

Penyesuaian ini terjadi agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dalam pasar perekonomian dunia, sehingga konsep tersebut dapat menambah beban negara untuk menurunkan tingkat inflasi, apalagi disertai dengan pelemahan Dolar Amerika Serikat yang menjadikan suku bunga bank mengalami peningkatan yang mengakibatkan penurunan Produk Domestik Bruto, meski di sektor riil penurunan tingkat suku bunga sangat diharapkan agar dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu pengaruh inflasi dan minyak bumi dipandang memberikan dampak pada fluktuasi gelombang keseimbangan internal seperti pada Gambar 11.2 tersebut.

Kedua, adanya ekspansi kredit melalui pelanggaran kebijakan moneter akan menciptakan pergerakan sektor riil dan konsumsi masyarakat, yang akan memudahkan perbankan untuk menyalurkan kredit produktifnya, kondisi ini tentunya akan mengurangi tekanan dalam perekonomian baik nasional maupun internasional, karena sektor usaha akan merasa terbantu dalam operasi usahanya, meski bagi perbankan harus mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan oleh ekspansi kredit tersebut.

Keterkaitan antara ekspansi kredit dengan tingginya harga komoditas (pertambangan dan perkebunan) tentunya akan menciptakan gelombang ekonomi yang besar (economy bubble) sehingga perbankan harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, karena jangka waktu untuk kredit yang digunakan pada sektor komoditas merupakan kredit jangka panjang, yang kemungkinan jika gelombang tersebut memberikan tekanan kuat (over investment) pada perekonomian akan mengakibatkan risiko tinggi bagi sektor keuangan melalui jalur kredit macet dan krisis keuangan berkelanjutan (Basmar et al, 2015).

Meningkatnya harga komoditas di pasar internasional terkhusus pada pertambangan dan energi (minyak, gas, batu bara, nikel, kelapa sawit, karet dan lainnya) akan meningkatkan keuntungan yang besar, sehingga konsep tersebut menjadikan perbankan berupaya untuk memberikan kredit secara maksimal kepada sektor produktif dan sektor infrastruktur.

Ketiga, tingkat optimisme di pasar bursa saham yang semakin meredup, hal ini dikarenakan oleh adanya resesi perekonomian Amerika Serikat, mengakibatkan nilai Indeks Harga Saham Gabungan di Wall Street New York ikut melemah yang kemudian merambat ke Indonesia, adapun faktor yang memengaruhinya antara lain sentimen negatif memengaruhi investor, meningkatnya risiko bagi investor, harga komoditas yang merosot, dan adanya harga minyak dunia.

Pergerakan harga saham di bursa didominasi oleh negara-negara yang pertumbuhan ekonominya di tahun 2008 tergolong kuat seperti negara-negara di Asean antara lain Singapura, Malaysia Hongkong, Indonesia dan Thailand, namun untuk aktivitas harga saham di bursa, Indonesia harus bersaing dengan negara lainnya seperti Thailand, Filipina dan India, karena Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan kurang lebih 80 poin karena adanya efek negatif pada elemen perekonomian di Indonesia antara lain perubahan anggaran, nilai mata uang, keuntungan perusahaan, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan neraca pembayaran (Siswanti et al, 2020).

Kondisi yang melemah ini menjadikan pemerintah Indonesia meningkatkan aktivitas perekonomian di sektor riil dengan membangun infrastruktur, ditunjang dengan tingkat suku bunga yang rendah, sehingga perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat menyalurkan kredit secara optimal serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas Indeks Harga Saham Gabungan di pasar bursa (Basmar et al, 2017).

Keempat, Anggaran pemerintah, dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, konsolidasi fiskal yang diterapkan bertujuan untuk mencegah indikator yang dapat memengaruhi anggaran pemerintah seperti tingginya hutang publik, pemberian subsidi yang banyak, kurangnya penerimaan pajak, perlemahan mata uang, kenaikan suku bunga dan kenaikan harga minyak.

Konsep subsidi yang dijalankan pemerintah menjadi dilematis karena jika subsidi berjalan terus maka akan memberatkan anggaran pemerintah, disamping itu pemberian subsidi harus dilandaskan pada aspek keuangan dan politik negara, karena konsep ini akan menyebabkan terjadinya distorsi harga, dampak sosial yang rawan, tidak efisien, boros dan tidak menyentuh masyarakat bawah, karena hanya kalangan atas yang menikmati keuntungan dari konsep ini. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan menggunakan cash on hand transfer karena akan langsung memberikan manfaat yang riil seperti keringan biaya sekolah, biaya kesehatan, tunjangan lauk pauk, perbaikan gizi. Konsep subsidi bisa dilakukan dengan mengganti minyak dengan subsidi lainnya seperti pangan, pupuk, benih, listrik, ataupun yang lainnya, karena tujuan subsidi ini agar dapat meningkatkan kualitas hidup, membantu rakyat miskin, usaha kecil menengah dapat terus berjalan, penentuan harga tetap mengikuti nilai pasar, tingkat inflasi terjaga dan tetap terjadi keseimbangan perekonomian.

Konsep subsidi ini dilakukan pemerintah dengan memberikan bantuan kepada rumah tangga agar terus dapat mengkonsumsi produk, serta kepada perusahaan untuk tetap berproduksi agar dapat meningkatkan output, menetralkan harga pasar dan meningkatkan pendapatan perkapita negara.

Kelima, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 6%, dalam kondisi ini Indonesia mengalami tekanan keuangan dari Amerika Serikat dan Eropa yang mengalami krisis keuangan, turbulensi ini terjadi karena kekuatan ekonomi China dan India yang cukup kuat sehingga untuk Asia tekanan keuangan tidak terlalu berimbas pada perekonomian negara termasuk Indonesia. Tekanan ini tentunya telah diantisipasi oleh pemerintah dengan meningkatkan investasi Asing di Indonesia melalui peningkatan infrastruktur untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, disamping itu dampak positif lainnya akan mengurangi tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja baru.

Meski tekanan perekonomian Amerika Serikat dan Eropa menghantam perekonomian negara relasi perdagangan mereka, namun untuk Indonesia

tekanan tersebut tidak memengaruhi pertumbuhannya karena tingkat ekspor Indonesia ke Amerika Serikat hanya mencapai 13%, dan telah terjadi pengalihan fokus ekspor Indonesia ke beberapa negara Asia yang memiliki struktur keuangan yang sama dengan Indonesia.

Kondisi krisis Amerika Serikat dan Eropa ini telah memberikan dampak pada perlambatan aktivitas pasar keuangan sehingga banyak negara melakukan proyeksi pertumbuhan yang rendah dengan laju inflasi yang juga menurun, apalagi tekanan tersebut telah memengaruhi Anggaran Pemerintah karena adanya gejolak minyak bumi yang meningkat. Meski berbagai tekanan telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia namun pendapatan perkapita Indonesia berada pada kisaran USD 2.000 sementara negara Asia lainnya seperti Malaysia sebesar USD 4.000, Thailand USD 3.400 dan India USD 11.262, selain itu Indonesia sudah berada pada status negara berkembang setelah Indonesia keluar dari negara yang layak menerima pinjaman bunga lunak dari negara donor.

11.4 Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Eksternal

Masuknya Indonesia dalam kancah perekonomian dunia mengakibatkan Indonesia harus bersiap terhadap segala perubahan perekonomian dunia, perubahan eksternal tersebut tentunya sedikit banyak akan memberikan pengaruh pada perekonomian negara, faktor yang paling rawan dari hubungan ini adalah nilai mata uang, sehingga dapat dikatakan bahwa rupiah akan semakin sensitif pada tekanan keuangan global, yang merupakan pintu masuknya guncangan ekonomi yang berawal dari pelemahan mata uang, meski tidak menutup kemungkinan guncangan perekonomian global dapat merambat melalui variabel makro ekonomi lainnya.

Perlambatan perekonomian Amerika Serikat tentunya akan menjadikan alarm bagi setiap negara, potensi terjadinya krisis keuangan di Indonesia semakin kuat, dikarenakan nilai tukar yang melemah tentunya memberikan pengaruh pada nilai investasi di Indonesia karena terjadi instabilitas nilai mata uang akibat adanya *capital outflow*.

Tekanan dari perlambatan ekonomi dunia mengakibatkan negara maju mengalami kekurangan likuiditas (liquidity crunch) sehingga menerapkan kebijakan moneter longgar, sementara negara berkembang tingkat likuiditas keuangannya cukup baik sehingga konsep kebijakan moneternya menggunakan kebijakan ketat (tight money policy) yang bertujuan untuk menjaga tingkat inflasi agar tetap stabil.

Harga komoditas telah menambah tekanan perekonomian dunia, dimana Indonesia merasakan tekanan tersebut karena ketergantungan impor bahan pangan seperti kedelai, gandum, beras, dan bahan makanan ternak, yang memengaruhi output produksi Indonesia. Faktor tersebut memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat yang melemah karena pendapatan riil turun akibat kenaikan harga pangan dan bahan-bahan kebutuhan pokok. Disamping itu kenaikan harga minyak kelapa sawit, BBM dunia dan harga komoditas dunia mengakibatkan peningkatan inflasi yang cukup tinggi karena terdapat imported inflation sebesar 1.77% dan juga menekan tingkat suku bunga, tentunya semua ini berimbas pada peningkatan kemiskinan dan perlambatan perekonomian (Basmar et al, 2018).

Peningkatan kemiskinan yang terjadi di Indonesia sebesar 14%, faktor penyebabnya karena masalah perilaku ekonomi untuk memenuhi kebutuhan primer yang mengalami peningkatan harga jualnya, meski upaya penurunan tingkat kemiskinan ini telah diupayakan oleh pemerintah dengan memberikan keringan dan bantuan, namun disisi lain memberikan tekanan pada anggaran pemerintah yang harus menyesuaikan anggaran keuangan negara hingga mencapai posisi 4.4% - 4.9%, hal ini terjadi karena adanya defisit anggaran, gejala ekonomi global yang sensitif dan mengandung ketidakpastian (uncertainty) (Basmar et al, 2020).

Persoalan kemiskinan yang terjadi dapat diturunkan jika tingkat inflasi ikut ditekan serendah mungkin, adapun angka pengangguran di Indonesia mencapai level diatas 8% dari total angkatan kerja, kondisi ini terjadi karena realisasi stimulus fiskal dan infrastruktur yang dilakukan pemerintah berjalan lambat, sehingga ini memberikan dampak negatif pada perekonomian. Berbagai tekanan yang terjadi secara eksternal dapat mengancam terjadinya krisis di Indonesia, meskipun perekonomian Indonesia pada tahun 2007 menunjukkan angka pertumbuhan yang positif dengan bekerjanya sistem perekonomian seperti stabilitas ekonomi (sektor keuangan) dan pertumbuhan ekonomi (sektor riil).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak terlepas pada faktor eksternal, dimana Indonesia sebagai negara berkembang memiliki hubungan perdagangan yang erat terhadap beberapa negara lainnya, hubungan perdagangan ini sedikit banyaknya akan memberikan tekanan keuangan, baik yang berdampak positif dan juga berdampak negatif. Pergerakan atau tekanan eksternal yang bersifat positif tentunya akan disikapi dengan kebijakan yang stabil dan berkelanjutan, namun jika tekanan eksternal yang bersifat negatif tentunya akan disikapi dengan kebijakan moneter dan fiskal yang seimbang.

Pengaruh tekanan tersebut tentunya akan ditransmisikan ke dalam sebuah kebijakan, tergantung besaran tekanan yang ditimbulkan, dimana tekanan tersebut digambarkan melalui gerakan gelombang yang berfluktuatif disertai besaran tekanan yang ditimbulkan. Konsep gerakan gelombang dapat dimaknakan sebagai pasang surutnya perekonomian Indonesia dalam menghadapi tekanan yang datang secara eksternal, seperti yang tampak pada Gambar 11.3 di bawah ini:



Gambar 11.3: Keseimbangan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Eksternal di Indonesia (Bank Indonesia data diolah)

Gambar 11.2 terlihat bahwa keseimbangan eksternal menunjukkan hubungan yang positif signifikan terhadap keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pada perekonomian Indonesia, besaran tekanan yang terjadi 0.7 hingga -0.4 Amplitudo, tekanan tersebut merupakan filterisasi dari berbagai tekanan perekonomian secara eksternal kemudian direspon oleh

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dijalankan di Indonesia. (Basmar, 2011)

Gambaran tekanan dan pergerakan gelombang tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor yang memengaruhi keseimbangan eksternal antara lain, pertama karena adanya gejolak ekonomi dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian di dunia ini telah menjadi universal antara satu negara dengan negara lainnya, baik negara maju, negara berkembang maupun negara kurang sejahtera, konsep ini nampak pada negara Amerika Serikat yang ketika terjadi guncangan dalam negara tersebut, maka cepat atau lambat akan masuk pada negara lainnya, tidak terkecuali dengan perekonomian Indonesia.

Perubahan tata kelola keuangan akan mendominasi aktivitas pertumbuhan suatu negara, kondisi keuangan yang positif akan meningkatkan pertumbuhan namun kondisi keuangan yang negatif akan menghantarkan perekonomian memasuki gelombang resesi yang akan merusak semua sendi perekonomian secara nasional yang terjadi karena transaksi perdagangan internasional (Munthe et al, 2021).

Gejala yang dapat ditimbulkan dapat berupa kenaikan harga minyak dunia (level USD 110 per barel di tahun 2008), yang berimbas pada perubahan perilaku keuangan setiap negara termasuk Indonesia, hal ini tentunya mendorong tingkat inflasi dan perubahan nilai tukar yang akhirnya memberikan efek negatif pada neraca pembayaran Indonesia.

Kedua, adanya pengaruh harga komoditas yang meningkat, faktor ini terjadi karena transaksi ekspor komoditi yang besar, yang memicu terjadinya gejolak resesi keuangan dunia, dan berujung pada rusaknya sendi-sendi perekonomian di setiap negara termasuk Indonesia. Kasus kenaikan harga komoditas (tambang, perkebunan dan pangan) ini telah menjadikan resesi di seluruh dunia, melalui kegagalan pasar perekonomian (market failure) dan kegagalan pemerintah (government failure), dimana kegagalan-kegagalan tersebut terakumulasi sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar yang dikenal dengan sebutan twins problem yang dihadapi oleh negara maju seperti Amerika Serikat.

Hubungan antara peningkatan harga komoditas terhadap peningkatan harga dipengaruhi oleh peningkatan harga minyak dunia serta tekanan dari twins problem yang dihadapi. Faktor tersebut mengakibatkan perubahan pada permintaan dan penawaran dalam hukum ekonomi. Konsep perubahan ini terjadi karena komoditas yang dikonsumsi oleh negara yang memiliki

pertumbuhan ekonomi yang besar seperti negara China dan India (populasi penduduk yang besar) menjadikan lonjakan harga komoditas meningkat (demand side), sementara proses produksi tidak dapat berjalan dengan baik (supply side) sehingga keseimbangan keduanya tidak stabil dan mengganggu ekuilibrium pasar dunia.

Ketimpangan ekuilibrium dunia mengakibatkan terjadinya resesi, yang tentunya akan memengaruhi kondisi perekonomian secara keseluruhan seperti terjadinya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan, investasi yang menurun dan profit perusahaan yang berkurang, fluktuasi harga yang tidak stabil, perubahan nilai valuta asing baik yang terjadi di pasar bursa saham dan pasar komoditas dunia menjadikan pengalaman berharga dalam mengontrol perekonomian yang terjadi di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus.

Ketiga, konsep pertumbuhan dan pembangunan merupakan suatu pengukuran yang bertujuan untuk dapat mengontrol terjadinya peningkatan standar perekonomian, sehingga untuk mengukur pertumbuhan dan pembangunan ini sebaiknya menggunakan pendapatan riil suatu negara. Konsep pertumbuhan dan pembangunan yang terjadi di Amerika Utara dan Eropa mengalami penurunan sangat tajam, kondisi tersebut tentunya akan sangat mengkhawatirkan bagi perekonomian dunia, dalam pengukuran International Monetary Fund menemukan bahwa pertumbuhan dan pembangunan di Amerika Utara dan Eropa sebesar -1.3%, meski pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara-negara di Asia menunjukkan nilai positif, harus tetap berhati-hati karena sifat perubahan perekonomian sulit diprediksi.

Keterkaitan antara satu dengan lainnya dalam pembangunan ekonomi akan menciptakan aktivitas pertumbuhan ekonomi yang maksimal, sementara dengan pertumbuhan ekonomi akan mempermudah proses pencapaian pembangunan ekonomi. Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi diukur secara kuantitatif sementara pengukuran pembangunan ekonomi menggunakan skala kualitatif, seperti teknik produksi, sumber ekonomi, pengetahuan dan sebagainya, sehingga faktor pertumbuhan dan pembangunan merupakan suatu faktor eksternal yang harus diperhatikan oleh setiap negara agar dapat menciptakan pemerataan ekonomi global (Nur et al, 2021).

Keempat, adanya depresi keuangan dan perkembangan Produk Domestik Bruto, dimana depresi keuangan dunia yang terjadi di tahun 1929 yang kemudian dikenal dengan nama *Malaise*, kondisi ini telah merusak

perekonomian dunia, depresi selasa kelam (24 Oktober 1929) ditandai dengan ketidakstabilan bursa saham di New York yang berdampak pada perekonomian negara maju dan negara berkembang saat itu, dampaknya mengakibatkan terjadinya penurunan dalam perdagangan internasional, pendapatan perorangan, pendapatan sektor pajak, meningkatnya harga barang manufaktur, dan margin perusahaan terus menurun.

Gejala depresi keuangan dan perkembangan Produk Domestik Bruto ini akan menentukan besaran output barang yang dihasilkan oleh suatu negara, sehingga ketika pertumbuhan Produk Domestik Bruto ini berada pada angka yang positif berarti kekuatan ekonomi negara tersebut dalam menghadapi guncangan perekonomian seperti depresi keuangan dapat diantisipasi dengan baik, oleh karena itu pertumbuhan Produk Domestik Bruto negara maju (eksternal) akan menjadi acuan bagi negara lainnya dalam mengukur pertumbuhan perekonomiannya.

Oleh karena itu, konsep keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini tentunya akan bekerja dalam tataran perekonomian yang berbeda terlepas dari adanya pengaruh internal dan eksternal, ke semuanya akan saling berkorelasi antara satu dengan yang lainnya agar dapat memberikan pengaruh pada perekonomian, dan atas dasar tersebut maka kestabilan harga dapat terpenuhi dan menciptakan neraca pembayaran yang lebih mapan, sesuai dengan tujuan bersama yaitu menjaga keseimbangan internal (stabilitas harga) dan keseimbangan eksternal (neraca pembayaran) melalui keseimbangan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Bab 12

Model Ekonomi Terbuka

12.1 Pendahuluan

Globalisasi yang salah satunya dipicu oleh kemajuan dalam teknologi, telah membawa perubahan aktivitas ekonomi mampu melewati batas-batas politik antar wilayah negara yang menjadikan transaksi ekonomi antar negara melampaui batas-batas yang semakin tidak nyata, karena transportasi yang mudah, transaksi yang semakin cepat dan efisien, serta komunikasi yang semakin lancar dan meningkat. Globalisasi dalam ekonomi telah menunjukkan kecenderungan perubahan ekonomi yang berlangsung sangat drastis bahkan ekstrem. Praktik ekonomi suatu negara yang mengglobal bisa disebut juga sebagai sistem perekonomian yang terbuka.

Perekonomian terbuka dikenal dengan suatu sistem perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional (ekspor dan impor) barang, jasa, dan modal dengan negara-negara lain. Dengan sistem ekonomi ini berarti terdapat kesempatan bagi produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dengan tujuan pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan aktivitas impor atas bahan mentah, bahan penolong, mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model ekonomi terbuka ini sektor perbankan dan lembaga keuangan juga bisa berasal dari luar negeri sehingga sistem perekonomian akan semakin menyatu dan mengglobal.

Perekonomian terbuka adalah suatu perekonomian yang berinteraksi secara bebas dengan perekonomian dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka akan menggambarkan kondisi antarnegara dalam melakukan kerja sama secara ekonomi melalui kegiatan perdagangan internasional maupun dalam bidang politik. Negara yang menerapkan sistem perekonomian terbuka, akan terlihat dengan adanya interaksi dengan pihak negara lain yang ditandai dengan mekanisme dan aktivitas ekspor dan impor. Oleh karena itu perekonomian terbuka disebut juga sebagai perekonomian empat sektor, yaitu suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain, sehingga kegiatan ekspor dan impor menjadi bagian penting dalam kegiatan perekonomian.

Ekspor adalah suatu aktivitas pengiriman dan penjualan barang-barang dari dalam negeri tujuan ke pasar luar negeri. Dari aktivitas ekspor yaitu kegiatan mengirim atau menjual barang dan jasa ke luar negeri maka akan mengakibatkan peningkatan dalam pendapatan nasional. Sedangkan kegiatan impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri.

12.2 Perekonomian Terbuka

12.2.1 Penyebab Sistem Perekonomian Terbuka

Berikut adalah beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional yang biasa disebut dengan perekonomian terbuka, yaitu:

1. Perbedaan kondisi produk.
Yaitu perbedaan kondisi suatu produk cenderung mengarah pada kualitas sebagai alasan terjadinya perdagangan internasional. Sebagai contoh suatu produk elektronik dari Jepang akan memiliki kualitas berbeda apabila dibandingkan dengan produk elektronik dari Korea, dan sebagainya.
2. Biaya produksi lebih hemat.
Dengan melakukan perdagangan secara internasional maka akan menambah kapasitas volume produksi. Dan dengan menghasilkan produk dalam skala jumlah yang lebih besar, akan mampu

menghemat biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Di samping itu, adanya kemungkinan suatu produk akan lebih efisien jika diproduksi di negara-negara tertentu karena memiliki sumber daya produksi yang lebih baik.

3. Perbedaan tingkat selera.

Perbedaan selera penduduk suatu negara juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap timbulnya perdagangan internasional dalam sistem ekonomi terbuka. Karena hampir dapat dipastikan bahwa penduduk di setiap negara akan memiliki tingkat selera yang berbeda dengan penduduk di negara lainnya.

4. Adanya perbandingan keunggulan (*comparative advantage*).

Suatu negara cenderung melakukan spesialisasi dalam menciptakan produk dan mengekspornya ke luar negeri apabila pembuatan produk tersebut memakan biaya yang relatif lebih murah dari negara lain. Demikian pula suatu negara akan lebih memilih mengimpor produk apabila biaya produksi dalam negeri untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi dan tidak efisien.

12.2.2 Sistem/Model Perekonomian Terbuka

Praktik perekonomian terbuka telah lama dilakukan oleh para pedagang sejak zaman dulu dengan melakukan kegiatan jual beli barang antar wilayah meskipun sarana dan prasarana saat itu belum maju seperti sekarang ini. Kegiatan ekspor dan impor memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara dewasa ini yang salah satu penyebabnya karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Manfaat yang diperoleh dengan perekonomian terbuka yaitu semakin terbarnya pasar yang berskala lebih luas dan terdiversifikasi, khususnya bagi produk-produk manufaktur dan produk yang memiliki nilai tambah, serta terjadinya relokasi industri dari negara maju ke negara berkembang karena faktor upah buruh di negara berkembang yang relatif masih rendah.

Karakteristik dari perekonomian terbuka adalah ditandai dengan dua aktivitas utama yang dilakukan yaitu aktivitas ekspor dan aktivitas impor. Dengan dua aktivitas tersebut, tentunya akan memengaruhi tingkat keseimbangan pendapatan nasional suatu negara. Dan dengan kedua aktivitas tersebut, maka

suatu negara telah melakukan kegiatan ekonomi dengan negara lain (berupa ekspor dan impor), maka negara tersebut sudah mempraktekkan model perekonomian terbuka. Aktivitas ekspor dan impor suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu: (1) perdagangan barang dan jasa; serta (2) keuangan/modal. Sedangkan tingkat keterbukaan perekonomian sebuah negara dapat diukur dengan parameter rasio ekspor impor terhadap gross national product (GNP) atau gross domestic product (GDP).

Perekonomian terbuka sering disebut juga dengan kegiatan ekonomi empat sektor, yaitu kegiatan ekonomi yang melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri serta masyarakat ekonomi di luar negeri yang meliputi sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri.

Dari keempat sektor tersebut terdapat hubungan yang saling terkait, yaitu:

1. Rumah tangga

- a. Hubungan dengan perusahaan. Dimulai dari rumah tangga menawarkan tenaga kerja (sumber daya manusia - SDM) yang dimilikinya kepada perusahaan yang dipertemukan pada pasar tenaga kerja, maka rumah tangga akan mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah dan profit yang dipertemukan dalam pasar uang & lembaga keuangan.
- b. Hubungan dengan Pemerintah. Dalam hubungan ini rumah tangga menyetorkan sejumlah uang berupa pajak kepada pemerintah dan rumah tangga akan menerima imbalan secara tidak langsung yang berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa dari pemerintah sebagai bentuk hasil dari pajak.
- c. Hubungan dengan negara lain. Untuk dapat berhubungan dengan negara lain rumah tangga harus melakukan aktivitas transaksi produk barang/jasa di pasar luar negeri berupa aktivitas ekspor. Namun rumah tangga juga dapat mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

2. Perusahaan

Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan produk barang atau jasa.

- a. Hubungan dengan rumah tangga. Perusahaan menghasilkan produk-produk berupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh

masyarakat. Lalu Perusahaan mendapatkan penghasilan dari penjualan produknya. Interaksi tersebut dipertemukan dalam pasar barang. Pasar Barang adalah pasar yang mempertemukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Pasar barang sering diistilahkan dengan sektor riil.

- b. Hubungan dengan Pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan jasa kepada pemerintah melalui pasar barang.
 - c. Hubungan dengan Dunia Internasional. Perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tersebut perusahaan mendapatkan laba/keuntungan.
3. Pemerintah
- Bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis.
- a. Hubungan dengan Rumah tangga. Pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan, dan lain-lain untuk membangun negara.
 - b. Hubungan dengan Perusahaan. Pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada.
4. Negara-negara lain
- a. Hubungan dengan Rumah tangga. Negara-negara lain (dunia internasional) menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri masuk ke dalam pasar barang dalam negeri sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli tersebut negara lain mendapatkan laba/keuntungan.
 - b. Hubungan dengan Perusahaan. Dunia internasional (negara lain) mengeksport produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan. Aliran

barang dan jasanya juga melalui pasar luar negeri lalu masuk ke pasar barang, dan dari proses tersebut akan dihasilkan suatu laba.

12.2.3 Faktor Ekspor dan Impor

Ekspor (X)

Jika suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang diperlukan di dalam negeri. Dengan meningkatnya jumlah produk (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh suatu negara, maka akan meningkatkan pendapatan nasional (Y) negara tersebut.

Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat (aggregate expenditure), sehingga dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh negara tersebut. Apabila ekspor meningkat maka pengeluaran agregat akan meningkat pula, dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional (Y) tidak dapat memengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkat atau mengalami perubahan, meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Besarnya kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah.

Suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi sendiri barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Ada faktor terpenting yang menentukan ekspor suatu negara yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri, baik dalam mutu, harga barang yang diekspor dan diperjual-belikan dalam pasaran luar negeri, serta cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor.

Sedangkan penyebab kemerosotan pada ekspor, yaitu terjadinya perubahan cita rasa penduduk luar negeri, merosotnya kemampuan bersaing di pasar luar negeri serta terjadi permasalahan ekonomi yang sedang dialami di luar negeri.

Impor (M)

Dalam analisis makro ekonomi diasumsikan bahwa faktor yang memengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri (impor) suatu negara adalah

kemampuan membayar (daya beli) negara tersebut terhadap barang impor. Makin tinggi tingkat kemampuan membayar (daya beli) negara tersebut maka semakin tinggi pula impor yang dapat dilakukannya.

Impor suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakatnya, semakin banyak impor yang akan dilakukan. Inflasi juga dapat menyebabkan secara keseluruhan barang buatan dalam negeri menjadi lebih mahal. Faktor lainnya yaitu kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya juga dapat menimbulkan perubahan impor terhadap tingkat pendapatan nasional.

12.2.4 Sirkulasi Pendapatan dan Keseimbangan Perekonomian Terbuka

Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Maka dari itu kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan suatu perekonomian. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan dengan bertambahnya sektor luar negeri berupa kegiatan ekspor dan impor.

Ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negeri. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran produk barang/jasa yang menjadi faktor pemasukan ke sektor perusahaan. Dengan demikian pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang/jasa dan pada akhirnya keadaan ini akan menyebabkan peningkatan dalam pendapatan nasional.

Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri atau ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan ke sektor luar negeri. Aliran keluar ini juga akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional.

Sebagaimana dari penjelasan sebelumnya, bahwa ekspor dan impor memengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Penggunaan faktor-faktor produksi oleh sektor perusahaan akan menghasilkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga. Aliran pendapatan ini meliputi gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan lainnya. Dapat

disimpulkan bahwa perekonomian terbuka pengeluaran agregat meliputi lima jenis pengeluaran, yaitu:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri (Cdn).
2. Investasi perusahaan (I) untuk menambah kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa.
3. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri (G).
4. Ekspor yaitu pembelian oleh negara lain terhadap barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri (X).
5. Impor yaitu barang yang dibeli dari luar negeri (M).

Dengan demikian komponen pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka adalah pengeluaran rumah tangga terhadap barang buatan dalam negeri, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengeluaran terhadap barang buatan dalam negeri (ekspor).

Pengeluaran agregat (AE) ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$AE = Cdn + I + G + X + M$$

Dengan adanya interaksi atau hubungan perdagangan dengan negara lain, maka dapat membawa dampak bagi suatu negara. Dampak positif dengan adanya ekspor/impor antara lain: (1) meningkatkan hubungan kerja sama antar negara; (2) meningkatkan neraca perdagangan; (3) meningkatkan kegiatan ekonomi; (4) memenuhi kebutuhan barang konsumsi; (5) dapat mengurangi pengangguran; (5) memperluas lapangan pekerjaan; dan (6) meningkatkan cadangan devisa negara.

Sedangkan dampak negatif dengan adanya transaksi ekspor-impor antara lain: (a) terjadinya tingkat persaingan yang tinggi di dalam perdagangan, baik berupa harga, mutu, dan kualitas barang; (b) menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri; (c) konsumerisme; dan (d) dapat menyebabkan eksploitasi besar – besaran terhadap sumber daya alam.

Dalam perekonomian tiga sektor, keseimbangan pendapatan nasional terbentuk ketika $Y = C + I + G$. Maka dalam perekonomian empat sektor yang mengalami perubahan menjadi ekonomi terbuka, timbul dua aliran

pengeluaran baru yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, sedangkan impor akan mengurangi pengeluaran agregat.

Sehingga keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada suatu keadaan di mana:

1. Penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat.
2. Dalam perekonomian terbuka barang dan jasa yang diperjual-belikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan, yaitu: (a) barang/jasa yang di produksi di dalam negeri dan merupakan pendapatan nasional (Y); dan (b) barang/jasa yang di impor dari luar negeri.

Dengan demikian dalam perekonomian terbuka penawaran agregat (AS) terdiri dari pendapatan nasional (Y) dan impor (M), yang dirumuskan dengan:

$$AS = Y + M$$

Sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat (AE) meliputi lima komponen berikut, yaitu: pengeluaran rumah tangga atas barang produksi dalam negeri (Cdn), investasi swasta (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), dan pengeluaran atas impor (M), yang dapat dirumuskan:

$$AE = Cdn + I + G + X + M$$

Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri (C) dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berlaku persamaan berikut:

$$C = Cdn + M \text{ atau } AE = C + I + G + X$$

Dalam setiap perekonomian keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat (AE). Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila:

$$Y + M = C + I + G + X \text{ atau } Y = C + I + G + (X - M)$$

Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka akan dicapai dalam keadaan berikut:

$$I + G + X = S + T + M$$

Untuk menentukan keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka diperlukan pencapaian dalam kesamaan, yaitu pendapatan nasional (Y)

yang telah dikurangi oleh pajak pendapatan perusahaan serta pendapatan nasional yang mengalir ke sektor rumah tangga dikurangi pula oleh pajak pendapatan individu. Sisa yang diperoleh merupakan pendapatan disposibel (Y_d). Sehingga timbul formula setelah pajak:

$$Y_d = Y - \text{Pajak perusahaan} - \text{Pajak Individu}, \text{ atau } Y_d = Y - T$$

Pendapatan setelah dikurangi dengan pajak disebut pendapatan disposibel, yaitu pendapatan yang bisa untuk dibelanjakan. Sehingga pendapatan disposibel tersebut dapat digunakan untuk tujuan-tujuan: (a) untuk membeli barang buatan dalam negeri dan barang impor, yang dirumuskan dengan: $C = C_{dn} + M$; serta (b) untuk disimpan sebagai tabungan (S).

Dengan demikian, maka timbul formula keseimbangan baru yaitu $Y_d = C + S$. Karena $Y_d = Y - T$, maka dalam ekonomi terbuka juga berlaku persamaan:

$$Y - T = C + S \text{ atau } Y = C + S + T$$

Dimana C merupakan pengeluaran rumah tangga untuk membeli barang/jasa dalam negeri dan dari luar negeri (impor).

12.2.5 Keunggulan dan Kelemahan Perekonomian Terbuka

Telah diketahui bahwa perekonomian terbuka adalah sistem perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Jadi sebuah negara yang mengadopsi ekonomi terbuka, pengeluaran negara itu pada tahun tertentu tidak perlu sama dengan output barang dan jasa. Suatu negara dapat menghabiskan lebih banyak uang daripada yang dihasilkannya dengan meminjam dari luar negeri, atau dapat menghabiskan lebih sedikit dari yang dihasilkannya dan meminjamkan kepada orang asing (di luar negeri).

Interaksi dan kolaborasi dengan luar negeri mendorong pertumbuhan, memungkinkan akses ke produk barang/jasa yang lebih murah, akses teknologi yang lebih baik dan tidak dikucilkan dari kehidupan berbangsa. Yang terakhir adalah sangat penting ketika sebuah negara sedang menghadapi bencana alam atau sosial, yang mana membutuhkan uluran bantuan dari negara lainnya, yang sulit ditemukan terjadi pada sistem perekonomian tertutup.

Dalam ekonomi terbuka, orang dapat bertukar barang dan jasa, memulai atau memperluas bisnis mereka melintasi batas dan menikmati biaya yang lebih rendah. Pelanggan memiliki akses ke berbagai produk yang masih mungkin. Ekonomi terbuka membuat berbagai negara saling bergantung, sehingga juga sangat rentan terhadap efek penularan akibat krisis ekonomi. Sebagai misal, krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara akan dapat menyebar ke negara lain yang mengadopsi ekonomi terbuka. Jalur transmisi yang digunakan dapat melalui saluran perdagangan internasional ataupun saluran portofolio keuangan.

Dalam perdagangan internasional ekonomi terbuka memungkinkan sebuah negara tergantung kepada negara lain, baik sebagai pasar maupun sebagai pemasok. Misalnya, Indonesia sangat tergantung kepada Uni Eropa sebagai pasar sawit karena ekspor ke wilayah ini cukup substansial. Sehingga, ketika ada larangan dari Uni Eropa terhadap sawit asal Indonesia, tentunya sektor sawit akan cenderung tertekan.

Peningkatan besar-besaran dalam aliran modal internasional juga telah menghasilkan masalah di bidang keuangan seperti hutang yang terus membesar, terutama yang dialami oleh negara-negara berkembang yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan utang adalah salah satu sumber kesulitan ekonomi yang dapat memicu timbulnya krisis.

Daftar Pustaka

- Academy, Saylor, A. S. (2012) Exchange Rate Systems, Saylor Academy. Available at: https://saylordotorg.github.io/text_principles-of-economics-v2.0/s33-03-exchange-rate-systems.html (Accessed: 12 February 2021).
- Adolf, H. (1919) Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar. -.
- Adolf, H. (2006) Hukum perdagangan internasional. PT RajaGrafindo Persada.
- Agus Budi, S. (2019) 'EKONOMI INTERNASIONAL'.
- Ahmadjayadi, C., Subkhan, F. and Wiradinata, M. R. (2016) Melesat atau Kandas? New Indonesia Dari Smart City Menuju Smart Nation. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Aiyagari S.R., Mark G., (1985) "The Backing of Government Bonds and Monetarism" Journal of Monetary Economics 16 July, pp 19-44.
- Amir, M. S. (2001) "Ekspor Impor Teori & Penerapannya," Jakarta: PPM.
- Anindhita, A. Y. (2016) 'Dampak Nilai Tukar Terhadap Perdagangan Internasional Sektor Industri Manufaktur Indonesia (Kuartal I: 2005–Kuartal Iv: 2012)', Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga (JEBA)| Journal of Economics and Business Airlangga, 26(3).
- Aninditain, H. (2021) 'Perusahaan Multinasional : Mengenal Seluk Beluknya di Indonesia'.
- Apridar (2009) Ekonomi internasional: sejarah, teori, konsep dan permasalahan dalam aplikasinya. Graha Ilmu.
- Arifin, S., Ediana RAE, D dan Joseph, C.P.R. (2007) "Kerjasama Perdagangan Internasional: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia" Jakarta: Elek Media Komputindo.
- Ashoer, M. et al. (2021) Ekonomi Pariwisata. Yayasan Kita Menulis.

- Astuti, I. P. and Ayuningtyas, F. J. (2018) 'Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19(1), pp. 1–10.
- Bank Indonesia, (2006) "Laporan Perekonomian Indonesia" Jakarta.
- Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, berbagai terbitan
- Basmar E., (2010) "Analisis Pengaruh Negatif Spread Terhadap Kinerja Perbankan" Nitro Institute Of Banking and Finance, Makassar.
- Basmar E., (2020b) "Analisis Tingkat Upah Dan Pengangguran di Indonesia" Universitas Fajar, Makassar.
- Basmar, E., (2011) "Pengaruh Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pasca Krisis Moneter di Indonesia" *Jurnal Manajemen Progresif* Vol 5, 1 Agustus 2011.
- Basmar, E., (2014) "Analysis of The Monetary Policy on The Stability of Economic Growth in Indonesia" Northern Illinois University Amerika Serikat.
- Basmar, E., (2018a) "Analisis Pengaruh Capital Adequatio Ratio Terhadap Kinerja Perbankan Pada Masa Krisis" Nitro Institute Of Banking and Finance Makassar.
- Basmar, E., (2020a) "Respon Fluktuasi Tingkat Upah Terhadap Perubahan Tingkat Pengguran Di Indonesia", *Jurnal Mirai Management*, Vol. 6, No.1, pp 76-85.
- Basmar, E., dan Rachmat S., (2020) "Impact Of Financial Activities On The Welfare Of Farmers In Bulukumba", *SEIKO Journal Of Management and Business*, Vol. 3, No. 2, pp 37 – 45.
- Basmar, E., (2018b) "Assymetric Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Tingkat Suku Bunga Deposito di Indonesia" Universitas Fajar 1 (1) pp 1-17.
- Basmar, E., (2018c) "The Analysis of Financial Cycle and Financial Crisis in Indonesia" Universitas Hasanuddin Makassar.
- Basmar, E., Carl M. C., Hasniaty, Erlin B., (2018) "The Effect Of Interest Rates On The Financial Cycle In Indonesia", *Advence in Economics, Business and Management Research Journal*, Atlantis Press, Vol. 75, pp 99-102.
- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2015) "Dampak Krisis Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" *Jurnal Analisis*

- Seri Ilmu-Ilmu Ekonomi, Vol 4 No 2, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Basmar, E., Muhammad Y.Z., Marsuki, Abdul H.P., (2017) "Do The Bank Credit Cause The Financial Crisis In Indonesia" *Scientific Research Journal*, Vol. V, Issue X, pp 36-38.
- Beetsma, Roel M.W.J., Boveberg A.L., (1998) "Monetary Union With-out Fiscal Coordination May Discipline Policy Makers" *Journal International Economy*, 45, pp 239-258.
- Bennet, Herman, Norman L., (2002) "Policy Biases When The Monetary and Fiscal Authorities Have Different Objectives", Central Bank Of Chile.
- Bernanke B., Jean B., Piotr E., (2005) "Measuring The Effects of Monetary Policy : A Factor-Augmented Vector Autoregressive Approach" *Quarterly Journal of Economics* (2), pp 387-422.
- Bidara, P. (2020) Neraca pembayaran Indonesia kuartal III-2020 surplus US\$ 2,1 miliar, <https://nasional.kontan.co.id/>. Available at: https://nasional.kontan.co.id/news/neraca-pembayaran-indonesia-kuartal-iv-2020-surplus-us-21-miliar?utm_source=dable.
- Björnskov, C. (2006) *Basics of International Economics - Exercises*.
- Blanchard O., Perotti R., (2002) "An Empirical Characterization of Dynamic Effects of Changes in Government Spending and Taxes on Out-put" *Quarterly Journal of Economics*, Vol. 117, pp 1329-168.
- Blejer, M. I., Khan, M. S. and Masson, P. R. (1995) 'Early Contributions of "Staff Papers" to International Economics', *Staff Papers - International Monetary Fund*, 42(4), p. 707. doi: 10.2307/3867596.
- Blinder, Alan S., (1982) "Issues in The Coordination of Monetary and Fiskal Policy" NBER Working Paper, No. 982.
- Boediono (1999) *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Budiono, G. L. (2009) *BISNIS INTERNASIONAL*. Edited by J. FEBSOS. Jakarta.
- Carbaugh, R. J. (2011) *Global Economics*. 13th edn. Canada: South-Western Cengage Learning.

- Cerdasco.com (2020) Term of Trade: Definisi, Cara Menghitung, Dampak. Available at: <https://cerdasco.com/term-of-trade/>.
- Chen, J. (2020) Forex Trading: A Beginner's Guide, Dotdash. Available at: <https://www.investopedia.com/articles/forex/11/why-trade-forex.asp> (Accessed: 13 February 2021).
- Chishti, S. (2002) 'Globalization, international economic relations and the developing countries', *International Studies*, 39(3), pp. 227–244. doi: 10.1177/002088170203900302.
- Chistiano, Lawrence, Martin E., Charles E., (1999) "Monetary Policy Shock : What Have We Learned and To What End?" *The Handbook of Macroeconomics* Vol. 1, North Holland, Amsterdam, pp 65-148.
- Cho, S. (2003) 'A New Monetary Policy Transmission Mechanism in a Small Open Economy: External Wealth Effect', Preliminary Draft.
- Christiansen L., (2008) "Fiscal Multiplier A Riview of The Literature" *International Monetary Fund*.
- Christina Majaski, R. C. K. (2020) Fixed Exchange Rate, Dotdash. Available at: <https://www.investopedia.com/terms/f/fixdexchangerate.asp> (Accessed: 15 February 2021).
- Chuku, Chuku A., (2009) "Measuring The Effects of Monetary Policy Innovations in Nigeria : A Structural Vector Autoregressive (SVAR) Approach" *African Journal of Accounting, Economics, Finance and Banking Research* Vol. 5, No. 5.
- Darwanto, D. (2009) 'Model Perdagangan Hecksher-Ohlin (Teori, Kritik dan Perbaikan)'.
Deliarnov (2005) *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dornbusch, Rudiger, S. F. & R. S. (2004) *Macroeconomics*. 8th edn. USA: The McGraw-Hill/Irwin.
- Duasa, J. (2000) 'The Malaysian Balance of Payments: Keynesian Approach Versus Monetary Approach', *Series Computing in Economics and Finance*, (September 2004), pp. 1–14.
- Ekananda, M. (2014) *Ekonomi Internasional*. Edited by N. I. Sallama. Jakarta: Erlangga.

- Ekananda, M. (2015) *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Ekananda, Mahyus. (2014) “Ekonomi Internasional,” Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Fakhrudin, U. (2008) ‘Kebijakan Hambatan Perdagangan Atas Produk Ekspor Indonesia di Negara Mitra Dagang’, *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. Available at: <https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/11/19/-1416393847.pdf>.
- Falianty, T. (2017) ‘Balance of Payment Dynamic in Indonesia and the Structure of Economy’, *Economics and Finance in Indonesia*, 63(1), pp. 53–80. doi: 10.7454/efi.v63i1.568.
- Fed, S. L. (2020) U.S. / Euro Foreign Exchange Rate (DEXUSEU), Economic Research Federal Reserve Bank of ST. Louis. Available at: <https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU> (Accessed: 14 February 2021).
- Ferdiansyah, F., Tin, S. and Anthonius, A. (2016) ‘Globalisasi ekonomi, integrasi ekonomi global, dinamika pasar modal & kebutuhan standar akuntansi internasional’, *Jurnal Akuntansi*, 8(1), pp. 119–130.
- Feridhanusetyawan, T dan Marie Pangestu. (2003) *Indonesian Trade Liberalization: Estimating The Gains*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(1).
- Ferinia, R. et al. (2020) *Komunikasi Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Freedman C., Kumhof M., Laxton D., Lee J., (2009) ”The Case for Global Fiscal Stimulus” *International Monetary Fund*, Washington.
- Friedman, M., (1968) ”The Role of Monetary Policy” *American Economic Review*, Vol, 58, No. 1 March : pp 1-17.
- Ganti, A. (2020) *Pasar Valuta Asing*, Dotdash. Available at: <https://www.investopedia.com/terms/forex/f/foreign-exchange-markets.asp> (Accessed: 13 February 2021).
- Giavazzi F., Pagano M., (1990) ”Can Serve Fiscal Contractions be Expansionary? Tales of Two Small European Countries” *NBER Macroeconomics Annual*, Cambridge, Massachusetts, pp 75-122.

- Gintoe, C. S. (2019) 'TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA', (<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/>).
- Goeltom M.S., Iskandar S., (2005) "Monetary and Fiscal Synergy in Indonesia" Working Paper Bank Indonesia.
- Goestjahjanti, F. S. (2016) 'PENGARUH FAKTOR INTI NILAI TUKAR DAN DAYA SAING TERHADAP TERM OF TRADE SERTA DAMPAKNYA KEPADA DAYA BELI MASYARAKAT INDONESIA', *Jurnal Bisnis dan Manajemen (Journal of Business and Management)*, 16(2), pp. 35–48.
- Gondolfo, G. (2004) 'Chapter 1 : Introduction', in *Elements of International Economics*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 1–6. doi: 10.1007/978-3-662-07005-5_1.
- Hady, H. (2009) 'Ekonomi Internasional (Buku Kedua, Edisi Revisi)', Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hady, H. (2009) *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hady, Hamdy. (2009). "Ekonomi Internasional," Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamid, E. S. (2005) 'Globalisasi Ekonomi dan Tekanan Ideologi Ekonomi Liberal', *Jurnal Ketahanan Nasional*, 10(2005).
- Heckscher, E. F. (1919) *The effect of foreign trade on the distribution of income*.
- Hemming R., Kell M., Mahfouz S., (2002) "The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity – A Review of The Literature" International Monetary Fund, Working Paper, Washington, Vol 2 No. 208.
- Heryanto, J. (2004) 'Pro dan Kontra Ekonomi Global', *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 6(2), pp. 105–113.
- Hiariej, E. (2012) 'Globalisasi, Kapitalisme dan Perlawanan', Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional UGM [Universitas Gadjah Mada], Terjemahan.
- International Monetary Fund, (2009) "Lesson of The Global Crisis For Macroeconomic Policy" International Monetary Fund, Washington DC

- International Monetary Fund, (2010) "World Economic Outlook 2010"
International Monetary Fund, Washington DC
- James Chen (2020) Exchange Rate Definition, Dotdash. Available at:
<https://www.investopedia.com/terms/e/exchangerate.asp#citation-1>
(Accessed: 14 February 2021).
- Javed, Zahoor H., Ahmet S., (2005)"Interction of Monetary and Fiscal in Case
of Turkey" Journal of Aplied Science, Asian Network for Scientific
Information.
- Jhingan, M. . (2018) Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Pertama.
Depok: Rajawali Pers.
- Kartawinata, Budi Rustandi. Wardhana, A. and S. (2014) 'Bisnis Internasional',
Penerbit : PT. Karya Manunggal Lithomas, Bandung.'
- Kavous, A. (2003) 'The Monetary Approach to Balance of Payments: A
Taxonomy with a Comprehensive Reference to the Literature', Journal of
Economics and Economic Education Research, 6(3), p. 39.
- Kavous, A. (2005) 'The Monetary Approach to Balance of Payments : A
Review of the Seminal Long-Run Empirical Research', Journal of
Economics and Economic Education Research, pp. 37–73.
- Krugman, P. R. and Obstfeld, M. (2003) International Economics: Theory and
Policy. Sixth. Boston: Addison-Wesley World Student Series.
- Kuncoro, M. (2009) Manajemen Keuangan Internasional: Pengantar Ekonomi
dan Bisnis Global. 2nd edn. Yogyakarta: BPFE.
- Kydland F.E., Prescott E.C., (1977) "Rule Rather Than Discretion : The
Inconsistency of Optimal Plans" Journal of Political Economy, Vol 85.
- Lanciaux, B. (1990) 'An Institutional Analysis of the Monetary Approach to the
Balance of Payments', Journal of Economic Issues, 24(2), pp. 433–441.
doi: 10.1080/00213624.1990.11505042.
- Landreth, H. et. a. (2002) History of Economic Theory. Boston: Houghton-
Mifflin.
- Leeper, Eric M., (1991) "Equilibria Under Active and Passive Monetary and
Fiscal Policy" Journal of Monetary Economics, 27 February.

- Leith, C., Simon W.L., (2000) "Interaction Between Monetary and Fiscal Policy Rule" 110 March, *The Economic Journal*.
- Lilimantik, E. (2015) 'Kebijakan Ekonomi Internasional'. FPK Unlam (Fakultas Perikanan dan Kelautan Unlam).
- Lipsey, R. (1976) 'Intra-industry trade: The theory and measurement of international trade in differentiated products: Herbert J. Grubel and P.J. Lloyd, (John Wiley, New York, 1975) pp. 205, \$24.00', *Journal of International Economics*, 6(3), pp. 312–314. Available at: <https://econpapers.repec.org/RePEc:eee:inecon:v:6:y:1976:i:3:p:312-314>.
- Machmud, A. (2016) *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga.
- Madura, J. (2006) *International Corporate Finance Keuangan Perusahaan Internasional*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Malik, N. (2017) *Ekonomi Internasional*. UMMPress.
- Mankiw, N. G. (2003) *Macroeconomics*. New York: Worth Publisher.
- Mankiw, N. Gregory. (2019). "Pengantar Ekonomi Makro," Jakarta: Salemba Empat.
- Mardia, M. et al. (2021) *Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Marzuki I., Erniati B., Fitria Z., Agung M.V.P., Hesti K., Deasy H.P., Dina C., Jamaludin, Bonaraja P., Ratna P., Muhammad C., Edwin B., Efendi S., Abdul R.S., Nasrullah, Puji H., Faizah M., Sukarman P., Muhammad F.R., Eka A., (2021) "Covid 19 Seribu Satu Wajah" Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 107-126.
- Masngudi. (2006) *Handout Ekonomi Internasional Lanjutan*, Universitas Borobudur. Jakarta.
- Miskhin F., (2002) "The Rule of Output Stabilization in The Conduct of Monetary Policy" NBER Working Paper No. 9291.
- Munthe R.N., Mardia, Nur A.N., Edwin B., Ahmad S., Anita F.P., Yuliasnita V., Eko S., Arfandi S.N., Abdul R., Darwin D., Bonaraja P., Hasyim, (2021) "Sistem Perekonomian Indonesia", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 41-62.

- Munthe, R. N. et al. (2021) *Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Munthe, Risma N, dkk. (2021). “Sistem Perekonomian Indonesia,” Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Murdani Drajat Andika (2020) ‘Multinational Corporation (MNC): Pengertian, Peran dan Imbasnya dalam Ekonomi Politik’, <https://portal-ilmu.com/multinational-corporation/>.
- Mustacelli V.A., Patrizio T., Carinine T., (2000) ”Monetary and Fiscal Policy Interaction Over The Cycle : Some Empirical Evidence” CESifo Working Paper No. 817.
- Nariska (2015) “Perusahaan Multinasional (Multinational Company)”, <http://Nariska21.Blogspot.Com/>.
- Negara, E. S. et al. (2021) *Sistem Informasi Manajemen Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Nelson H. Barbosa-Filho (2002) ‘The balance of payments constraint: From balanced trade to sustainable debt’, *Essays on Balance of Payments Constrained Growth: Theory and Evidence*, (219), pp. 126–140. doi: 10.4324/9780203495360.
- Nopirin (1983) *A Synthesis of Monetary and Keynesian Approaches to Balance of Payments Analysis: the Indonesian Case, 1970-1979*. Washington State University: Unpublished Ph.D Dissertation.
- Nopirin (1998) ‘Pertumbuhan Ekonomi dan Neraca Pembayaran Indonesia 1980- 1996: Suatu Pendekatan Keynes dan Monetarist’, *Majalah Kelola FE UGM.*, No. 18/VII, pp. 32–44.
- Nopirin (2007) *Ekonomi internasional*. 3rd edn. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Noverius, L. (2020) *Neraca pembayaran Indonesia kuartal II 2020 surplus US\$ 9,2 miliar*, <https://nasional.kontan.co.id/>. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/neraca-pembayaran-indonesia-kuartal-ii-2020-surplus-us-92-miliar>.
- Nur A.N., Edwin B., (2021) ”Ekonomi Pembangunan” Yayasan Kita Menulis, Medan.

- Nurhayati, N. and Priangani, A. (2017) 'EKONOMI POLITIK DAN BISNIS INTERNASIONAL'. FISIP UNPAS Press.
- Nusantara, A. (2000) 'Perkembangan Pendekatan Moneter tentang NPI: Equilibrium, Disequilibrium dan Global Approach', Gema Stikubank, (32 No. II April 2000).
- Nwaobi, G. C. (2003) 'The balance of payments as a monetary phenomenon: an Econometric Case Study of Nigeria', *The Monetary Approach to the Balance of Payments*, (August 2003), pp. 1–34.
- Obstfeld, M. and Krugman, P. R. (2003) *International economics: theory and policy*. Addison-Wesley.
- Ohlin, B. (1935) *Interregional and international trade*. Harvard University Press, Cambridge.
- Perotti R., (2005) "Estimating The Effects of Fiscal Policy in OECD Countries" Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, No. 4842.
- Petit, Maria L., (1989) "Fiscal and Monetary Policy Coordination : A Differential Game Approach" *Journal of Applied Econometrics*, Vol 4, No. 2.
- Pippenger, J. (1973) 'Balance-of-Payments Deficits: Measurement and Interpretation', *Review*, 55(February 1973). doi: 10.20955/r.55.6-14.ows.
- Pradita, A. E. (2005) *Kebijakan Ekonomi & Perdagangan Internasional*, Universitas Gunadarma. Available at: http://afriola_pradita.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57292/M4+-+Kebijakan+Perdagangan+Int.pdf.
- Prasetyo, N. E. and Rakhmadian, M. (2020) 'Pengembangan Buku Ajar Ekonomi Internasional sebagai Refleksi Perekonomian Global', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), pp. 276–281.
- Pratama, C. D. (2020) 'Hambatan Perdagangan Internasional: Definisi Tarif dan Jenisnya', *Kompas.com*, 12 November. Available at: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/12/090000769/>.
- Purba, B., Nainggolan, L. E., et al. (2020) *Ekonomi Sumber Daya Alam: Sebuah Konsep, Fakta dan Gagasan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Purba, B., Sudarmanto, E., et al. (2020) *Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis.

- Puspasari, N. K. and Darmawan, A. (2017) 'Pengaruh Ekspor dan Nilai Tukar Perdagangan (Term of Trade) Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Studi Periode 2008 - 2016)', *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 50(1), pp. 190–199. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/186643-ID-none.pdf>.
- Rafiq M. S., Mallick S.K., (2008) "The Effect of Monetary Policy on Output in EMU3 : A Sing Restriction Approach" *Journal of Macroeconomics* No. 30, pp 1756-1791.
- Rahardja, Prathama & M. Manurung. (2008). "Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)," Jakarta: Lembaga Penerbit FEB-Universitas Indonesia.
- Razmi, A. (2005) 'Balance-of-payments - Constrained growth model: The case of India', *Journal of Post Keynesian Economics*, 27(4), pp. 655–687. doi: 10.1080/01603477.2005.11051457.
- Ricardo, D. (1817) "The theory of comparative advantage," *Principles of Political Economy and Taxation*.
- Richards-Elliott, D. (1994) 'The Jamaican balance of payments and the monetary approach', *Atlantic Economic Journal*, 22(1), p. 101. doi: 10.1007/BF02301711.
- Romer C., Romer D., (2008) "The Macroeconomic Effects of Tax Changes : Estimates Based on A New Measure of Fiscal Shocks" University of California at Barkeley.
- Romindo, R. et al. (2020) *Sistem Informasi Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Safitriani, S. (2014) 'Perdagangan Internasional dan Foreign Direct Investment Di Indonesia', 8(1), pp. 93–116.
- Sahir, S. H. et al. (2021) *Dasar-Dasar Pemasaran*. Yayasan Kita Menulis.
- Salvatore, D. (1992) *Economía internacional*. McGraw-Hill.
- Salvatore, D. (2014) *Ekonomi internasional*. Sembilan. Jakarta: Salemba Empat.
- Salvatore, D. (2018) 'Ekonomi Internasional Edisi 9'.
- Salvatore, Dominick. (2004) "Ekonomi Internasional," Jakarta: Penerbit Erlangga

- Sargant T., Neil W., (1981) "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic" Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review 5, Fall 1-17.
- Sari, A. P. et al. (2020) *Ekonomi Kreatif*. Yayasan Kita Menulis.
- Sari, A. R., Hakim, D. B. and Anggraeni, L. (2014) 'Analisis Pengaruh Non-Tariff Measures Ekspor Komoditi Crude Palm Oil (Cpo) Indonesia Ke Negara Tujuan Ekspor Utama', *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 3(2), pp. 111–135. doi: 10.29244/jekp.3.2.111-135.
- Satriana, D. (2016) 'Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional', *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Satyarini, R. (2001) 'BISNIS INTERNASIONAL DAN PERUSAHAAN MUL TINASIONAL', *BINA EKONOMI/Februari 2001*'.
- Setiawan, H. dan Lestari, S. (2011) "Perdagangan Internasional," Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Sherly, S. et al. (2020) *Pemasaran Internasional*. Yayasan Kita Menulis.
- Siagian, V. et al. (2020) *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Siagian, V., Muhammad F.R., Edwin B., Pretiwi B.P., Lora E.N., Nur A.N., Robert T.S., Endang L., Elisabeth L.M., Hengki M.P.S., Agustian B.P., Bonaraja P., (2020) "Ekonomi dan Bisnis Indonesia", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-54.
- Silitonga, R. B. R., Ishak, Z. and Mukhlis, M. (2017) 'Pengaruh Ekspor, impor, dan inflasi terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia', *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), pp. 53–59.
- Sinaga, Murbanto. (2015) "Ekonomi Internasional," Tebing Tinggi: Penerbit STIE Bina Karya
- Siregar P.A., Suptriyani, Luthfi P., Astuti, Khairul A., Hengki M.P.S., Rosintan S., Elly S., Irdawati., Eko S., Misnawati, Bonaraja P., Sudang S., Hasyim, Edwin B., Arfandi S.N., (2021) "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 209-238.
- Siregar, B. W. (2020) 'Modul Pertemuan 8, Ekonomi Internasional - Perusahaan Multinasional', Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi International Golden Institute, Jakarta, <https://stie-igi.ac.id/wp-content/>'.

- Siregar, P. A. et al. (2021) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yayasan Kita Menulis.
- Siswanti I., Conie N.B.S., Novita B., Edwin B., Rahmita S., Sudirman, Mahyuddin, Luthfi P., Laura P., (2020) "Manajemen Risiko Perusahaan", Yayasan Kita Menulis, Medan, pp 33-58.
- Smith, A. (1975) "The Theory of International Trade," *Essays on Adam Smith*. Clarendon Press: Oxford, 472.
- Snowdown, Brian, H. V. & P. W. (1995) *A Modern Guide to Macroeconomics: An Introduction to Competing Schools of Thought*. United Kingdom: Edwar Elgar Publishing Limited.
- Soediyono, R. (1987) *Ekonomi Internasional: Pengantar Lalulintas Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Soediyono, R. (2000) *Ekonomi Makro: Analisis IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*. Milenium. Yogyakarta: BPFE.
- Soelistyo, M. B. A. and Nopirin, M. A. (1977) 'Teori Perdagangan Internasional'. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Statistik, B. P. (2021) *Nilai Tukar Perdagangan Luar Negeri*, Badan Pusat Statistik. Available at: <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/854>.
- Sudarmanto, E. et al. (2020) *Etika Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Sudarso, A. et al. (2020) *Konsep E-Bisnis*. Yayasan Kita Menulis.
- Sukardi, Paulus. and Sari, E. T. (2007) 'Bisnis Internasional – Sebuah Perspektif Kewirausahaan' Edisi Pertama, Cetakan Pertama Jakarta: Graha Ilmu.'
- Sukirno, S. (2000) *Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2000). "Makroekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru," Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suleman, Abdul R, dkk. (2020). "Ekonomi Makro," Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Suprijanto, A. (2011) 'Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia', CIVIS, 1(2/Juli).

- Surugiu, M.-R. and Surugiu, C. (2015) 'International Trade, Globalization and Economic Interdependence between European Countries: Implications for Businesses and Marketing Framework', *Procedia Economics and Finance*, 32(15), pp. 131–138. doi: 10.1016/s2212-5671(15)01374-x.
- Survey, T. C. B. (2019) Foreign exchange turnover in April 2019, BIS. Available at: https://www.bis.org/statistics/rpfx19_fx.htm (Accessed: 13 February 2021).
- Suryawan, I Putu Gede Budi. Semara, I B Made. Hendrawan. and I Wayan. Septiyana, G. A. (2018) 'Teori Tentang Perusahaan Multi Nasional (MNC)', Fakultas Ekonomi, Universitas, Warmadewa, Denpasar, <http://tude0399.blogspot.com/>.
- Taylor, M. P. (2019) 'The Economics of Exchange Rates The Economics of Exchange Rates', *Journal of Economic Literature*, 33(1), pp. 13–47. Available at: <http://www.jstor.org>.
- Thompson, H. (2011) *International economics: Global markets and competition*, third edition, *International Economics: Global Markets and Competition*, Third Edition. doi: 10.1142/7744.
- Todaro, M. P. and Smith, S. C. (2011) *Pembangunan Ekonomi*. Kesebelas. Edited by A. Maulana. Jakarta: Erlangga.
- Traclet, Virginie, (2004) "Monetary and Fiscal Policies in Canada : Some Interesting Principles for EMU?" Working Paper, Bank of Canada.
- Undang-Undang Republik Indonesia, (2003) "Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara" Jakarta.
- Utama, M. (2012) 'Hukum ekonomi internasional'. Fikahati Aneska.
- Vera, L. V. (2006) 'The balance-of-payments-constrained growth model: A north-south approach', *Journal of Post Keynesian Economics*, 29(1), pp. 67–92. doi: 10.2753/PKE0160-3477290104.
- View, B. I. S. P. and Mihaljek, D. (2014) Foreign exchange market intervention in emerging. BIS Papers.
- Wahab, A. (2013) *Ekonomi Internasional*. Alauddin University Press.
- Wau, T. (2020) 'Ekonomi Internasional #5'. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=BLFSf-wCF6k&t=524s>.

- Whitesell, W. C. (2003) 'Tunnels and Reserves in Monetary Policy Implementation', SSRN Electronic Journal. doi: 10.2139/ssrn.427765.
- Whittlesey, C. R. (1939) 'Five years of the export-import bank', *The American Economic Review*, pp. 487–502.
- Wikipedia (2021) Foreign exchange market, Wikimedia Foundation, Inc. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_exchange_market (Accessed: 8 February 2021).
- Wikipedia, I. (2021) Pasar Valuta Asing, Wikipedia bahasa Indonesia. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_valuta_asing (Accessed: 8 February 2021).
- Wilfridus, S. E. (2019) *Ekonom: Defisit Neraca Perdagangan 2018 Terburuk Sepanjang Sejarah*, www.merdeka.com. Available at: <https://www.merdeka.com/uang/ekonom-defisit-neraca-perdagangan-2018-terburuk-sepanjang-sejarah.html>.
- Woodfrod M., (2001) "Fiscal Requirements for Price Stability" *Journal of Money, Credit and Banking* 33, pp 669-728.
- World Trade Organization (1998) *Annual Report 1998, Jahresbericht (Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften : 1988)*.
- Yohana, A. U. (2019) *Defisit Neraca Perdagangan 2018 Terburuk Sejak 1975*, <https://economy.okezone.com/>. Available at: <https://economy.okezone.com/read/2019/01/15/320/2004723/defisit-neraca-perdagangan-2018-terburuk-sejak-1975>.
- Yudho, W. (2020) *Defisit transaksi berjalan (CAD) kuartal I-2020 tercatat 1,4% dari PDB*, <https://nasional.kontan.co.id/>. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-transaksi-berjalan-cad-kuartal-i-2020-tercatat-14-dari-pdb>.

Biodata Penulis

Dr. Drs. Bonaraja Purba, M.Si



Lulus Sarjana Pendidikan dan Akta IV dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Sains dalam Ilmu Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Doktor Ilmu Ekonomi Bidang Konsentrasi Ilmu Ekonomi Perencanaan dan Regional juga dari Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh. Sejak tahun 1987 hingga saat ini berkarir sebagai Dosen Tetap di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Universitas

Negeri Medan. Author dari 50 Buku ISBN Bidang Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan.

Email bonarajapurba@gmail.com dan bonarajapurba@unimed.ac.id



Dewi Suryani Purba, S.Pd.,M.M.,M.Pd.

Lahir di Medan pada tanggal 02 September 1988. Sarjana Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Manajemen dari Universitas HKBP Nommensen, Magister Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Medan (UNIMED). Menikah dengan C. Marpaung dan memiliki 3 orang anak. Saat ini mengajar di SMA Swasta Santo Thomas 1 Medan

sebagai Guru Matematika.

Pratiwi Bernadetta Purba, M.M,M.Pd



Lahir di Medan pada tanggal 24 Maret 1990. Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), Magister Manajemen dari Universitas HBKP Nommensen dan Magister Pendidikan dari Universitas Negeri Medan. Sejak tahun 2012 hingga saat ini aktif berkarir sebagai pendidik. Penulis telah menghasilkan beberapa buku kolaborasi antara lain: Pengantar Komunikasi Organisasi (2020), Ekonomi dan Bisnis Indonesia (2020), Manajemen Sektor Publik (2020), Industri Pariwisata dan Kuliner (2020), Pemasaran Pariwisata: Konsep, Perencanaan & Implementasi (2020), Konsep E-Bisnis (2020), Teori dan Strategi Manajemen Operasional (2020), Dasar-dasar Manajemen dan Bisnis (2020), Dasar-dasar Manajemen Pendidikan (2020), Manajemen Konflik Berbasis Sekolah (2020), Perilaku Organisasi (2020), Manajemen Merek (2020), Pengantar Media Pembelajaran, dan Pengantar Pendidikan Anti Korupsi (2020), Dasar-Dasar Kependidikan (2021), Kewirausahaan dan Bisnis (2021), Pendidikan Multikultural (2021), Analisis Kebijakan Pendidikan (2021), Teori Belajar dan Pembelajaran (2021), Ekonomi Publik (2021), Manajemen Usaha Kecil dan Menengah (2021).

Pinondang Nainggolan



Dilahirkan di desa Laepanginuman Kabupaten Dairi tahun 1959. Kuliah di Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Umum (Ekonomi Inti), Universitas HKBP Nommensen Medan, dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Tahun 1994 melanjutkan kuliah Program Pasca sarjana (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Syiahkuala Banda Aceh dan memperoleh gelar Magister Sain (M.Si) tahun 1997. Tahun 2010 studi lanjut Doktoral (S3) Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Medan dan memperoleh gelar Doktor tahun 2015. Saat ini aktif mengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (USI) Pematangsiantar, serta dosen pada Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Simalungun, Dosen Luar Biasa pada STIE Sultan Agung Pematangsiantar. Mata kuliah yang diampu adalah Teori

Ekonomi Makro-Mikro, Ekonomi Internasional, Statistik Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Pembangunan.

Elly Susanti, S.Kom, M.Si



Lahir di Binjai pada tanggal 1 Oktober 1982 menamatkan S1 jurusan Teknik Informatika pada tahun 2010 dan S2 jurusan Ilmu Akuntansi tahun 2013 di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Saat ini aktif mengajar di STIE Sultan Agung Pematangsiantar jurusan Akuntansi.

Darwin Damanik, SE, MSE



Pria asal Kota Pematangsiantar. Ia lahir di Jakarta, 28 Desember 1981. Ia menyelesaikan studi S-1 di Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (FE UNILA) pada tahun 2005. Selanjutnya, ia merampungkan studi S-2 di Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 2008. Saat ini, ia tengah menempuh studi doktor (S-3) di Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB USU). Tak hanya itu, ia juga beraktivitas sebagai Dosen Tetap dan juga menjabat saat ini sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun (FE USI) di Kota Pematangsiantar. Mata kuliah yang diampunya adalah Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan, dan Perekonomian Indonesia. Beberapa buku yang pernah ditulisnya yaitu Pengantar Ekonomi Makro (Citapustaka Media, 2014), Sistem Perekonomian Indonesia (Kita Menulis, 2021), Ekonomi Pembangunan (Kita Menulis, 2021). Penulis dapat dihubungi melalui email: darwin.damanik@gmail.com.

Luthfi Parinduri

Lahir dan tinggal di Pematang Siantar, hingga menyelesaikan pendidikan SMA. Melanjutkan pendidikan di Fakultas Teknik USU Medan, kini tinggal dan bekerja di Medan. Memberi beberapa mata kuliah diantaranya, Manajemen Industri, Manajemen Strategi dan Prilaku Organisasi di Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik UISU. Beberapa kali telah menulis buku secara kolaborasi yang diterbitkan oleh Yayasan Kita Menulis.

Dr. Darwin Lie, S.E., M.M.,

Lahir di Kota Pematangsiantar, 10 Januari 1963. Menyelesaikan Studi S-1 di Universitas Simalungun Tahun 1988. Melanjut studi Magister (S-2) di Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Islam Sumatera Utara lulus pada tahun 2004. Tahun 2010 melanjutkan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Pasundan lulus bulan Juni tahun 2012. Saat ini aktif mengajar dan menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung.

Fajrillah, S. Kom., M. Si., M. Kom.,

Meraih gelar Sarjana Komputer (S. Kom.) Manajemen Informatika – Universitas Gunadarma Jakarta Tahun 1997, Magister Sains (M. Si.) Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan – Universitas Syiah Kuala – Banda Aceh Tahun 2007, Magister Komputer (M. Kom.) Teknik Informatika Konsentrasi Sistem Informasi Manajemen – Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer ERESHA Tahun 2014, Prestasi yang pernah diraih Juara Harapan II Kategori Penulis Umum Nasional yang diselenggarakan PT. Indosat (Persero) Tbk. Jakarta – LIPI – Kompas Gramedia Grup, Dosen Berprestasi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

(LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara. Dosen LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara dpk. Universitas IBBI, Dosen di FE Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Dosen di STIE ITMI, Verifikator SINTA, Asesor BKD, Penulis Buku Nasional “Aplikasi Game Dan Multimedia Dengan VB” Penerbit PT. Elex Media Komputindo Jakarta Tahun 2009, Buku “Sistem Operasi” Penerbit Ghalia Indonesia Jakarta Tahun 2011, Buku “Komputer Bisnis” Penerbit ANDI Yogyakarta Tahun 2014, dan Penulis Buku di Yayasan Kita Menulis. Saat ini aktif menjadi Nara Sumber, Konsultan Pendidikan dan Bisnis, Dapat dihubungi Email: fajrillahhasballah@gmail.com / +6281361400108

Abdul Rahman



Dosen Tetap Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2015. lahir di Opo (Bone), 01 Mei 1982. Menempuh pendidikan SD, SMP dan SMA di Kabupaten Bone, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana dengan predikat Cum Laude pada Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar 2005, Magister of Science (M.Si) program studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin 2009. Sekarang

menempuh program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin mulai tahun 2019. Sejak bergabung di Jurusan Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar penulis mengampu mata kuliah Ekonometrika; Statistika Ekonomi; Ekonomi Pembangunan; Ekonomi Perencanaan Pembangunan; Ekonomi Demografi dan Ekonomi Mikro. Tugas Tambahan diamanatkan sebagai Ketua Komite Penjaminan Mutu (KPM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Tahun 2019 – 2024. Aktif menulis beberapa diantaranya Buku Pengantar Kewirausahaan (2020); Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan R (2020) dan beberapa jurnal nasional maupun internasional

Edwin Basmar



Lahir di Makassar, menyelesaikan Pendidikan Doktor di Universitas Hasanuddin, serta mengikuti Pendidikan Doktor di Northern Illinois University Amerika Serikat, dengan konsentrasi keilmuan pada bidang Ekonomi Pembangunan, Kebijakan Moneter dan Perbankan, menjalankan aktivitas sebagai Pengamat dan Peneliti di Bidang Ekonomi khususnya Kebijakan Moneter pada Bank Sentral.

Eko Sudarmanto



Lahir di Boyolali, 12 Maret 1970, anak kedua dari pasangan Dulkarim (alm.) dan Sunarti. Saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan program doctoral di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta, Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir. Pendidikan sebelumnya, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Program Studi Magister Manajemen (2009-2012), Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Jakarta (1997-2000), Akademi Akuntansi Muhammadiyah (AAM) Jakarta (1992-1996), SMA Negeri Simo Boyolali (1985-1988), SMP Muhammadiyah VI Klego Boyolali (1982-1985), dan Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Jaten Klego Boyolali (1976-1982). Pelatihan dan ujian sertifikasi profesi yang pernah diikuti, yaitu Certified Risk Associate (CRA) dan Certified Risk Professional (CRP) dan Certified of Sharia Fintech (CSF) masing-masing di tahun 2020. Aktivitas kegiatan penulis saat ini adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Tangerang [UMT] Indonesia. Sebelum aktif menjadi akademisi (Tahun 2015), penulis cukup lama sebagai praktisi di dunia perbankan (sejak 1991), dan dua tahun sebelumnya bekerja di PT JIPRI Rattan Industry – Tangerang. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: ekosudarmanto.umat@gmail.com.

EKONOMI INTERNASIONAL

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk membantu para pembaca, memahami bahwa Ilmu Ekonomi dan Perdagangan Internasional merupakan bagian tidak terpisahkan dan sangat penting dalam kelangsungan pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang.

Buku ini berisi materi yang dapat digunakan baik oleh tenaga pengajar maupun mahasiswa, serta para pembaca umumnya untuk menambah wawasan berpikir dan ilmu yang berkenaan dengan ilmu ekonomi pembangunan dan perdagangan internasional.

Buku ini terdiri dari 12 Bab yang menguraikan tentang:

- Bab 1 Karakteristik Ekonomi Internasional
- Bab 2 Teori Perdagangan Internasional Klasik
- Bab 3 Teori Perdagangan Internasional Modern
- Bab 4 Kebijakan Ekonomi Internasional Tariff
- Bab 5 Nilai Pertukaran (Term of Trade)
- Bab 6 Liberalisasi Perdagangan
- Bab 7 Perusahaan Multinasional
- Bab 8 Perdagangan Internasional dan Pertumbuhan Ekonomi
- Bab 9 Pasar Valuta Asing dan Sistem Nilai Tukar
- Bab 10 Neraca Pembayaran Internasional
- Bab 11 Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Keseimbangan Internal dan Eksternal
- Bab 12 Model Ekonomi Terbuka



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6840-89-4

